



Katalog/Catalog: 3312002

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Statistics of Marine and Coastal Resources

2016



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Statistics of Marine and Coastal Resources



2016

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR
STATISTICS OF MARINE AND COASTAL RESOURCES
2016

ISSN : 2086-2806

No. Publikasi / Publication Number : 04320.1602

Katalog BPS / BPS Catalogue : 3312002

Ukuran Buku / Book Size : 17,6 cm X 25 cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : xxii + 259 halaman / pages

Naskah / Script :

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup

Subdirectorate of Environment Statistics

Penyunting / Editor :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup

Sub Directorate of Environment Statistics

Gambar Kulit / Cover Design:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Subdirectorate of Statistical Publication and Compilation

Diterbitkan oleh / Published by:

© Badan Pusat Statistik / *BPS-Statistics Indonesia*

Dicetak oleh / Printed by :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

Tim Penyusun

Pengarah:

Thoman Pardosi

Editor:

Nur Sahrizal

Evi Oktavia

Masfufah

Penulis:

Devy Setiyowati

Annisa Febriana Ayub

Mochamad Zulkifli

Pengolah Data:

Devy Setiyowati

Annisa Febriana Ayub

Mochamad Zulkifli

Perapihan Naskah:

Devy Setiyowati

Annisa Febriana Ayub

KATA PENGANTAR

Sumber daya laut sebagai sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*) merupakan anugerah Tuhan yang perlu di kelola secara lestari. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk Goals ke-13, 14, dan 15 serta Agenda Nawa Cita yang memiliki kaitan dengan upaya mengatasi perubahan iklim dan aspek kemaritiman menjadi pondasi pembangunan Indonesia. Pembangunan berbasis maritim yang sedang digalakkan merupakan wujud Indonesia sebagai negara kepulauan perlu di dukung oleh data yang berkualitas.

Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi cukup penting dalam pembangunan nasional. Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga menjadi permasalahan global. Kerusakan sumber daya laut dan pesisir akibat pengelolaan yang kurang baik di masa lalu menjadi perhatian yang cukup serius bagi Indonesia. Sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai yang terdiri dari berbagai mata pencaharian termasuk nelayan. Potensi sumber daya laut Indonesia sangat tinggi. Potensi tersebut belum dieksplorasi secara maksimal, namun pada beberapa wilayah perairan Indonesia terjadi over eksplorasi.

Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP) 2016 merupakan publikasi tahunan yang di terbitkan oleh BPS sejak tahun 2004 dalam rangka menyediakan data dan informasi statistik yang mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan sumber daya laut dan pesisir. Momentum kebangkitan Indonesia melalui dukungan sumber daya laut dan pesisir perlu didukung dan dijaga keberlanjutannya. Diharapkan SDLP 2016 dapat menjadi sumber informasi utama bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan wilayah pesisir, akademisi serta pemerhati masalah laut dan pesisir. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini di masa datang sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih.

Jakarta, Desember 2016
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suharyanto

PREFACE

Fishery resources as resources that can be recovered (renewable resources) is a gift from God that needs to be managed sustainably. Sustainable Development Goals (SDGs) for 13th-15th Goals, as well as Nawa Cita Agenda has linked with the efforts to cope with climate change and maritime aspects of the foundation of Indonesia's development. Maritime-based development that is currently promoted is a manifestation of Indonesia as an archipelagic country that needs to be supported by quality data.

Marine and fisheries sectors are importantly contributed to national development. Environmental issues are not the only a national problem but also a global problem. Marine and coastal resources damage due to deficient managed in the past become a serious concern for Indonesia. About 60 percent of Indonesia's population living within a radius of 50 km of coastline consisting of various livelihood including fishermen. Indonesian marine resources potential is very high. That potential has not been exploited to the maximum, but in some areas, there is over exploitation of Indonesian waters.

Statistics of Marine and Coastal Resources (SMCR) 2016 is an annual publication published by BPS since 2004 in order to provide statistical data and information to support the planning and evaluation of the development of marine and coastal resources. The Momentum of Indonesia resurrection through the support of marine and coastal resources need to be supported and maintained its sustainability. SDLP in 2016 is expected to be the primary source of information for stakeholders in formulating policy on the management of marine resources and coastal development, academics and observers of marine and coastal issues. Suggestions and comments for the improvement of this publication in the future are welcome. Sincere gratitude and award are presented to all contributor who has participated in the preparation of this publication.

Jakarta, December 2016

BPS-Statistics Indonesia



Dr. Suhariyanto
Chief Statistician

DAFTAR ISI / CONTENTS

Kata Pengantar / Preface	v
Daftar Isi / Contents	vii
Daftar Tabel / List of Tables	ix
Daftar Gambar / List of Figures	xx
Daftar Singkatan / List of Abbreviations	xxi
Penjelasan Umum / Explanatory Notes	xxiii
I. PENDAHULUAN / INTRODUCTION	1
1.1. Latar Belakang / Background	3
1.2. Tujuan / Objectives	5
1.3. Ruang Lingkup / Coverage	6
II. KAJIAN LITERATUR / LITERATURE STUDY	7
2.1. Permasalahan terkait Sumber Daya Laut dan Pesisir	9
<i>Issues Related to Marine and Coastal Resources</i>	
2.2. Kerangka Kerja / Framework	10
III. METODOLOGI / METHODOLOGY	15
3.1. Sumber Data / Data Sources	17
3.2. Metode Penyajian / Method of Dissemination	17
3.3. Konsep dan Definisi / Concept and Definition	18
IV. STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR	31
STATISTICS OF MARINE AND COASTAL RESOURCES	
4.1. Gambaran Umum Wilayah Laut dan Pesisir	33
<i>General Overview of Marine and Coastal Region</i>	
4.2. Mangrove, Terumbu Karang, dan Padang Lamun	41
<i>Mangroves, Coral Reefs, and Seagrass</i>	
4.2.1. Mangrove / Mangroves	43
4.2.2. Terumbu Karang / Coral Reefs	48
4.2.3. Padang Lamun / Seagrass	53
4.3. Potensi dan Produksi Perikanan / Potency and Production of Fisheries	55
4.3.1. Perikanan Tangkap / Capture Fisheries	55

4.3.2. Perikanan Budidaya / <i>Aquaculture Fisheries</i>	60
4.4. Perdagangan Perikanan / <i>Fishery Trade</i>	67
4.4.1. Ekspor Perikanan / <i>Fishery Exports</i>	69
4.4.2. Impor Perikanan / <i>Fishery Imports</i>	73
4.5. Konsumsi Perikanan / <i>Fish Consumption</i>	77
4.6. Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	81
<i>Marine Transportation Infrastructure</i>	
4.7. Rumah Tangga Perikanan dan Perusahaan Perikanan	89
<i>Fisheries Household and Establishments</i>	
4.8. Mineral / <i>Mineral</i>	91
4.9. Kawasan Konservasi Laut / <i>Marine Conservation Area</i>	94
4.10. Kualitas Air Laut / <i>Sea Water Quality</i>	96
4.11. Tindak Pidana dan Pengawasan Kelautan Perikanan	102
<i>Fisheries Violation and Marine Affairs and Fisheries Surveillance</i>	
4.12. Sarana dan Prasarana Pendidikan / <i>Education Facilities and Infrastructure</i>	105
4.13. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Desa Pesisir	106
<i>Socio-Economic Infrastructure in Coastal Village</i>	
4.14. Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan (NTN)	114
<i>Fishery Farmer Terms of Trade (NTN)</i>	
Daftar Pustaka / <i>References</i>	119
Lampiran / <i>Appendix</i>	125

DAFTAR TABEL / LIST OF TABLES

1.	Produksi dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Dunia	56
	<i>World Fisheries and Aquaculture Production and Utilization</i>	
2.	Produksi Perikanan menurut Jenis Perairan atau Lahan, 2010 – 2015	58
	<i>Production of Fisheries by Type of Water and Land, 2010-2015</i>	
3.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap, 2010 – 2015	59
	<i>Production Value of Fisheries, 2010-2015</i>	
4.	Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan, 2014.....	61
	<i>Potency of Aquaculture Area and Usage Level, 2014</i>	
5.	Distribusi Pendapatan PDB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015	68
	<i>Percentage Distribution of Industry of Agriculture, Forestry, and Fishing in the GDP at Current Market Prices, 2011-2015</i>	
6.	Penyediaan Ikan untuk Konsumsi, Angka Ikan, dan Ketersediaan Nutrisi dari Ikan per Kapita, 2010-2014.....	78
	<i>Fish Supply for Consumption, Fish Consumption, and Fish Nutrition per Capita Availability, 2010-2014</i>	
7.	Perubahan It, Ib, dan NTN Desember 2015 terhadap Desember 2014.....	116
	<i>Change of It, Ib, and NTN Desember 2015 to Desember 2014</i>	
4.1.	Luas Wilayah, Jumlah Wilayah Administrasi, dan Panjang Garis Pantai menurut Provinsi, 2015.....	127
	<i>Area, Number of Administration Area, and Length of Coastline by Province, 2015</i>	
4.2.	Jumlah dan Persentase Desa menurut Provinsi dan Letak Geografis, 2014.....	128
	<i>Number and Percentage of Village by Province and Geographical Location, 2014</i>	
4.3.	Rekapitulasi Data Pulau di Indonesia Sebelum dan Sesudah Diverifikasi menurut Provinsi, 2015.....	129
	<i>Recapitulation of Islands Data in Indonesia Before and After Verified by Province, 2015</i>	
4.4.	Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Provinsi, 2015.....	130
	<i>Small Outer Islands by Province, 2015</i>	

4.5.	Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Provinsi dan Status Kependudukan, 2015	133
	<i>Number of Small Outer Islands by Province and Population Status, 2015</i>	
4.6.	Luas dan Kondisi Hutan Mangrove menurut Provinsi, 2015.....	134
	<i>Area and Condition of Mangrove Forest by Province, 2015</i>	
4.7.	Penanaman/Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa, dan Gambut menurut Provinsi, 2010 - 2014	135
	<i>Mangrove and Peat Swamp Forest Plantation/Rehabilitation by Province, 2010 - 2014</i>	
4.8.	Jumlah Lokasi dan Persentase Kondisi Terumbu Karang menurut Wilayah, 2011-2015	136
	<i>Number of Coral Reef Location and Percentage of Condition by Area, 2011-2015</i>	
4.9.	Luas dan Kondisi Terumbu Karang menurut Provinsi, 2015	137
	<i>Area and Condition of Coral Reef by Province, 2015</i>	
4.10.	Luas dan Kondisi Padang Lamun menurut Provinsi, 2015	138
	<i>Area and Condition of Seagrass by Province, 2015</i>	
4.11.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi, Pemanfaat Laut, dan Keberadaan Mangrove, 2014	139
	<i>Number of Coastal Villages by Province, Utilization of the sea, and the existence of Mangrove, 2014</i>	
4.12.	Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2011-2014.....	140
	<i>Exploitation of Fish Resources in Indonesia, 2011-2014</i>	
4.13.	Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2011-2014	141
	<i>Production Value of Fish Resources in Indonesia, 2011-2014</i>	
4.14a.	Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera, 2011-2014.....	142
	<i>Exploitation of Fish Resources in Western Sumatera, 2011-2014</i>	
4.14b.	Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera, 2011-2014	143
	<i>Exploitation of Fish Resources in Eastern Sumatera, 2011-2014</i>	
4.14c.	Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa, 2011-2014	144
	<i>Exploitation of Fish Resources in Northern Java, 2011-2014</i>	
4.14d.	Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa, 2011-2014	145
	<i>Exploitation of Fish Resources in Southern Java, 2011-2014</i>	
4.14e.	Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara, 2011-2014	146
	<i>Exploitation of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara, 2011-2014</i>	

4.14f. Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka, 2011-2014	147
<i>Exploitation of Fish Resources in Malacca Strait, 2011-2014</i>	
4.14g. Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan, 2011-2014.....	148
<i>Exploitation of Fish Resources in Southern/Western Kalimantan, 2011-2014</i>	
4.14h. Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan, 2011-2014.....	149
<i>Exploitation of Fish Resources in Eastern Kalimantan, 2011-2014</i>	
4.14i. Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi, 2011-2014.....	150
<i>Exploitation of Fish Resources in Northern Sulawesi, 2011-2014</i>	
4.14j. Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi, 2011-2014.....	151
<i>Exploitation of Fish Resources in Southern Sulawesi, 2011-2014</i>	
4.14k. Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua, 2011-2014	152
<i>Exploitation of Fish Resources in Maluku and Papua, 2011-2014</i>	
4.15a. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera, 2011-2014	153
<i>Production Value of Fish Resources in Western Sumatera, 2011-2014</i>	
4.15b. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera, 2011-2014.....	154
<i>Production Value of Fish Resources in Eastern Sumatera, 2011-2014</i>	
4.15c. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa, 2011-2014.....	155
<i>Production Value of Fish Resources in Northern Java, 2011-2014</i>	
4.15d. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa, 2011-2014.....	156
<i>Production Value of Fish Resources in Southern Java, 2011-2014</i>	
4.15e. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara, 2011-2014.....	157
<i>Production Value of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara, 2011-2014</i>	
4.15f. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka, 2011-2014	158
<i>Production Value of Fish Resources in Malacca Strait, 2011-2014</i>	
4.15g. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan, 2011-2014.....	159
<i>Production Value of Fish Resources in Southern/ Western Kalimantan, 2011-2014</i>	
4.15h. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan, 2011-2014	160
<i>Production Value of Fish Resources in Eastern Kalimantan, 2011-2014</i>	
4.15i. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi, 2011-2014.....	161
<i>Production Value of Fish Resources in Northern Sulawesi, 2011-2014</i>	
4.15j. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi, 2011-2014.....	162
<i>Production Value of Fish Resources in Southern Sulawesi, 2011-2014</i>	
4.15k. Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua, 2011-2014	163
<i>Production Value of Fish Resources in Maluku and Papua, 2011-2014</i>	

416.	Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2014.....	164
	<i>Production of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and Province, 2014</i>	
4.17.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2014.....	166
	<i>Production Value of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and Province, 2014</i>	
4.18.	Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Daerah Perairan dan Jenis Udang, 2012-2014	168
	<i>Production of Marine Shrimp Capture Fisheries by Territorial Waters and Type of Shrimp, 2012-2014</i>	
4.19.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Daerah Perairan dan Jenis Udang, 2012-2014.....	172
	<i>Production Value of Marine Shrimp Capture Fisheries by Territorial Waters and Type of Shrimp, 2012-2014</i>	
4.20.	Luas Usaha dan Produksi Budidaya Tambak dan Laut menurut Provinsi, 2014.....	176
	<i>Area and Production of Brackishwater Pond and Marine Culture by Province, 2014</i>	
4.21.	Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2010-2014	177
	<i>Production of Brackishwater Pond Culture by Province, 2010-2014</i>	
4.22.	Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2010-2014	178
	<i>Production of Marine Culture by Province, 2010-2014</i>	
4.23.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2010-2014.....	179
	<i>Production Value of Brackishwater Pond Culture by Province, 2010-2014</i>	
4.24.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2010-2014.....	180
	<i>Production Value of Marine Culture by Province, 2010-2014</i>	
4.25.	Produksi Budidaya Udang menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2014.....	181
	<i>Production of Shrimp Culture by Type of Shrimp and Province, 2014</i>	
4.26.	Nilai Produksi Budidaya Udang menurut Provinsi dan Jenis Udang, 2014.....	182
	<i>Production Value of Shrimp Culture by Province and Type of Shrimp, 2014</i>	
4.27.	Produksi Budidaya Udang Windu menurut Provinsi, 2010-2014	183
	<i>Production of Black Tiger Shrimp Culture by Province, 2010-2014</i>	

4.28.	Produksi Budidaya Udang Putih menurut Provinsi, 2010-2014	184
	<i>Production of White Tiger Shrimp Culture by Province, 2010-2014</i>	
4.29.	Produksi Budidaya Udang Vaname menurut Provinsi, 2010-2014.....	185
	<i>Production of Vaname Shrimp Culture by Province, 2010-2014</i>	
4.30.	Produksi Budidaya Rumput Laut menurut Provinsi, 2010-2014.....	186
	<i>Production of Seaweed Culture by Province, 2010-2014</i>	
4.31.	Persentase Kontribusi Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi, 2011-2015.....	187
	<i>Percentage of Fishery Contribution to Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Province, 2011-2015</i>	
4.32.	Volume Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014.....	188
	<i>Volume of Export on Fishery Products by Province, 2010-2014</i>	
4.33.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014.....	189
	<i>Value of Export on Fishery Products by Province, 2010-2014</i>	
4.34.	Persentase Nilai Ekspor Hasil Perikanan terhadap Total Nilai Ekspor menurut Provinsi, 2013-2014	190
	<i>Percentage of Export Value on Fishery Products to Total of Export Value by Province, 2013-2014</i>	
4.35.	Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2010-2014.....	191
	<i>Export Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2010-2014</i>	
4.36.	Volume Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014.....	192
	<i>Volume of Import on Fishery Products by Province, 2010-2014</i>	
4.37.	Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014.....	193
	<i>Value of Import on Fishery Products by Province, 2010-2014</i>	
4.38.	Persentase Nilai Impor Hasil Perikanan terhadap Total Nilai Impor menurut Provinsi, 2013-2014	194
	<i>Percentage of Import Value of Fishery Products to Total of Import value by Province, 2013-2014</i>	
4.39.	Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2010-2014	195
	<i>Import Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2010-2014</i>	

4.40.	Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014-2016.....	196
	<i>Average Daily per Capita Consumption of Calorie from Fish by Province and Type of Region, 2014-2016</i>	
4.41.	Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014-2016.....	197
	<i>Average Daily per Capita Consumption of Protein from Fish by Province and Type of Region, 2014-2016</i>	
4.42.	Jumlah Pelabuhan menurut Jenis Pelabuhan Perikanan dan Provinsi, 2016.....	198
	<i>Number of Port by Type of Fishing Port and Province, 2016</i>	
4.43.	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut menurut Provinsi dan Jenis Kapal yang Digunakan, 2013-2014.....	199
	<i>Number of Marine Fishing Boats by Province and Type of Fishing Boat, 2013-2014</i>	
4.44.	Jumlah Alat Penangkap Ikan Laut menurut Jenis Alat Penangkap, 2010-2014	200
	<i>Number of Marine Fishing Gear by Type of Fishing Gear, 2010-2014</i>	
4.45.	Jumlah Nelayan di Laut menurut Provinsi dan Kategori Nelayan, 2014.....	202
	<i>Number of Marine Fishers by Province and Category of Fishers, 2014</i>	
4.46.	Jumlah Nelayan di Laut menurut Provinsi, 2010-2014	203
	<i>Number of Marine Fishermen by Province, 2010-2014</i>	
4.47.	Jumlah Rumah Tangga /Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut menurut Provinsi, 2010-2014	204
	<i>Number of Marine Capture Household/Fishing Company by Province, 2010-2014</i>	
4.48.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut dan Tambak serta Pembudidaya Ikan menurut Provinsi, 2014.....	205
	<i>Number of Marine and Brackishwater Pond Culture Households and Fish Farmer by Province, 2014</i>	
4.49.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut menurut Provinsi dan Jenis Perahu yang Digunakan, 2014	206
	<i>Number of Marine Households/Fishing Company by Province and Type of Fishing Boat, 2014</i>	
4.50.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014.....	207
	<i>Number of Coastal Villages by Province and Main Income Source of Major Population, 2014</i>	

4.51.	Pulau Kecil yang Berpotensi Mengandung Mineral di Beberapa Provinsi dan Jenis Potensi, 2015	209
	<i>Potency of Mineral on Several Small Islands in Several Provinces and Potential Type, 2015</i>	
4.52.	Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut menurut Provinsi, 2014.....	213
	<i>Number and Area of Marine Conservation by Province, 2014</i>	
4.53.	Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Laut di Beberapa Provinsi, 2009-2014...	216
	<i>Number of Visitors to Marine Ecotourism Parks in Several Provinces, 2009-2014</i>	
4.54.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Terjadinya Pencemaran, 2014	218
	<i>Number of Coastal Villages by Province and Pollution Incident, 2014</i>	
4.55.	Kejadian Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia, 1997-2016.....	220
	<i>Occurrence of Oil Spill in Indonesian Waters, 1997-2016</i>	
4.56.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi, Tempat Buang Sampah oleh Sebagian Besar Keluarga, dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), 2014.....	221
	<i>Number of Coastal Villages by Province, Type of Garbage Dump Area, and Temporary Shelters Trash, 2014</i>	
4.57.	Jumlah Desa pesisir menurut Provinsi, Tempat Buang Air Besar, dan Tempat/Saluran Pembuangan Limbah Cair/Air Kotor Sebagian Besar Keluarga, 2014.....	222
	<i>Number of Coastal Villages by Province, Type of Toilet Facility, and Type of Drain/Area Liquid Waste Disposal by Most of Families, 2014</i>	
4.58.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Perubahan Penggunaan (Konversi) Lahan Selama Setahun Terakhir, 2014.....	223
	<i>Number of Coastal Villages by Province and Land Conversion during Last Year, 2014</i>	
4.59.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Kejadian/ Bencana Alam yang terjadi selama 3 Tahun Terakhir, 2014.....	224
	<i>Number of Coastal Villages by Province and Type of Natural Disaster throughout The Past 3 Years, 2014</i>	
4.60.	Kualitas Air Laut di Sekitar Pantai di Indonesia, 2015.....	226
	<i>Quality of Sea Water Around Port in Indonesia, 2015</i>	
4.61.	Jumlah dan Nama Speedboat Pengawas menurut Provinsi, 2015.....	228
	<i>Number and Name of Surveillance Speedboat by Province, 2015</i>	

4.62.	Jumlah Awak Kapal Pengawas, 2011-2015	229
	<i>Number of Surveillance Vessel's Crews, 2011-2015</i>	
4.63.	Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Provinsi, 2011-2015.....	230
	<i>Number of Fisheries Violation by Province, 2011-2015</i>	
4.64.	Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Jenis Tindak Pidana, 2011-2015	231
	<i>Number of Fisheries Violation by Type of Violation, 2011-2015</i>	
4.65.	Hasil Operasi Kapal Pengawas, 2011-2015.....	233
	<i>Joint Operation of Surveillance Vessels, 2011-2015</i>	
4.66.	Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Provinsi dan Nama Sekolah, 2011-2015	234
	<i>Number of Fishery School Alumni in Ministry of Marine Affairs and Fisheries by Province and Name of School, 2011-2015</i>	
4.67.	Jumlah Penyuluh Perikanan menurut Provinsi, 2011-2015.....	235
	<i>Number of Fishery Information Agent by Province, 2011-2015</i>	
4.68.	Jumlah Desa Pesisir yang mempunyai Fasilitas Pendidikan menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014.....	236
	<i>Number of Coastal Villages Having Education Facility by Province and Type of Education Level, 2014</i>	
4.69.	Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Sarana Kesehatan, 2014	239
	<i>Number of Coastal Villages Having Health Facility by Province and Type of Health Facility, 2014</i>	
4.70.	Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Perdagangan dan Hotel menurut Provinsi, 2014	241
	<i>Number of Coastal Villages Having Trade Facility and Hotel by Province, 2014</i>	
4.71.	Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Koperasi menurut Provinsi, 2014 ...	242
	<i>Number of Coastal Villages Having Cooperative Facility by Province, 2014</i>	
4.72.	Jumlah Desa Pesisir yang menerima Dana Modal Usaha untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Selama 3 tahun terakhir menurut Provinsi dan Sumber Dana, 2014.....	243
	<i>Number of Coastal Villages that Receive Capital Fund through the Community Empowerment Program during 3 years by Province and Type of Funding Sources, 2014</i>	

4.73.	Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Jumlah Petambak Garam menurut Provinsi, 2011-2015	245
	<i>Land Area, Production Number, and Labors Number of Salt by Province, 2011-2015</i>	
4.74.	Jumlah Keluarga pada Desa Pesisir menurut Provinsi dan Pengguna Listrik, 2014	248
	<i>Number of Families on Coastal Villages by Province and Power Electricity Users, 2014</i>	
4.75.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi, Sumber Air Minum, dan Jenis bahan bakar untuk memasak Sebagian Besar Keluarga, 2014.....	249
	<i>Number of Coastal Villages by Province, Main Source of Drinking Water, and Type of Cooking Fuel Most of Families, 2014</i>	
4.76.	Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Sarana dan Prasarana Transportasi antar Desa, 2014	252
	<i>Number of Coastal Villages by Province and Transportation Facilities between Village, 2014</i>	
4.77.	Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Sarana Komunikasi, 2014.....	253
	<i>Number of Coastal Villages Having Communication Facilities by Province and Type of Communication Facility, 2014</i>	
4.78.	Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan (Ib), dan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTN) menurut Provinsi, 2014 (2012=100).....	256
	<i>Price Received by Fish Farmers Indices (It), Price Paid by Fish Farmers Indices (Ib), and Farmers' Terms of Trade of Fishery Sub Sector (NTN) by Province, 2014</i>	
4.79.	Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan (Ib), dan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTN) menurut Provinsi, 2015 (2012=100).....	258
	<i>Price Received by Fish Farmers Indices (It), Price Paid by Fish Farmers Indices (Ib), and Farmers' Terms of Trade of Fishery Sub Sector (NTN) by Province, 2015</i>	

DAFTAR GAMBAR / LIST OF FIGURES

2.1.	Kerangka Kerja Analisis Lingkungan dan Sosial Ekonomi di Wilayah Laut dan Darat <i>Analytical Framework for Environment, Social, and Economic Study in Marine and Coastal Area.....</i>	13
4.1.	Percentase Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir, 2014 <i>Percentage of Coastal Village and Non-Coastal Village, 2014.....</i>	37
4.2.	Jumlah Pulau di Indonesia, 2003 <i>Number of Islands in Indonesia, 2003</i>	38
4.3.	Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan tahun 2013-2014, serta Kontribusi Nilai Ekspor Hasil Perikanan terhadap Nilai Ekspor Indonesia tahun 2011-2014 <i>Export Volume and Value of Fishery Product in 2013-2014, and Contribution of Exports Value of Fishery Product to the Total of Indonesia Exports Value in 2011-2014.....</i>	70
4.4.	Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2014 <i>Export Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2014</i>	71
4.5.	Nilai Impor Hasil Perikanan tahun 2010-2014 serta Kontribusi Nilai Impor Hasil Perikanan terhadap Nilai Impor Indonesia tahun 2011-2014 <i>Import Value of Fishery Product in 2010-2014 and The Contribution of Imports Value of Fishery Product to the Total of Indonesia Imports Value in 2011-2014....</i>	74
4.6.	Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2014 <i>Import Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2014</i>	75
4.7.	Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut menurut Jenis Kapal yang digunakan, 2013 – 2014 <i>Number of Marine Fishing Boats by Type of Fishing Boat, 2013 – 2014</i>	85
4.8.	Jumlah dan Persentase Nelayan di Laut menurut Kategori Nelayan, 2014 <i>Number and Percentage of Marine Fishers by Category of Fishers, 2014.....</i>	90
4.9.	Jumlah Desa Pesisir menurut Jenis dan Sumber Pencemaran, 2014 <i>Number of Coastal Village by Type and Source of Pollutants, 2014.....</i>	97
4.10.	Kenaikan Hasil Operasi Kapal Pengawas, 2015 <i>Increasing of Joint Operation of Surveillance Vessels, 2015</i>	104

DAFTAR SINGKATAN/ LIST OF ABBREVIATIONS

AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
AHPNS	: <i>Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome</i>
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASELI	: Asosiasi Energi Laut Indonesia
BAP	: <i>Best Aquaculture Practices</i>
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
CCRF	: <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
ENSO	: <i>El-Nino Southern Oscillation</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EMS	: <i>Early Mortality Syndrome</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GAP	: <i>Good Aquaculture Practices</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HACCP	: <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>
IUU	: <i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i>
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LOG	: <i>Laboratory of Organic Geochemistry</i>
LPI	: <i>Logistics Performance Index</i>
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MSY	: <i>Maximum Sustainable Yield</i>
MW	: <i>Mega Watt</i>

NOSB	: <i>National Organic Standards Board</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
PELNI	: PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PEMP	: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
PNPM-KP	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
PODES	: Potensi Desa
PPKT	: Pulau-Pulau Kecil Terluar
PUGAR	: Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
RTP/PP	: Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan
SIG	: Sistem Informasi Geografis
TAC	: <i>Total Allowable Catch</i>
TCF	: <i>Trillion Cubic Feet</i>
TD	: Titik Dasar
TR	: Titik Referensi
TSCF	: <i>Tera Standard Cubic Feet</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
TWF	: <i>The World Factbook</i>
WPP-RI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
WRI	: <i>World Resources Institute</i>
UNCLOS	: <i>United Nation Convention of The Sea</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

PENJELASAN UMUM / EXPLANATORY NOTES

TANDA-TANDA / SYMBOLS :

Data belum tersedia / <i>Data not yet available</i>	: ...
Data tidak tersedia atau dapat diabaikan / <i>Data not available or negligible</i>	: -
Data kurang dari setengah satuan yang digunakan / <i>Data less than half of the unit used</i>	: 0
Data/angka sementara / <i>Preliminary figures</i>	: x)
Data/angka sangat sementara / <i>Very preliminary figures</i>	: xx)
Data/angka diperbaiki / <i>Revised figures</i>	: r)
Data/angka perkiraan / <i>Estimation figures</i>	: e)
Tidak Terdeteksi / <i>Undetected</i>	: tt
Tidak Terpantau / <i>Not Monitored</i>	: tp

SATUAN / UNITS :

Liter (untuk beras) / <i>Litre (for rice)</i>	: 0,80 kg
<i>Barrel</i>	: $158,99 \text{ litre} = 1/6,2898 \text{ m}^3$.
<i>mscf</i>	: $1/35,3 \text{ m}^3$.
<i>Long ton</i>	: 1.016,50 kg.
<i>Metric ton (m. ton)</i>	: $0,98421 \text{ long ton} = 1.000 \text{ kg}$.
<i>Hectare (Ha)</i>	: 10.000 m ²

1

PENDAHULUAN

Introduction



1.1. Latar Belakang

Panjang garis pantai di seluruh wilayah Indonesia menurut data yang dikeluarkan oleh *The World Factbook* (TWF), dari buku yang diterbitkan oleh *Central Intelligence Agency* adalah 54.716 km. Indonesia menempati urutan kedua negara dengan panjang garis pantai terpanjang setelah Kanada diantara 198 negara dan 55 wilayah dunia (*The World Factbook*, 2016).

Berdasarkan *World Resources Institute* (WRI), panjang garis pantai Indonesia adalah 95.181 km yang menempati urutan ke-4 diantara 182 negara. Indonesia secara berturut-turut berada di bawah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia. Menurut catatan teknis mereka, panjang garis pantai berasal dari database Vektor Shoreline Dunia pada 1:250.000 kilometer dihitung dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) secara konsisten di seluruh dunia (*World Resources Institute*, 2016).

Namun di sisi lain, data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP), panjang garis pantai seluruh Indonesia adalah 68.216 km. Data ini dikumpulkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Surat Badan Informasi Geospasial Nomer B-3.4/SESMA/IGD/07/2014, panjang garis pantai Indonesia pada tahun 2014 adalah 99.093 km (KKP, 2015).

Sedangkan data luas daratan seluruh Indonesia yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar 1.910.931 km² (Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, 2015). Berdasarkan kedua data tersebut maka dapat kita hitung rasio panjang garis pantai terhadap luas daratan yaitu

1.1. Background

Indonesia coastlines, released by The World Factbook (TWF), from the book published by the Central Intelligence Agency is 54,716 km. Indonesia is the second country with the longest coastline length after Canada among 198 countries and 55 regions of the world (The World Factbook, 2016).

Based on World Resources Institute (WRI), coastline of Indonesia is 95,181 km which ranks 4th among 182 countries. Indonesia respectively under Canadian, United States, and Russia. According to their technical notes, length of coastline is derived from a database World Vector Shoreline at 1: 250,000 kilometer calculated using Geographic Information System (GIS) consistently throughout the world (World Resources Institute, 2016).

On the other hand, BPS – Statistics Indonesia in Statistics of Marine and Coastal Resources (SMCR), the length of the entire Indonesian coastline is 68,216 km. This data is collected from the Department of Marine and Fisheries Provinces throughout Indonesia. Based on Geospatial Information Agency Missive Number B.3-4/SESMA/IGD/07/2014, the length of Indonesia coastline in 2014 is 99,093 km (KKP, 2015).

While data land area across Indonesia issued Directorate General of Regional Authority, Ministry of Home Affairs is of 1,910,931 km² (Statistics of Marine and Coastal Resources, 2015). Based on these data we can calculate the ratio of the length of the coastline to total land area is 35.7 m/km².

PENDAHULUAN

sebesar 35,7 m/km².

Potensi tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya kelautan. Indonesia juga mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Sehingga Pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan berhaluan kelautan dengan menjadi poros maritim dunia.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat tiga program yaitu,

- 1). kedaulatan,
- 2). keberlanjutan, dan
- 3). kesejahteraan.

Kedaulatan dibutuhkan untuk menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesadaran untuk menegakkan kedaulatan maritim harus tumbuh dalam diri setiap manusia Indonesia. Kedaulatan dimulai dari keberanian dan ketegasan serta sikap konsisten dalam penegakkan hukum dengan sanksi yang tegas dan adil.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan adalah keharusan. Tindakan perusakan eksploitasi dan pengelolaan yang tidak ramah lingkungan harus dihentikan. Pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan nelayan khususnya, adalah hasil yang harus dicapai setelah kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan maritim di Indonesia. Hal ini dapat tercapai dengan cara meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian

Potential mentioned above shows that Indonesia is a country rich in marine resources. Indonesia also has a wealth of biodiversity and the largest non-living marine. So that the Government of Indonesia launched the construction of the marine wing to become the world's maritime axis.

To support the program, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries made three programs, namely,

- 1). sovereignty,
- 2). sustainability, and
- 3). welfare.

Sovereignty is needed to sustain economic independence in the management of marine resources and fisheries. Awareness to enforce maritime sovereignty should grow in every Indonesian human being. Sovereignty begins on the courage and firmness and consistency in law enforcement with tough sanctions and fair.

Management of marine resources and sustainable fisheries is a must. Acts of vandalism exploitation and management of environmentally unfriendly must be stopped. Construction of marine and fishery resources must apply the principles of management of marine resources and fisheries are responsible, competitive, and sustainable.

Welfare of the people of Indonesia in general and fishing in particular, is the result to be achieved after the sovereignty and sustainable maritime development in Indonesia. This can be achieved by increasing empowerment, competitiveness, and independence in maintaining the

dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Masyarakat dan segenap bangsa Indonesia berhak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dilakukan dengan menggulirkan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan bagi nelayan, pembudidaya, dan petambak garam.

BPS sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik, berupaya menyajikan data terkait laut dan pesisir dalam bentuk publikasi yaitu publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP). SDLP tahun 2016 merupakan edisi keduabelas yang merupakan hasil perkembangan dan penyempurnaan dari edisi-edisi sebelumnya.

sustainability of marine and fisheries. Whole Indonesian society and is entitled to the wealth of marine resources and fisheries Indonesia. Steps to increase community involvement is done by rolling the various programs of empowerment and protection for fishermen, farmers, and salt farmers.

BPS–Statistics Indonesia efforts to compile data and information related to marine and coastal resources into a publication, named Statistics of Marine and Coastal Resources (SMCR). The 2016 SMCR publication is the twelfth publications, which is a result of previous editions improvement.

1.2. Tujuan

Secara umum, publikasi ini bertujuan menyajikan data dan informasi tentang laut dan pesisir di Indonesia sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan, mengevaluasi, dan menentukan program terkait laut dan pesisir. Publikasi ini juga dimaksudkan sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat luas. Secara khusus, publikasi SDLP bermaksud menyajikan isu terkait laut dan pesisir, kondisi fisik, sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, jasa kelautan, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

1.2. Objectives

In general, the purpose of SMCR is to present data and information related to marine and coastal is input for decision makers. This publication is also as data source and information for wide society. Specifically, the purpose of this publication is to present the issues linked with marine and coastal resources, its physical condition, renewable and non-renewable resources, marine services, and socio economic condition of population in coastal region.

PENDAHULUAN

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi SDLP menyajikan data dan informasi terkait wilayah laut dan pesisir yang bersumber dari berbagai survei dan sensus yang dilakukan BPS serta data dari instansi lain. Secara umum, data dalam publikasi disajikan hingga level provinsi dan nasional dengan cakupan tahun data sampai dengan tahun 2016.

1.3. Coverage

SMCR publication presents data and information of marine and coastal resources that comes from various surveys and census conducted by BPS-Statistics Indonesia and from related institutions. In general, data in this publication present the central and provincial level with coverage up to year 2016.

2

KAJIAN LITERATUR *Literature Study*



2.1. Permasalahan Terkait Sumber Daya Laut dan Pesisir

Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga menjadi permasalahan global. Kerusakan sumber daya laut dan pesisir akibat pengelolaan yang kurang baik di masa lalu menjadi perhatian yang cukup serius bagi Indonesia. Sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai yang terdiri dari berbagai mata pencaharian termasuk nelayan (Saad, 2009). Potensi sumber daya laut Indonesia sangat tinggi. Potensi tersebut belum dieksplorasi secara maksimal, namun pada beberapa wilayah perairan Indonesia terjadi over eksplorasi.

Sumber daya laut dan pesisir Indonesia selama ini mengalami *syndrome dutch disease*, di mana terjadi over eksplorasi terhadap sumber daya laut dan pesisir untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut tersebut. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung bersifat *myopic* yang hanya melihat jangka pendek semata dan hanya berorientasi pada hasil besar dan cepat tanpa memperhatikan stabilitas lingkungan laut dan pesisir dalam jangka panjang. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan pemerintah sehingga menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan terhadap sumber daya laut dan pesisir (Satria, 2010).

Masih banyak permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya laut dan pesisir. Agar sumber daya laut dapat juga dimanfaatkan oleh generasi penerus, maka data sumber daya laut dan pesisir sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.1. Issues Related to Marine and Coastal Resources

Environmental issues are not the only a national problem but also a global problem. Marine and coastal resources damage due to deficient managed in the past become a serious concern for Indonesia. About 60 percent of Indonesia's population living within a radius of 50 km of coastline consisting of various livelihood including fishermen (Saad, 2009). Indonesian marine resources potential is very high. That potential has not been exploited to the maximum, but in some areas, there is over exploitation of Indonesian waters.

Indonesia marine and coastal resources all this time has syndrome dutch disease, where there is over exploitation of the marine and coastal resources to reap maximum benefits without regard to the sustainability of the marine resources. Many policies are taken tend to be myopic who only see the short-term and results-oriented without regard to the stability of the marine and coastal environment in the long term. Plus a lack of government oversight poses a threat to the sustainability of the marine and coastal resources (Satria, 2010).

There are many other issues related to marine and coastal resources. In order to the marine and coastal resources can also be beneficial to the next generation, it is necessary to have data on marine and coastal resources for better and sustainable development of the marine and coastal region.

KAJIAN LITERATUR

2.2. Kerangka Kerja

Pembangunan berkelanjutan merupakan strategi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasinya. Pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ekologis, sosial-ekonomi dan budaya, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan.

Terkait dengan dimensi ekologis, agar pembangunan wilayah pesisir dan lautan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan biofisik dari kegiatan pembangunan tersebut. Dengan perkataan lain, perlu adanya tata ruang pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Untuk keperluan penyusunan tata ruang ini, dibutuhkan informasi tentang karakteristik biofisik suatu wilayah dan persyaratan biofisik dari setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu, perlu juga informasi tentang tata guna wilayah pesisir dan lautan yang ada saat ini.

Kedua, laju pembuangan limbah ke dalam wilayah pesisir dan lautan hendaknya tidak melebihi kapasitas asimilasi wilayah tersebut. Artinya, perlu pengendalian pencemaran sehingga diperlukan informasi tentang sumber dan kuantitas setiap jenis limbah yang masuk ke dalam wilayah pesisir dan lautan, tingkat kualitas perairan pesisir dan lautan, dan kapasitas asimilasi perairan tersebut.

Ketiga, laju (tingkat) pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan lautan, khususnya yang dapat pulih, hendaknya tidak melampaui

2.2. Framework

Sustainable development is a development strategy to meet the needs of the present without compromising or damaging the ability of future generations to meet their needs and aspirations. Sustainable development has dimensions of ecological, socio-economic and cultural, social, political, and legal and institutional.

Associated with ecological dimensions, so that development of coastal and marine can be sustain, it must meet three main requirements. First, every development activity should be placed in locations that are biophysical (ecological) in accordance with the biophysical requirements of the development activities. In other words, there are needed spatial development of coastal and marine areas. For the purposes of this spatial planning, it takes information about the biophysical characteristics of the region and biophysical requirements of any development activities that will be implemented. In addition, it is also necessary information about the land use of coastal and ocean current.

Secondly, the pace of disposal waste into coastal and marine areas should not exceed the assimilation capacity of the region. It means needed to control pollution, so the information about the source and quantity of any kind of waste that goes into the ocean and coastal areas, the level of quality of coastal waters and oceans, and the assimilation capacity of the waters are needed.

Third, the rate of utilization of natural resources of coastal and marine areas, especially those that can be recovered, should not exceed

kemampuan pulihnya (potensi lestari) dalam kurun waktu tertentu. Artinya, perlu pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Untuk itu diperlukan informasi tentang potensi lestari dari setiap sumber daya alam dapat pulih yang ada di wilayah pesisir dan lautan, dan permintaan (*demand*) terhadap sumber daya alam tersebut dari waktu ke waktu. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat pulih, seperti minyak, gas, dan mineral, perlu dilakukan secara cermat dan dampak negatif lingkungan yang mungkin timbul ditekan seminimal mungkin.

Dimensi sosial-ekonomi dan budaya mensyaratkan bahwa laju pembangunan hendaknya dirancang sedemikian rupa, sehingga permintaan total atas sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan tidak melebihi kemampuan ekosistem pesisir dan lautan untuk menyediakannya. Untuk itu diperlukan informasi tentang jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk serta permintaan pasar internasional atas sumber daya dan jasa-jasa lingkungan pesisir dari waktu ke waktu. Selain itu, perlu juga informasi tentang teknologi yang dapat meningkatkan daya dukung wilayah pesisir dan lautan bagi kehidupan manusia dan jalannya proses pembangunannya.

Dimensi sosial-politik mensyaratkan bahwa perlu diciptakan suasana yang kondusif bagi segenap lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sumber daya pesisir dan lautan. Untuk itu diperlukan informasi tentang pola dan sistem perencanaan dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya tersebut oleh segenap lapisan masyarakat yang terlibat.

Dimensi hukum dan kelembagaan mensyaratkan perlunya sistem dan kinerja hukum serta

the ability of the recovery (sustainable potential) within a certain time. It means need to use natural resources optimally. It is needed information about the sustainable potential of any natural resources that can be recovered in coastal and marine areas, and demand on natural resources from time to time. In terms of utilization of natural resources that can not be recovered, such as oil, gas, and minerals, it should be done carefully and minimize the environmental negative impacts that may arise.

Dimensions of socio-economic and culture requires the rate of development should be designed in order to the total demand of natural resources and environmental services on coastal areas and the sea does not exceed the ability of coastal and marine ecosystems to provide it. It is needed information about the number and growth rate of population as well as international market demand of the resources and environmental services of coastal from time to time. In addition, it should be well informed about the technology that can increase the carrying capacity of coastal and marine areas for human life and the development process.

Socio-political dimension requires the conducive situation to all levels of society to participate actively in the development of coastal and marine resources. It is needed information about the patterns and systems of planning and decision-making processes related to the utilization of these resources by all sections of society that are involved.

Legal and institution dimensions requires the need for legal and institutional system and

KAJIAN LITERATUR

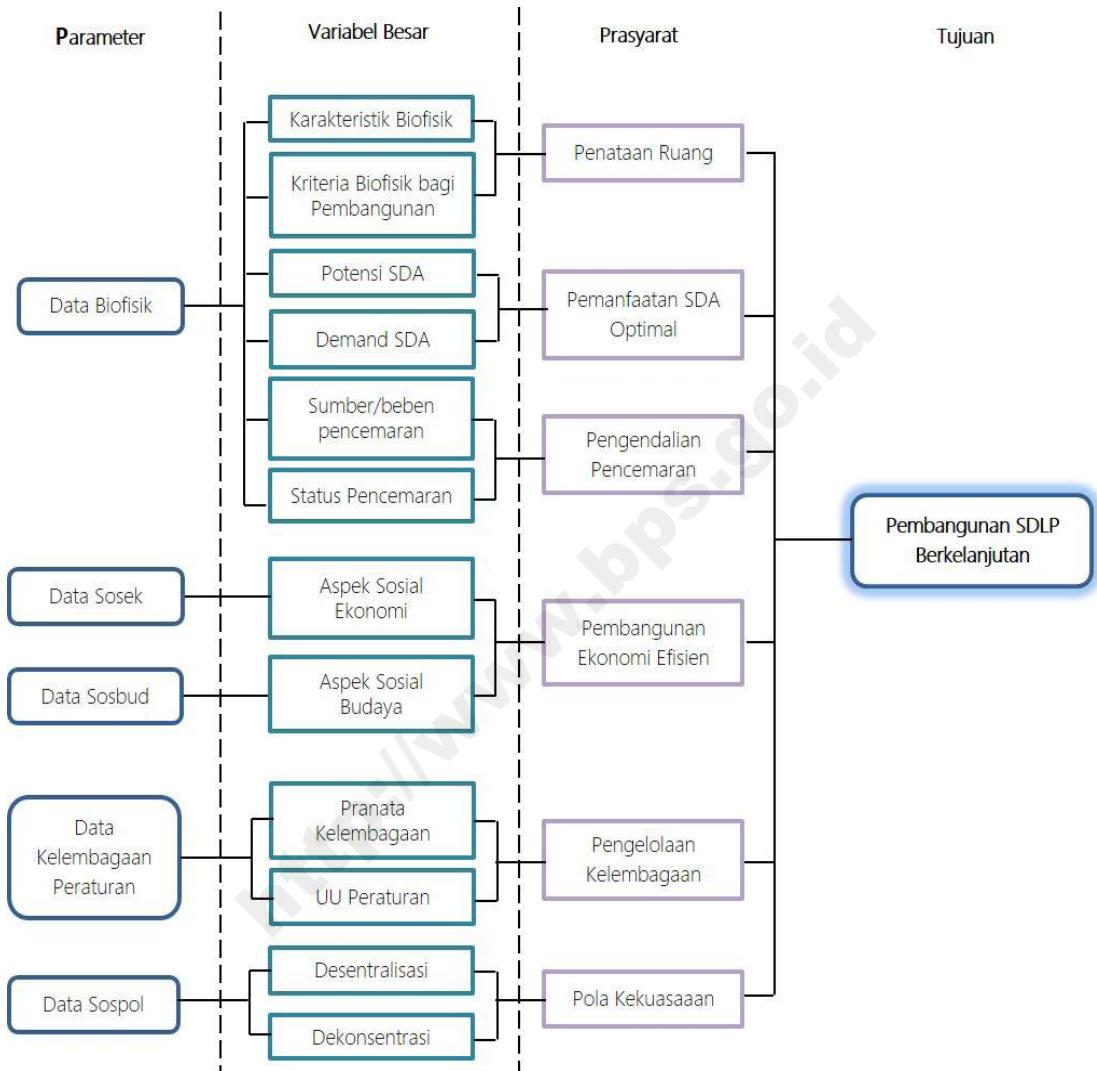
kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan informasi tentang aspek dan dinamika hukum serta kelembagaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Kebutuhan informasi untuk pengelolaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara berkelanjutan dapat digambarkan pada kerangka kerja dalam Gambar 2.1 (Dahuri, R. et. al. 2001; h. 277). Namun demikian kerangka kerja tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP) karena minimnya ketersediaan data sumber daya laut dan pesisir.

legal and institutional performance that can support the development of coastal resources and oceans sustainably. It required the information about legal aspects and dynamics as well as the institutional that grow in the society.

Management information needs for the development of coastal and marine resources in a sustainable manner can be described in the framework in Figure 2.1 (Dahuri, R. et. Al. 2001; p. 277). However, this framework can not be applied fully in the preparation of Publication of Statistics of Marine and Coastal Resources (SMCR) because of the lack of data availability of marine and coastal resources.

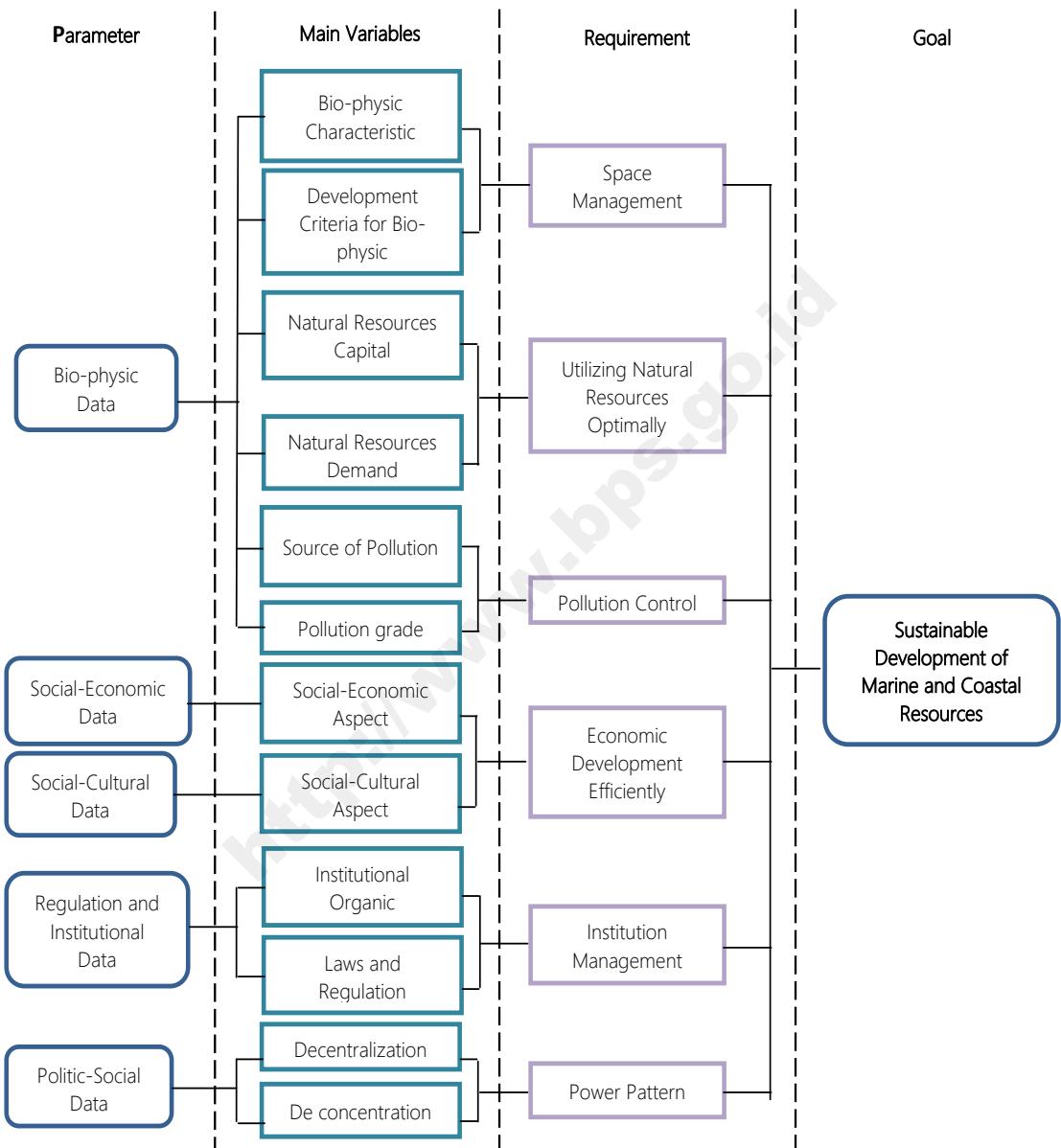
Gambar 2.1. Kerangka Kerja Analisis Lingkungan dan Sosial Ekonomi di Wilayah Laut dan Pesisir



Sumber: Dahuri, R. et. al. 2001; hal. 277

KAJIAN LITERATUR

Figure 2.1. Analytical Framework for Environment, and Social-Economic Study in Marine and Coastal Area



Source: Dahuri, R, et. al. 2001; p. 277

3

METODOLOGI *Methodology*



3.1. Sumber Data

Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2016 disusun menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei dan sensus yang dilakukan BPS, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil kumpilasi data beberapa instansi/unit terkait pembangunan wilayah laut dan pesisir baik di pusat maupun daerah.

BPS mengumpulkan dan mengkompilasikan data dari kementerian atau institusi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.2. Metode Penyajian

Publikasi SDLP 2016 ini merupakan edisi keduabelas dan merupakan pengembangan dari publikasi-publikasi sebelumnya. Publikasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, terutama kebutuhan data bagi para pengambil kebijakan dan kegiatan ilmiah lainnya. Data dan informasi terkait sumber daya laut dan pesisir disajikan menurut level nasional dan provinsi.

Data dan informasi dibagi dalam 14 pokok bahasan yaitu Gambaran Umum Wilayah Laut dan Pesisir, Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun, Potensi dan Produksi Perikanan, Perdagangan Perikanan, Konsumsi Perikanan, Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, Rumah

3.1. Data Sources

Statistics of Marine and Coastal Resources 2016 is a compilation of primary and secondary data. The primary data are taken from surveys and censuses conducted by BPS-Statistics Indonesia; while the secondary data are taken from central and regional institutions related to development of marine and coastal region.

BPS-Statistics Indonesia collecting and compile the data from ministry or other institutions, they are Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Home Affairs, Ministry of Forestry, Geospatial Information Agency, Indonesian Institute of Sciences, Ministry of Energy and Mineral Resource, Ministry of Transportation, Ministry of Environment, and Ministry of Education and Culture.

3.2. Method of Dissemination

The 2016 SMCR is twelfth edition which is improvement from previous publications. This publication is aimed to fulfill the needs of data user, specifically the needs of statistical data and information for decision makers and others scientific activities.

Data and information related to marine and coastal resources are presented at national and provincial level. This publication is divided into 14 main topics, that is General Overview of Marine and Coastal Region, Mangroves, Coral Reefs and Seagrass, Potency and Production of

METODOLOGI

Tangga Perikanan dan Perusahaan Perikanan, Mineral, Kawasan Konservasi Laut, Kualitas Air Laut, Tindak Pidana dan Pengawasan Kelautan Perikanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Desa Pesisir, serta Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan.

Fisheries, Fishery Trade, Fish Consumption, Marine Transportation Infrastructure, Fisheries Household and Establishments, Mineral, Marine Conservation Area, Sea Water Quality, Fisheries Violation and Marine Affairs and Fisheries Surveillance, Education Facilities and Infrastructure, Socio-Economic Infrastructure in Coastal Village, and Fishery Farmer Terms of Trade.

3.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini berasal dari berbagai sumber. Sumber utama adalah UU Nomer 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

1. Abrasi adalah proses pengikisan yang terjadi akibat ombak/gelombang pantai atau yang juga disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar wilayah pantai.
2. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
3. Biota adalah tumbuhan dan satwa di suatu kawasan.
4. Budidaya laut adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dengan menggunakan metode tertentu.
5. Cadangan mineral adalah konsentrasi komoditi mineral yang dapat di manfaatkan,

3.3. Concept and Definition

Concept and definition used in this publication are taken from several sources. The main source is the Law of the Republic Indonesia Number 27 year 2007 about Coastal Region and Small Islands Management, and the Law of the Republic Indonesia Number 45 Year 2009 about Fishery.

1. *Abrasion is an eroding process that happened due to effect of waves or due to human being activities around coastal region.*
2. *Seawater quality standard is a parameter of the limit or degree of creature substances, energy, or component which exist or must be exists and/or pollutants whose existence is tolerable in seawater.*
3. *Biotas are animals and plants that living in an area.*
4. *Marine culture is a preservation of plants and animals such as various types of fish, shrimp, crustacean, and various types of seaweed in some places by using certain method.*
5. *Mineral reserve is the concentration of mineral commodities that can be utilized and*

- serta secara ekonomis dan hukumiah dapat diproduksi.
6. Cadangan terbukti adalah sumber daya mineral terukur yang berdasarkan studi ke layakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik.
 7. Cagar alam di perairan adalah kawasan suaka alam di perairan yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan biota tertentu dengan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi.
 8. Dataran pasang surut adalah daerah yang terletak diantara pasang tertinggi dan surut terendah.
 9. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya yang secara hukum dilindungi sebagian atau semua lingkungan disekitarnya.
 10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
 11. Ekosistem mangrove adalah satu-satunya jenis tanaman tingkat tinggi yang sangat berhasil mendiami daerah intertidal yang merupakan pertemuan antara daratan dan lautan. Hutan mangrove secara spesifik mendominasi daerah pesisir di sepanjang pantai tropis sampai sub-tropis (Clough, 1982). Ekosistem mangrove memiliki fungsi signifikan baik dilihat dari aspek atau nilai ekologi, lingkungan, maupun sosial ekonomi, seperti mempertahankan kualitas air di kawasan pantai; melindungi pantai dengan mengurangi dampak dari badai, gelombang, dan banjir; berfungsi se-
can be produced economically and legally.
 6. *Proved reserve is a measured mineral resource which based on mining feasibility study that all relevant factors have been fulfilled therefore mining can be done economically.*
 7. *Natural conservation in waters is a natural preservation area in waters that has specific biota with its ecosystem, or specific ecosystem that requires protection.*
 8. *Ebb-tide area (tidal flat) is an area between the highest tide and the lowest ebb.*
 9. *Marine protected area is a coastal and marine area covering coral of rock, forest of mangrove, ponder, or other habitat that has been protected part or the entire enclosed environment by law.*
 10. *Ecosystem is community unity of flora, fauna, organism, and other non-organism as well as process that connecting in the form of balance, stability, and productivity.*
 11. *Mangrove ecosystem is the only one of high level crop types that very succeeding to inhabit the intertidal area that is the meeting between sea and land. Forest of mangrove specifically predominate seaboard in tropical coastwise until sub-tropics (Clough, 1982). Mangrove ecosystem have good function not only from the aspect or ecology value, environmental, but also social economics, like maintaining the quality of water in coastal area; protecting coast through decreasing the affect of storm, waving, and floods; functioning as area to stand on place and eat*

METODOLOGI

- bagai daerah pemijahan dan tempat makan berbagai jenis ikan (komersial dan lokal); merupakan tempat makan berbagai hewan-hewan laut baik yang bersifat identik maupun pelagis serta berbagai jenis burung; dan dapat berfungsi sebagai sumber bahan atau produksi kayu (English et. al., 1997).
12. Garis pantai adalah garis yang dibentuk perpotongan garis air surut dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
13. Habitat adalah lingkungan fisik, kimia, dan biologis dengan ciri-ciri khusus yang mendukung spesies atau komunitas biologis tertentu.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Jasa lingkungan adalah jasa yang memanfaatkan fungsi sumber daya pesisir untuk tempat rekreasi dan pariwisata serta sebagai media transportasi dan sumber energi gelombang dan lain-lain.
16. Kapal penangkap ikan adalah perahu/kapal yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Kapal pengangkut tidak termasuk kapal penangkap. Tetapi perahu/kapal yang digunakan untuk mengangkut nelayan, alat-alat penangkap dan hasil penangkapan dalam rangka penangkapan termasuk kapal penangkap ikan.
17. Kapal penangkap ikan untuk penangkapan di laut diklasifikasikan sebagai berikut :
- (i) Perahu tidak bermotor
 - a. Jukung
 - b. Perahu papan
 - kecil (perahu yang terbesar panjang-
- various types of fish (local and commercial); is a place to eat various of sea animals identically or pelagis and also various types of birds; and can be functioned as materials source or wood production (English. et.al., 1997).*
12. *Coastline is line formed by line intersection of low tide line with coastal land, which used to specify the outsides point of sea territorial.*
13. *Habitat is the physical, chemical, and biological environment whose specific characteristics to support certain species or biological communities.*
14. *Fish is all kinds of organisms that all or some part of its life cycle in the water.*
15. *Environmental service is a service through utilizing coastal resource's function for tourism and recreation as well as a transportation media and source of waving energy, and others.*
16. *Capturing fish vessel is a boat/ship used in capturing fish/other aquatic animals/aquatic plants. Freighter vessel is not included as capturing fish vessel, but a vessel that used to carry fishermen, fishing tools, and capturing result is included as capturing fish vessels.*
17. *Capturing fish vessels for capturing fish in the sea are classified as follows:*
- (i) Non powered boat*
 - a. Jukung*
 - b. Board boat*
 - small (the largest boat length less than*

- nya kurang dari 7 meter)
- sedang (perahu yang terbesar panjangnya dari 7-10 meter)
 - besar (perahu yang terbesar panjangnya 10 meter atau lebih)
- (ii) Perahu motor tempel
- (iii) Kapal Motor
- | | |
|---------------|-------------------|
| • < 5 GT | • 100 - 200 GT |
| • 5 - 10 GT | • 200 - 300 GT |
| • 10 - 20 GT | • 300 - 500 GT |
| • 20 - 30 GT | • 500 - 1000 GT |
| • 30 - 50 GT | • 1000 GT ke atas |
| • 50 - 100 GT | |
18. Karang/*Corals* adalah termasuk hewan coelenterata yang dapat atau tidak dapat membentuk rangka.
19. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
20. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya dari jenis biota tertentu atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
22. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 7 meters)
- medium (the largest boat length from 7 to 10 meters)
 - big (the largest boat length is 10 meters or more)
- (ii) Outboard motor
- (iii) Motorboat
- | | |
|---------------|---------------------|
| • < 5 GT | • 100 - 200 GT |
| • 5 - 10 GT | • 200 - 300 GT |
| • 10 - 20 GT | • 300 - 500 GT |
| • 20 - 30 GT | • 500 - 1000 GT |
| • 30 - 50 GT | • 1000 GT and above |
| • 50 - 100 GT | |
18. Coral is a coelenterate animal that able or disable to form chalk frame.
19. Region or area is a part of the coastal and small islands region which has a specific function based on criteria of physical, biological, social, and economic characteristics, and needs to maintain their existence.
20. Culture area is a specified area with main function for the activity of culture for certain type of biota based on potency and condition of natural resources, human resources, and man-made resources.
21. Conservation area is a part of coastal areas and small islands that has a particular characteristic as a whole sustainable protected, preserved and/or utilized ecosystem in order to achieve sustainable management of coastal areas and small islands.
22. Protected area is a specified area with main function to keep the environment sustainably that included natural resources and man-made resources.

METODOLOGI

23. Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Menurut Bengen (2001), dari batas wilayah pesisir ke daerah laut adalah daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut serta wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Sedangkan dari batas wilayah pesisir ke arah daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air atau yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut.
24. Kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan wujud alamiah lainnya yang satu sama lainnya mempunyai hubungan erat, satu kesatuan geografis, ekonomis, dan politis yang hakiki, dan secara historis dianggap demikian.
25. Konservasi laut adalah pengelolaan sumber daya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumber daya alam laut yang rusak.
26. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
27. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
28. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
23. Coastal area is a transition area between land and ocean ecosystem that affected by changes in land and ocean. According to Bengen (2001), from the boundary of coastal area towards the sea are the areas which are still influenced by natural processes in land such as sedimentation and the stream of fresh water to the sea, and the sea area which are still influenced by human activities in the land. While, from the boundary of coastal area towards the land are the areas which filled by water or still influenced by sea processes like ebb-tide, sea breeze, and seawater intrusion.
24. Archipelago is a group of islands, including part of island, territorial water surroundings, and other natural form which one to another have a close relationship; one geographical unity, economic, and authentic political, and historically assumed that way.
25. Marine conservation is a management of marine natural resources which the exploitation is conducted wisely to guarantee the continuity of its supply by keeping preserve and improve the quality of diversity and its value, also rehabilitate the damage of marine natural resources.
26. Open sea is a part of the sea that is not included in Exclusive Economic Zone of Indonesia (ZEEI), territorial sea of Indonesia, archipelagic waters of Indonesia, and depth waters of Indonesia.
27. Territorial sea of Indonesia is the sea-lane with 12 (twelve) nautical miles width measured from the baseline of the Indonesian archipelago.
28. Environment is space unity with all things, energy, condition and creature including

makhluk hidup termasuk manusia dan perlakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

29. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
30. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
31. Nelayan penuh adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
32. Nelayan sambilan utama adalah nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
33. Nelayan sambilan tambahan adalah nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.
34. Padang lamun ditemukan hidup pada perairan dangkal, perairan pantai bersubstrat lunak dan terlindung pada daerah estuaria. Padang lamun memiliki peranan penting dalam ekosistem pantai, selain berfungsi sebagai tempat berlindungnya larva ikan dan biota laut lainnya, juga sebagai daerah mencari makanan ikan dan udang (den Hartog, 1970; Stevenson, 1988). Padang lamun juga berperan dalam melindungi pantai dan abrasi, karena daun dan batang tumbuhan ini dapat

human and their behavior that influences the human-being sustainability and other creature's welfare.

29. *Fishers are the person whose livelihood is fishing.*
30. *Small fishers are a person whose livelihood is fishing to meet the daily life's needs. He uses the vessel with the largest size around 5 (five) gross tons (GT)*
31. *Full time fishers are fishers who use whole work time to catch fish/other aquatic animals/aquatic plants.*
32. *Major part time fishers are fishers who uses most of his work time to catch fish/other aquatic animals/ aquatic plants. This fishers type may have other jobs.*
33. *Minor part time fishers are fishers who uses small of his work time to catch fish.*
34. *Seagrass are founded live in shallow water, coastal water with soft substrate and protected in an estuarial area. Seagrass has an important role in coastal ecosystem, besides functioning as the shelter place of fish larva and other biota of sea, also as an area to look for fish food and prawn (den Hartog, 1970; Stevenson, 1988). Sea-grass is also protecting coastal from abrasion, because the stem and leaf of this plant can weaken wave and slow down current stream (Scoffin, 1970; Fonseca*

METODOLOGI

- meredam ombak dan memperlambat aliran arus (Scoffin, 1970; Fonseca et.al., 1982).
35. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir.
36. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
37. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
38. Pelabuhan perikanan tipe A atau Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.
39. Pelabuhan perikanan tipe B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) adalah pelabuhan et.al., 1982).
35. *Community participation is an involvement of local community in activity for managing coastal area resources.*
36. *Port is a place that consists of the mainland and surrounding waters with certain limits as a place of government activity and economic activity which is used as a shipping dock, docked, load, and unload passengers and goods and equipped with safety facilities, and have port supporting activities. The port is also a place for transferring intra and intertransportation device*
37. *Fishing port is a place that consists of land and surrounding waters with certain limits as a place of government activity and the activities of fisheries business system that is used as a place fishing boats to dock, anchor, and/or loading and unloading of fish that are equipped with facilities supporting the safety of shipping and fishing activities.*
38. *Fishing port type A or ocean fishing port (PPS) is a fishing port which is intended primarily for fishing vessels operating in Indian waters, commonly classified into long-distance fishing fleet until Exclusive Economic Zone of Indonesia and international waters, have the equipment to handle and process the fish resources in accordance with its capacity is number of fish landed.*
39. *Fishing port type B or nusantara fishery port (PPN) is a fishing port which is applied to*

perikanan yang diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.

40. Pelabuhan perikanan tipe C atau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan yang beroperasi di perairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya.
41. Pelabuhan perikanan tipe D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan ber-skala lebih kecil daripada pelabuhan perikanan pantai ditinjau dari kapasitas penanganan jumlah produksi ikan, maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya. PPI dimaksudkan sebagai prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton per hari.
42. Pembudidaya ikan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
43. Penangkapan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan.
44. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke

fishing vessels operating in waters of the archipelago are commonly classified into long-distance fishing fleet until the waters Exclusive Economic Zone of Indonesia, has the equipment to handle and/or fish processing capacity in accordance with the number of fish landed.

40. *Fishing port type C or coastal fishery port (PPP) is a dedicated fisheries operating in coastal waters, have the equipment to handle and process the fish or in accordance with its capacity.*
41. *Fishing port type D or fish landing (PPI) is the base for the landing of the fish-scale fishermen smaller than observed from shore fishery port handling capacity of fish production, and basic facilities and equipment. PPI is meant as a fish landing infrastructure that can handle the production of fish up to 5 tons per day.*
42. *Fish aquaculture farmer is a person who actively engaged in cultivation of fishes/other aquatic animals/aquatic plants.*
43. *Capture is an activity to catch or collect fishes/ other aquatic animals/aquatic plants that grow naturally in inland open water/marine areas and no belong to the property of any person.*
44. *Coastal pollution is an entry of living things, matter, energy, and or other components into the coastal environment caused by human activities, and it makes the quality of coastal down to a certain level which causes the*

METODOLOGI

- tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
45. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
46. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
47. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.
48. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
49. Perikanan budidaya adalah kegiatan ekonomi coastal environment cannot be functioned as its purpose.
45. *Fisheries management is all the efforts, including an integrated process of information collection, analysis, planning, consultation, decision making, allocation of fish resources, and implementation and legislation enforcement in the field of fisheries, conducted by the government or other authority which is aimed at achieving sustainable productivity of aquatic biological resources and the agreed objectives.*
46. *Management of coastal zones and small islands is a process of planning, utilization, supervision and control of coastal resources and small islands inter sector between the central government and local government, between terrestrial and marine ecosystems, as well as between science and management to improve the welfare of the community.*
47. *The average expenditure per capita is the cost incurred for the consumption of all household members during the month divided by the number of household members. Expenditures for food consumption is calculated over a week ago then converted into an average monthly expenditure.*
48. *Fisheries is all activities related to the management and utilization of fish resources and its environment from preproduction, production, processing up to marketing which conducted in a fisheries business systems.*
49. *Aquaculture is an economic activity on cul-*

- dalam bidang budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
50. Perusahaan perikanan budidaya adalah unit ekonomi berbadan hukum yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.
51. Perusahaan perikanan tangkap adalah unit ekonomi berbadan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.
52. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air.
53. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.
54. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki kondisi yang rusak kepada keadaan semula.
55. Rumah tangga perikanan budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.
56. Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh rumah tangga tersebut saja, oleh anggota rumah tangga tersebut bersama-sama tenaga buruh, atau oleh tenaga buruh saja. Jadi rumah tangga perikanan adalah unit ekonomi. Oleh karena itu dalam penulisannya kedua bentuk unit ekonomi tersebut sering disatukan menjadi rumah tangga perikanan/perusahaan perikanan (RTP/PP).
- tivating fish/other aquatic animals/aquatic plants.
50. *Culture fisheries company is an economy unit under the laws which conducts cultivate fishes/other aquatic animals/aquatic plants, and some part or all the results is to be sold.*
51. *Capture fisheries company is an economy unit under the law that conducts catching fishes/other aquatic animals/aquatic plants, and some part or all the results are to be sold.*
52. *The island is an area of land that formed naturally and surrounded by water.*
53. *Small island is an island with an area less than or equal to 2,000 square km along with the ecosystem.*
54. *Rehabilitation is an activity to repair damage condition back to the original situation.*
55. *Marine culture fisheries households are households engaged in aquaculture/other aquatic animals/ aquatic plants activity, and sell some or all of its results.*
56. *Marine capture fisheries households are households engaged in capturing fish/ aquatic animals/aquatic plants activity and sell some or all of its results. This activity can be done by the household alone, by members of the household and its worker, or by the worker alone. Therefore fishery household is also an economic unit as well as fisheries company. Both of those economic units are often written as one form i.e. households fisheries/fisheries company (RTP/PP).*

METODOLOGI

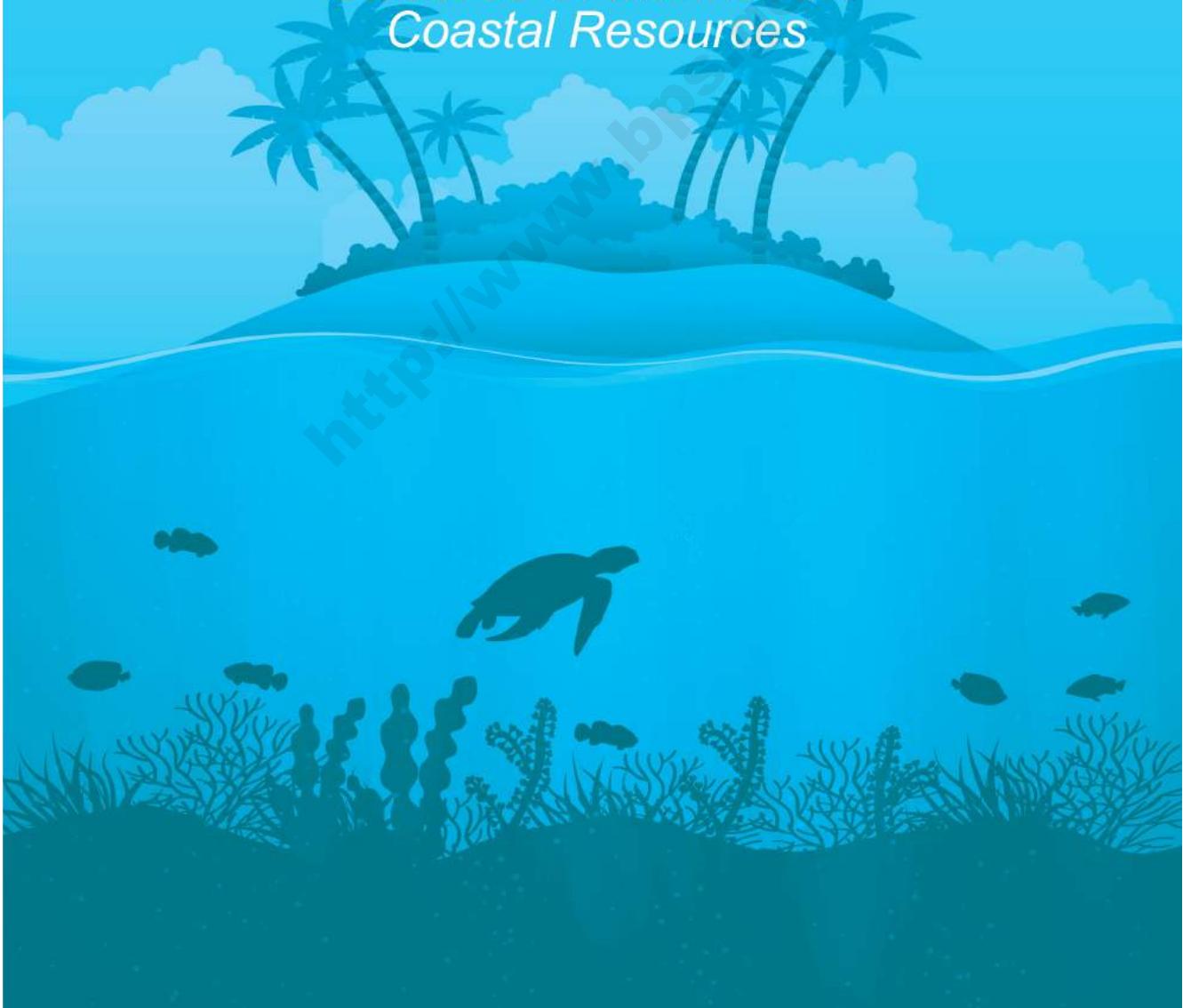
57. Sanitasi adalah proses yang dilakukan untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat.
58. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
59. Sumber daya pesisir adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati. Sumber daya hayati antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan; sedangkan sumber daya non hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumber daya di airnya, dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir, timah, dan mineral lainnya.
60. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
61. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
62. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
63. Terumbu karang adalah struktur yang mengandung *mineral carbon*, yang di produksi oleh biota laut dan tahan terhadap gempuran ombak. Terumbu karang ditemu-
57. *Sanitation is a process to maintain the environment to be clean and hygiene.*
58. *Border coastal is the land of a width proportional to the shape and physical condition of the beach, at least 100 meters from the highest tide point landward.*
59. *Coastal resources are natural resources, man made resources, and environmental services in the coastal area. Natural resources consist of biological resources and non-biological resources. Biological resources, for example are fish, seaweed, lamun field, mangrove, and coral, territorial water biota; while non biological resources is consist of sand farm, surface of the water, resources in water, and in sea base like gas and oil, sand, tin, and other minerals.*
60. *A fish carrier vessel permit (SIKPI) is a written permission that must be owned by a fishing vessel to carry fish.*
61. *A fishing permit (SIP) is a written permission that must be owned by a fishing vessel to catching fish, and its an integral part of SIUP.*
62. *Fisheries business license (SIUP) is a written permission that must be owned by fishing companies to conduct fishing operations using production facilities specified in the license.*
63. *Coral reef is an aragonite structures produced by living organism, which is an erosion-resistant marine. Coral reef is found in shallow and tropical marine.*

- kan di laut dangkal di daerah tropis.
64. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia
64. *Exclusive Economic Zone of Indonesia is a point beyond and adjacent to the territorial sea of Indonesia as defined under the applicable laws concerning Indonesian waters which include the seabed, subsoil, and water with the outer boundary 200 nautical miles measured from the Indonesian territorial sea baseline.*

4

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

*Statistics Of Marine And
Coastal Resources*



STATISTICS OF MARINE AND COASTAL RESOURCES

4.1. Gambaran Umum Wilayah Laut dan Pesisir

Secara geografis Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa tepatnya berada di antara $94^{\circ}45' BT - 141^{\circ}01' BT$ dan $06^{\circ}08' LU - 11^{\circ}05' LS$. Luas seluruh wilayah teritorial Indonesia adalah 7,7 juta kilometer persegi (km^2). Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km^2 atau sama dengan $\frac{3}{4}$ dari luas wilayah Indonesia. Luas perairan tersebut terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km^2 , laut nusantara 2,3 juta km^2 dan perairan territorial 0,8 juta km^2 . Luas wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui oleh *United Nation Convention of The Sea* (UNCLOS, 1982).

Wilayah laut Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019, perairan laut Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan atau *Maximum Sustainable Yield* (MSY) sebesar 7,3 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau *Total Allowable Catch* (TAC) sebesar 5,8 juta ton/tahun (80 persen dari MSY). Potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93 persen dari TAC. Total produksi perikanan tangkap adalah 5,863 juta ton dan potensi mikro flora-fauna kelautan belum tereksplosiasi secara penuh sebagai penyanga pangan fungsional pada masa depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan

4.1. General Overview of Marine and Coastal Region

Geographically, Indonesia is located on the equator line, from $94^{\circ}45'$ to $141^{\circ}01'$ east longitude and from $06^{\circ}08'$ north latitude to $11^{\circ}05'$ south latitude. Territorial area of Indonesia is 7.7 million square kilometers (km^2). The ocean waters area approximately 5.8 million km^2 or equal to $\frac{3}{4}$ of the total area of Indonesia. Ocean waters area consist of 2.7 million km^2 of Exclusive Economic Zone (EEZ), 2.3 million km^2 of archipelagic waters, and 0.8 million km^2 of territorial waters. The total area of Indonesian waters region has been recognized by the United Nation Convention of The Sea (UNCLOS, 1982).

Indonesia marine area has an enormous diversity of marine and fishery resources. Based on the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 45 of 2015 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 25 of 2015 About the Strategic Plan of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries during 2015-2019, marine waters of Indonesia has the potential for sustainable fish resources or the Maximum Sustainable Yield (MSY) of 7.3 million tons per years, with Total allowable Catch (TAC) of 5.8 million tons/year (80 percent of MSY). That potential already use only 5.4 million tons in 2013 or only 93 percent of the TAC. Total fisheries production was 5.863 million tons and the potential of marine micro flora-fauna not been explored fully as a functional food buffer in the future.

Based on the Regulation of the Minister of

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum Indonesia yang memiliki total luas sekitar 54 juta hektar, meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Sedangkan, untuk perikanan budidaya, potensi yang dimilikinya adalah perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta hektar, perikanan budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta hektar, perikanan budidaya air tawar seluas 2,2 juta hektar, dan pengembangan bioteknologi ke laut. Pada tahun 2013-2014 berdasarkan data FAO (2016), Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap setelah China dan peringkat ke-7 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Jika dibandingkan dengan kondisi 2011-2012, peringkat untuk produksi perikanan tangkap masih sama sedangkan untuk produksi perikanan budidaya turun, di mana sebelumnya Indonesia berada pada posisi ke-4.

Berdasarkan fakta-fakta di atas memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar. Potensi ini harus dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, sehingga menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dalam WPP-RI dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum diterapkan.

Pengelolaan perikanan yang belum op-

Marine and Fisheries Number 15 of 2012 on the Strategic Plan of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries during 2010-2014, the dimensions of the potential of fisheries in Indonesia public waters which has a total area about 54 million hectares, including lakes, reservoirs, rivers, swamps, and another puddle, estimated reaches 0.9 million tonnes of fish/year. Meanwhile, aquaculture potential consist of aquaculture marine area of 8.3 million hectares, brackish water pond area of 1.3 million hectares, the freshwater area of 2.2 million hectares, and the development of marine biotechnology. During 2013-2014 based on data from FAO (2016), Indonesia was ranked 2nd for fisheries production after China and ranks 7th for aquaculture production in the world. When compared with the conditions of 2011-2012, the ratings for fisheries production is still the same, while for aquaculture production is down, which Indonesia is in the 4th position before.

Based on the facts given above shows that the potential for Indonesian fishery is very large. This potential must be managed properly and responsibly so that its activities can be sustained, thus becoming one of the main sources of capital development of Indonesia in the present and the future. This is in accordance with the mandate of Law of the Republic Indonesia Number 45 Year 2009 Article 6 paragraph 1 about Fishery which states that fisheries management in WPP-RI done to achieve optimum and sustainable benefits, and ensuring sustainability of fish resources. But in reality, it has not yet implemented.

Fisheries management is not optimal oc-

timal terjadi pada perikanan tangkap dan budidaya. Pada perikanan tangkap masih banyak aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, gejala *overfishing* di beberapa perairan, penggunaan alat penangkap ikan yang bersifat merusak lingkungan, serta belum efektifnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan. Sedangkan pada perikanan budidaya, masih bergantungnya kebutuhan pakan dari impor negara lain, belum diterapkannya *Good Aquaculture Practices (GAP)* atau *Best Aquaculture Practices (BAP)* sehingga berdampak negatif pada lingkungan, terjadinya konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta induk ikan dan udang unggulan yang masih terbatas ketersediaannya (Bappenas, 2014).

Mengingat hampir 65 persen penduduk di Indonesia hidup di kawasan pesisir dan laut (Dahuri, Rais, Sapta, dan Sitepu, 2001), maka ekosistem di sekitar kawasan tersebut harus dijaga dan dikembangkan seoptimal mungkin demi keberlangsungan kehidupan di pesisir dan laut. Sehingga pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan sudah selayaknya dikelola secara baik dan optimal demi menunjang pembangunan nasional dan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Menurut Baransano dan Mangimbulude (2011), sampai saat ini belum ada pembagian laut yang dapat diterima secara universal. Ekosistem perairan laut dapat dibagi menjadi dua, pertama adalah perairan laut pesisir, bagian ini meliputi daerah paparan benua, dan kedua adalah laut lepas atau laut oseanik. Belum ada definisi yang baku juga untuk penetapan batas wilayah pesisir sampai saat ini, namun terdapat kesepakatan dunia bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan laut. Terdapat dua

curred on capture fisheries and aquaculture. In capture fisheries, there are still a lot of activity *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, symptoms of over-fishing in some waters, the use of fishing gear which is damaging to the environment, and ineffectiveness system of monitoring the utilization of fish resources. While in aquaculture, there are still dependency on feed requirements from import countries, yet implementation of *Good Aquaculture Practices (GAP)* or *Best Aquaculture Practices (BAP)* that negatively impact the environment, land conversion that is not in accordance with the designation, and the availability of fish and shrimp seed still limited (Bappenas, 2014).

Considering nearly 65 percent of Indonesia's population lives in coastal and marine areas (Dahuri, Rais, Sapta, dan Sitepu, 2001), the ecosystem around the area should be maintained and developed as optimal as possible for the continuation of life on the coastal and marine. So the use of coastal and ocean resources are appropriately managed properly and optimally in order to support national development and for improving the welfare of the people a fair and prosperous.

According to Baransano and Mangimbulude (2011), until now there is no division of the sea that can be universally accepted. Marine ecosystems can be divided into two, the first is a coastal marine water, this section covers the area of the continental shelf, and the second is the open sea or oceanic sea. Until now there is no standard definition as well as to the delimitation of coastal areas, but there is the world deal that the coastal region is an area of transition between land and sea. There are two limits coastal areas

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

batas wilayah pesisir jika ditinjau dari garis pantai, yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Menurut Dahuri (2003), batas wilayah pesisir secara tegak lurus belum diperoleh kesepakatan. Hal ini disebabkan batas wilayah antara satu negara dengan negara lain berbeda.

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang masih di pengaruhi kedua zona tersebut. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini disebabkan karena kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya pedagangan antar daerah, pulau dan benua. Potensi besar yang dimiliki oleh wilayah tersebut harus bisa dieksplorasi dengan sebaik mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat seluas luasnya tanpa mengesampingkan pembangunan lingkungannya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi sumber daya perairan dan kelautan yang melimpah. Wilayah Indonesia terdiri atas lima pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hampir dua per tiga wilayah Indonesia terdiri dari laut dan sisanya adalah pulau dengan luas daratannya sekitar 1,9 juta km². Wilayah daratan Indonesia terbagi menjadi 82.038 desa, 7.083 kecamatan, 514 kabupaten, dan 34 provinsi (lampiran Tabel 4.1).

Desa pesisir adalah desa yang memiliki batas langsung dengan laut atau desa yang memiliki pantai. Berdasarkan data Potensi Desa (PODES), dari 82.190 desa pada tahun 2014, 12.827 desa

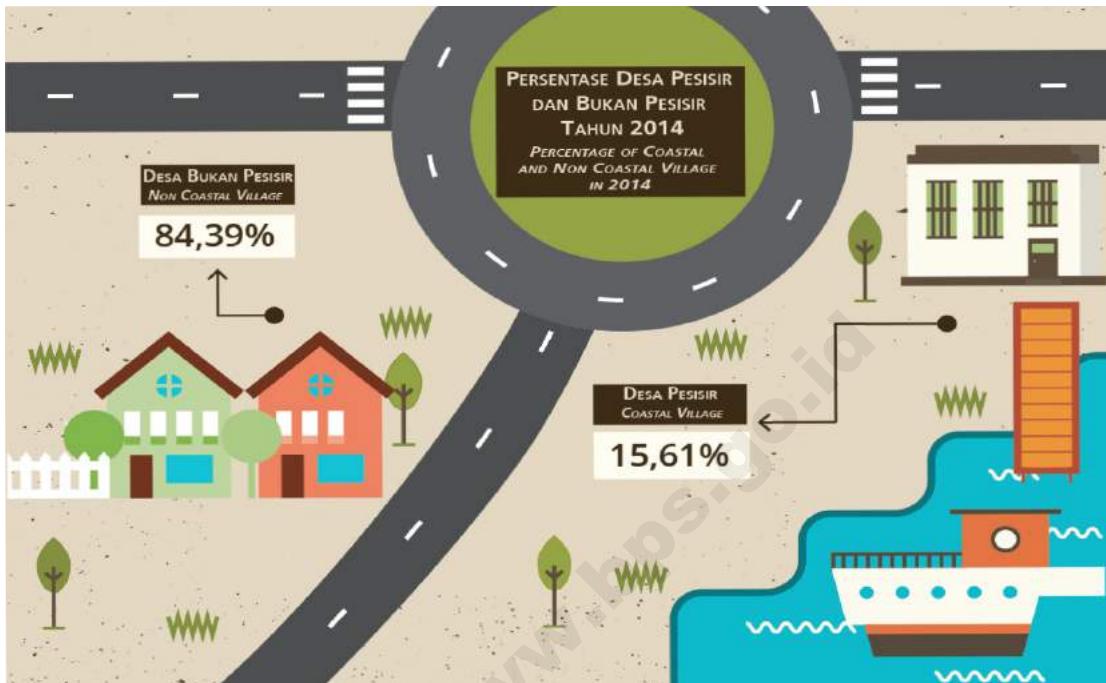
when viewed from the shoreline, the boundary parallel to the coastline and boundaries that are perpendicular to the coastline. According to Dahuri (2003), coastal zone boundary is perpendicular yet obtained the agreement. This is due to the different boundaries between one country to another.

The coastal area is defined as the meeting area between land and sea that influenced by both of the zones itself. As a transitional area of land and sea which has a unique ecosystem, the world has a concern for this area, particularly in the environment sector in the context of sustainable development. The reason, the region has the potential of marine resources and fisheries, as well as facilitate the trade between regions, islands, and continents. The enormous potential possessed in that region should be explored as well as possible for the community welfare without compromising the environment development.

Indonesia is the largest archipelago nation in the world that has a huge potential of aquatic and marine resources. The Indonesian territory had five major islands, that are Sumatera, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. Nearly two-thirds of Indonesia consists of marine and the rest are islands with the total of the land area approximately 1.9 million km². The land area of Indonesia is divided into 82,038 villages, 7,083 sub-district, 514 districts, and 34 provinces (Appendix of Table 4.1).

Coastal village is the village that has a direct border with ocean or villages that have a beach. Based on village potential data (PODES), from 82,190 villages in 2014, about 12,827 villages

Gambar 4.1. Persentase Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir, 2014
 Figure 4.1. Percentage of Coastal Village and Non-Coastal Village, 2014



Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik / Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

atau sekitar 15,61 persen merupakan desa pesisir (Gambar 4.1). Provinsi Kepulauan Riau mempunyai persentase desa pesisir paling banyak yaitu 86,99 persen. Provinsi dengan persentase desa pesisir terendah terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,90 persen (lampiran Tabel 4.2).

Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia pada tahun 2003 adalah sejumlah 17.504 pulau, dimana sebelumnya berjumlah 17.508 pulau. Sebanyak 7.870 pulau diantaranya telah memiliki nama dan sisanya 9.634 belum memiliki nama (Gambar 4.2). Berkurangnya jumlah pulau tersebut karena ada 4 pulau yang menjadi bagian dari wilayah negara

or 15.61 percent from the total villages is coastal villages (Figure 4.1). Province of Kepulauan Riau has the most percentage of the coastal villages as much as 86.99 percent. The province with the lowest percentage of the coastal village located in the province of Sumatera Selatan about 0.90 percent (Appendix of Table 4.2).

Ministry of Home Affairs stated that the number of Indonesia's islands in 2003 are 17,504 islands which the previous number are 17,508 islands. A total of 7,870 islands already had a name, and 9,634 do not have a name (Figure 4.2). Reduced number of these islands because there are 4 islands became a part of other countries, i.e. Sigitan Island and Sipadan Island became

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Gambar 4.2. Jumlah Pulau di Indonesia, 2003
Figure Number of Islands in Indonesia, 2003



Sumber / Source : Kemdagri dan tim dalam "Data Pulau di Wilayah NKRI", tahun 2003 / Ministry of Home Affairs and Team in "Data Pulau di Wilayah NKRI", 2003

lain yaitu Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan masuk ke wilayah negara Malaysia selanjutnya Pulau Kambing (Pulau Atauro) dan Pulau Yako masuk ke wilayah negara Timor Leste.

Pada tahun 2007, "Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi" pemerintah Indonesia telah melaporkan sejumlah 4.981 pulau ke PBB. Pada tahun 2014, jumlah pulau yang dilaporkan bertambah menjadi 13.449 pulau yang sudah diverifikasi dan mempunyai nama, dimana secara yuridis sejumlah pulau tersebut telah diakui oleh negara lain (lampiran Tabel 4.3).

Data tersebut berubah namun belum diverifikasi lebih lanjut. Berdasarkan data yang

a part of Malaysia, and then Kambing Island (Atauro Island) and Yako Island became a part of Timor Leste.

In 2007, "Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi" of the Indonesian government has reported a number of 4,981 islands to the United Nations. In 2014, the number of islands reported is increased to 13,449 islands that have been verified and have the name, which is legally a number of the islands has been recognized by another country (Appendix of Table 4.3).

The data is changed but further unverified. Based on data from Geospatial Information

dirilis Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2013, masih ada sekitar 3.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama atau direkam data koordinatnya. Jumlah resmi pulau yang sebelumnya berjumlah 13.466 pulau menjadi 17.000-an. Selain menjadi negara dengan pulau terbanyak, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada. Panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 km. Panjang ini bertambah dari sebelumnya sekitar 91.000 km. Namun panjang garis pantai ini bisa dimungkinkan bertambah lagi setelah BIG selesai memetakan lingkungan pantai Indonesia dengan skala lebih besar yakni 1:25.000 untuk Jawa Bali dan 1:50.000 untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dari sebelumnya hanya dengan skala 1:250.000 (Antaranews, 2015).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.508 gugusan pulau, tiga perbatasan darat, dan 10 perbatasan maritim dengan negara tetangga. Dari total pulau, terdapat 92 pulau kecil yang berhadapan langsung dengan negara tetangga (lampiran Tabel 4.4). 92 pulau kecil ini disebut Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). 92 pulau ini tersebar di 21 provinsi, dimana 31 pulau sudah berpenduduk sedangkan 61 pulau lainnya tidak berpenduduk (lampiran Tabel 4.5). Pulau-pulau terluar tersebut berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Dari 92 PPKT tersebut terdapat 12 pulau kecil diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengelolaan. 12 PPKT tersebut mempunyai nilai yang sangat strategis baik dari sisi pertahanan keamanan maupun kekayaan sumber daya alam. 12 tersebut PPKT terdiri dari, Pulau Rondo di

Agency (BIG) in 2013, there are around 3,000 islands in Indonesia which do not have a name or data recorded coordinates. The official number of islands that previously amounted 13,466 become 17,000 islands. In addition to being the country with the most islands, Indonesia also has the second longest coastline in the world after Canada. Indonesia coastline is 99,093 km. This length is increased from about 91,000 km. However, this coastline could be possible increased again after BIG finished mapping the coastal environment on a bigger scale which is 1:25,000 for the Jawa-Bali and 1:50,000 to Sumatera, Kalimantan, Sulawesi and Papua from the previous only with a scale of 1:250,000 (Antaranews, 2015).

As an archipelago, Indonesia has 17,508 islands, three land border, and 10 maritime borders with neighboring countries. From the total island, there are 92 small islands that have borderline with neighboring countries (Appendix of Table 4.4). These 92 small islands are called the Small Outer Islands (PPKT). This 92 PPKT are spread in 21 provinces, which 31 islands are inhabited, while 61 other islands are uninhabited (Appendix of Table 4.5). The small outer islands in Indonesia have borderline with 10 neighboring countries, there are Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, and Timor Leste.

From 92 PPKT, there are 12 small islands, of which are assigned the priority to do management. These 12 PPKT have strategic value both in terms of defense and security as well as a wealth of natural resources. These 12 PPKT consist of Rondo Island in Aceh, Berhala Island in Sumatera Utara, Nipa and Sekatung Island in Kepulauan

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Aceh, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore, dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan Pulau Batek di Nusa Tenggara Timur.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, pemerintah mengatur pengelolaan PPKT demi menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) dari pulau-pulau kecil tersebut batas kedaulatan dan yuridiksi perairan Indonesia ditentukan. Hal ini menjadikan 12 PPKT mengemban misi politis yang sangat penting bagi negara. 12 PPKT ini juga sangat strategis dalam aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam pengelolaan PPKT ini, antara lain : letak yang jauh dari pemerintahan ditambah dengan minimnya sarana transportasi dan komunikasi membuat PPKT terisolasi, belum adanya pengelolaan yang optimum dalam potensi ekonomi utama yaitu ekonomi kemaritiman, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, masih adanya ketergantungan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan negara tetangga, serta banyaknya kegiatan ilegal yang terjadi seperti *illegal fishing*, jalur *illegal logging*, *illegal trading*, dan *illegal trafficking*.

Dibutuhkan suatu kebijakan khusus dalam pengelolaan PPKT ini. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian secara terus

Riau, Marampit, Marore, and Miangas Island in Sulawesi Utara, Fani, Fanildo, and Brass Island in Papua, as well as Dana and Batek Island in Nusa Tenggara Timur.

Through Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 78 of 2005, the government arranges PPKT management in order to maintain the sovereignty of The Unitary State of The Republic Indonesia (NKRI). Based on Basis Point (TD) and Reference Point (TR) of small islands, the border of sovereignty and jurisdiction of the Indonesia waters is determined. It makes 12 PPKT carried very important politically mission for the country. 12 PPKT is also very strategic in the ideological aspects, economic, social, cultural, and security defense because of its location directly adjacent to the neighboring countries. But many problems that must be resolved in the management of PPKT, there are : the location is far from the government plus the lack of transport and communication make PPKT isolated, yet the existence of optimum management in main economic potential which is economic maritime, low level of education cause low levels of welfare, there are still dependence fulfilling for daily needs with neighboring countries, and the number of illegal activities such as illegal fishing, track illegal logging, illegal trading, and illegal trafficking.

It takes a special policy in the PPKT management. Utilizing the resources optimally and sustainably through planning, implementation, supervision and control continuously, the existence of PPKT can be maintained and will

menerus maka keberadaan PPKT dapat diperlakukan serta dapat menjaga keutuhan NKRI. Konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan PPKT dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara optimal dan lestari, pengembangan dan penataan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian peyebaran penduduk, peningkatan pertahanan dan keamanan, penataan peraturan perundang-undangan pengelolaan PPKT, mewujudkan penetapan dan pemeliharaan batas wilayah perbatasan, guna memantapkan stabilitas nasional untuk mewujudkan keutuhan NKRI. Kebijakan ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam strategi-strategi yang kemudian direalisasikan dalam berbagai langkah upaya-upaya di lapangan (Kemenhan, 2010).

be able to protect the integrity of the Republic of Indonesia. The concept of management policy and development of PPKT is to be conducted through the increased utilization of natural resources management and environmental services in an optimal and sustainable development and management of infrastructure and communications facilities were adequate, improving the quality of human resources and control of population distribution, an increase in defense and security, structuring legislation PPKT management, the realization of the establishment and maintenance of the boundary of the border, in order to consolidate national stability to realize the integrity of the Republic of Indonesia. This policy will then be translated into strategies and then implemented in various steps of the efforts in the field (Kemenhan, 2010).

4.2. Mangrove, Terumbu Karang, dan Padang Lamun.

Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamik dan unik, karena merupakan pertemuan tiga kekuatan yang berasal dari daratan, laut, dan udara. Daratan memberikan kekuatan dalam bentuk batuan pembentuk tebing pantai, lautan memberikan kekuatan dalam bentuk gelombang, pasang surut, dan arus, sedangkan kekuatan udara berupa angin yang menghasilkan gelombang dan arus sepanjang pantai, suhu udara, dan curah hujan (Soetikno (1993) dalam Vatria (2007)).

Indonesia mempunyai potensi kelautan dan pesisir yang kaya. Selain itu Indonesia meru-

4.2. Mangroves, Coral Reefs, and Seagrass

Ecosystems coastal are dynamic and unique ecosystems because it is the confluence of three forces that came from the land, sea, and air. Mainland provides force in the form of rock-forming coastal cliffs, oceans provide force in the form of waves, tides, and currents, while the air force in the form of wind generates waves and currents along the coast, air temperature, and precipitation (Soetikno (1993) in Vatria (2007)).

Indonesia has a rich potential of marine and coastal. In addition, Indonesia is an archi-

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

pakan negara kepulauan (*archipelagic state*), yang memiliki 17.508 gugusan pulau-pulau. Ekosistem pesisir mempunyai berbagai sumber daya hayati seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Hubungan antara hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun dengan lingkungan di pesisir akan menciptakan kondisi lingkungan yang sangat cocok bagi keberlangsungan kehidupan organisme akuatik. Ketiga ekosistem tersebut secara ekologis berperan sebagai penyeimbang stabilitas ekosistem pesisir dari pengaruh dari darat maupun laut (Thoha, 2007).

Ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun berperan dalam menopang tempat kehidupan biota laut apabila lingkungan perairan relatif stabil, kondusif, dan tidak terlalu fluktuatif. Ekosistem mangrove memegang kunci dalam perputaran nutrien. Sedangkan ekosistem padang lamun berperan utama dalam pendauran zat hara yang sangat diperlukan bagi kehidupan biota laut. Ekosistem terumbu karang berperan dalam sebagai habitat tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta tempat pemijahan bagi biota laut (Lugo dan Snedaker (1974) dalam Thoha, (2007)).

Luas padang lamun dan mangrove di seluruh pesisir Indonesia masing-masing mencapai 3,1 juta hektar dan 3,5 juta hektar. Luas padang lamun tersebut, diperkirakan dapat terserap 15 juta ton CO₂ per tahun. Sedangkan hutan mangrove mampu mengurangi 120 juta ton CO₂ (Kompas, 2015b). Sedangkan menurut Tony Wagey, peneliti oseanografi di Badan Penelitian Pengembangan Kelautan dan Perikanan, berdasarkan data hasil penelitian tahun 2014 tentang pengukuran kandungan karbon pesisir di hutan mangrove dan padang lamun di Indo-

pelago country, which has 17,508 islands. The coastal ecosystem has a variety of biological resources such as mangrove forests, coral reefs, and seagrass. The relationship between mangrove forests, coral reefs, and seagrass to the coastal environment will create environmental conditions suitable for the survival of aquatic organisms life. All three of these ecosystems are ecological acts as a counterweight to the stability of coastal ecosystems from the effects of both land and sea (Thoha, 2007).

Mangrove ecosystems, coral reefs and seagrass role in sustaining marine life if the aquatic environment is relatively stable, conducive and not too volatile. The mangrove ecosystem holds the rotation the key nutrients. While seagrass ecosystems play a major role in recycling nutrients are essential for marine life. Coral reef ecosystem role as a habitat for foraging, upbringing and growing, as well as spawning sites for marine biota (Lugo and Snedaker (1974) in Thoha (2007)).

Seagrass and mangrove across the Indonesia coastal area respectively reached 3.1 million hectares and 3.5 million hectares. The seagrass area is estimated to be absorbed by 15 million tons of CO₂ per year. While the mangrove forests can reduce 120 million tons of CO₂ (Kompas, 2015b). Meanwhile, according to Tony Wagey, researcher of oceanography at the National Research Development of the Marine and Fisheries, based on the data of the research in 2014 on the measurement of coastal carbon content of mangrove forests and seagrass in Indonesia reveal

nesia mengungkapkan bahwa laju kerusakan kawasan mangrove dan padang lamun di Indonesia mencapai 1 persen atau 618,94 km per tahun. Degradasi dan deforestasi melepas gas karbon setara dengan 33 juta ton CO₂ per tahun. Area padang lamun 30.000 km² menyimpan 269,4 juta ton karbon. Sedangkan area mangrove seluas 31,894 km² menyimpan 3.000 juta ton karbon. Sehingga total penyimpanan karbon di pesisir hampir 3.300 juta ton karbon. Daya simpan ini kira-kira sepertiga dari penyimpanan karbon di dunia (Kompas, 2015d).

Kerusakan kawasan pesisir menyebabkan karbon teroksidasi hingga terpapar ke atmosfer. Jumlah emisi gas karbon itu setara sekitar 4 persen emisi karbon yang dikaitkan dengan konversi lahan gambut di Indonesia. Oleh karena itu peranan karbon pesisir (*blue carbon*) harus diperhitungkan dalam skema mitigasi perubahan iklim. Program *blue carbon* bertujuan mengurangi emisi CO₂ di bumi dengan menjaga keberadaan hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, atau ekosistem pesisir. Vegetasi pesisir menyimpan karbon 100 kali lebih permanen dibandingkan hutan di daratan (Kompas, 2015a).

that the rate of destruction of mangrove and seagrass in Indonesia reached 1 percent or 618.94 km per year. Degradation and deforestation that release carbon gas equivalent to 33 million tons of CO₂ per year. Seagrass area of 30,000 km² saves 269.4 million tons of carbon. While the mangrove area covering 31,894 km² store 3,000 million tons of carbon. With that the total carbon storage in coastal nearly 3,300 million tons of carbon. The shelf life is approximately one-third of carbon storage in the world (Kompas, 2015d).

*Coastal areas damage caused by oxidized carbon to the atmosphere. A number of carbon emissions are equivalent to 4 percent of the carbon emissions associated with the conversion of peatlands in Indonesia. Therefore, the role of coastal carbon (*blue carbon*) should be taken into climate change mitigation schemes. The blue carbon program aimed at reducing CO₂ emissions on the earth by keeping the existence of mangrove forests, seagrass, kelp, or coastal ecosystems. Coastal vegetation store 100 times more carbon than forests on land permanently (Kompas, 2015a).*

4.2.1. Mangrove

Mangrove merupakan tumbuhan yang unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Mangrove pada umumnya mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (*pneumatofor*). Dengan sistem tersebut mangrove beradaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen bahkan anaerob (Wijayanti (2007) dalam Mulyadi dan Fitriani (2010)).

4.2.1. Mangroves

*Mangrove is a plant that is unique because of a combination of the characteristics of plants that live on land and sea. Mangrove generally has protruding root system is called the root of breath (*pneumatofor*). With this system, mangrove adapt to oxygen poor soil conditions even anaerobic (Wijayanti (2007) in Mulyadi and Fitriany (2010)). The mangrove ecosystem is near the beach, so it is often also referred to as coastal*

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Ekosistem mangrove berada di dekat pantai, sehingga mangrove sering juga disebut sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Dalam bahasa Indonesia mangrove lebih dikenal dengan istilah bakau, hal ini menunjukkan nama salah satu spesies penyusun hutan mangrove yaitu *Rhizophora sp.* Untuk menghindari bias dalam bidang keilmuan antara bakau dan mangrove, maka ditetapkan bahwa hutan mangrove merupakan istilah baku untuk menyebutkan hutan yang memiliki karakteristik hidup di daerah pantai (Mulyadi, dkk, 2010).

Mangrove mempunyai tiga macam fungsi, yaitu pertama fungsi fisik, dimana mangrove berfungsi menjaga garis pantai dari erosi dan abrasi, melindungi pantai dari gelombang dan angin kencang, serta sebagai kawasan penyangga terhadap intrusi atau rembesan air laut. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekonomi, hutan mangrove berfungsi sebagai penghasil kayu bakar, bahan bangunan, madu, obat-obatan, makanan dan minuman, tanin, dan lain-lain. Hutan mangrove juga bisa digunakan lahan rekreasi. Ketiga, fungsi dari mangrove adalah fungsi biologi yaitu sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah (*spawning ground*), serta tempat berkembang biak (*nursery ground*) ikan, udang, kerang, dan biota laut lainnya. Selain itu mangrove juga digunakan sebagai ekosistem satwa liar dan sumber plasma nutfah (Gunarto (2004) dalam Adrianto (2015)).

Kawasan tropis mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (Ligtvoet et al., 1996). Hampir tiga per empat kawasan pantai tropis diperkirakan merupakan mangrove (Chapman, 1976). Namun dengan adanya tekanan dari manusia luas mangrove menurun hampir setengah dari luas awal (Saenger et al., 1983).

*forests, tidal forests, or brackish. Mangrove in Indonesian better known as a bakau forest, it shows the name of one of the species composing the forest mangrove namely *Rhizophora sp.* To avoid bias in scientific fields between mangrove and bakau, it was determined that the mangrove forest is a standard term to mention the forest that has the characteristics of life in coastal areas (Mulyadi, et al, 2010).*

Mangrove has three kinds of functions, the first function is a physical function, which serves to keep the mangrove shoreline from erosion and abrasion, protect the shoreline from waves and strong winds, as well as a buffer zone against the intrusion or seepage of sea water. The second function is a function of economics, mangrove forests serve as a producer of firewood, building materials, honey, medicine, food and beverage, tannins, and others. Mangrove forests can also be used as a recreation area. Thirdly, the function of the mangrove is a biological function that is as feeding ground, spawning ground as well as nursery grounds for fish, shrimp, oysters, and other marine creatures. In addition, it is also used as mangrove ecosystems and wildlife germplasm resources (Gunarto (2004) in Adrianto (2015)).

The tropical region has the highest biodiversity in the world (Ligtvoet et al., 1996). Nearly three-quarters of the tropical coastal areas expected to be a mangrove (Chapman, 1976). However with the pressure of human mangrove area declined by almost half of the initial area (Saenger et al., 1983). Methods and references in

Metode dan referensi dalam menghitung luas mangrove sangat beragam, sehingga luasan yang dihasilkan juga berbeda. Spalding et.al (1997) menggunakan metode *remote sensing* menyatakan luas mangrove dunia adalah 18,1 juta hektar. Hal yang berbeda dinyatakan oleh Saenger et al. (1983), luas mangrove di dunia adalah sekitar 16,9 hektar.

Menurut FAO (1982), mangrove yang dimiliki Indonesia adalah yang terluas di dunia, dimana dari 15,9 juta hektar sekitar 27 persen atau 4,25 juta hektar ada di Indonesia (Adrianto, 2015). Sedangkan di Asia, 49 persen mangrove ada di Indonesia. Hampir di seluruh kepulauan Indonesia ditemukan mangrove. Namun, mangrove sebagian besar terdapat di Provinsi Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sumatera Selatan (Purnobasuki, 2011).

Berdasarkan Studi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan pada 1999 menyatakan bahwa luas mangrove di Indonesia adalah 9,2 juta hektar yang terdiri dari 3,7 juta hektar di kawasan hutan dan 5,5 juta hektar di luar kawasan hutan. Dari data tersebut 43 persen (1,6 juta hektar) mangrove di kawasan hutan dan 63 persen (3,7 juta hektar) di luar kawasan hutan rusak. Kerusakan tersebut diakibatkan eksplorasi, alih fungsi, dan pencemaran (Kompas, 2015d).

Terdapat dua faktor yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove yaitu faktor aktivitas manusia dan faktor alam. Menurut Adrianto (2015), menyusutnya luas mangrove diakibatkan adanya reklamasi untuk pembangunan tambak udang, ikan, dan garam (Terchunian et al. (1986) dan Primavera (1993)); over eksplorasi hutan (Hussein, (1995) dan Semesi (1998)); aktivitas

calculating the mangrove area are very diverse, so the result in different extents. Spalding et.al (1997) using remote sensing methods declared that mangrove area in the world was 18.1 million hectares. Different things stated by Saenger et al. (1983), the mangrove area in the world is approximately 16.9 hectares.

According to FAO (1982), mangrove in Indonesia is the largest in the world, which 15.9 million hectares in the world for about 27 percent or 4.25 million hectares in Indonesia (Adrianto, 2015). While in Asia, 49 percent of mangrove in Indonesia. Almost across the Indonesian archipelago discovered mangrove. However, mangroves are mostly found in Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau and Sumatera Selatan Province (Purnobasuki, 2011).

Based on research of Faculty of Forestry, Institut Pertanian Bogor (IPB) in collaboration with the Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry, Ministry of Forestry in 1999, stated that 9.2 million hectares mangrove area in Indonesia comprising 3.7 million hectares of forest area and 5.5 million hectares outside forest areas. From the data, 43 percent of mangrove forest area (1.6 million hectares) and 63 percent of outside forest area (3.7 million hectares) damaged. The damage caused by the exploitation, conversion, and pollution (Kompas, 2015d).

There are two factors that cause mangrove forests damage that is human activities and natural factors. According Adrianto (2015), the shrinking area of mangroves due to their reclamation for the construction of shrimp, fish and salt ponds (Terchunian et al. (1986) and Primavera (1993)); over-exploitation of forests (Hussein, (1995) and Semesi (1998)); the activities

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

pertambangan dan pertanian, adanya pencemaran, pembendungan sungai, serta bencana alam (Lewis, 1990); tumpahan minyak (Ellison dan Farnsworth, 1996); dan konversi mangrove menjadi hutan jenis lainnya (Machfud, 1990).

Diperlukan usaha untuk mengatasi penyusutan luas mangrove ini, diantaranya adalah adanya upaya konservasi, manajemen, dan restorasi mangrove (Manassrisuksi et al. (2001) dalam Adrianto (2015)). Pembentukan kawasan konservasi dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar yaitu dengan menjadikan mangrove sebagai sumber bahan baku kehidupan sehari-hari, sarana rekreasi, menjadi identitas budaya dan spiritual, serta adanya jasa ekologi untuk ekosistem sekitarnya (Miller (1999) dalam Adrianto (2015)).

Kerusakan Mangrove

Aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan mangrove adalah pembukaan lahan untuk tambak ikan, garam, dan udang, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perindustrian, serta perambahan mangrove secara berlebihan misalnya untuk pembuatan arang, kayu bakar dan bahan bangunan (Mulyadi, dkk, 2010).

Menurut Purnobasuki (2011), ancaman utama kerusakan mangrove dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman yang secara langsung mengakibatkan kerusakan mangrove adalah adanya peningkatan pembangunan di wilayah pesisir misalnya pemanfaatan untuk budidaya perairan, pertanian, industri, infrastruktur pantai termasuk pelabuhan, serta pembangunan tempat perdagangan dan perumahan. Sedangkan ancaman secara tidak langsung berasal dari luar yang disebabkan

of mining and agriculture, pollution, rivers damming, and also natural disasters (Lewis, 1990); oil spills (Ellison and Farnsworth, 1996); and the conversion of mangroves into other types of forest (Machfud, 1990).

The effort is needed to overcome this depreciation of mangrove area, which is the conservation, management and restoration of mangrove (Manassrisuksi et al., (2001) in Adrianto (2015)). Establishment of protected areas can improve the local economy which is to make the mangrove as a source of raw material everyday life, recreational facilities, cultural and spiritual identity, as well as their ecological services for the ecosystem around it (Miller (1999) in Adrianto (2015)).

Damage to Mangroves

Human activity is causing mangrove damage are clearing for pond fish, salt, and shrimp, settlement, agriculture, mining, and industry, as well as the encroachment of mangrove excessively for example for the manufacture of charcoal, firewood and building materials (Mulyadi, et al, 2010).

According to Purnobasuki (2011), the main threat to mangrove damage can occur directly or indirectly. Directly threats that resulted in mangrove damage is the increasing development in coastal areas, for example, the use of aquaculture, agriculture, industry, coastal infrastructure including ports, as well as the construction of commercial and residential. While the indirect threat is derived from outside caused by the activities that are far away from the mangrove habitat. E.g haphazard watershed management,

oleh aktivitas yang terdapat jauh dari habitat mangrove. Misalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang serampangan, pencemaran hasil industri dan domestik atau rumah tangga yang masuk dalam daur hidrologi, erosi tanah, dan sedimentasi yang tinggi. Aktivitas tersebut akan menyebabkan kematian massal (*dieback*) mangrove. Lentisel mangrove akan tersumbat polusi yang berasal dari limbah cair dan padat sehingga akan menghambat pertumbuhan mangrove.

Pemanfaatan mangrove secara lestari akan mengurangi kerusakan mangrove. Terdapat lima tindakan dalam pemanfaatan mangrove secara lestari, diantaranya : tambak tumpang-sari, yaitu dengan mengkombinasikan tambak dengan penanaman mangrove; hutan rakyat, yaitu pengelolaan hutan mangrove dengan berkelanjutan dengan siklus tebang 15-30 tahun atau sesuai dengan tujuan penanaman; budaya memanfaatkan mangrove untuk mendapatkan hasil selain kayu; *silvofishery* (mina hutan); dan bentuk kombinasi pemanfaatan mangrove yang simultan (Purnobasuki, 2011).

Hutan mangrove tersebar di Indonesia pada jarak 1-10 km dari garis pantai. Degradasi terjadi karena konversi lahan mangrove menjadi tambak, daerah wisata, kawasan pabrik, dan permukiman. Kerusakan pesisir bukan hanya berasal dari akumulasi gas karbon di atmosfer dan dampak perubahan iklim, namun juga berasal dari abrasi. Untuk menekan laju deforestasi, publik perlu diberi edukasi fungsi ekosistem pesisir sebagai penyangga kualitas perairan.

Pulau Papua memiliki hutan mangrove terluas di Indonesia, yaitu sekitar 1,64 juta hektar atau 41,04 persen dari luas hutan mangrove di Indonesia. Sedangkan gabungan Pulau Bali dan

*industrial and domestic or household pollution which entered in the hydrological cycle, soil erosion, and high sedimentation. Those activities will cause mass deaths (*dieback*) of mangrove. Mangrove lenticels will blockage by pollution of liquid and solid wastes that inhibit the growth of mangrove.*

*The utilization of mangrove sustainably will reduce mangrove damage. There are five actions in sustainable mangrove utilization, which are: pond polyculture, with combine pond with mangrove planting; public forests, the sustainable management mangrove forests with cutting cycles of 15-30 years or in accordance with the purpose of planting; cultural utilize mangrove to get product other than wood; silvofishery (*wanamina*); and combination of simultaneous utilization of mangrove (Purnobasuki, 2011).*

The mangrove forests are spread in Indonesia at a distance of 1-10 km from the coastline. Degradation occurs because of land conversion of mangroves into fishponds, tourist areas, factory area, and settlements. Coastal damage not only from the accumulated carbon in the atmosphere and the impact of climate change but also from abrasion. To reduce deforestation, the public needs to be educated coastal ecosystem function as a buffer water quality.

Papua Island has the largest mangroves forest in Indonesia which reached about 1.64 million hectares or 41.04 percent of the total mangroves area in Indonesia. Meanwhile, Bali

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Nusa Tenggara memiliki luas hutan mangrove paling kecil yaitu hanya 0,98 persen dari luas hutan mangrove di Indonesia. Sebaran hutan mangrove menurut provinsi dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.6.

Berdasarkan data dari dinas kelautan dan perikanan tiap provinsi di tahun 2014, jika dilihat menurut kondisinya, dari 4,42 juta hektar hutan mangrove yang sudah diklasifikasikan sekitar 37,03 persen kondisinya baik, 9,3 persen kondisi sedang, dan 5,62 persen kondisinya rusak. Sementara sebanyak 48,05 persen belum terklasifikasi (lampiran Tabel 4.6). Dari data tersebut terlihat bahwa sekitar 23,46 persen mangrove dalam kondisi yang tidak baik.

Rehabilitasi hutan mangrove, rawa, dan gambut dilakukan hampir di semua provinsi setiap tahun. Namun pada tahun 2014 tidak ada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan. Berdasarkan data statistik kehutanan, luas rehabilitasi hutan mangrove, rawa, dan gambut di Indonesia mencapai 11,4 ribu hektar pada tahun 2013. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang seluas 8,87 ribu hektar. Provinsi Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua merupakan provinsi yang melakukan rehabilitasi mangrove, rawa, dan gambut paling luas, yaitu mencapai seribu hektar atau 9 persen dari total luas rehabilitasi hutan mangrove di Indonesia (lampiran Tabel 4.7).

4.2.2. Terumbu Karang

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*. Hewan karang bentuknya aneh, menyerupai batu

and Nusa Tenggara Island has the smallest of mangroves area about 0.98 percent of the total mangroves area in Indonesia. Distribution of mangrove forests by province can be seen in Appendix of Table 4.6.

Based on data from the department of marine and fisheries by province, in terms of the conditions in 2014 show that from 4.42 million hectares of mangrove forests that have been classified, about 37.03 percent in good condition, 9.3 percent in moderate condition, and 5.62 percent in damaged condition. While as many as 48.05 percent is not yet classifiable (Appendix of Table 4.6). The data showed that approximately 23.46 percent of mangrove in damage condition.

The rehabilitation of mangroves forests, swamp, and peat is almost done in all provinces annually. However, in 2014 there were no activities. Based on forestry statistics data, the area of mangroves and peat swamp forest rehabilitation in Indonesia reached 11.4 thousand hectares in 2013. It experience increased compared the previous year which rehabilitates 8.87 thousand hectares. Province of Kalimantan Barat, Papua Barat, and Papua is the province with the most extensive mangrove forests, swamp, and peat rehabilitation program that reached the total area of one thousand hectares or 9 percent from the total rehabilitation mangrove forests area in Indonesia (Appendix of Table 4.7).

4.2.2. Coral Reefs

Coral reefs are a bunch of coral animals which symbiosis with a type of algae called *zooxanthellae*. Coral animals have peculiar shape, resembling stone and have color and various

dan mempunyai warna dan bentuk beraneka rupa. Ada dua jenis terumbu karang yaitu terumbu karang keras (*hard coral*) dan terumbu karang lunak (*soft coral*). Terumbu karang keras (seperti *brain coral* dan *elkhorn coral*) merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Terumbu karang lunak (seperti *sea fingers* dan *sea whips*) tidak membentuk karang.

Menurut LIPI (1983) dalam Hutomo (1996) menyatakan bahwa terumbu karang hanya dapat hidup pada perairan laut jernih dan dangkal (kurang dari 40 meter), dengan suhu air laut 25–28 °C, mempunyai salinitas 25 ‰, terdapat arus, dan terdapat cahaya matahari. Kondisi lingkungan ini menggambarkan perairan tropis.

Indonesia dengan iklim tropisnya merupakan ekosistem yang sangat baik bagi pertumbuhan terumbu karang. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki terumbu karang terluas dan terbanyak jenisnya di dunia. Luas terumbu karang di perairan laut Indonesia lebih dari 75.000 km² atau sebesar 14 persen dari luas total terumbu karang dunia. (Dahuri (2003) dalam Arini (2013)). Proses terbentuknya terumbu karang membutuhkan waktu jutaan tahun. Terumbu karang di Indonesia diperkirakan terbentuk sejak 450 tahun yang lalu. Keragaman jenis terumbu karang di Indonesia cukup tinggi. Dari total 800 jenis terumbu karang di dunia, 60 persen berada di Indonesia. Namun sampai saat ini baru teridentifikasi 480 jenis terumbu karang. Dari jenis terumbu karang tersebut tersebut, 60 persen berada di bagian timur Indonesia. (Arini, 2013).

Kawasan perairan Asia Tenggara mempunyai terumbu karang sekitar 100.000 km² atau sebesar 34 persen dari luas total terumbu karang dunia. Sedangkan potensi jenis terumbu karang

shape. There are two types of coral reefs i.e. hard coral and soft coral. Hard coral (like brain coral and elkhorn coral) is hard limestone coral that forms coral reefs. Soft coral such sea fingers and sea whips can not form corals.

According to LIPI (1983) in Hutomo (1996) states that the coral reef can only live in the crystal clear sea and shallow waters (less than 40 meters), with the temperature of sea water about 25–28 °C, has a salinity of 25 ‰, has current and sunlight. These environmental conditions describe tropical waters.

Indonesia with tropical climate ecosystems that are very suitable for the growth of coral reefs. This makes Indonesia as the country with the largest coral reef and variety in the world. Coral reefs in the marine waters of Indonesia more than 75,000 km² or 14 percent of the total world's coral reefs. (Dahuri (2003) in Arini (2013)). The process of formation of coral reefs took millions of years. Coral reefs in Indonesia were formed since 450 years ago. The diversity of coral reefs in Indonesia is quite high. From 800 species of coral reefs in the world, 60 percent are in Indonesia. However, until now only 480 species of coral reefs identified, which 60 percent were in the eastern part of Indonesia. (Arini, 2013).

Region Southeast Asian waters have coral reefs around 100,000 km² or 34 percent of the total world's coral reefs. While the potential of coral reefs from 800 species of them, 600 species

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

dari 800 jenis terdapat 600 jenis ditemukan di kawasan perairan Asia Tenggara. Kawasan ini juga merupakan pusat keragaman ikan karang, moluska, dan krustacea, memiliki 51 dari 70 jenis mangrove dan 23 dari 50 jenis lamun (Burke, Selig, dan Spalding, 2002).

Nilai ekonomi yang terhubungan dengan terumbu karang sangat besar. Terumbu karang memegang peranan penting dalam persediaan makanan, tenaga kerja, pariwisata, penelitian farmasi, dan perlindungan pantai. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari terumbu karang Indonesia mencapai US\$ 1,6 miliar per tahun (Burke, Selig, dan Spalding, 2002).

Kerusakan Terumbu Karang

Dalam laporan *Reviving the Ocean Economy: The Case for Action 2015* oleh Ove Hoegh-Guldberg memaparkan bahwa laut sebagai sumber penggerak ekonomi dunia mempunyai nilai aset kekayaan mencapai US\$ 24 trilyun. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan 10 negara dengan tingkat ekonomi tertinggi di dunia akan menempati urutan ketujuh dengan nilai sumber daya dan jasa mencapai US\$ 2,5 trilyun/tahun. Namun eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya laut berakibat menurunnya kondisi laut. Kondisi kesehatan laut menurun yang diakibatkan perubahan iklim di dunia. Peningkatan iklim akan meningkatkan keasaman air laut dimana terumbu karang, sebagai penyedia makanan, pekerjaan, dan melindungi ratusan juta manusia dari badi akan punah pada tahun 2050 (Media Indonesia, 2015).

Laporan yang diliris oleh World Resources Institutes 2002 mengenai kondisi terumbu karang di Asia Tenggara menyebutkan 64 persen

are found in Southeast Asia. This area is also a center of diversity of reef fish, mollusks, and crustaceans have 51 of 70 species of mangrove and 23 of 50 species of seagrasses (Burke, Selig, and Spalding, 2002).

The economic value that is connected with coral reefs extremely big. Coral reefs play an important role in the food supply, labor, tourism, pharmaceutical research, and coastal protection. The economic benefits generated from coral reefs in Indonesia reached US\$ 1.6 billion per year (Burke, Selig, and Spalding, 2002).

Damage to Coral Reefs

In a report Reviving the Ocean Economy: The Case for Action in 2015 by Ove Hoegh-Guldberg explained that the sea as a driving source of the world economy has a value of property assets reach US\$ 24 trillion. This value if compared with 10 highest economy levels countries in the world would rank 7th with a value of resources and services reached US\$ 2.5 trillion/year. However, over-exploitation of marine resources resulting from a decline in sea conditions. The health condition of the sea decreases as a result of climate change in the world. Climate improvement will increase the acidity of sea water, where coral reefs, as a provider of food, jobs, and protect hundreds of millions of people from the storm will be extinct by 2050 (Media Indonesia, 2015).

A report by the World Resources Institutes which release in 2002 about the condition of coral reefs in Southeast Asia said 64 percent of

terumbu karang di Asia Tenggara terancam oleh penangkapan ikan secara berlebihan dan 56 persen sisanya terancam oleh teknik penangkapan ikan yang merusak. Aktivitas yang berhubungan dengan pembangunan wilayah pesisir seperti pengeringan, penimbunan, pembangunan pasir dan karang, pendirian bangunan, dan pembuangan limbah mengancam 25 persen terumbu karang di kawasan Asia Tenggara. 20 persen ancaman berasal dari sedimen dan pencemaran yang berasal dari penebangan hutan dan aktivitas pertanian. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman bagi terumbu karang di kawasan Asia Tenggara, di mana peningkatan suhu permukaan air laut menyebabkan terjadinya pemutihan karang (*coral bleaching*). Akibat peristiwa *El-Nino Southern Oscillation* (ENSO) pada tahun 1997-1997 menyebabkan 18 persen terumbu karang di kawasan Asia Tenggara rusak atau hancur (Burke, Selig, dan Spalding, 2002).

Terumbu karang yang berada dalam kondisi terancam di kawasan Asia Tenggara lebih dari 90 persen berada di Kamboja, Singapura, Taiwan, Filipina, Vietnam, Cina, dan Kepulauan Spratly, serta lebih dari 85 persen berada di Malaysia dan Indonesia. Indonesia dan Filipina yang memiliki 77 persen dari total terumbu karang di kawasan Asia Tenggara, 80 persen diantaranya terancam (Burke, Selig, dan Spalding, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa di 1.259 lokasi kawasan terumbu karang yang ada di Indonesia terdapat sekitar 30,02 persen dalam kondisi kurang (tutupan karang hidup 0-24 persen), 37,97 persen mengalami kerusakan dengan kondisi cukup (tutupan karang hidup 25-49 persen), 27,01 persen masih dalam kondisi baik

coral reefs in Southeast Asia are threatened by overfishing, and 56 percent were threatened by destructive fishing techniques. Activities related to the development of coastal areas such as dredging, landfill, mining of sand and coral, construction of buildings, and waste disposal threatens 25 percent of coral reefs in Southeast Asia. 20 percent of the threats come from sediment and pollution from logging and agricultural activities. Global climate change is also a threat to coral reefs in Southeast Asia, where the increase in sea surface temperatures causes coral bleaching. As a result of the events of El-Nino Southern Oscillation (ENSO) in the year 1997 to 1997 led to 18 percent of coral reefs in the region were damaged or destroyed (Burke, Selig, and Spalding, 2002).

Coral reefs in Southeast Asia are under threat more than 90 percent were in Kamboja, Singapore, Taiwan, Philippines, Vietnam, China, and the Spratly Islands, as well as more than 85 percent in Malaysia and Indonesia. Indonesia and Philippines, which has 77 percent of coral reefs in Southeast Asia, 80 percent of which are threatened condition (Burke, Selig, and Spalding, 2002).

Based on studies of Oceanographic Research Center of Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in 1,259 coral reef locations of Indonesia in 2015 showed that about 30.02 percent of coral reefs in damaged condition (the living surface of coral reef around 0-24 percent), 37.97 percent in moderate condition (the living surface of coral reef around 25-49 percent), 27.01 percent in good condition (the living surface of coral reef

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

(tutupan karang hidup 50-74 persen), dan hanya tinggal 5,00 persen dalam kondisi sangat baik (tutupan karang hidup 75-100 persen). Kerusakan terumbu karang paling parah terjadi di Indonesia bagian timur yaitu 40,29 persen dalam kondisi kurang (lampiran Tabel 4.8).

Upaya pemulihan perlu dilakukan untuk menanggulangi kerusakan lebih besar. Menurut Suharsono, peneliti dari LIPI, Indonesia pada tahun 1993 sempat kehilangan 80 persen populasi terumbu karang yang diakibatkan penggunaan bahan peledak dan racun sianida oleh nelayan untuk mencari ikan. Namun angka ini menurun pada tahun 2001 menjadi 40 persen. Untuk mengantisipasi kerusakan lebih besar oleh tindakan para nelayan ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun undang-undang ini tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku nelayan. Di Indonesia saat ini terdapat 569 spesies terumbu karang. Jumlah ini berkurang, di mana sebelumnya tercatat 590 spesies. Melalui penanaman bibit terumbu karang dapat dipulihkan kondisinya. Pembibitan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam dua sampai tiga tahun bibit terumbu karang dapat tumbuh dengan alami. Namun hal ini akan berhasil jika dibarengi dengan perubahan perilaku nelayan dengan tidak menggunakan peledak dan racun sianida dalam menangkap ikan. Perubahan iklim juga membawa pengaruh dalam pembibitan terumbu karang ini. Indonesia sebagai negara tropis memiliki suhu laut yang relatif stabil dibandingkan dengan negara subtropis. Di mana perubahan suhu laut sekecil apapun akan mempengaruhi ekosistem laut termasuk terumbu karang (Kompas, 2015e).

around 50-74 percent), and only 5.00 percent in very good condition (the living surface of coral reef around 75-100 percent). The most severe damaged of coral reefs had happened in eastern Indonesia, 40.29 percent in damaged condition (Appendix of Table 4.8).

The recovery effort should be made to overcome the greater damage. According to Suharsono, researchers from LIPI, Indonesia in 1993 had lost 80 percent of coral reefs resulting from the use of explosives and cyanide by fishermen to catch fish. However, this figure declined in 2001 to 40 percent. To anticipating greater damage by the actions of the fishermen, the government issued Law Number 31 of 2004 on Fisheries. However, this law will not have a significant effect if it is not accompanied by changes in the behavior of fishermen. In Indonesia, there are currently 569 species of coral. This amount is reduced, which were previously recorded 590 species. Through the planting of coral reefs can be restored condition. Nurseries do not require a long time. In two to three years seedlings coral reefs can grow naturally. But this will be successful if accompanied by changes in the behavior of fishermen by not using explosives and cyanide to catch fish. Climate change also brings an influence in this coral reefs nursery. Indonesia as a tropical country has ocean temperatures relatively stable compared with subtropics country. Where the slightest change ocean temperatures will affect marine ecosystems including coral reefs (Kompas, 2015e).

4.2.3. Padang Lamun

Lamun merupakan tumbuhan berbunga (*angiospermae*) yang terdiri dari daun dan seludang, batang menjalar yang biasanya disebut rimpang (*rhizome*), dan akar yang tumbuh pada bagian rimpang yang hidup terendam baik di perairan laut dangkal dan estuari. Terdapat 13 jenis lamun yang tersebar di hampir seluruh perairan Indonesia, dengan perkiraan luas 30.000 km² (Nienhuis (1993) dan Kuo (2007) dalam Rahmawati, Irawan, Supriyadi, dan Azkab (2014)).

Satu atau beberapa jenis lamun pada umumnya membentuk hamparan luas yang disebut komunitas lamun. Komunitas ini berinteraksi dengan biota yang hidup di dalamnya dan dengan lingkungan sekitar membentuk ekosistem padang lamun. Ekosistem ini umumnya berada pada daerah pesisir pantai dengan kedalaman kurang dari 5 m saat pasang. Terdapat pula beberapa jenis lamun yang dapat tumbuh lebih dari kedalaman 5-90 m selama kondisi lingkungan mendukung pertumbuhannya. (Rahmawati, dkk (2014)).

Di Indonesia, ekosistem padang lamun umumnya termasuk padang vegetasi campuran. Ekosistem ini sering dijumpai di daerah pasang surut bawah (*inner intertidal*) dan subtidal atas (*upper subtidal*). Secara horizontal dilihat dari pola zonasi, ekosistem ini terletak di antara ekosistem mangrove dan terumbu karang. Ekosistem padang lamun mempunyai hubungan dan interaksi sangat erat serta merupakan mata rantai (*link*) dan penyanga (*buffer*) dengan ekosistem mangrove di pantai dan terumbu karang ke arah laut (Harpiansyah, Pratomo, dan Yandri (2014)).

Padang lamun di dunia mengalami penurunan luas sejak awal abad 20. Luas padang la-

4.2.3. Seagrass

Seagrass is flowering plants (angiosperms) consisting of leaf and sheath, spreading stems called rhizome, and the roots that grow on the rhizome that lives submerged in the waters of shallow marine and estuarine. There are 13 species of seagrasses scattered in almost all of Indonesia waters, with an estimated area of 30,000 km² (Nienhuis (1993) and Kuo (2007) in Rahmawati, Irawan, Supriyadi, and Azkab (2014)).

One or multiple species of seagrasses, in general, form a vast expanse called seagrass communities. This community interacts with biota that lives in it and with the surrounding environment forming seagrass ecosystems. These ecosystems are generally located in a coastal area with a depth of less than 5 m at high tide. There are also several types of sea grass that can grow with a depth more than 5-90 m during the environmental conditions support its growth. (Rahmawati, et al (2014)).

In Indonesia, seagrass ecosystems generally include a mix of meadow vegetation. This ecosystem is often found in inner intertidal and upper subtidal areas. Horizontally seen from the pattern of zonation, this ecosystem lies between mangrove and coral reef ecosystems. Seagrass ecosystems have a very close relationship and interaction as well as a link and buffer with mangrove ecosystems in the coastal and coral reef towards the sea (Harpiansyah, Pratomo, and Yandri (2014)).

Seagrass in the world has decreased since the early 20th century. Seagrass area before 1940

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

mun sebelum tahun 1940 di seluruh dunia mengalami penurunan sebesar 0,9 persen per tahun. Lalu pada tahun 1990-an penurunan meningkat sebesar 7 persen per tahun. Secara global, sebaran padang lamun telah hilang sekitar 29 persen sejak abad 19. Penyebab utama adalah penurunan kecerahan air baik yang berasal dari peningkatan kekeruhan air maupun kenaikan masuknya zat hara. Peralihan fungsi wilayah pesisir menjadi kawasan industri, pemampatan (deposition) udara, dan banjir dari daratan adalah penyebab hilangnya padang lamun pada daerah sub tropis. Sedangkan di daerah tropis, penyebab hilangnya padang lamun diakibatkan oleh peningkatan masuknya sedimen ke perairan pesisir akibat pembalakan hutan di daratan dan penebangan mangrove, serta pengaruh langsung dari kegiatan budidaya perikanan. Di Indonesia, penurunan luas padang lamun diakibatkan dua faktor. Pertama adalah faktor alami yaitu gelombang dan arus yang kuat, badai, gempa bumi, dan tsunami. Sedangkan yang kedua adalah faktor buatan yang berasal dari aktivitas manusia terutama di lingkungan pesisir seperti reklamasi pantai, pengerukan, penambangan pasir, dan pencemaran (Rahmawati, dkk (2014)).

Laut juga ikut berperan sebagai pengikat karbon (*blue carbon*) sama seperti peranan hutan daratan (*green carbon*). Di seluruh laut terdapat tumbuhan yang dapat menyerap karbon dari atmosfer lewat fotosintesis, baik berupa plankton yang mikroskopis maupun yang berupa tumbuhan yang hanya hidup di pantai seperti di hutan mangrove, padang lamun, ataupun rawa payau (*salt marsh*). Meskipun tumbuhan pantai (mangrove, padang lamun, dan rawa payau) luasnya kurang dari setengah persen dari luas seluruh laut, ketiganya dapat mengunci lebih

worldwide decreased by 0.9 percent per year. Then in the 1990s the reduction increased by 7 percent per year. Globally, the seagrass area has been lost around 29 percent since the 19th century. The main cause is decreasing in water transparency, both derived from the increase in turbidity of the water and the increase in the influx of nutrients. Transition function of coastal areas into industrial zones, deposition of air, and the flooding of the land is the cause of the loss of seagrass in the sub-tropical. While in tropical regions, the loss of seagrass caused by the increased influx of sediments into coastal waters due to deforestation in the land and harvesting of mangroves, as well as the direct effects of aquaculture activities. In Indonesia, decreasing of seagrass cause two factors. Firsts are natural factors, there are waves and strong currents, storms, earthquakes, and tsunami. While the second is man-made factors derived from human activities, especially in coastal environments such as coastal reclamation, dredging, sand mining, and pollution (Rahmawati, et al. (2014)).

*Sea also acts as a binder of carbon (*blue carbon*) which has the same role as the forest land (*green carbon*). Across the sea, there were plants that can absorb carbon from the atmosphere through photosynthesis, either in the form of microscopic plankton that form and plants that live on the coast like mangrove forests, seagrass, or salt marsh. Although coastal vegetation (mangroves, seagrass, and salt marsh) area is less than half a percent of the whole sea, it can lock more than half of carbon produced by marine ecosystem into the seabed sediment.*

dari separuh karbon laut ke sedimen dasar laut. Keseluruhan tumbuhan mangrove, padang lamun, dan rawa payau dapat mengikat 235-450 juta ton karbon per tahun, setara hampir setengah dari emisi karbon lewat transportasi di seluruh dunia (LIPI, 2010). Data mengenai luas dan kondisi padang lamun tahun 2014 disajikan dalam lampiran Tabel 4.10.

Overall mangroves, seagrass, and salt marshes bound the total number of 235-450 million tons of carbon per year or equivalent to nearly half of carbon emissions produced by transportation sector in the world (LIPI, 2010). The data of area and condition of seagrass in 2014 were presented in Appendix of Table 4.10.

4.3. Potensi dan Produksi Perikanan

4.3.1. Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap secara global pada 2014 adalah 93,4 juta ton, dimana 81,5 juta ton berasal dari perikanan tangkap di perairan laut dan 11,9 juta ton dari perairan umum (Tabel 1). Untuk produksi perikanan tangkap di perairan laut, China menduduki posisi teratas diikuti oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Rusia. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap di perairan umum posisi pertama juga diduduki oleh China, sementara Indonesia berada pada urutan ke-7 (FAO, 2016).

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas perairan sekitar tiga per empat dari seluruh luas wilayah, perairan laut Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,5 juta ton per tahun yang tersebar di sebelas WPP-RI. Potensi tersebut terdiri dari ikan pelagis besar 1,15 juta ton, ikan pelagis kecil 3,65 juta ton, ikan demersal 1,45 juta ton, ikan karang 145 ribu ton, udang penaeid 98,3 ribu ton, ikan karang konsumsi 145,3 ribu ton, lobster 4,8 ribu ton, dan cumi-cumi 28,3 ton. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPP-RI menyatakan bahwa sebanyak 72,44 persen sumber 92 dari 127 spesies

4.3. Potential and Production of Fisheries

4.3.1. Capture Fisheries

Global total capture fishery production in 2014 was 93.4 million tons, which 81.5 million tons from marine waters and 11.9 million tons from inland open waters (Table 1). For capture fishery production from marine waters, China is the major producer followed by Indonesia, the United States of America, and the Russian Federation. Meanwhile, for inland open waters, the major producer for capture fishery production is also China, while Indonesia was ranked 7th (FAO, 2016).

As the largest archipelago country with an area of ocean around three-fourths from the total area, Indonesia marine waters has the sustainable fish resources potential of 6.5 million tons per year which spread in eleven WPP-RI. The potential consists of 1.15 million tons of large pelagic fish, 3.65 million tons of small pelagic fish, 1.45 million tons of demersal fish, 145 thousand tons of reef fish, 98.3 thousand tons of penaeid shrimp, 145.3 thousand tons of reef fish consumption, 4.8 thousand tons of lobster, and 28.3 thousand tons of squid. Estimated potential of fish resources in WPP-RI stated that a total of 72.44

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

di 11 WPP-RI telah dieksplorasi maksimal (*fully exploited*) atau mengalami tangkapan berlebih (*over fishing*). Tersisa 27,56 persen atau 35 spesies dan kelompok spesies ikan yang masih bisa dimanfaatkan dengan status tingkat eksplorasi sedang (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 tahun 2011). Sedangkan untuk potensi perikanan tangkap di perairan umum Indonesia diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun dengan total luas sekitar 54 juta hektar yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2012).

percent of fish resources of Indonesia, which is 92 of 127 fish species and groups of species in 11 WPP-RI has fully exploited or overfishing. There are remaining 27.56 percent or 35 species and groups of species of fish that can still be used with a moderate rate of middle exploitation status (Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Decree Number 45 of 2011). Meanwhile, the potential of capture fishery from inland open water in Indonesia estimated at 0.9 million tons of fish/year, which has a total area of about 54 million hectares, including lakes, reservoirs, rivers, swamps, and another puddle (Minister of Marine and Fisheries Number 15 of 2012).

Tabel 1. Produksi dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Dunia
Table 1. World Fisheries and Aquaculture Production and Utilization

Rincian Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produksi / Production						
Tangkap / Capture						
Perairan Umum / Inland Open Water Fisheries	10,5	11,3	11,1	11,6	11,7	11,9
Perikanan Laut / Marine Fisheries	79,7	77,9	82,6	79,7	81,0	81,5
Jumlah / Total capture	90,2	89,1	93,7	91,3	92,7	93,4
Budidaya / Aquaculture						
Budidaya Perikanan di darat / Inland Aquaculture	34,3	36,9	38,6	42	44,8	47,1
Budidaya Perikanan di Laut / Marine Aquaculture	21,4	22,1	23,2	24,4	25,5	26,7
Jumlah / Total aquaculture	55,7	59,0	61,8	66,5	70,3	73,8
Jumlah/ Total	146,0	148,0	155,5	158,0	163,0	167,0
Pemanfaatan / Utilization¹						
Konsumsi manusia / Human consumption	123,8	128,1	130,8	136,9	141,5	146,3
Penggunaan Non-Makanan / Non-food uses	22,0	20,0	24,7	20,9	21,4	20,9
Populasi (miliar) / Population (billions)	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Per kapita pasokan makanan berasal dari ikan Per capita food fish supply (kg)	18,1	18,5	18,6	19,3	19,7	20,1

Catatan / Note : Tidak termasuk tanaman air. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan/ *Excluding aquatic plants. Totals may not match due to rounding.*

¹ Data pada tahun 2014 adalah hasil dari estimasi sementara / *Data in this section for 2014 are provisional estimates*

Sumber / Source : Food and agriculture Organization of United Nation (FAO), 2016

Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia yang mencapai luas sekitar 5,8 juta km² terbagi menjadi 11 WPP-RI. Status tingkat pemanfaatan ikan di sebelas wilayah tersebut berbeda-beda. Ada yang dalam kondisi over fishing, full capacity, dan ada yang masih dalam kondisi under fishing. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan kebijakan yang membatasi penangkapan ikan jenis tertentu untuk masing-masing wilayah sehingga terwujud perikanan tangkap yang berkelanjutan (*sustainable fisheries capture*) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perikanan (CCRF).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia memiliki 27,2 persen dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia, meliputi 12 persen mammalia, 23,8 persen amfibia, 31,8 persen reptilia, 44,7 persen ikan, 40 persen moluska, dan 8,6 persen rumput laut. Adapun potensi sumber daya ikan meliputi sumber daya ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, udang penaeid dan krustasea lainnya, ikan demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, benih alam komersial, karang, ikan, konsumsi perairan karang, ikan hias, peny, mammalia, dan rumput laut.

Pengelolaan dan praktik perikanan di Indonesia selama ini terfokus pada jumlah tangkapan, belum memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dampaknya lebih banyak yang negatif, yaitu kerusakan terumbu karang dan ekosistem dasa laut, serta terjadinya penangkapan berlebihan atau *overfishing*. Meningkatkan kapasitas penangkapan untuk mengejar target juga tidak akan efisien karena dengan stok perikanan yang sudah hampir habis, jumlah tangkapan tidak akan meningkat secara signifikan (Ridwan, 2013).

The spread of the fishing grounds which cover an area about 5.8 million km² is divided into 11 WPP-RI. In some water areas, the fishery resource utilization had reached to the levels of disparity. There are areas that in overfishing, full capacity, and there are some areas still in under fishing condition. Based on this condition, the policies that restrict certain type of fishing for each area is required. The policies are needed to realize sustainable capture fisheries in accordance with the provision implementation of responsible fisheries (FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries / CCRF).

As an archipelagic country, Indonesia has the high potential of fish resources and biodiversity. The Indonesian waters have 27.2 percent of all species of flora and fauna in the world which covering 12 percent of mammalian, 23.8 percent of amphibian, 31.8 percent of reptiles, 44.7 percent of fish, 40 percent of Mollusca, and 8.6 percent of seaweed. The potential of fish resources is large pelagic fish, small pelagic fish, penaeid shrimp and other crustaceans, demersal fish, mollusks and sea urchins, squid, commercial natural seed, coral, reef fish resource consumption of water, ornamental fish, turtles, mammals, and sea grass.

Management and fishing practices in Indonesia has focused on the total catch, not to pay attention to the balance of the ecosystem. It is cause more negative impact such as the damage to coral reefs and seabed ecosystems and the occurrence of overfishing. Increase fishing capacity to pursue the target will not be efficient because the fish stocks are already running low, catch volume will not increase significantly (Ridwan, 2013). Exploitation of fish resources and the value of production in 2014, respectively 7.21 percent

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Eksplorasi dan nilai produksi sumber daya ikan di Indonesia tahun 2014, masing-masing 7,21 persen dan 8,98 persen (Lampiran Table 4.12 dan 4.13). Eksplorasi sumber daya ikan dan nilai produksi di 11 WPP-RI disajikan pada lampiran Tabel 4.14 dan 4.15.

and 8.98 percent (Appendix of Table 4.12 and 4.13). Exploitation of fish resources and the value of production in the 11 WPP-RI are presented in Appendix of Table 4.14 and 4.15

Tabel 2. Produksi Perikanan menurut Jenis Perairan atau Lahan, 2010 - 2015
Table 2. Production of Fisheries by Type of Water and Land, 2010-2015

Rincian Item		Tahun / Year				
		2010	2011	2012	2013	2014
Volume Produksi / Production Volume		11 662 341	13 643 233	15 504 747	19 416 283	20 843 475
Perikanan Tangkap / Capture Fisheries	Sub Jumlah / Subtotal	5 384 418	5 714 271	5 829 194	6 115 377	6 484 346
	Perikanan Laut / Marine Fisheries	5 039 446	5 345 729	5 435 633	5 707 013	6 037 654
	Perairan Umum / Inland Open Water Fisheries	344 972	368 542	393 561	408 364	446 692
Perikanan Budidaya Aquaculture Fisheries	Sub Jumlah / Subtotal	6 277 924	7 928 963	9 675 553	13 300 906	14 359 129
	Budidaya Laut / Marine Culture	3 514 702	4 605 827	5 769 737	8 386 271	9 034 756
	Tambak / Brackishwater Pond	1 416 038	1 602 748	1 756 799	2 337 671	2 428 389
	Kolam / Freshwater Pond	819 809	1 127 127	1 433 820	1 774 407	1 963 589
	Keramba / Cage	121 271	131 383	178 367	200 006	221 304
	Jaring Apung / Floating Cage Net	309 499	375 430	455 012	505 248	500 873
	Jaring Tancap / Pen Culture	-	-	-	-	65 955
	Mina Padi / Rice Fish	96 605	86 448	81 818	97 303	144 263

Catatan / Note : *) Angka sementara / Preliminary Figures

- Perikanan Tangkap : Angka capaian sementara 2015 / Capture fisheries : Preliminary figures of 2015

- Perikanan Budidaya : Angka sementara hingga Triwulan III 2015 / Aquaculture fisheries : Update to 3rd quarter of 2015

Sumber / Source : Kementerian Kelautan dan Perikanan / Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

Volume produksi perikanan tangkap tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen atau sebesar 36 ribu ton dibandingkan tahun 2014. Dengan pertumbuhan produksi perikanan tangkap di laut sebesar 0,45 persen atau sebesar 27 ribu ton dan perikanan tangkap di perairan umum sebesar 1,92 persen atau sebesar 8 ribu ton. Rata-rata tingkat pertumbuhan

The production volume of capture fisheries in 2015 grew by 0.55 percent or by 36 thousand tons compared to previous year. The growth of marine capture fisheries production by 0.45 percent or by 27 thousand tons and the capture fisheries from inland open waters by 1.92 percent or 8 thousand tons. The growth trend for the 2010-2015 volume of fisheries production grew

volume produksi perikanan tangkap 2010-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen. Dengan pertumbuhan volume produksi perikanan tangkap di laut sebesar 3,14 persen dan perikanan tangkap di perairan umum sebesar 4,73 persen (Tabel 2).

Pada tahun 2014, 13 dari 25 negara penangkapan ikan terbesar di dunia naik hasil tangkapannya lebih dari 100.000 ton dibandingkan dengan 2013. Kenaikan signifikan berasal dari China, Indonesia, dan Myanmar di Asia, Norwegia di Eropa, serta Chili dan Peru di Amerika Selatan.

Seiring dengan peningkatan produksi perikanan, nilai produksi perikanan juga meningkat. Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,62 persen atau sebesar 8,24 triliun rupiah dibandingkan tahun 2014. Dengan pertumbuhan produksi perikanan tangkap di laut sebesar 7,48 persen atau sebesar 7,44 triliun rupiah dan perikanan tangkap di perairan umum sebesar 9,24 persen atau sebesar 0,8 triliun rupiah.

by 3.24 percent. The growing volume of marine capture fisheries production reach 3.14 percent and the capture fishery in inland open waters reach 4.73 percent (Table 2).

In 2014, 13 out of the 25 major fishing countries increased their catches by more than 100,000 tons compared with 2013. The most significant increments were those of China, Indonesia, and Myanmar in Asia, Norway in Europe, and Chile and Peru in South America.

Along with the increasing in fish production, the value of fishery production was also increased. The value of capture fisheries production in 2015 grew by 7.62 percent or 8.24 trillion rupiah compare to previous year. The growth of marine capture fisheries production reaches 7.48 percent or 7.44 trillion rupiah and the capture fishery in inland open waters reach 9.24 percent or in value reach 0.8 trillion rupiahs.

Tabel
Table

3. Nilai Produksi Perikanan Tangkap, 2010 – 2015
Production Value of Fisheries, 2010-2015
(Rp 1 000 000,-)

Perikanan Tangkap <i>Capture Fisheries</i>	Tahun / Year					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *)
Perikanan Laut / <i>Marine Fisheries</i>	59 580 474	64 452 537	72 016 210	93 186 165	99 473 348	106 913 714
Perairan Umum / <i>Inland Open Water Fisheries</i>	4 968 927	5 578 746	7 377 115	8 142 373	8 606 064	9 401 243
Jumlah / Total	64 549 401	70 031 283	79 393 325	101 328 538	108 079 412	116 314 957

Catatan / Note : *) Angka sementara / Preliminary Figures

Sumber / Source : Kementerian Kelautan dan Perikanan / Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

Rata-rata tingkat pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap tahun 2010-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 10,31 persen.

The growth trend in the value of fisheries production in 2010-2015 grew by 10.31 percent. While the growth of marine capture fisheries

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Dengan pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar 10,24 persen dan 11,21 persen di perikanan tangkap di perairan umum.

production value amounted to 10.24 percent and capture fisheries in inland open waters reach 11.21 percent.

4.3.2. Perikanan Budidaya

A. Budidaya Perikanan

Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Indonesia terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah perikanan budidaya air laut dengan luas 8,3 juta hektar, terdiri dari 20 persen untuk budidaya ikan, 10 persen untuk budidaya kekerangan, 60 persen untuk budidaya rumput laut, dan 10 persen untuk lainnya. Kedua adalah perikanan budidaya air payau atau tambak dengan luas 1,3 juta hektar. Ketiga adalah perikanan budidaya air tawar dengan luas 2,2 juta hektar, terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu hektar; perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa) seluas 158,2 ribu hektar; dan sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta hektar. Dan yang terakhir adalah pengembangan bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan serta non pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti untuk industri kesehatan dan kosmetika atau farmasetika laut (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2012).

Dalam publikasi ini, perikanan budidaya dibagi menjadi dua yaitu budidaya tambak dan budidaya laut. Pada tahun 2014, potensi luas lahan budidaya secara keseluruhan sebesar 17,32 juta hektar, yang terdiri dari perikanan budidaya tambak sebesar 2,96 juta hektar dan budidaya laut sebesar 12,12 juta hektar. Potensi yang

4.3.2. Aquaculture Fisheries

A. Aquaculture

Indonesia potential for aquaculture is divided into four part. The first part is aquaculture marine area of 8.3 million hectares, consisting of 20 percent for fish farming, 10 percent for oyster cultivation, 60 percent for seaweed farming, and 10 percent for the other. Secondly, brackish water aquaculture area or pond of 1.3 million hectares. Thirdly, freshwater aquaculture area of 2.2 million hectares, consisting of 526.40 thousand hectares for the pond, inland open water (lakes, reservoirs, rivers, and swamps) covering an area of 158.2 thousand hectares, and rice fields for the minapadi area of 1.55 million hectares. And the last is the development of marine biotechnology as raw materials for the food industry, industrial natural feed ingredients, fish and shrimp seed, industrial food and non-food which has high economic value such as for health and cosmetic industries or sea pharmaceutical (The Ministry of Marine Affairs and Fisheries regulation Number 15 of 2012).

In this publication, aquaculture is consisting of two types, namely brackish water pond and marine culture. In 2014, the potential areas for cultivation of land constitute an area of 17.32 million hectares, brackish water ponds covered an area of 2.96 million hectares and the marine culture covered an area of 12.12 million hectares.

sangat besar tersebut baru termanfaatkan 5,48 persen. Luas tambak yang dimanfaatkan baru seluas 667.083 hektar atau sekitar 22,50 persen, sedangkan luas budidaya laut yang dimanfaatkan masih sangat rendah yaitu hanya seluas 281.474 hektar atau 2,32 persen dari total potensi budidaya laut (Tabel 4). Hal ini menggambarkan bahwa perikanan budidaya laut di Indonesia belum termanfaatkan secara optimal.

The utilization was only 5.48 percent. The area that was used for ponds is only cover an area of 667,083 hectares or about 22.50 percent, while for marine culture was still very low, only an area of 281,474 hectares is utilized or 2.32 percent from the total potential of marine culture (Table 4). This illustrates that marine culture in Indonesia has not been utilized optimally.

Tabel
Table

4.

Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan, 2014
Potency of Aquaculture Area and Usage Level, 2014

Jenis Budidaya/ Type of Aquaculture	Potensi / Potency ¹ (Ha)	Pemanfaatan/ Usage ² (Ha)	Peluang Pengembangan/ Developing Opportunity (Ha)	Percentase Pemanfaatan Lahan Budidaya/ Percentage of Usage Aquaculture Area
Tambak / Brackishwater Pond	2 964 331	667 083	2 297 248	22,50
Kolam / Freshwater Pond	541 100	161 387	379 713	29,83
Perairan Umum / Inland Open Water	158 125	1 707	156 418	1,08
Mina Padi / Rice Fish	1 536 289	142 122	1 394 167	9,25
Budidaya Laut / Marineculture	12 123 383	281 474	11 841 909	2,32

Catatan / Note : ¹ Data berdasarkan buku saku Statistik Perikanan Budidaya Indonesia tahun 2009 / Data based on Indonesia Aquaculture Statistics pocket book in 2009

² Data berdasarkan buku saku Statistik Perikanan Budidaya Indonesia tahun 2014 / Data based on Indonesia Aquaculture Statistics pocket book in 2014

Sumber / Source : Kementerian Kelautan dan Perikanan / Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

Pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur memiliki luas lahan budidaya tambak paling luas dibandingkan dengan provinsi lainnya. Walaupun memiliki luas lahan budidaya tambak terluas, namun produksi perikanan budidaya tambak Provinsi Jawa Timur masih rendah. Dari 129.518 hektar tambak di Jawa Timur hanya menghasilkan 191.610 ton atau 1,48 ton per hektar. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang paling tinggi produksi perikanan budidaya tambaknya. Dari 44.822 hektar tambak di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menghasilkan 1.001.214 ton atau

In 2014, Jawa Timur was the province with the most extensive used of land area for brackish water pond compared with other provinces. Despite having the largest land used for brackish water ponds in Jawa Timur was still undersized. Of 129,518 hectares of ponds in Jawa Timur only produced 191,610 tons or 1.48 tons per hectares. Sulawesi Selatan was a province with the highest production of brackish water ponds, from 44,822 hectares of ponds in Sulawesi Selatan could produce 1,001,214 tons or 22.34 tons per hectares.

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

22,34 ton per hektar. Luas lahan budidaya tambak dan laut beserta produksinya dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.20.

Pada lampiran Tabel 4.21 dan 4.22 menyajikan data produksi perikanan budidaya tambak dan laut. Selama periode tahun 2010-2014, rata-rata tingkat pertumbuhan produksi perikanan budidaya tambak meningkat sebesar 11,39 persen per tahun. Produksi perikanan budidaya laut juga mengalami peningkatan pada periode 2010-2014. Rata-rata tingkat pertumbuhan produksi perikanan budidaya laut sebesar 20,78 persen per tahun, yaitu dari 3,51 juta ton tahun 2010 menjadi 9,03 juta ton pada tahun 2014.

Seiring dengan peningkatan produksinya, nilai produksi perikanan budidaya tambak dan budidaya laut juga mengalami peningkatan. Selama tahun 2010-2014 nilai produksi budidaya tambak mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14,33 persen per tahun, sedangkan nilai produksi budidaya laut mengalami pertumbuhan sebesar 18,25 persen per tahun. Nilai produksi budidaya tambak dan budidaya laut menurut provinsi tahun 2010-2014 disajikan pada lampiran Tabel 4.23 dan 4.24.

B. Budidaya Udang

Udang merupakan salah satu produk ekspor perikanan yang berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa merupakan pasar ekspor utama udang dari Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan komoditas udang sebagai komoditas ekspor non migas urutan ke-6. Dalam kurun 2010-2014, volume ekspor mengalami kenaikan 8,19 persen per tahun. Ekspor udang tahun 2014 mengalami

The area of brackish water pond and marine culture and its production is presented in Appendix of Table 4.20.

In Appendix of Table 4.21 and 4.22 present the production of brackish water ponds and marine culture. During the period of 2010-2014, the average annual growth rate of production of brackish water ponds was increased by 11.39 percent. The production of marine culture also increased in the period of 2010-2014. The average annual growth rate of marine culture production was 20.78 percent annually, from 3.51 million tons in 2010 to 9.03 million tons in 2014.

Along with increased production, the production value of brackish water ponds and marine culture also increased. During 2010-2014, the production value of brackish water ponds grew around 14.33 percent annually, while production value of marine culture grew around 18.25 percent annually. The production value of brackish water ponds and marine culture by the province in 2010-2014 are presented in Appendix of Table 4.23 and 4.24.

B. Shrimp Aquaculture

Shrimp is one of fishery export contributing significantly to Indonesia economy. United state, Japan, and the European Union is the main export market of shrimp from Indonesia. Government through the Ministry of Trade has set the shrimp commodity as the non-oil export commodities ranked 6th. During 2010-2014, the export volume of shrimp had been experiencing an increasing 8.19 percent annually. The shrimp export volume in 2014 was increased by 21.07 percent.

kenaikan sebesar 21,07 persen yaitu dari 162,4 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 196,6 ribu ton pada tahun 2014. Kondisi yang sama terjadi pada nilai ekspor udang, dimana terjadi kenaikan sebesar 27,12 persen yaitu dari US\$ 1,68 miliar pada tahun 2013 menjadi US\$ 2,14 miliar pada tahun 2014. Nilai ekspor udang dalam periode 2010-2014 mengalami kenaikan 19,95 persen per tahun.

Udang vaname (*Litopenenaeus vannamei*) dan udang windu (*Penaeus monodon*) merupakan spesies unggulan ekspor Indonesia. Udang vaname merupakan jenis udang introduksi yang berasal dari pantai pasifik Barat Amerika Latin yang diperkenalkan di Indonesia tahun 2001. Keuntungan dalam membudidayakan udang vaname adalah memiliki tingkat adaptasi yang baik, laju pertumbuhan yang relatif cepat, lebih tahan terhadap penyakit, responsif terhadap pakan, dan memiliki pangsa pasar yang luas, serta dapat dijual dalam ukuran kecil sampai sedang. Udang ini paling banyak diekspor ke Amerika Serikat. Untuk udang windu yang merupakan udang asli Indonesia, paling banyak diekspor ke Jepang dan Uni Eropa. Keuntungan budidaya udang windu terletak pada pertumbuhan yang cepat, ukuran yang besar, dan penggunaan teknologi yang sederhana atau tradisional.

Selama periode tahun 2010-2015, produksi budidaya udang nasional naik cukup signifikan 13,9 persen per tahun. Hal ini didukung oleh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan memanfaatkan lahan-lahan tambak *idle* dengan merevitalisasi lahan yang sudah ada. Pengembangan budidaya udang dilakukan tanpa merusak lingkungan. KKP mendorong petambak udang untuk menanam mangrove sebagai penjaga kelestarian lingkungan di

percent from 162.4 thousand tons in 2013 to 196.6 thousand tons in 2014. The same condition also happens in the export value of shrimp. In 2014 the export value of shrimp was increased 27.12 percent from US\$ 1.68 billion in 2013 to US\$ 2.14 billion in 2014. During 2010-2014, the export value of shrimp had been experiencing an increasing 19.95 percent annually.

Vaname shrimp (Litopenenaeus vannamei) and black tiger shrimp (Penaeus monodon) are featured species of Indonesia export. Vaname shrimp is an introduction species came from the West Pacific Coast of Latin America. Vaname shrimp was introduced in Indonesia in 2001. The advantage in cultivating vaname shrimp is they have good adoption rate, fast growth rate, more resistant to disease, responsive to the feed, have a large market share, and can be sold in small to medium size. Vaname shrimps mostly exported to United State. Whereas, black tiger shrimp is Indonesia native species and most exported to Japan and the European Union. The advantages in cultivating black tiger shrimp are they have rapid growth, large size, and applying conventional or traditional technology.

During 2010-2015, the national shrimp aquaculture production increased significantly around 13.9 percent annually. This occurs because Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) policy to utilize idle land by revitalizing existing land. The development of shrimp pond done without damaging the environment. KKP encourages shrimp farmers to plant mangrove to protect the environment around the shrimp pond. The growth of shrimp aquaculture production was the

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

sekitar tambak. Kenaikan produksi budidaya udang ini merupakan dampak dari revitalisasi tambak udang di sepanjang Pantai Jawa Barat dan Banten. Selain itu juga adanya pemanfaatan lahan budidaya dengan metode super intensif di beberapa daerah di Sulawesi (Berita Satu, 2016).

Pada tahun 2014, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki produksi budidaya udang paling tinggi diantara provinsi lainnya yaitu menyumbang sekitar 18,23 persen produksi budidaya udang nasional. Jenis udang vaname adalah jenis udang yang paling banyak diproduksi. Tercatat sebesar 428,91 ribu ton atau 73,34 persen dari total produksi budidaya udang tahun 2014 merupakan jenis vaname. Nilai produksi jenis udang vaname juga mempunyai nilai produksi lebih tinggi. Nilai produksi budidaya udang vaname tahun 2012 mencapai Rp. 25,33 triliun. Produksi dan nilai budidaya udang tahun 2014 menurut provinsi dan jenis udang disajikan pada lampiran Tabel 4.25 dan 4.26.

Volume produksi budidaya udang Indonesia menempati posisi pertama di tingkat ASEAN pada tahun 2014, diikuti Vietnam dan Thailand. Tahun-tahun sebelumnya volume produksi budidaya udang Indonesia kalah dibandingkan kedua negara tersebut. Hal ini disebabkan munculnya wabah penyakit udang *Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome* (AHPNS) atau lebih dikenal dengan sebutan *Early Mortality Syndrome* (ESM) yang menyebabkan kematian pada udang. Daerah penyebaran penyakit ini antara lain China (2009), Vietnam (2010), Malaysia (2010), Thailand (2012) sampai dengan perbatasan Kamboja (2013). Akibat penyakit ini volume produksi budidaya udang di Thailand dan Vietnam mengalami penurunan yang signifikan. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ini di Indonesia, pemerintah

impact of the revitalization of shrimp pond along the coast of Jawa Barat and Banten. In addition, the pond use super intensive cultivation methods in several areas in Sulawesi (Berita Satu, 2016).

In 2014, Jawa Barat was a province that has the highest shrimp aquaculture production among the provinces which contributed to 18.23 percent of national shrimp aquaculture production. Vaname shrimp was the most produced shrimp type. Vaname shrimp production in 2014 was about 428.91 thousand tons or 73.34 percent of the total production of shrimp aquaculture. Production values vaname shrimp type also has higher production value. The production value of vaname shrimp in 2014 reached 25.33 trillion rupiahs. Production and value of shrimp in 2014 by province and type of shrimp are presented in Appendix of Table 4.25 and 4.26.

The Indonesia shrimp aquaculture production ranked 1st in ASEAN in 2014 followed by Vietnam and Thailand. Previous years, the Indonesia shrimp aquaculture production losing from Vietnam and Thailand. This is due to shrimp disease outbreaks Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) or better known as Early Mortality Syndrome (ESM), which causes the death of shrimp. Regional spread of this disease includes China (2009), Vietnam (2010), Malaysia (2010), Thailand (2012) to the border of Cambodian (2013). As a result of this disease, shrimp aquaculture production in Vietnam and Thailand experienced a significant decrease. To Anticipate the spread of this disease in Indonesia, the government issued the Ministry of Marine Affairs and Fisheries regulation Number 32 of

tah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 32 Tahun 2013 sebagai larangan pemasukan udang dan pakan alami dari negara dan atau negara transit yang terkena wabah EMS atau AHPNS. Negara-negara tersebut adalah China, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Mexico.

C. Budidaya Rumput Laut

Budidaya spesies rumput laut tropis dari jenis *Kappaphycus alvarezii* dan *Eucheuma spp.* di Indonesia merupakan penyumbang utama pertumbuhan produksi tanaman air di dunia. Produksi budidaya rumput laut Indonesia meningkat tiap tahun, dimana kenaikannya lebih dari 10 kali lipat atau kurang dari satu juta ton di tahun 2005 menjadi 10 juta ton di 2014. Kenaikan ini akan terus berlangsung seiring dengan kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan produksi budidaya rumput laut. Kontribusi Indonesia di dunia dari produksi budidaya rumput laut meningkat drastis dari 6,7 persen di tahun 2005 menjadi 36,9 persen pada tahun 2014 (FAO, 2016). Dari rumput laut, Indonesia mampu menghasilkan 500 jenis produk akhir di seluruh industri dunia, seperti kosmetik, farmasi, pangan, hingga kertas dan biofuel (Nurifah, 2010).

Kebutuhan rumput laut dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan ini disebabkan adanya permintaan pasar dari dalam dan luar negeri. Produksi budidaya rumput laut di Indonesia selama kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan, yaitu dari 3,92 juta ton pada tahun 2010 menjadi 10,08 juta ton pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan sebesar 27,29 persen per tahun. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil rumput laut terbesar di

2013 regarding the prohibition of importation of shrimp and natural food from the country or transit country which plagued with EMS or AHPNS. These countries are China, Vietnam, Thailand, Malaysia, and Mexico.

C. Seaweed Cultivation

The cultivation of tropical seaweed species (*Kappaphycus alvarezii* and *Eucheuma spp.*) in Indonesia is the major contributor of aquatic plant production growth in the world. Indonesia increased its annual seaweeds cultivation output by more than 10 times, from less than a million tons in 2005 to 10 million tons in 2014. The increases of seaweed cultivation production will continue in line with its national policy. Indonesia's share of world seaweed cultivation production increased dramatically from 6.7 percent in 2005 to 36.9 percent in 2014 (FAO, 2016). From seaweed, Indonesia is able to produce 500 types of final products throughout the world industry, including cosmetics, pharmaceutical, food, until paper and biofuel (Nurifah, 2010).

The demand for seaweed from year to year is always increasing. The increase is due to market demand for domestic and abroad. Seaweed production in Indonesia during the period 2010-2014 increased, from 3.92 million tons in 2010 to 10.08 million tons in 2014 or increased by an average of about 27.29 percent per year. Sulawesi Selatan was a province that produces the highest seaweed production in 2014. In 2014, the production of seaweed cultivation in Sulawesi

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

tahun 2014. Pada tahun 2014, produksi budidaya rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.087 ribu ton. Produksi budidaya rumput laut tahun 2010-2015 menurut provinsi disajikan pada lampiran Tabel 4.30.

Meskipun pertumbuhan produksi rumput laut di Indonesia terus meningkat, masih ada beberapa kendala yang dialami oleh pengusaha rumput laut. Kendala tersebut diantaranya adalah sistem pengolahan, belum memadainya sumber daya manusia, masih harus diimpornya bahan kimia pengolah, sistem logistik yang tidak begitu baik, serta belum jelasnya peraturan mengenai standar dan biaya limbah.

Rencana Amerika mencoret rumput laut dari daftar pangan organik melalui *National Organic Standards Board* (NOSB) pada November 2016 menjadi kekuatiran bagi kinerja ekspor rumput laut. Nilai ekspor rumput laut akan mengalami penurunan hingga US\$ 1 juta. Kemungkinan terburuk adalah jika negara Uni Eropa dan semua negara tujuan pasar ekspor rumput laut akan memberlakukan hal yang sama, maka Indonesia akan mengalami kerugian hingga US\$ 160,4 juta. Namun beberapa kalangan pengusaha rumput laut tidak terlalu khawatir. Hal ini karena pasar utama ekspor rumput laut adalah Cina, sedangkan persentase ekspor ke Amerika hanya sedikit. Pencoretan rumput laut dari daftar makanan organik dipicu adanya petisi Joanne K. Tobacman dari University of Illinois, Chigaco. Tobacman melarang penggunaan carrageenan yang berasal dari rumput laut sebagai bahan tambahan makanan. Berdasarkan penelitian Tobacman, carrageenan dapat menyebabkan peradangan yang memicu kanker (Tempo, 2016).

Selatan reached 2,087 thousand tons. Production of seaweed cultivation by province during 2010-2015 is presented in Appendix of Table 4.30.

Despite the increases of seaweed production in Indonesia, there is some constraint that still experienced by entrepreneurs seaweed. The constraint is processing system, inadequate human resources, chemicals processing are still imported, logistics systems are not very good, and regulations on standards and the cost of waste are unclear.

United States plans to write-off the seaweed from the list of organic food through the National Organic Standards Board (NOSB) in November 2016 become a concern for seaweed export performance. Seaweed export value will decline to US\$ 1 million. The worst possibly is if the European Union and all destination country seaweed export markets will impose the same thing, then Indonesia will experience a loss of up to US \$ 160.4 million. However, some seaweed entrepreneurs are not too worried. The main seaweed export markets are China, while the percentage of exports to the United States small. The write-off of seaweed from the list of organic foods triggered by Joanne K. Tobacman petition from the University of Illinois, Chicago. Tobacman prohibits the use of carrageenan derived from seaweed as a food additive. Based on Tobacman research, carrageenan can cause inflammation that trigger cancer (Tempo, 2016).

4.4. Perdagangan Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) subkategori perikanan berperan strategis dalam memberikan sumbangan terhadap PDB Nasional. Semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut masuk dalam PDB subkategori perikanan. Kegiatan perikanan menghasilkan komoditas yang meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak juga tercakup dalam kegiatan subkategori ini.

Kontribusi PDB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 13,34 persen, kemudian meningkat menjadi 13,52 persen pada tahun 2015. Secara total PDB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan 4,02 persen pada tahun 2015. PDB subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memberikan kontribusi terbesar pada lapangan usaha ini sebesar 10,28 persen, diikuti oleh perikanan sebesar 2,53 persen, dan usaha kehutanan dan penebangan kayu sebesar 0,71 persen (BPS, 2016).

Subkategori perikanan memberikan kontribusi PDB sebesar 18,72 persen terhadap nilai tambah pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 17,41 persen. Laju pertumbuhan subkategori ini juga meningkat dari 16,53 persen pada tahun 2014 menjadi 19,00 persen pada

4.4. Fishery Trade

Gross Domestic Product (GDP) of fisheries sub-sector contributes a strategic role to national GDP. All kinds of capture fisheries and aquaculture activities of fish and other aquatic biotas, in freshwater or brackish water or sea, are included in this GDP sub-sector. Fishing activities generated commodities that included all kinds of fish, crustaceans, mollusks, seaweed and other aquatic organisms derived from the capture (marine and inland open water) and aquaculture (sea, pond, cage, floating net, pond, and paddy field). The services that support fishing activities on the basis of fee or contract also includes in this sub-sector.

The contribution of agriculture, forestry, and fishing section GDP in 2015 increased compared to 2014. In 2014, its contribution was 13.34 percent, then it increased 13.52 percent in 2015. Totally, the industry of agriculture, forestry and fishing GDP section grew 4.02 percent in 2015. GDP of agriculture, livestock, hunting and agriculture services sub-sector give the largest contribution to this industry by 10.28, followed by fishing at 2.53 percent and forestry and logging at 0.71 percent (BPS, 2016).

The contribution of fishing sub-sector to value added of agriculture, forestry, and fishing was 18.72 percent, its contribution increased by 17.41 percent compared to the previous year. The growth rate of this sub-sector increased from 16.53 percent in 2014 to 19.00 percent in 2015 (Table 5).

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

tahun 2015 (Tabel 5).

**Tabel
Table** 5. **Distribusi Pendapatan PDB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015**
Percentage Distribution of Industry of Agriculture, Forestry, and Fishing in the GDP at Current Market Prices, 2011-2015

Lapangan Usaha / Industrial Origin	Tahun				
	2011	2012	2013	2014 *)	2015 **)
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Jasa Pertanian / Agriculture, Livestock, Hunting, and Agriculture Service	78,67	78,29	78,02	77,29	76,04
a. Tanaman Pangan / Food Crops	25,61	26,53	26,05	24,35	25,21
b. Tanaman Hortikultura / Horticulture Crops	11,84	10,86	10,77	11,39	11,23
c. Tanaman Perkebunan / Plantation Crops	28,67	28,06	28,09	28,25	26,39
d. Peternakan / Livestock	11,08	11,34	11,61	11,85	11,76
e. Jasa Pertanian dan Perburuan / Agriculture Service and Hunting	1,47	1,51	1,50	1,45	1,45
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu / Forestry and Logging	5,88	5,72	5,45	5,29	5,24
3. Perikanan / Fishery	15,45	15,99	15,52	17,41	18,72
Pertanian / Agriculture	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku / Growth Rate of Fisheries Sector of Gross Domestic Product at Current Market Price	...	12,70	14,34	16,53	19,00

Catatan / Note : *) Angka Sementara / Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber / Source : Perdagangan Nasional Indonesia 2011-2015, BPS-RI / National Income of Indonesia 2011-2015, Statistics Indonesia

Provinsi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap subkategori perikanan adalah Maluku. Pada tahun 2015, Provinsi Maluku memberikan kontribusi sekitar 13,24 persen terhadap total PDB subsektor perikanan. Sementara provinsi yang paling kecil memberikan kontribusi terhadap subkategori perikanan adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 0,04 persen. Persentase kontribusi perikanan terhadap produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut provinsi dalam periode 2010-2015 disajikan pada lampiran Tabel 4.31.

PDB subkategori perikanan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produksi perikan-

The highest contribution to the fisheries sub-sector is Province of Maluku. In 2015, Maluku Province contributes around 13.24 percent to the total GDP of fisheries sub-sector. Province with the smallest contribution to the fisheries sub-sector is DKI Jakarta Province with only of 0.04 percent. Percentage of fishery contribution to the gross regional domestic product at the current market price by the province in period 2010-2015 is presented in Appendix of Table 4.31.

GDP of fisheries sub-sector can be improved by increasing the production of capture

an tangkap dan budidaya, meningkatkan mutu hasil perikanan dan produk olahan turunannya, memberi kemudahan investasi, serta meningkatkan peran stakeholder perikanan dalam memperluas pasar (KKP, 2015).

4.4.1. Ekspor Perikanan

Berdasarkan data FAO (2016), ekspor yang berasal dari ikan dan produk perikanan secara global pada tahun 2014 mencapai US\$ 148 miliar. Nilai ini tidak termasuk tambahan US\$ 1,8 miliar yang berasal dari rumput laut dan tanaman air lainnya (62 persen), ikan yang tidak dapat dimakan berdasarkan produk (27 persen), serta spons dan karang (11 persen). Perdagangan tumbuhan air meningkat dari US\$ 0,1 miliar pada 1984 menjadi lebih dari US\$ 1 miliar pada tahun 2014, dimana Indonesia, Chile, dan Korea Selatan adalah eksportir utama, sedangkan China, Jepang, dan Amerika Serikat merupakan importir terbesar. Hal ini disebabkan meningkatnya produksi produk komersial yang terbuat dari ikan (*fishmeal*) dan produk lainnya yang berasal dari sisa pengolahan ikan serta perdagangan ikan yang tidak dapat dimakan berdasarkan produk. Dari US\$ 90 juta pada tahun 1984 menjadi US\$ 0,2 miliar pada tahun 2004 dan US\$ 0,5 miliar pada tahun 2014.

Volume ekspor hasil perikanan pada periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Kenaikan rata-rata volume ekspor tahun 2010-2014 mencapai 2,93 persen pertahun. Peningkatan ekspor perikanan tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu mencapai 1.275 ribu ton atau meningkat sebesar 1,34 persen dibandingkan volume ekspor hasil perikanan tahun 2013 (Gambar 4.3).

and aquaculture fisheries, improve the quality of fishery products and processed derivatives products, provide ease of investment, and increasing the role of fisheries stakeholders in expanding markets (KKP, 2015).

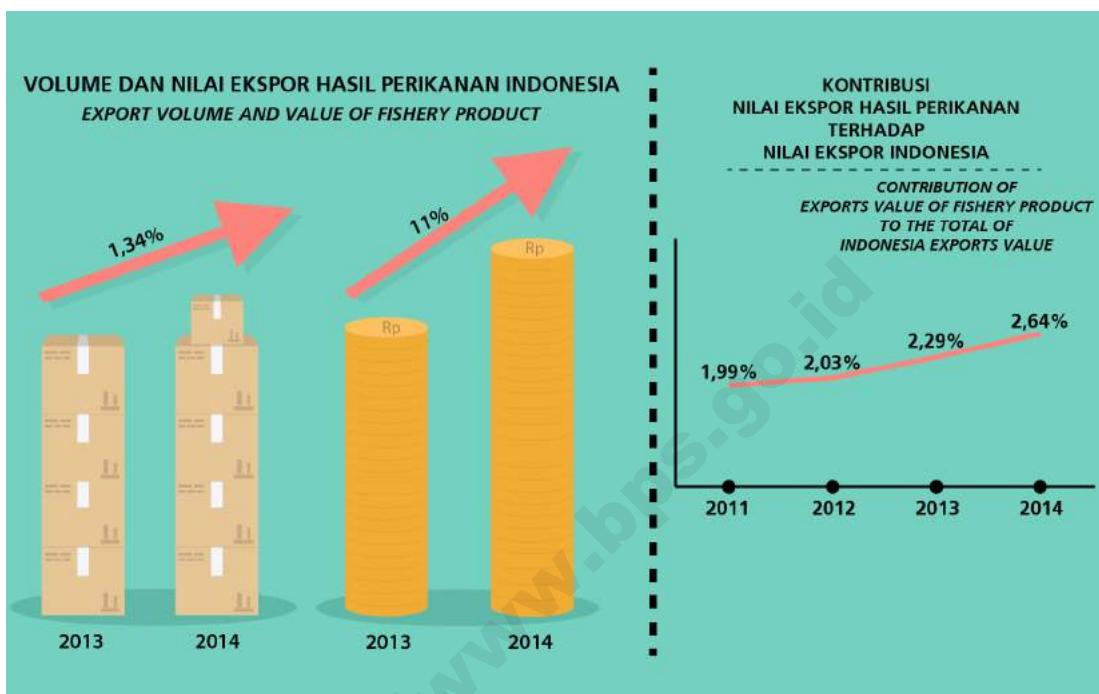
4.4.1. Fishery Exports

Based on FAO (2016), the global export of fish and fishery products in 2014 reached US\$ 148 billion. This value does not include an additional US\$ 1.8 billion represented by seaweeds and other aquatic plants (62 percent), inedible fish by-products (27 percent), and sponges and corals (11 percent). Trade in aquatic plants increased from US\$ 0.1 billion in 1984 to more than US\$ 1 billion in 2014, where Indonesia, Chile, and South Korea the major exporters, meanwhile China, Japan, and the United States of America the leading importers. Owing to the increasing production of fishmeal and other products deriving from fishery residues from processing, and also trade in inedible fish by-products. Up from US\$ 90 million in 1984 to US\$ 0.2 billion in 2004 and US\$ 0.5 billion in 2014.

The exports volume of fishery products in the period 2010-2014 was increasing. During 2010-2014, the average growth of export volume reached 2.93 percent annually. The highest exports increases occur in 2014 which reached 1,275 thousand tons or increased 1.34 percent compared to 2013 (Figures 4.3).

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Gambar 4.3. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan tahun 2013-2014, serta Kontribusi Nilai Ekspor Hasil Perikanan terhadap Nilai Ekspor Indonesia tahun 2011-2014
Figure 4.3. Export Volume and Value of Fishery Product in 2013-2014, and Contribution of Exports Value of Fishery Product to the Total of Indonesia Exports Value in 2011-2014



Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan / Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang volume ekspor hasil perikanannya terbesar. Pada tahun 2014, volume ekspor hasil perikanan di Provinsi Jawa Timur sebesar 376,9 ribu ton atau sekitar 29,56 persen dari total ekspor hasil perikanan di Indonesia. Volume ekspor hasil perikanan menurut provinsi tahun 2010-2014 dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.32.

Nilai ekspor hasil perikanan cenderung meningkat selama kurun waktu 2010-2014. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2010 mencapai US\$ 2,7 miliar, meningkat menjadi US\$ 4,6 miliar

Jawa Timur was a province with the highest exports volume of fishery product. In 2014, the exports volume of fishery product in Jawa Timur Province amounted to 376.9 thousand tons or approximately 29.56 percent of the total exports volume of fishery products in Indonesia. The volume of export of fishery products by the province in 2010-2014 can be seen in Appendix of Table 4.32.

The exports value of fishery product stands to increase during the period 2010-2014. The exports value of fishery products in 2010 reached US\$ 2.7 billion, increased to US\$ 4.6

pada tahun 2014. Selama periode tersebut terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 10,14 persen per tahun. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2014 meningkat dibandingkan nilai ekspor tahun 2013 yaitu terjadi kenaikan sebesar US\$ 460 juta atau naik 11 persen. Pulau Jawa terutama Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai ekspor hasil perikanan nasional. Total ekspor hasil perikanan dari Pulau Jawa tahun 2014 mencapai US\$ 1,7 miliar atau sebesar 37,05 persen. Nilai ekspor hasil perikanan menuju provinsi tahun 2010-2014 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.33.

billion in 2014. During that period there was an average growth of 10.14 percent per year. The export value of fishery products in 2014 increased compared to the value of exports in 2013 which is an increase of US\$ 460 million or up to 11 percent. Java Island, especially Jawa Timur Province greatly contributed to the exports value of fishery product. Total exports value of fishery product from Java Island in 2014 reached US\$ 1.7 billion or about 37.05 percent. The value of exports of fishery product by the province in 2010-2014 can be seen in Appendix of Table 4.33.

Gambar 4.4. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2014
Figure 4.4. Export Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2014



Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan / Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terhadap total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014 kontribusi nilai ekspor dari hasil perikanan mencapai 2,64 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 2,29 persen. Total nilai ekspor tahun 2014 mencapai US\$ 175,9 miliar, sedangkan tahun 2013 mencapai US\$ 182,5 miliar. Kontribusi nilai ekspor tahun 2013 dan 2014 menurut provinsi disajikan pada lampiran Tabel 4.34. Sedangkan pada lampiran Tabel 4.35 menyajikan volume dan nilai ekspor hasil perikanan menurut komoditi. Pada tahun 2014, produk rumput laut merupakan komoditi terbesar yang di ekspor ke luar negeri (Gambar 4.4).

Semua produk dan olahan hasil perikanan budidaya yang akan diekspor harus bersertifikat *Best Aquaculture Practices* (BAP) atau *Good Aquaculture Practices* (GAP). Produk perikanan budidaya dan olahannya memiliki resiko tinggi sebagai penyebab penyakit dan keracunan. Mikrobiologi dan zat kimia sangat rentan mengkontaminasi produk perikanan budidaya. Isu keamanan pangan terkait dengan produk perikanan budidaya berasal dari beberapa faktor. Metode produksi budidaya perikanan yang mudah terkontaminasi dan terdekomposisi, serta penggunaan bahan kimia secara sengaja yang tidak dijinkan termasuk diantara faktor tersebut. Oleh karena itu, produk perikanan budidaya harus memenuhi standar ketat untuk memastikan mutu dan keamanannya.

BAP dan GAP merupakan suatu strategi dalam pengelolaan yang terdiri dari aspek ethical, kualitas dan keamanan pangan, serta kelestarian lingkungan (*sustainability*) pada industri perikanan budidaya. Dalam penerapannya, *Global Aquaculture Alliance* (GAA) bekerjasama den-

The contribution of exports value of fishery product to the total of Indonesia exports value in 2014 has increased compared to 2013. In 2014, the contribution of exports value of fishery product reached 2.64 percent, while in 2013 reached 2.29 percent. Total exports value in 2014 reached US\$ 175.9 billion, while in 2013 reached US\$ 182.5 billion. The contribution of exports value in 2013 and 2014 by province are presented in Appendix of Table 4.34. Meanwhile, in Appendix of Table 4.35 presents volume and value of exports by fishery commodity. In 2014, seagrass was a commodity with the highest export volume (Figures 4.4).

All aquaculture and other processed exports products must be certified with Best Aquaculture Practices (BAP) or Good Aquaculture Practices (GAP). Aquaculture and other processed products have a high risk as a cause of illness and poisoning. Microbiology and chemicals are particularly vulnerable contaminating aquaculture products. Food safety issues related to aquaculture products originating from several factors. Aquaculture production methods are easily contaminated and decomposition, and the deliberate use of chemicals which is not permitted included among those factors. Therefore, aquaculture products must meet strict standards to ensure quality and safety.

BAP and GAP are a strategy in the management which consists of the ethical aspects, quality and food safety, and environmental sustainability in the aquaculture industry. In the application, the Global Aquaculture Alliance (GAA) collaboration with BAP in issuing certification standards for

gan BAP mengeluarkan standar sertifikasi untuk pabrik pakan, pembenihan, pembudidayaan, dan pabrik pengolahan. Untuk memenuhi standar sertifikasi tersebut ada 3 hal yang perlu dipenuhi. Pertama adalah memastikan bahwa industri perikanan budidaya menghasilkan produk perikanan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan dengan menerapkan program keamanan pangan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Kedua adalah memastikan setiap proses yang dilakukan sesuai dengan persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan. Misalnya tidak menggunakan bahan berbahaya serta adanya penangangan limbah yang dihasilkan. Ketiga adalah dengan memastikan industri perikanan budidaya menjalankan konsep ethical yang sesuai dengan standar persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atas ketenagakerjaan termasuk jaminan sosial, kesehatan, dan sistem pengupahan (APEC, 2013).

4.4.2. Impor Perikanan

Walaupun Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, namun kenyataannya Indonesia masih mengimpor ikan dari negara lain. Volume impor hasil perikanan Indonesia setiap tahun cenderung meningkat, namun nilainya masih dibawah nilai ekspor hasil perikanan Indonesia.

Volume impor perikanan pada periode 2010-2014 relatif fluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2011 yaitu mencapai 431,9 ribu ton, atau naik sebesar 16,95 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling banyak melakukan impor hasil perikanan yaitu mencapai 142,8 ribu ton atau sebesar 46,52 persen dari total

feed mills, hatcheries, breeding, and processing factory. To meet the certification standards there are three things that need to be met. The first is to ensure that the fishing industry produces fishery products with quality and safe for consumption. This is done by implementing Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) for food safety program. The second is to make sure every process is carried out in accordance with the environmental requirements that have been set. For example, do not use hazardous materials as well as the resulting waste handling. The third is to ensure the aquaculture industry runs the concept of ethical standards in accordance with the requirements set by the government for employment including social security, health, and wage systems (APEC, 2013).

4.4.2. Fishery Imports

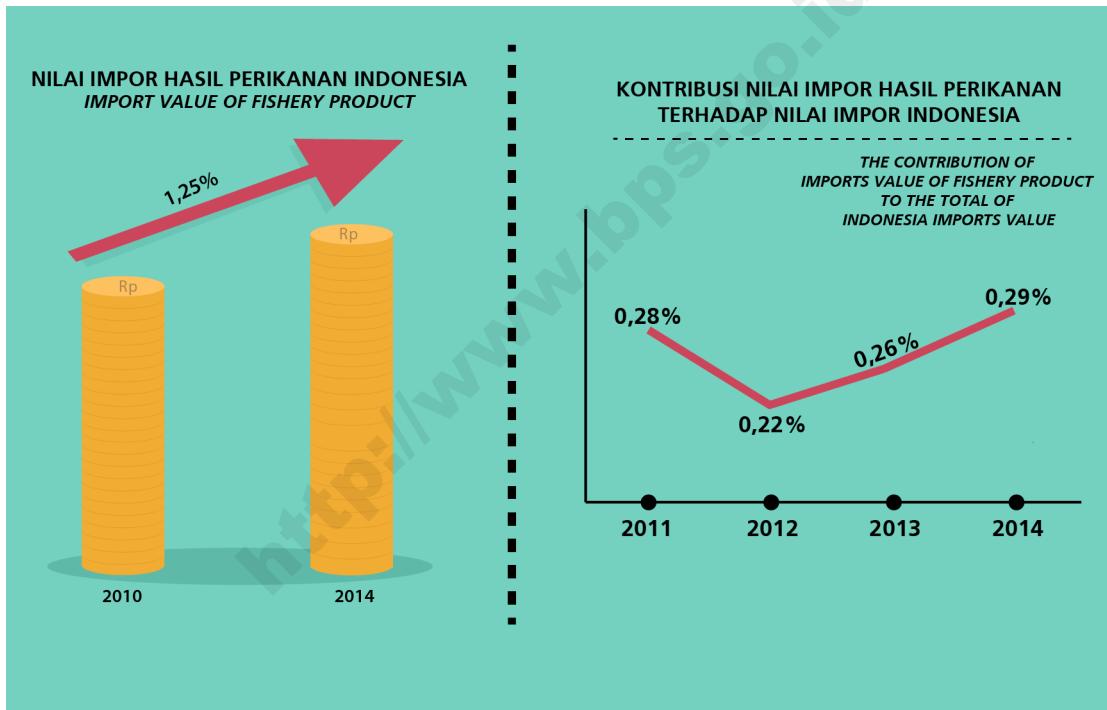
Although Indonesia has an abundant of fisheries resources, Indonesia still importing fishery product from other countries. The import volume of Indonesian fishery product continues to increase every year, but the value is still below the exports value of Indonesian fishery products.

The imports of fishery products in 2010-2014 was relatively fluctuated. The highest increases occurred in 2011 which reach the total amount of 431.9 thousand tons or increase 16.95 percent compared to 2010. In 2014, DKI Jakarta is the largest consumers of fishery product imports that reached 142.8 thousand tons or 46.52 percent of total imports of fishery pro-

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

impor hasil perikanan di Indonesia. Banyaknya impor hasil perikanan di DKI Jakarta disebabkan banyaknya rumah makan atau hotel internasional yang menggunakan jenis ikan impor serta banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang menjual ikan impor. Volume dan nilai impor hasil perikanan menurut provinsi tahun 2010-2014 disajikan pada lampiran Tabel 4.36 dan 4.37.

Gambar 4.5. Nilai Impor Hasil Perikanan tahun 2010-2014 serta Kontribusi Nilai Impor Hasil Perikanan terhadap Nilai Impor Indonesia tahun 2011-2014
Figure 4.5. Import Value of Fishery Product in 2010-2014 and The Contribution of Imports Value of Fishery Product to the Total of Indonesia Imports Value in 2011-2014



Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan / Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Peningkatan impor hasil perikanan dapat mengganggu pasar perikanan domestik serta dapat meningkatkan risiko masuknya hama dan penyakit yang dibawa produk impor. Nilai impor hasil perikanan selama tahun 2010-2014 terus

ducts in Indonesia. The largest imports of fishery products in DKI Jakarta due to the existence of international restaurants or hotels that use imported fish and the large shopping centers that sell imported fish. Volume and value of import on fishery products by the province in 2010-2014 are presented in Appendix of Table 4.36 and 4.37.

The increases of import on fishery products can disrupt the domestic market as well as can raise the risk of the entry of pests and diseases which were brought by imported products. Imports value of fishery product 2010-

meningkat seiring dengan peningkatan volumenya. Pada tahun 2010, nilai impor hasil perikanan mencapai US\$ 391,8 juta dan terus meningkat hingga tahun 2014 yang mencapai US\$ 417 juta. Selama periode 2010-2014, nilai impor hasil perikanan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 1,25 persen per tahun (Lampiran Tabel 4.37).

**Gambar 4.6. Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2014
Figure Import Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2014**



Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan / Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Meningkatnya volume impor perikanan dikarenakan kurangnya daya saing produk perikanan dalam negeri. Hal ini membuktikan bahwa kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kontribusi impor hasil perikanan terhadap total impor nasional mencapai 0,29 persen pada tahun

2014 was steadily increased along with the increasing in volume. Imports value of fishery product in 2010, reached US\$ 391.8 million and steadily increase until 2014 which reached US\$ 417 million. During the period 2010-2014, the imports value of fishery products grew by 1.25 percent per year (Appendix of Table 4.37).

The increase in the volume of imports of fishery products is due to the lack of competitiveness in domestic fisheries product. This indicates that the abundance of marine and fisheries resources is not optimally utilized. The contribution of fishery imports to total imports national reached 0.29 percent in 2014. This percentage

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

2014. Persentase ini meningkat dari 0,26 persen pada tahun 2013. Persentase nilai impor hasil perikanan tahun 2013-2014 menurut provinsi disajikan pada Tabel 4.38. Pada tahun 2014, mutiara merupakan komoditi terbesar yang diimpor diikuti tuna, cakalang, dan tongkol. Volume dan nilai impor hasil perikanan menurut komoditi disajikan pada gambar 4.6.

Berdasarkan hasil utama dari Model Perikanan : Perbandingan Produksi tahun 2025 dengan 2013-15 yang dihitung oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), negara-negara di Asia diperkirakan akan mengalami peningkatan kontribusi pada nilai ekspor hasil perikanan untuk konsumsi dari 50 menjadi 53 persen. Hal ini sebagai akibat dari meningkatnya produksi perikanan budidaya negara-negara di Asia. China, Vietnam, dan Norwegia diprediksi akan menjadi negara eksportir perikanan terbesar di dunia. Sedangkan importir makanan laut diprediksi berasal dari negara-negara maju seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Utara. Akibat dari produksi perikanan domestik yang stagnan, negara-negara maju secara keseluruhan diprediksi akan tetap sangat bergantung pada pasokan eksternal untuk memenuhi kebutuhan domestik. Impor perikanan mereka diprediksi akan meningkat 20 persen dibanding periode estimasi. Meskipun negara-negara maju tersebut akan terus mendominasi impor ikan dan produk perikanan untuk konsumsi, kontribusi impor global mereka akan menurun dari 54 persen di 2013-15 menjadi 53 persen pada tahun 2025. Sedangkan untuk negara-negara berkembang, ekspansi impor akan terdiri dari persediaan bahan baku untuk sektor pengolahan dimana produk yang dihasilkan selanjutnya akan diekspor ulang. Peningkatan produk impor untuk

improve from 0.26 from 2013. Percentage of imports value on fishery products by the province in 2013-2014 is presented in Table 4.38. In 2014, Pearl was a commodity with the highest import follow by tuna, skipjack, and mackerel. Volume and value of imports of fishery products by commodity is presented in Figure 4.6.

Based on Main Results Of The Fish Model: Comparison 2025 Vs 2013-15: Production calculated by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Asian countries are expected to slightly increase their share in world exports for human consumption from 50 to 53 percent. This is as a result of further expansion of their aquaculture production. China, Vietnam, and Norway will be the world's largest fish exporters. While the leading importers for seafood come from developed countries such as Japan, Europe, and North America. Due to stagnating domestic fishery production, overall, developed countries will remain highly dependent on external supplies to satisfy their domestic demand. Their imports expected to increase by 20 percent over the outlook period. However, although developed countries will continue to dominate world imports of fish and fishery products for human consumption, their share in global imports will decrease from 54 percent in 2013-15 to 53 percent in 2025. Meanwhile, for developing countries, import expansion will consist of supplies of raw material for their processing sectors for subsequent re-export. The increasing of imported products destined to meet surging domestic consumption, in particular for species not produced locally. Increasing imports are expected to be recorded by several Asian countries (including Indonesia, the Fillipina, and Vietnam), Brazil, and selected countries in the

memenuhi konsumsi domestik, khususnya berasal dari spesies ikan yang tidak diproduksi secara lokal. Peningkatan impor diprediksi akan terjadi di beberapa negara Asian (termasuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam), Brazil, dan beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika (FAO, 2016).

Near East and in Africa (FAO, 2016).

4.5. Konsumsi Perikanan

Berdasarkan data FAO (2016), dalam beberapa dekade terakhir, sektor konsumsi perikanan menjadi lebih heterogen dan dinamis secara global. Rata-rata konsumsi harian yang berasal dari ikan hanya sekitar 34 kalori per kapita. Namun, dapat melebihi 130 kalori per kapita di negara-negara dimana makanan alternatif proteinnya terbatas dan negara-negara dimana preferensi untuk mengkonsumsi ikan telah dikembangkan, misalnya Islandia, Jepang, Norwegia, Korea Selatan. Ikan mempunyai kontribusi yang lebih signifikan untuk memenuhi asupan protein hewani, di mana dalam 150 gram ikan terdapat sekitar 50-60 persen kebutuhan protein harian untuk orang dewasa. Protein ikan dapat mewakili komponen penting dalam makanan pada beberapa negara dengan total tingkat asupan protein rendah. Pola makanan di negara-negara ini mengungkapkan bahwa konsumsi ikan menjadi sangat penting dalam membantu meningkatkan rasio protein dan kalori. Selain itu, ikan sering menjadi sumber protein hewani yang lebih terjangkau tidak hanya lebih murah daripada sumber protein hewani lainnya, tetapi lebih digemari. Misalnya pada tahun 2013 di Bangladesh, Kamboja, Ghana, Indonesia, Sierra Leone, dan Sri Lanka, ikan menyumbang sekitar

4.5. Fish Consumption

According to FAO data (2016), in recent decades, the fish food sector has become more heterogeneous and dynamic. fish provides only about 34 calories per capita. However, it can exceed 130 calories per capita in countries where there is a lack of alternative protein food and where a preference for fish has been developed, for example, Iceland, Japan, Norway, South Korea. The fish has more significant in terms of animal proteins, as a portion of 150 gram of fish provides about 50-60 percent of the daily protein requirements for an adult. Fish proteins can represent a crucial component in countries where total protein intake levels may be low. The dietary pattern in many of these countries can reveal that fish consumption becoming particularly important in helping to improve the calorie/protein ratio. In addition, for these populations, fish often represents an affordable source of animal protein that may not only be cheaper than other animal protein sources, but more popular. For example, in 2013, in Bangladesh, Cambodia, Ghana, Indonesia, Sierra Leone, and Sri Lanka, fish accounted for about 17 percent of animal protein, and 6.7 percent of all protein, consumed by the global population. Moreover, fish provided more than 3.1 billion people with

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

17 persen protein hewani, dan 6,7 persen total protein yang dikonsumsi oleh populasi global. Selain itu, ikan dikonsumsi lebih dari 3,1 miliar orang dengan rata-rata asupan protein hewani per kapita sekitar 20 persen.

Di Indonesia, kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat semakin terlihat seiring dengan peningkatan konsumsi ikan (*white meat*) dibanding konsumsi daging (*red meat*). Kondisi ini dibuktikan dengan perkembangan peningkatan konsumsi ikan dari tahun 2013-2014. Konsumsi ikan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan, baik dilihat dari konsumsi kalori maupun protein per kapita per hari.

almost 20 percent of their average per capita intake of animal protein.

In Indonesia, the rise of people aware of the importance of healthy food occurs due to the consumption increases of white meat compare to red meat. This is shown by the increase of fish consumption from 2013 to 2014. The fish consumption in the urban area is lower compared to the rural area both in calory consumption and protein per capita per day.

Tabel
Table

6. Penyediaan Ikan untuk Konsumsi, Angka Ikan, dan Ketersediaan Nutrisi dari Ikan per Kapita, 2010-2014
Fish Supply for Consumption, Fish Consumption, and Fish Nutrition per Capita Availability, 2010-2014

Rincian Item		Tahun / Year					Kenaikan Rata-Rata Increasing Average (%)	
		2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014	2013-2014
<i>Penyedia ikan/ Fish Providers</i>	Jumlah/ Total (1000 ton)	9 119	10 282	11 588	11 882	13 072	9,50	10,01
	Per Kapita/ Per Capita (kg/kap/Thn)	38,39	42,49	47,22	47,77	51,80	7,85	8,44
<i>Konsumsi Ikan/ Fish Consumption</i>	Per Kapital/ Per Capita (kg/kap/Thn)	30,48	32,25	33,89	35,21	38,14	5,78	8,32
<i>Ketersediaan Nutrisi/ Availability of Nutrition</i>	Energi/ Calory (kkal/ kap/hari)	66,00	72,00	82,00	164,00	186,00	34,38	13,41
	Protein/ Protein (gram/ kap/hari)	11,65	12,73	14,74	10,73	11,54	1,34	7,55
	Iemak/ Fat (gram/kap/ hari)	1,53	1,70	1,83	1,58	1,75	4,00	10,76

Sumber / Source : Kementerian Kelautan dan Perikanan / Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

Tingkat konsumsi ikan dan ketersediaan ikan untuk dikonsumsi keduanya meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyediaan konsumsi ikan dari tahun

The level of fish consumption and the fish supply both increases. Base on The Ministry of Marine and Fishery, the fish supply from 2010-2014 was increase annually, with the average growth

2010-2014 selalu meningkat setiap tahunnya dengan kenaikan rata-rata sebesar 9,50 persen. Hal ini bisa diartikan bahwa tingkat konsumsi ikan masih terpenuhi dengan ketersediaan ikan yang ada (Tabel 6).

Pada lampiran Tabel 4.40 dan 4.41 menampilkan rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita per hari yang berasal dari ikan menuju provinsi dan tipe daerah. Berdasarkan tipe daerah, rata-rata konsumsi kalori yang berasal dari ikan untuk daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Begitu juga untuk rata-rata konsumsi protein yang berasal dari ikan untuk penduduk di perkotaan lebih rendah daripada penduduk perdesaan.

Rata-rata konsumsi kalori dan protein yang berasal dari ikan oleh penduduk Indonesia selama 2014-2015 mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan selama 2015-2016. Rata-rata konsumsi kalori selama 2014-2015 menurun sebesar 6,14 persen, begitupula rata-rata konsumsi protein juga menurun sebesar 4,93 persen. Sementara selama 2015-2016, rata-rata konsumsi kalori dan protein naik masing-masing sebesar 0,85 persen dan 0,45 persen.

Selama tahun 2015-2016 rata-rata konsumsi kalori dan protein yang berasal dari ikan mengalami kenaikan baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Rata-rata konsumsi kalori dari ikan oleh penduduk perkotaan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen, sedangkan untuk perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen. Untuk konsumsi protein dari ikan oleh penduduk perkotaan mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen sedangkan konsumsi protein dari ikan oleh penduduk perdesaan mengalami kondisi stagnan.

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi

of 9.50 percent. This shown that fish stocks are adequate for the level of fish consumption (Table 6).

Appendix of Table 4.40 and 4.41 show the average consumption of calory and protein per capita per day which source from fish by province and type of area. Base on the type of area, the average consumption of calory which source from fish for the urban area is lower compare to the rural area. The same condition is also applied for protein consumption of protein which source from fish, the urban area is lower compared to the rural area.

The average calory and protein consumption which source from fish for Indonesia population from 2014-2015 experiencing decreased, but increased during 2015-2016. The average calory consumption during 2014-2015 decreased 6.14 percent, also the protein consumption reaches 4.93 percent. During the years 2015-2016, the average consumption of calories and protein respectively increased by 0.85 percent and 0.45 percent.

During 2015-2016, the average calory and protein consumption which source from fish both in urban and rural areas has increased. The average calorie consumption of fish by the urban population in 2016 increased by 1.72 percent, while for rural areas increased by 0.14 percent. As for the consumption of fish protein by urban areas increased by 1.13 percent and the consumption of fish protein by rural areas experienced stagnant conditions.

Maluku Utara is a province that has the

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

yang memiliki rata-rata konsumsi kalori dan protein perkapita per hari dari ikan tertinggi, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita per hari dari ikan terendah dibandingkan provinsi lain di tahun 2016. Konsumsi kalori perkapita perhari dari ikan di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 21,52 KKal atau hanya 24,53 persen dari konsumsi kalori perkapita perhari di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan konsumsi protein yang berasal dari ikan perkapita perhari di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 3,52 gram atau hanya 23,76 persen dari konsumsi protein perkapita perhari di Provinsi Maluku Utara.

Tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Rendahnya konsumsi ikan di dalam negeri karena kurangnya informasi mengenai pentingnya konsumsi ikan. Untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional, pemerintah melalui KKP melakukan beberapa upaya, antara lain membentuk tim nasional untuk melaksanakan program percepatan peningkatan konsumsi ikan dan membuka pasar di dalam negeri yang mempunyai potensi yang sangat besar. Untuk meningkatkan produksi perikanan nasional, dilakukan program *restocking* atau penebaran ikan. Penebaran benih ini juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan stok ikan, pelestarian sumber daya ikan di perairan umum, dan untuk meningkatkan keanekaragaman jenis ikan. Selain itu, peningkatan stok diperlukan agar dapat menjaga populasi ikan di danau, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar danau akan bisa selalu menangkap ikan.

highest average consumption of calories and protein per capita per day derived from fish, while DI Yogyakarta Province has lowest average consumption of calories and protein per capita per day derived from fish compared to other provinces in 2016. The calories consumption per capita per day derived from fish in DI Yogyakarta Province was 21.52 Kcal or only 24.53 percent of the calories consumption per capita per day in Maluku Utara Province. While the protein consumption per capita per day derived from fish in DI Yogyakarta Province was 3.52 grams or only 23.76 percent of the protein consumption per capita per day in Maluku Utara Province.

The level of fish consumption in Indonesia is still lower than neighboring countries such as Malaysia and Singapore. The low consumption of fish in the country is due to the lack of information about the importance of fish consumption. To improve the national fish consumption, the government through KKP makes some effort. Among others was forming a national team to implement the accelerated program of increasing consumption of fish, opening the domestic market that possesses huge potential. To improve national fishery production a restocking fish program is conducted. Restocking fish is necessary to maintain the fish stocks, to conserve fish resources in public waters, and to increase the diversity of fish species. In addition, increasing stock is required in order to maintain fish populations in the lake, hence the people who live around the lake will be able to always catch fish.

4.6. Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam persaingan ekonomi. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan sistem transportasi sebagai penghubung antar pulau dan dunia luar yang efisien dan terkelola dengan baik. Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan global, Indonesia harus mempersiapkan jasa transportasi sebagai alur barang dan jasa antar negara. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat permintaan konsumen relatif tinggi dibandingkan negara lain. Di sisi lain, potensi produk Indonesia sebagai komoditi ekspor juga besar.

Kondisi sarana dan prasarana transportasi laut di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang harus segera terselesaikan. Kendala pertama adalah mahalnya biaya transportasi laut. Besarnya biaya transportasi berpengaruh terhadap harga barang, bahkan melebihi dari biaya produksi. Sarana transportasi yang kurang memadai, akan berakibat pada mahalnya produk dalam negeri dikarenakan pengiriman dan proses bongkar muat barang yang lama. Produk dalam negeri juga tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri dikarenakan mahalnya biaya transportasi. Padahal sekitar 90 persen perdagangan luar negeri Indonesia diangkut melalui transportasi laut

Kedua adalah masalah perkapalan. Kapal-kapal yang dimiliki oleh perusahaan perkapalan di Indonesia banyak yang sudah berumur tua. Biaya pemeliharaan kapal tua ini sangat tinggi yang menyebabkan mahalnya biaya transportasi laut. Ketiga adalah masalah permodalan, dimana harga bahan bakar minyak dan komponen biaya

4.6. Marine Transportation Infrastructure

Availability of transport facilities and infrastructure is a very important supporting factor in economic competition. As an archipelago country, Indonesia needs transportation system as a link between the island and the outside world that is well managed and efficient. To deal with The ASEAN Economic Community (AEC) and global trade, Indonesia must prepare transport services as the flow of goods and services among countries. Indonesia with a large population, the level of consumer demand is relatively high compared to other countries. On the other hand, the potential of Indonesia product as an export commodity also large.

Conditions of facilities and infrastructure marine transport in Indonesia face many obstacles that must be resolved. The first obstacle is the high cost of marine transportation. The high of transportation costs affect the prices of goods, even beyond than the cost of production. Inadequate transportation facilities will result in high cost of domestic products due to shipping and long unloading process. Domestic products can not compete with foreign products because of the high cost of transportation. Though about 90 percent of Indonesia's foreign trade is transported by marine transportation.

The second obstacle is a shipping problem. The ships are owned by the shipping company in Indonesia, many of them are old. These old ship maintenance costs are very high which causes high cost of marine transport. The third obstacle is the problem of the capital, where the price of fuel oil and marine cost component relatively

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

laut relatif tinggi. Biaya tinggi ini disebabkan waktu tunggu kapal terlalu lama untuk berlabuh

Keempat adalah kondisi pelabuhan. Indonesia tidak memiliki pelabuhan pindah muat (*transshipment*) yang mampu mengakomodasi kebutuhan kapal-kapal besar antar benua (*large transoceanic vessels*). Kapal-kapal yang lebih besar akan membutuhkan kedalaman air minimum yang diperlukan agar kapal dapat mengapung, jalur yang lebih panjang, basin yang dalam, mesin derek yang lebih besar dan lebih cepat, serta penanganan kargo yang baik. Jasa pelayaran dan pelabuhan di Indonesia relatif masih kalah dibandingkan dengan negara lain di wilayah ASEAN. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia hanya menjadi pengumpulan bagi pelabuhan milik beberapa negara tetangga. Hal ini mengakibatkan Indonesia kehilangan potensi pemasukan devisa miliaran rupiah (pkslipb.or.id).

Kelima adalah akses transportasi darat. Pelabuhan besar Indonesia umumnya berlokasi dekat dengan kota-kota besar dengan akses menuju pelabuhan melalui jalan-jalan raya kota yang padat. Masalah kemacetan seringkali diperparah dengan kedatangan penumpang dan barang di terminal yang tidak terpisah. Hanya beberapa pelabuhan regional yang memiliki sarana terpisah untuk kapal barang dan penumpang. Di pelabuhan yang lokasi terminal kapal penumpang dan barang tidak terpisah, menyebabkan lebih banyak keterlambatan dan memperlama waktu persiapan perjalanan pulang kapal barang.

Berdasarkan Laporan *Logistics Performance Index* (LPI) tahun 2016, dimana laporan ini menggambarkan tingkat efisien dan efektivitas sektor logistik yang memiliki hubungan pelayanan pengiriman logistik (*supply chain*) dan ekspor. Indonesia berada di posisi ke 63

high. These high costs are due to the long waiting time fishing boat rests.

The fourth obstacle is the port conditions. Indonesia does not have a transshipment, which accommodates the needs for large trans-oceanic vessels. The bigger ships require a minimum depth of water to float, the longer channels, deeper basin, larger and faster cranes and an efficient cargo handling. The shipping and port service in Indonesia are relatively left behind compare to other countries in ASEAN region. Indonesia's ports only act as the feeders ports belonging to neighboring countries. The potential loss of revenue from foreign exchange reached the amount of billions rupiah (pkslipb.or.id).

The fifth obstacle is ground transportation access. Generally, the major ports in Indonesian are located near big cities with access passing through the crowded city roads. The traffic problems are compounded by the arrival of passenger ships at the same terminal location, since only a few regional ports that have separate facilities for cargo and passenger terminal. For the port with the same terminal location for passengers and cargo, it causes more delays and increases in turn around freight time.

Based on the Logistics Performance Index (LPI) report in 2016, which is described the level of efficient and effective logistics sector that have a relationship of service delivery logistics (*supply chain*) and exports. Indonesia rank 63th among the 160 countries and 4th among ASEAN countries

diantara 160 negara dan posisi ke 4 diantara negara ASEAN setelah Singapore, Malaysia, dan Thailand. Peringkat ini turun dibandingkan dengan tahun 2015 (posisi 53). Dari enam dimensi penilaian, terdapat tiga dimensi yang mengalami penurunan yaitu pelayanan bea dan cukai, infrastruktur, dan ketepatan waktu pengiriman internasional. Infrastruktur transportasi yang ada di Indonesia dinilai sangat kurang itu dari segi jumlah, kapasitas, maupun penyebarannya.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, pemerintah melalui kebijakan dan strategi sektor transportasi laut sebagai penerapan Nawa Cita, membangun sistem transportasi laut yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan khusus industri, komplek industri, dan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non koridor ekonomi. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang dilakukan lebih difokuskan ke wilayah timur Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antar pulau, menurunkan disparitas harga antar wilayah, dan mendukung Program Tol Laut.

Program Tol Laut merupakan penghubung pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di daerah terpencil, khususnya yang terletak di wilayah timur, sehingga bisa terhubung dengan simpul pelabuhan utama. Jaringan pelabuhan ini dapat dilalui oleh kapal secara tetap dan teratur dengan pola subsidi. Pelayaran tetap dan teratur ini akan menggerakkan sektor ekonomi domestik yang akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Program Tol Laut ini merupakan perwujudan Nawa Cita ke-3 untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selama periode tahun 2015, untuk mewu-

after Singapore, Malaysia, and Thailand. This position down compared to 2015 (53rd). Assessment of six dimensions, three dimensions are decreased, i.e. customs services, infrastructure, and timeliness of international shipping. The existing transport infrastructure in Indonesia was considered inadequate in terms of quantity, capacity, and distribution.

To overcome the constraints above, the government through marine transportation sector policies and strategies as the application of Nawa Cita, build the marine transport system that is integrated to support investment in economic corridors, special areas of industry, industrial complex, and the growth center in the territory of the noncorridor economy. Construction and development of the port carried out more focused on the eastern part of Indonesia. This is done to strengthen the inter-island connectivity, lowering the price disparity between regions, and supporting Marine Highway Program.

The Marine Highway Program is connecting ports in remote areas, especially those located in the eastern region, so it can connect with the main port knot. The port networks can be traversed by boat regularly with the subsidies pattern. This regularly cruise will drive the domestic economic sector that will increase the productivity people welfare. Marine Highway Program is a manifestation of 3rd Nawa Cita to build Indonesia from the periphery to strengthen areas and villages within the framework of the Unitary Country.

During the period of 2015, to realize Ma-

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

judikan Program Tol Laut ini, pemerintah telah membangun pelabuhan di 35 lokasi, meningkatkan kapasitas pelabuhan di 6 lokasi, pengadaan 85 unit peralatan bongkar muat, 86 trayek rute perintis, mengoperasikan 1 unit kapal ternak, dan 95 unit kapal perintis. Program Tol Laut ini dilanjutkan pada tahun 2016 dengan membangun pelabuhan di 89 lokasi, meningkatkan kapasitas pelabuhan di 6 lokasi, pengadaan peralatan bongkar muat 26 unit, rute perintis 96 trayek, *freight liner* PELNI 6 trayek, kapal ternak 5 unit, dan membangun kapal perintis 95 unit.

Pembangunan dan revitalisasi pelabuhan melalui Program Tol Laut merupakan wujud nyata pembangunan Indonesia Sentris. Dari total 91 pelabuhan non komersial yang diselesaikan pada tahun 2015, hanya 7 pelabuhan di Sumatera, 2 di Jawa, 2 di Kalimantan, sementara 80 sisanya berada di wilayah timur Indonesia. Sedangkan untuk trayek tol laut, 5 trayek sudah dijalankan dari 6 trayek yang direncanakan, Trayek 1-3 berangkat dari Tanjung Perak, trayek 4 berangkat dari Tanjung Priok, dan trayek 5 berangkat dari Makassar (presidenri.go.id, 2016). Beberapa fasilitas yang dibangun untuk program ini adalah dermaga, *trestle*, *causeway*, reklamasi, fasilitas darat, terminal penumpang, gedung kantor, dan lain-lain. Sebagian besar pelabuhan tersebut mampu disinggahi kapal berukuran 1.000 DWT dan ada juga yang dapat disinggahi oleh kapal yang berukuran 15.000 GT. Sebagian besar pelabuhan yang dibangun juga dapat melayani angkutan laut perintis hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan terdepan (Kemenhub, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan

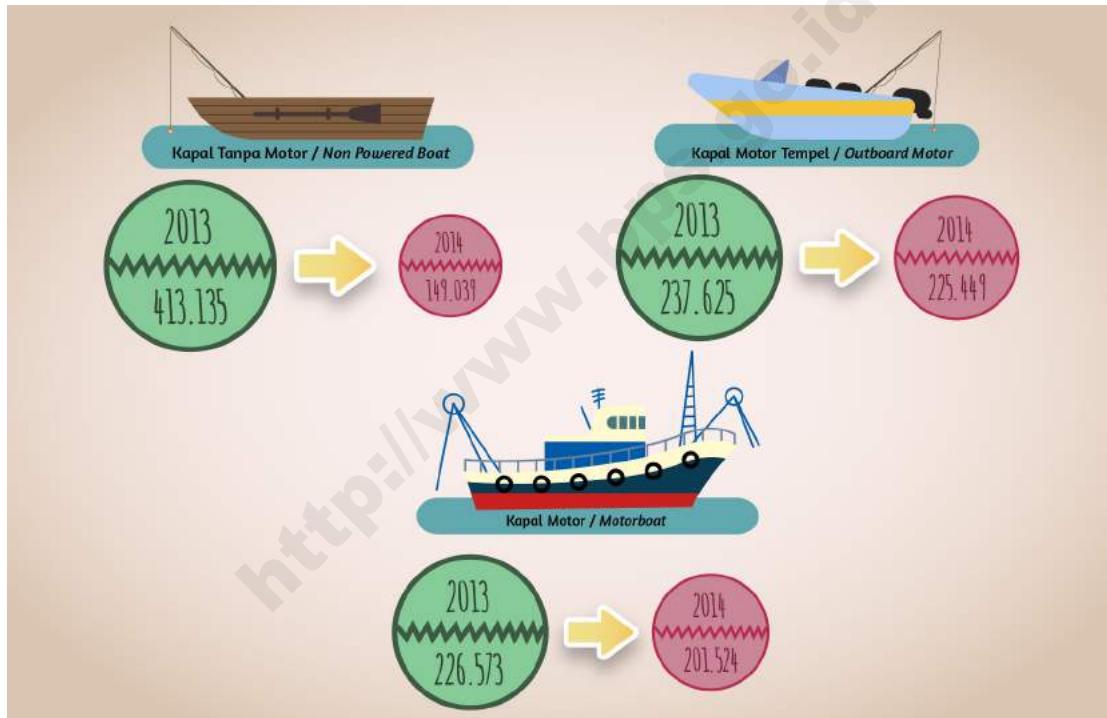
Marine Highway Program, the government has built the port in 35 locations, increasing the capacity of the port at 6 locations, procurement 85 units of loading and unloading equipment, 86 pioneers route, operate one unit ships cattle, and 95 units of the pioneer ship. Marine Highway Program was followed in 2016 by building ports in 89 locations, increasing the capacity of the port at 6 locations, provision of loading and unloading equipment 26 units, 96 pioneering routes, 6 routes PELNI freight liner, 5 units ship cattle and build 95 unit ship pilot.

The development and revitalization of the harbor through the Marine Highway Program is a realization of the Indonesia-centric development. From a total of 91 noncommercial port which was completed in 2015, only 7 ports in Sumatera, 2 ports in Java, 2 ports in Kalimantan, while the remaining 80 are in the eastern region of Indonesia. As for the toll route of the sea, 5 routes has run out of six planned route. The 1st until 3rd route departs from Tanjung Perak, 4th route departs from Tanjung Priok, and 5th route departs from Makassar (presidenri.go.id, 2016). Some of the facilities built for this program is the dock, trestle, causeway, reclamation, ground facilities, passenger terminals, office buildings, and others. Most of the port is able to accommodate 1,000 DWT-sized ships and some other can be accommodated by 15,000 GT-sized ships. Most ports are built can also serve pioneering marine transport to the remote areas, the outermost, and foremost (Kemenhub, 2016).

According to the Ministry of Marine Affairs and Fisheries regulation Number. 16 of 2006 about Fishery Port. The Fishery Port Ports are categorized according to the capacity and capability

masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan yang terbagi menjadi 4 kategori utama yaitu : PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera), PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara), PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), dan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan). Jumlah dan jenis pelabuhan perikanan disajikan pada lampiran Tabel 4.42.

Gambar 4.7. Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut menurut Jenis Kapal yang digunakan, 2013 - 2014
Figure 4.7. Number of Marine Fishing Boats by Type of Fishing Boat, 2013 - 2014



Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2014-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan / Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2014-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Untuk menangkap ikan di laut, digunakan perahu/kapal baik yang menggunakan motor maupun tanpa motor. Perahu tanpa motor biasanya dipergunakan oleh para nelayan kecil. Secara nasional, terjadi penurunan jumlah

of each port to handle ships that come and go as well as the location and position of port, which is divided into 4 main categories, i.e.: PPS (Fishery Ocean Port), PPN (Fishery Archipelago Port), PPP (Fishery Coastal Port), and PPI (Fishery Landing Quay) Appendix of Table 4.42 present the number and type of fishing port.

Boats are used to capture sea fish using both motorized or non-motorized boat. The non-motorized boat is usually used by small fishermen. Nationally, there are decreasing in the number of fishing boats in 2014 compared to 2013 (figure

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

perahu/kapal penangkap ikan pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 (gambar 4.7). Pada tahun 2013, jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebesar 877.333 buah, turun menjadi 576.012 buah di tahun 2014 (34,35 persen). Penurunan paling besar terjadi pada jumlah perahu/kapal tanpa motor yaitu sebesar 63,92 persen, disusul kapal motor sebesar 11,06 persen, dan motor tempel sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2013.

Selain perahu/kapal, alat penting lainnya yang diperlukan untuk menangkap ikan di laut adalah pukat, jaring, perangkap, pancing, dan lain-lainnya. Jumlah alat penangkap ikan yang digunakan mengalami kenaikan selama periode 2010-2013. Dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,54 persen per tahun. Namun pada tahun 2014 jumlah alat penangkap ikan laut sedikit mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun 2013. (lampiran Tabel 4.44). Jenis alat penangkap ikan yang paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2014 adalah pancing ulur yaitu sejumlah 170.561 buah. Sementara alat yang paling sedikit digunakan adalah jenis pukat tarik berbingkai sejumlah 100 buah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di WPP-RI, maka kedua alat tangkap tersebut tidak lagi digunakan. Kedua alat tangkap ini telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Industri Maritim

Menurut Alexander (1998) dalam Herdiawan (2015), maritim bukan hanya persoalan

4.7). In 2013, the number of the fishing boat was 877,333 units. It decreased to 576,012 units in 2014 (34.35 percent). The largest decreasing number of fishing boats occurred to the non-powered boats by 63.92 percent, followed by motor boats at 11.06 percent, and outboard motors by 5.12 percent compare with 2013.

In addition to boats used to catch fish in the sea, another equipment for catching fish are trawler, nets, traps, fishing rods, and others. The number of fishing gear increased during the period 2010-2013. In 2008-2009, with increased rate 5.54 percent annually. However, in 2014, the number of fishing gear least decreased by 0.09 percent, compare with 2013 (Appendix of Table 4.44). Types of fishing gear are the most widely used in Indonesia in 2014 was a handline (including Vertical long line) with a total number of 170,561 units. While the least used tool is beam trawl with a number of 100 units.

According to the Ministry of Marine Affairs and Fisheries regulation Number 2 of 2015 about prohibiting the use of fishing gear hela trawl and seine nets in WPP-RI, so both of these fishing gear is no longer used. Both of these types of fishing gear has resulted in decreasing and threatening the environmental sustainability of fish resources.

Maritime Industry

According to Alexander (1998) in Herdiawan (2015), maritime is not only the issue of

perikanan dan kelautan saja, namun semua kegiatan yang mempunyai hubungan dengan laut baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya industri maritim, industri ini terdiri dari teknologi perkapalan, perbaikan kapal, galangan kapal, manufaktur komponen kapal, dan lainnya; aktivitas ekspor atau impor, aktivitas ini terdiri dari penyediaan, pemeliharaan, perbaikan, jasa angkutan, dan bongkar muat pelabuhan; pariwisata, antar lain wisata pantai, wisata bawah laut, jasa penginapan, serta budaya masyarakat sekitar yang menjadi daya tarik wisatawan; perikanan budidaya, antara lain budidaya air laut, budidaya air tawar, dan budidaya air payau (Bergheim, Nielsen, Mearns, and Eid (2015) dalam Herdiawan (2015)). Aktivitas-aktivitas tersebut hanya sebagian kecil dari aktivitas kemaritiman. Jika seluruh potensi kemaritiman Indonesia bisa dimanfaatkan maka akan meningkatkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk pembangunan negara.

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat strategis, dimana terletak pada persilangan antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Hal ini menyebabkan perlunya industri maritim yang kuat. Industri maritim sangat dibutuhkan untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah telah membangun sepuluh sektor ekonomi kelautan unggulan untuk mengembangkan industri maritim. Sepuluh sektor tersebut antara lain perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata bahari (Herdiawan, 2015).

Peluang Indonesia dalam industri dan perdagangan antar negara sangat besar. Selat

fisheries and marine but all the activities that have a relationship with the sea either directly or indirectly. For example, the maritime industry, the industry is comprised of technology shipbuilding, ship repair, shipbuilding, ship component manufacturing, and others; export or import activity, this activity consists of the provision, maintenance, repairs, transport services, loading, and unloading port; tourism, there are beach tourism, underwater tours, lodging services, as well as the culture of local communities that attract tourists; aquaculture, there are marine aquaculture, freshwater aquaculture and brackish water aquaculture (Bergheim, Nielsen, Mearns, and Eid (2015) in Herdiawan (2015)). These activities only a fraction of maritime activity. If the whole potential of the Indonesia maritime utilized then it will increase state revenues that could be allocated for the development of the country.

Indonesia position as an archipelagic country is very strategic, which is located at the intersection between Asia and Australia and between the Indian and the Pacific Ocean. This leads to the need for a strong maritime industry. The maritime industry is needed to connect the islands of Indonesia. Therefore, the government has built ten sectors of the marine economy featured to develop the maritime industry. Ten of the sector, among others, capture fisheries, aquaculture, fishery product processing industry, marine biotechnology industry, energy, and mineral resources, as well as marine tourism (Herdiawan, 2015).

Indonesia opportunities in industry and inter-state trade are very big. Malacca Strait and

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Malaka dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah jalur perdagangan strategis yang digunakan kapal dagang dengan volume perdagangan mencapai 45 persen dari total nilai perdagangan dunia. ALKI merupakan jalur wilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati kapal dan pesawat udara asing. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Internasional UNCLOS 1982, dimana Indonesia sebagai negara kepulauan dipandang sebagai negara kesatuan yang utuh wajib memberikan hak lintas damai dan hak alur kepulauan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2002, terdapat tiga jalur ALKI, yaitu (1). ALKI I terdiri dari Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan; (2) ALKI II, terdiri dari Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulawesi; (3) ALKI III-A, terdiri dari Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda (Barat Pulau Buru)-Laut Seram (Timur Pulau Mongole)-Laut Maluku, Samudera Pasifik; (4) ALKI III-C, terdiri dari Laut Arafuru, Laut Banda terus ke utara ke ALKI III-A. Potensi nilai perdagangan dari jalur ALKI tersebut sekitar US\$ 1,5 juta per hari. Menurut FAO, nilai perekonomian Indonesia yang berasal dari laut mencapai US\$ 3-5 trilyun (www.rri.co.id, 2014).

Untuk mendukung perkembangan industri maritim di Indonesia banyak yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menambah armada kapal. Jumlah kapal di Indonesia masih sangat kurang dan kondisinya yang banyak diantaranya membutuhkan perbaikan. Di sisi lain jumlah galangan kapal di Indonesia tidak akan cukup untuk melaksanakan perbaikan kapal apalagi membuat kapal-kapal baru. Selain jumlahnya yang kecil, banyak infrastruktur dan fasilitas di masing-masing galangan kapal sudah tidak memadai, seperti lautnya sudah dangkal

the Indonesian archipelagic sea lanes lines (ALKI) is a strategic trade route used by merchant ships with the volume of trading reached 45 percent of the total value of world trade. ALKI is the path of the territorial waters of Indonesia can be passed to foreign ships and aircraft. This is in accordance with the provisions of international law UNCLOS 1982, which Indonesia as an archipelago country, is seen as a unitary country is obliged to give right of pax passage and right of the archipelagic groove. In accordance with Regulation Number 37 of 2002, there are three ALKI lines, which is (1). ALKI I, consists of the Sunda Strait, Karimata Strait, Natuna Sea, and the South China Sea; (2) ALKI II, consists of Lombok Strait, Makassar Strait, and the Celebes Sea; (3) ALKI III-A, consists of the Savu Sea, Ombai Strait, Banda Sea (West Buru Island)-Seram Sea (Eastern Mongole Island)-Maluku Sea, the Pacific Ocean; (4) ALKI III-C, consists of Arafuru Sea, Banda Sea continue to north ALKI III-A. Potential trade value of ALKI was US\$ 1.5 million per day. According to FAO, the value of Indonesia's economy from the sea to reach US\$ 3-5 trillion (www.rri.co.id, 2014).

There are lots to do to support the development of the maritime industry in Indonesia. One of them is to add ship fleet. The number of ships in Indonesia is still very less and many of them in need of repair. On the other hand, the number of shipyards in Indonesia will not be enough to carry out ship repairs even to make new ships. A number of the shipyard in Indonesia is relatively small, despite the infrastructure and facilities in each shipyard have been insufficient, such as the sea is shallow and the access to the shipyard is difficult. An effort to repair the ship is needed to

dan juga akses masuk ke galangan kapal tersebut sulit. Padahal perbaikan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal laut, apalagi sebagian besar kapal sudah tidak layak berlayar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membangun kawasan industri maritim terpadu di Lamongan, Jawa Timur. Daerah Lamongan dipilih sebagai kawasan industri maritim terpadu karena mempunyai pantai dengan laut yang relatif dalam.

prevent ship accident, moreover, most of the ship is unworthy sailing. The government has built an integrated maritime industrial in Lamongan, Jawa Timur. Lamongan is chosen as the area of the integrated maritime industry due to the possession of the deep-sea coast.

4.7. Rumah Tangga Perikanan dan Perusahaan Perikanan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan, nelayan diklasifikasikan menjadi nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Jumlah nelayan pada tahun 2014 sebanyak 2.210 ribu orang (gambar 4.8). Dari jumlah tersebut, sebanyak 59,86 persen nelayan penuh, 26,20 persen nelayan sambilan utama dan sisanya sebesar 13,94 persen nelayan sambilan tambahan. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar nelayan hanya mempunyai satu pekerjaan yaitu sebagai nelayan.

Selama periode tahun 2010-2014, jumlah nelayan di Indonesia berfluktuasi, dimana jumlah nelayan pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan. Selanjutnya di tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami kenaikan. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah nelayan paling banyak yaitu 227.888 orang atau sebesar 10,31 persen

4.7. Fisheries Household and Establishments

Fishers refer to a person whose work actually engaged fishing. Based on the working time, the fishers are classified as full-time fishers, major part-time fishers, and minor part-time fishers. The number of fishers in 2014 was 2,210 thousand people (figure 4.8). Of these fishers, about 59.86 percent was full-time fishers, 26.20 percent was major part-time fishers and 13.94 percent was minor part-time fishers. This indicated that most fishers only have one job that is fishers.

During period 2010-2014, the number of fishers in Indonesia fluctuated. The number of fishers in 2012 and 2013 was decreased. In 2013 and 2014, the number of fishers was increased again. Jawa Timur Province has the largest number of fishers that reached 227,888 people or about 10.31 percent of fishers in 2014 (figure 4.8).

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

dari nelayan di Indonesia di tahun Indonesia 2014 (gambar 4.8).

Gambar 4.8. Jumlah dan Persentase Nelayan di Laut menurut Kategori Nelayan, 2014
Figure 4.8. Number and Percentage of Marine Fishers by Category of Fishers, 2014



Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2014-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan / Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2014-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Jumlah rumah tangga perikanan/perusahaan perikanan (RTP/PP) tangkap di laut menurut provinsi selama periode tahun 2010-2014 tersaji pada lampiran Tabel 4.47. Terjadi penurunan jumlah RTP/PP selama kurun waktu 2013-2014 sebesar 4,25 persen. Sedangkan jumlah RTP/PP budidaya laut dan tambak tersaji pada Lampiran Tabel 4.48, dimana jumlah pembudidaya di laut lebih banyak dibandingkan dengan pembudidaya di tambak.

Pada lampiran Tabel 4.49 disajikan data jumlah rumah tangga perikanan/perusahaan

The number of households fishery/fishery companies (RTP/PP) by province during 2010-2014 is presented in Appendix of Table 4.47. There is a declining in the number of RTP / PP during 2013-2014 by 4.25 percent. While the number of marine and brackishwater pond RTP/PP is presented in Appendix of Table 4.48, where the number of marine fish farmer more than brackish water pond fish farmer.

In Appendix of Table 4.49 present the number of households fishery/fishery companies

perikanan (RTP/PP) tangkap di laut menurut provinsi dan jenis perahu yang digunakan. Pada tahun 2014, terdapat 35,06 persen RTP/PP menggunakan perahu motor tempel, 31,34 persen menggunakan kapal motor, 23,17 persen menggunakan perahu tanpa motor, dan 10,43 persen tanpa perahu.

Berdasarkan data PODES 2014, sumber penghasilan utama sebagian penduduk yang tinggal di desa pesisir disajikan pada Lampiran Tabel 4.50. Sebagian besar desa pesisir, sumber penghasilan utama penduduknya adalah di bidang pertanian (90,42 persen). Jenis komoditi terbesar berasal dari tanaman pangan (38,02 persen) dan perkebunan (30,29 persen). Sementara perikanan tangkap hanya sekitar 18,19 persen dan perikanan budidaya 2,97 persen.

(RTP/PP) by province and type of fishing boats used. In 2014, there was 35.06 percent of RTP/PP that caught fish using outboard motorboat, 31.34 percent using the non-powered boat, 23.17 percent using motorboat and 10.43 percent without the boat.

Based on PODES 2014, the main income source of major population in coastal villages are presented in Appendix of Table 4.50. Most of the coastal village, the main income source of the major population is agriculture (90.42 percent). The types of commodities derived from food crops (38.02 percent) and plantation (30.29 percent). While capture fishery is only about 18.19 percent and aquaculture fisheries 2.97 percent.

4.8. Mineral

Indonesia dengan luas lautan tiga kali daripada luas daratan mempunyai potensi kelautan yang sangat besar. Secara geologis, wilayah perairan Indonesia merupakan pertemuan antara beberapa lempeng tektonis yang merupakan sumber minyak bumi, gas bumi, dan mineral yang sangat besar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi di dunia.

Wilayah pesisir laut Indonesia mengandung cadangan minyak, gas, mineral, dan bahan tambang yang besar. Kawasan pesisir dan lautan menghasilkan sekitar 70 persen produksi minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 yang di

4.8. Mineral

Indonesia with ocean area three times its land area has huge potential for marine. Geologically, the Indonesian water is the meeting between several tectonic plates that possess an abundant source of petroleum, natural gas, and minerals. This had made Indonesia as a major of oil producing countries in the world.

The coastal area in Indonesia is the location of the abundant reserved areas for oil, gas, minerals, and others mining materials. The coastal and oceans areas contribute around 70 percent of the oil and gas production. From 60 basins that have a big potentially reserved of oil and gas, 40 basins located in the offshore, 14 basins

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensi minyak bumi diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel. Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik. Kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral, seperti emas, perak, timah, bijih besi, dan mineral berat. Belum lama ini ditemukan jenis energi baru pengganti bahan bakar minyak berupa gas hidrat dan gas biogenik di lepas pantai Barat Sumatera dan Selatan serta bagian Utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi (Richardson, 2008 dalam Dahuri 2009).

Berdasarkan survei geologi dan geofisika kelautan yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2014, ditemukan cadangan migas yang amat besar di perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh. Apabila cadangan minyak ini memang terbukti, maka diperkirakan cadangan ini mencapai 320,79 miliar barel. Sebagai perbandingan, jumlah cadangan terbukti untuk Arab Saudi sebesar 264,21 miliar barel dan jumlah cadangan untuk lapangan Banyu Urip, Cepu adalah sekitar 450 juta barel. Lapangan migas dapat dikategorikan sebagai lapangan raksasa apabila volume cadangan terhitung mencapai 500 juta barel (m.energitoday.com, 2014).

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2008, Indonesia diperkirakan memiliki potensi cadangan gas sebesar 170 Tera Standard Cubic Feed (TSCF). Potensi cadangan ini diperkirakan masih bisa dipergunakan hingga 59 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan produksi gas di Indonesia setiap tahunnya hanya sebesar 2,87 TSCF.

Lautan merupakan gudang terbesar

on the coast, and only 6 basins on the mainland. The estimation number of oil and natural gas in the entire basins reach the number of 11.3 billion barrels. The natural gas reserves estimated at 101.7 trillion cubic feet (TCF). This area is also rich in various types of mines and minerals, like gold, silver, tin, iron ore, and heavy minerals. The new type of energy in the form of biogenic and hydrate gas as the substituted for fuel oil was recently discovered in off coast region of western Sumatera and southern Jawa Barat and northern of Makassar Strait with tremendous potential, beyond all the potential oil and gas (Richardson, 2008 in Dahuri 2009).

Based on marine geological and geophysical surveys which were conducted by Assessment and Application of Technology Agency (BPPT) in 2014, it was discovered a huge oil and gas reserves in the waters of the northeast island of Simeulue, Aceh. If the reserve is proven, the oil reserves are 320.79 billion barrels. For comparison, the proven reserves of Saudi Arabia reached the number of 264.21 billion barrels and total reserves for the field Banyu Urip, Cepu is approximately 450 million barrels. Oil and gas fields are categorized as a giant field when the number reached around 500 million barrels (www.energitoday.com, 2014).

According to the Ministry of Energy and Mineral Resources in 2008, Indonesia estimated has the potential of gas reserves reached 170 Tera Standard Cubic Feed (TSCF). The potential reserves are estimated can be used for 59 years. This is due to the production of gas in Indonesia each year only reached the total number of 2.87 TSCF.

Ocean is the location of the largest ware-

yang mengandung sekitar 50.000 triliun ton berbagai logam dan garam mineral, termasuk emas, mangan, lithium, bromium, fosfor, sulfur, borium, sodium klorida, magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium sulfat, dan potassium sulfat. Setiap mil kubik air laut mengandung 4 juta ton magnesium, emas senilai US\$ 93 juta, dan perak senilai US\$ 8,5 juta (Dahuri, 2009). Selain itu, menurut Carson (1973) di lautan juga terdapat sekitar 10 triliun ton deuterium, sejenis isotop hidrogen yang mudah dipisahkan dari air laut dan merupakan bahan bakar utama reaktor pembangkit energi sistem nuklir fusion, yang lebih aman ketimbang sistem nuklir fision. Dengan teknologi nuklir yang relatif aman ini, lautan dapat mencukupi kebutuhan energi umat manusia di dunia secara berkelanjutan.

Potensi kekayaan tambang dasar laut sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut. Lebih dari seratus pulau kecil di Indonesia yang berpotensi mengandung mineral. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan pulau kecil terbanyak yang berpotensi mengandung mineral, dimana terdapat 19 pulau kecil berpotensi, selain itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 10 pulau kecil, di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan terdapat 9 pulau kecil, dan di Riau terdapat 8 pulau kecil yang berpotensi mengandung mineral. Pulau kecil yang mengandung mineral lainnya menurut provinsi dan jenis potensi mineralnya disajikan pada lampiran Tabel 4.51.

Pulau-pulau kecil di Indonesia yang tereksploitasi sumber daya alamnya secara berlebihan rentan mengalami kerusakan dan tenggelam. Di Indonesia terdapat sekitar 80 persen pulau berkategori pulau kecil. Data KKP (2011) meny-

house, which is containing around 50,000 trillion tons of various metals and mineral salts, including gold, manganese, lithium, bromium, phosphorus, sulfur, borium, sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate, and potassium sulfate. Each cubic mile of sea water containing 4 million tons of magnesium, US\$ 93 million worth of gold, and silver US\$ 8.5 million (Dahuri, 2009). In addition, according to Carson (1973), the ocean also consist about 10 trillion tons of deuterium, a hydrogen isotope is easily separated from the sea water and is the main fuel reactor of the nuclear fusion energy generation system, which is more secure than fission nuclear system. With the relatively safe of nuclear energy, the ocean can meet the energy needs of humankind in a sustainable world.

The potential wealth of mining in the seabed has not yet been properly identified, the advanced technology needed to develop its potential. There are more than a hundred small islands in Indonesia that potentially contain the mineral. Jawa Tengah Province has the largest number of small islands that potentially contain mineral with 19 small islands. The next provinces with the largest number of small islands that potentially contain mineral are Nusa Tenggara Timur Province with 10 small islands, Sulawesi Utara and Sulawesi Selatan Province with 8 small islands. The other small islands according to the province and the potential mineral type are presented in Appendix of Table 4.51.

Small islands in Indonesia which exploited its natural resources excessively vulnerable to damage and sinking. In Indonesia, there is about 80 percent of the small island. KKP (2011) states that 28 small islands in Indonesia have drowned

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

butkan, 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil terancam tenggelam. Sedangkan menurut Kajian Indeks Dampak Perubahan Iklim oleh lembaga dunia *Maplecroft*, 1.500 pulau kecil di Indonesia diprediksi tenggelam pada 2050 (*Kompas*, 2015c).

Selain mineral, laut juga memberikan energi lain yang bisa dimanfaatkan. Dalam Laporan Perhitungan Sumberdaya Energi Laut, dikemukakan bahwa kegiatan pemanfaatan energi laut untuk pembangkit listrik belum berkembang. Beberapa hal yang menjadi kendala antara lain adalah belum tersedianya informasi pemanfaatan secara ekonomi terhadap potensi energi laut untuk pembangkit tenaga listrik. Hal ini sangatlah disayangkan, mengingat luas wilayah laut Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari luas daratan. Menurut Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI), total sumber daya energi laut Indonesia secara teoritis sangat besar. Energi laut dari tenaga gelombang laut, tenaga arus laut, dan tenaga panas laut mencapai 727.000 Mega Watt (MW). Namun hanya 49.000 MW potensi energi laut yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan teknologi yang tersedia saat ini. Industri berbasis energi laut yang paling siap adalah industri berbasis teknologi gelombang laut dan teknologi arus pasang surut laut dengan potensi 6.000 MW (ESDM, 2016).

*and 24 small islands in danger of drowning. Meanwhile, according to Climate Change Impacts Assessment Indices by Maplecroft world institutions, 1,500 small islands in Indonesia is predicted to sink the 2050 (*Kompas*, 2015c).*

Besides minerals, the sea also provides other energy that can be utilized. In the Ocean Energy Resources Calculation Workshop been suggested that the activities of marine energy utilization for power generation has not grown. A few things that become obstacles include the unavailability of information utilization of the economic potential of marine energy for power generation. This is extremely unfortunate, given that Indonesian with three times sea area larger than land area. According to the Ocean Energy Association of Indonesia (ASELI), Indonesian marine energy resources are theoretically very large. Marine energy from ocean wave energy, ocean current energy, and ocean thermal energy reached 727,000 Mega Watt (MW). However, only 49,000 MW of marine energy potential which allows for developed and harnessed with the technology available today. Industry-based marine energy is the most readily are wave technology-based and tidal technology-based with the potential of 6,000 MW (ESDM, 2016).

4.9. Kawasan Konservasi Laut

Konservasi alam adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan serta terjaminnya keberadaan ekosistem yang ber-

4.9. Marine Conservation Area

Nature conservation is the protection, preservation, and utilization as well as ensuring the existence of continuous ecosystems. The area

kesinambungan. Kawasan yang dijadikan konservasi alam adalah kawasan yang mempunyai ciri tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyanga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KLHK (2013) dalam Jakfar (2015)).

Ada berbagai macam jenis kawasan konservasi laut di Indonesia, antara lain taman nasional laut, taman wisata alam laut, taman wisata perairan, suaka margasatwa laut, cagar alam laut dan kawasan konservasi laut daerah. Jumlah kawasan yang paling banyak dan paling luas adalah kawasan konservasi laut daerah. Pada lampiran Tabel 4.52 menyajikan jumlah, luas, dan jenis kawasan konservasi laut.

Laut merupakan kunci kapasitas adaptasi yang tinggi. Keanekaragaman hayati laut merupakan sumber kekayaan pangan dan obat-obatan di masa depan. Menurut WHO, 70 persen pangan dan obat-obatan di masa depan berasal dari laut. Alan F. Koropitan, peneliti kelautan dari Institut Pertanian Bogor, menyatakan laut merupakan modal dasar Indonesia yang sangat besar. Dataran Sunda di barat, Dataran Sahul di timur, dengan laut dalam yang mempunyai arus yang kompleks di bagian tengah dataran Indonesia sering ditemukan spesies baru. Indonesia merupakan pusat keragaman hayati.

Majalah *Science* memuat suatu riset yang mengungkapkan bahwa lebih dari 5 persen spesies kemungkinan besar akan punah meskipun kenaikan suhu bumi ditahan agar tidak melampaui 2°C dibandingkan dengan suhu bumi pra-era industri. Untuk itu konservasi alam perlu dilakukan dengan melindungi, melestarikan dan memanfaatkan ekosistem secara berkesinambu-

is used as a nature conservation are areas with specific characteristics, its have protective functions of life support systems, preservation of biodiversity, and sustainable use of natural resources and ecosystems (KLHK (2013) in Jakfar (2015)).

Indonesia consists of many types of marine conservation areas, among others marine national park, marine ecotourism park, marine nature recreation park, marine sanctuary, marine natural preservation and district marine conservation area. The most numerous and most widespread marine conservation is the district marine conservation area. In Appendix of Table 4.52 presented the number, area, and type of marine conservation areas.

The sea is the key to high adaptation capacity. Marine biodiversity is the source of wealth of food and medicine in the future. According to WHO, 70 percent of food and medicine in the future comes from the sea. Alan F. Koropitan, marine researchers from the Bogor Institute of Agriculture, said the sea as the basic capital of Indonesia is very large. Sunda Area in the west, Sahul Area in the east, with the complex deep ocean stream, in the middle of the Indonesia Area often found new species. Indonesia is the center of biodiversity.

Science magazine contains a research which revealed that more than 5 percent of species are most likely to be extinct despite the increase of global temperature retained does not exceed 2°C to be compared with the temperature of Earth's pre-industrial era. For that nature conservation needs to protect, conserve, and utilize ecosystem sustainably (Kompas, 2016).

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

ngan (Kompas, 2016).

Dewasa ini pariwisata berbasis kelautan (wisata bahari) telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik dunia internasional. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berupa pantai dan laut yang indah, serta keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 jenis harus dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata bahari.

Kawasan konservasi laut menjadi salah satu tujuan para wisatawan. Salah satu kawasan konservasi laut yang dikunjungi oleh wisatawan adalah taman wisata alam laut. Berdasarkan data pada lampiran Tabel 4.53, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi taman wisata alam laut selama periode 2009-2014 cenderung mengalami kenaikan.

Kenaikan jumlah wisatawan taman wisata alam laut baik domestik maupun mancanegara yang paling signifikan dalam kurun waktu 2013-2014 adalah kunjungan ke Pulau Sangian, Provinsi Banten. Pulau ini merupakan salah satu seven wonder Provinsi Banten. Pulau Sangian merupakan pulau kecil dengan pemandangan indah dengan pasir putih. Pulau ini merupakan salah satu spot menyelam terbaik di Indonesia. Selain sebagai objek wisata, pulau ini kaya akan flora dan fauna yang sering dijadikan objek penelitian (Prasetya, 2014).

4.10. Kualitas Air Laut

Menurut Konvensi Hukum Laut III (*United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS III*), pencemaran laut adalah perubahan

Nowadays, the marine-based tourism (marine tourism) has become internationally attractive as a tourism product. The Natural wealth which is owned by Indonesia in the form of a beautiful beach and sea, the diversity of flora and fauna such as coral reefs and various kinds of ornamental fish, which is estimated around 263 species, have been developed and used as an object of fascination for marine tourism.

Marine conservation areas become one of the tourist's destinations. The marine conservation area mostly visited by tourists is the marine ecotourism park. Based on Appendix of Table 4.53, the number of domestic and foreign tourists visited the marine ecotourism park during the period 2009-2014 was increasing.

A number of visitor to marine ecotourism park both domestic and foreign tourists during 2013-2014 increase significantly especially to Sangiang Island, Banten Province. This island is one of the seven wonders of Banten province. Sangiang is a small island with beautiful scenery with white sand. This island is one of the best diving spots in Indonesia. In addition as a tourist attraction, this island is rich in flora and fauna that are often used as objects of research (Prasetya, 2014).

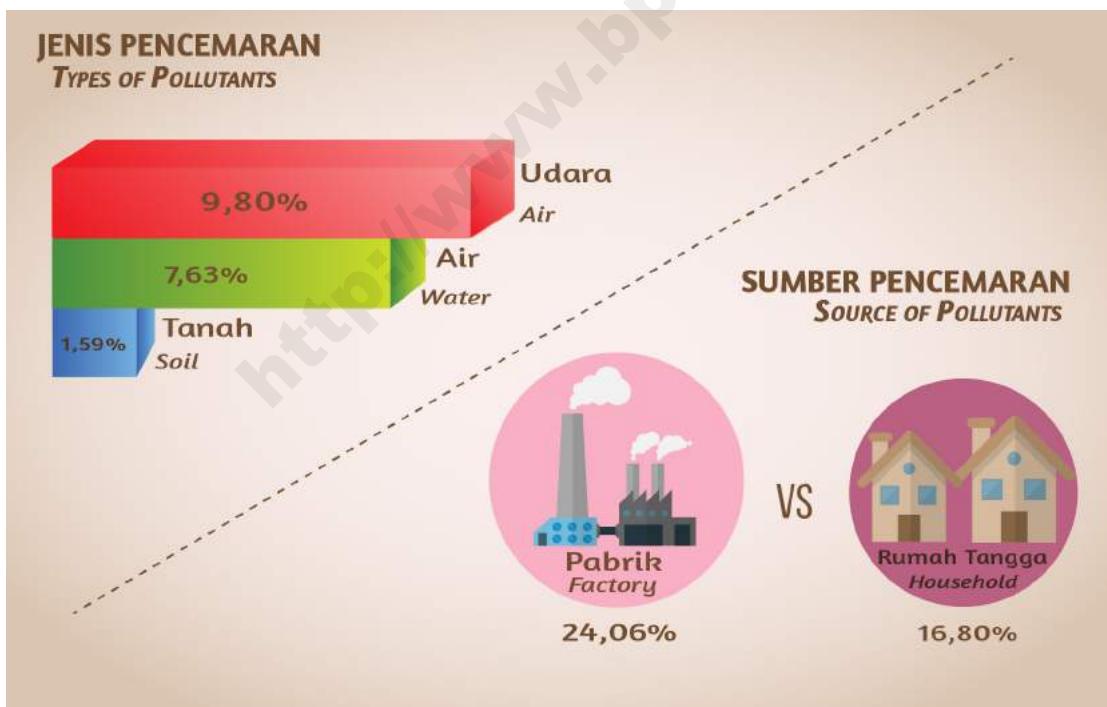
4.10. Sea Water Quality

According to the Convention on Law of the Sea III (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS III), marine pollution is

dalam lingkungan laut termasuk muara sungai (estuaries) yang dapat menimbulkan akibat buruk seperti merusak sumber daya laut hayati, berbahaya terhadap kesehatan manusia, menganggu kegiatan di laut termasuk perikanan dan penggunaan laut secara wajar, menurunkan kualitas air laut dan mutu kegunaan serta manfaatnya (Misran 2002 dalam Saraswati, 2011). Limbah buangan kegiatan berasal dari aktivitas di daratan (*land based pollution*) dan di lautan (*sea based pollution*) merupakan sumber pencemaran laut. Pencemaran laut terbagi menjadi pencemaran secara fisik dan kimia. Aktivitas yang berasal dari daratan yang dapat menyebabkan

a change in the marine environment including river mouths (estuaries) that lead to bad consequences that can be harm to marine resources of biodiversity, hazards to human health, disruption of activities at sea, including fisheries and marine use naturally, lowers the quality of sea water and the quality of the usefulness and benefits (Misran 2002 in Saraswati 2011). Waste from activities came from activities on land (land-based pollution) and at sea (sea-based pollution) is a source of marine pollution. Marine pollution is divided into physically and chemically pollution. Activities that comes from the land that can cause marine pollution include deforestation, especially those

Gambar 4.9. Persentase Desa Pesisir menurut Jenis dan Sumber Pencemaran, 2014
Figure 4.9. Percentage of Coastal Village by Type and Source of Pollutants, 2014



Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik / Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

pencemaran laut antara lain penebangan hutan, terlebih yang dilakukan secara liar; limbah rumah tangga; limbah industri; limbah pertanian; limbah cair domestik; limbah padat; konversi lahan mangrove dan lamun; dan reklamasi di kawasan pesisir.

Berdasarkan data PODES 2014, pencemaran yang paling sering terjadi di desa pesisir berasal dari udara (9,80 persen). Sumber pencemaran paling besar berasal dari limbah pabrik (24,06 persen) dan diikuti limbah rumah tangga (16,80 persen) (gambar 4.9).

Aktivitas di laut yang mengakibatkan pencemaran laut yang pertama adalah aktivitas perkapalan (*shipping*) seperti pengoperasian kapal; kebocoran bahan bakar minyak dari instalasi mesin, pipa, tangki, dan lain-lain; serta kecelakaan kapal yang menimbulkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun lainnya. Kedua adalah dumping di laut (*ocean dumping*), yaitu pembuangan limbah di laut akibat kegiatan industri yang berasal dari pertambangan; eksplorasi dan eksploitasi minyak; budidaya laut; dan perikanan. Dalam kurun waktu 1997-2016, diperkirakan telah terjadi 42 kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia (lampiran Tabel 4.55).

Tumpahan minyak ini memberikan dampak terhadap sumber daya non hayati dan sumber daya hayati atau organisme laut. Dampak terhadap sumber daya non hayati yaitu pencemaran air laut, udara, sedimen dan tanah serta benda purbakala yang tenggelam di lautan. Laut yang tercemar oleh tumpahan minyak juga akan membawa pengaruh negatif bagi berbagai sumber daya hayati atau organisme laut, seperti berbagai jenis ikan, mamalia laut, plankton serta membahayakan ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, rumput laut dan ve-

done illegally; disposal of home wastes; disposal of industrial wastes; disposal of agricultural wastes; sewage disposal; solid wastes disposal; mangrove and seagrass conversion; and reclamation in coastal areas.

Based PODES 2014, pollution most often occurs in a coastal village is from the air (9.80 percent). The most major sources of pollution from the factory (24.06 percent), followed by household (16.80 percent) (figure 4.9).

The first activity at sea causing sea pollution is the shipping, they are the operation of the vessel, leakage of fuel from the engine installation, pipes, tanks, and others; shipwrecks, causing an oil or other toxic liquid material spill. The second activity is ocean dumping, that is the disposal of waste at sea as a result of industrial activities from mining; oil exploration and exploitation; marine culture; and fishing. During 1997-2016, there have been 42 cases of oil spills in the waters of Indonesia (Appendix of Table 4.55).

The oil spills have an impact on non-biological resources and biological resources or marine organisms. The impact on nonbiological resources is in the seawater, air, sediment and soil as well as archaeological objects that sank in the ocean. Sea is polluted by oil spills will also bring negative effects for a variety of biological resources or marine organisms. As various kinds of fish, marine mammals, plankton, and jeopardize the ecosystem of coral reefs, mangroves, seagrass, seaweed and other underwater vegetation. This, of course will affect the fishing and

getasi bawah air lainnya. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap daerah penangkapan ikan dan lingkungannya yang akhirnya berdampak pula terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan lautan. Tumpahan minyak juga berdampak terhadap pariwisata bawah lautan, kawasan wisata akan mengalami kerusakan, penurunan jumlah pengunjung serta penurunan kualitas lingkungan di sekitar kawasan wisata. Tumpahan minyak juga akan menghambat atau mengurangi transmisi cahaya matahari ke dalam air laut karena terhalang oleh minyak dan dipantulkan kembali ke udara.

Selain tumpahan minyak, pencemaran laut juga berasal dari sampah. Paparan Hideshige Takada dari *Laboratory of Organic Geochemistry (LOG) Tokyo University of Agriculture and Technology*, 3 Maret 2014, di Surabaya menyebutkan bahwa jumlah mikroplastik (berukuran kurang dari 5 mm) di pusaran Laut Pasifik enam kali lebih banyak dibandingkan jumlah plankton. Mikroplastik tersebut ditemukan dalam saluran pencernaan burung, penyu, dan ikan yang mengganggu kesehatan hingga berpotensi mematikan. Merujuk penelitian Jenna R Jambeck dan kawan-kawan (12 Februari 2015, di www.sciencemag.org), Indonesia menduduki peringkat kedua "pembuang" sampah plastik ke lautan setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka (Kompas, 2015f). Perilaku masyarakat yang beranggapan drainase (got dan selokan), sungai, saluran irigasi, danau sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan lautan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) harus dihentikan. Pengelolaan sampah dengan penyediaan TPS sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir di

environment that ultimately affect the lives of all socio-economic communities in coastal areas and oceans. Oil spills also affect the marine tourism, the tourist areas will be damaged, decreasing the number of visitors as well as environmental degradation around the area of tourism. Oil spills also inhibit or reduce the transmission of sunlight into the seawater due to blocked by the oil and reflected back into the air.

In addition to oil spills, marine pollution also comes from the trash. Hideshige Takada of the Laboratory of Organic Geochemistry (LOG) Tokyo University of Agriculture and Technology Exposure on March 3, 2014, in Surabaya, showed that in the vortex of Pacific the number microplastic (measuring less than 5 mm) six times more than plankton. Micro-plastic is found in the digestive tract of birds, turtles, and fish which affect health, potentially lethal. Referring to Jenna R Jambeck and colleagues research (February 12, 2015, at www.sciencemag.org), Indonesia ranked second as "waster" plastic garbage into the sea after China, followed by the Philippines, Vietnam, and Sri Lanka (Kompas, 2015f). The behavior of people who thinks that drainage (gutters and sewers), rivers, irrigation canals, lakes as Temporary Shelters Trash (TPS) and the ocean as the final disposal (TPA/landfill) should be stopped. Waste management by providing TPS as temporary shelters garbage before being transported to the recycling, management, and final processing at landfill essential for its existence facilitated to reduce waste discharged into the sea. However, based on the data PODES 2014, the number of

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

TPA penting untuk difasilitasi keberadaannya untuk mengurangi sampah yang terbuang ke laut. Namun berdasarkan data PODES 2014, jumlah desa pesisir yang mempunyai fasilitas TPS hanya sekitar 11,05 persen. Perilaku terhadap sampah sebagian besar keluarga yang tinggal di desa pesisir antara lain: membuang sampah di sungai atau saluran irigasi atau danau atau laut sebesar 21,57 persen, membuang sampah dalam lubang atau membakar (55,69 persen), dan hanya 11,34 persen sebagian besar keluarga yang tinggal di desa pesisir membuang sampah di tempat sampah kemudian diangkut (Lampiran Tabel 4.56).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restauran*), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Limbah cair rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu *black water* dan *grey water*. Ketersediaan tempat pembuangan air besar bagi setiap rumah tangga sangatlah penting. *Black water* atau limbah yang berasal dari air tinja mengandung mikroba pathogen, air seni yang mengandung nitrogen dan fosfor, serta kemungkinan kecil adanya mikro organisme. Jumlah desa pesisir yang mempunyai jamban sendiri ada 66,54 persen, dan yang tidak mempunyai jamban ada 21,40 persen (Lampiran Tabel 4.57). Sedangkan air bekas cucian, dapur, dan kamar mandi yang tidak mengandung tinja disebut sebagai *grey water*. *Grey water* dari kegiatan domestik, baik dari rumah tangga, perniagaan, dan industri, dialirkan melalui pipa menuju ke sungai atau saluran yang bermuara ke laut. Tempat pembuangan limbah cair desa pesisir terdiri dari lubang resapan (7,62 persen), drainase

coastal villages provided TPS only about 11.05 percent. The behavior to the garbage of most families living in coastal villages are : throw garbage in rivers or irrigation canals or lakes or the sea by 21.57 percent, throwing garbage in the hole or burned (55.69 percent), and only 11.34 percent of most families living in coastal villages throw garbage in the trash is then transported (Appendix of Table 4.56).

According to the Decree of Minister of Environment Number 112 of 2003 concerning Domestic Wastewater Quality Standard, domestic wastewater is wastewater from business or settlement activities (real estate), restaurants, office, commercial, apartments, and dormitories. Domestic wastewater is divided into two, there are black water and gray water. Availability of toilet facility for each household is essential. Blackwater or waste water originating from the stool contains microbial pathogens, urine contains nitrogen and phosphorus, as well as the possibility of tiny micro-organisms. The number of coastal villages has private toilet by 66.54 percent, and no toilet facility by 21.40 percent (Appendix of Table 4.57). While water used from washing, kitchen, and bathroom that does not contain feces referred to as gray water. Grey water from domestic activities, from households, commerce, and industry, flowed through the pipes leading to the river or channel that empties into the sea. Liquid waste disposal site of coastal villages consists of infiltration hole (7.62 percent), drainage (drains/gullies) (22.36 percent), directly discharged into rivers or irrigation canals or lakes or the sea (11.37 per-

berupa got dan selokan (22,36 persen), langsung dibuang ke sungai atau saluran irigasi atau danau atau laut (11,37 persen), dalam lubang atau tanah (57,22 persen), dan lainnya (1,43 persen) (Lampiran Tabel 4.57).

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah merubah fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsi sebelumnya. Perubahan ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konversi lahan pertanian sawah menjadi lahan pertanian non sawah maupun menjadi lahan non pertanian akan berdampak terhadap keberlangsungan swasembada pangan, memberikan ancaman terhadap kualitas lingkungan seperti hilangnya lahan untuk menampung kelebihan air sehingga akan menimbulkan bencana banjir, serta akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data PODES 2014, selama setahun terakhir konversi lahan pertanian sawah di desa pesisir menjadi lahan non sawah sebesar 4,01 persen dan menjadi lahan non pertanian sebesar 4,88 persen (Lampiran Tabel 4.58).

Berdasarkan PODES 2014, bencana yang paling sering terjadi di desa pesisir selama tiga tahun terakhir adalah banjir (23,06 persen), dimana 20,67 adalah bencana banjir dan 2,39 persen banjir bandang. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang paling sering terkena bencana banjir dalam kurun tiga tahun terakhir sebanyak 331 peristiwa (Lampiran Tabel 4.59).

Kualitas air laut dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia maupun kejadian bencana alam. Terdapat beberapa parameter yang digunakan sebagai patokan pengukuran kualitas air laut atau biasa disebut baku mutu air laut. Standar baku mutu air laut diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 51 Tahun

cent), in the hole/open area (57.22 percent), and others (1.43 percent) (Appendix of Table 4:57).

Land use or land conversion is a change of the function of some or all of the land from the previous function. This change will have a significant impact on the economic, social, and environmental. Conversion of wetland area into agricultural dryland and non-agricultural land will have an impact on the sustainability of self-sufficiency, giving a threat to environmental quality such as loss of land to accommodate the excess water that will cause floods, and will have an impact on employment. Based on data PODES 2014, during last year the conversion of wetland area into agricultural dryland in a coastal village by 4.01 percent and conversion of wetland area into non-agricultural land by 4.88 percent (Appendix of Table 4.58).

Based on PODES 2014, the most frequent disaster that occurred in the coastal village during the last three years is floods (23.06 percent), where 20,67 percent is floods and 2.39 percent is flash floods. Sulawesi Tengah was a province with the most often affected by floods in the past three years reached 331 events (Appendix of Table 4.59).

The quality of sea water can be affected by human activities and natural disasters. There are several parameters that are used as a benchmark measurement of the quality of sea water or so-called seawater quality standards. Sea water quality standards regulated in Decree of Minister of Environment Number 51 of 2004. Appendix of

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

2004. Lampiran Tabel 4.60 menyajikan kualitas air laut di sekitar pantai beberapa pelabuhan di Indonesia.

Table 4.60 presents the seawater quality around the coast ports in Indonesia.

4.11. Tindak Pidana dan Pengawasan Kelautan Perikanan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, yaitu laut dan perikanan, harus melindungi setiap jengkal wilayahnya dengan berbagai sumber daya manusia yang ada. Sumber daya tersebut adalah nelayan dan masyarakat sekitar. Selain itu pemerintah juga berperan dalam pengaturan dan pengawasan masalah perikanan di Indonesia.

Data speedboat pengawas disajikan pada lampiran Tabel 4.61. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah speedboat pengawas 109 unit. Sebaran speedboat pengawas di Pulau Sumatera terdapat 27 unit. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan speedboat pengawas terbanyak yaitu 9 unit. Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara masing-masing terdapat 11 unit speedboat pengawas. Pulau Kalimantan terdapat 10 unit speedboat pengawas dan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan speedboat pengawas terbanyak (5 unit). Pulau Sulawesi terdapat 18 unit speedboat pengawas. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan speedboat pengawas terbanyak yaitu 4 unit. Sementara untuk Kepulauan Maluku dan Papua jumlahnya 32 unit speedboat pengawas dan Papua sebagai provinsi dengan speedboat pengawas terbanyak (15 unit). Pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2015, jumlah awak kapal pengawal telah mencapai 1.623 orang (lampiran

4.11. Fisheries Violation and Marine Affairs and Fisheries Surveillance

Indonesia as a country rich in natural resources, i.e. the marine and fishery, must protect every inch area with existing human resources. These resources are fishermen and the surrounding community. Besides, the government also plays a role in the regulation and supervision of fisheries issues in Indonesia.

Surveillance speedboats data are presented in the appendix of Table 4.61. The data shows that the number of surveillance speedboat 109 units. Distribution of a surveillance speedboat in the island of Sumatra, reach 27 units. Kepulauan Riau province is the province with the largest surveillance speedboats, which are 9 units. In the island of Java, Bali, and Lombok respectively are 9 units surveillance speedboats. There are 11 surveillance speedboats in Kalimantan Island and Kalimantan Barat Province with the largest surveillance speedboat (5 units). In Sulawesi Island, there are 18 surveillance speedboats. Sulawesi Utara Province and Sulawesi Tengah Province are the provinces with the largest surveillance speedboat which is 4 units. Moreover, the number of surveillance speedboat in the island of Maluku and Papua are 32 units and Papua as a province with the largest surveillance speedboat (15 units). The number of the surveillance vessel's crew during 2011 up to 2015 amounted 1,623 people

Tabel 4.62).

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomer 9 tahun 1985 pada awalnya mengatur peradilan tindak pidana perikanan, namun seiring perkembangan kebutuhan hukum dan perkembangan teknologi maka muncul tindakan-tindakan pidana perikanan baru, undang-undang ini dianggap tidak mampu mengantisipasi perkembangan tersebut. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomer 45 tahun 2009 sebagai pengganti Nomer 31 Tahun 2004. Pada undang-undang terbaru ini terselip tiga pasal yang disesuaikan dengan perkembangan hukum dan teknologi yang ada saat ini. Pasal 71 ayat (2) berisi tentang peradilan khusus, dimana artinya adalah pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 71 A berisi tentang pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan yang terjadi di WPP-RI, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jika tidak tersedia pengadilan perikanan maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam wilayah hukumnya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut adalah isi dari pasal 71 ayat (3). Pasal-pasal tersebut selama ini sudah dilaksanakan dalam praktik Peradilan dan diharapkan akan memberi efek jera bagi pelanggarnya (Zainuddin, 2013).

Jumlah tindak pidana perikanan menurut provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 4.63, di mana pada tahun 2015 jumlahnya naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2014. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah tindak pidana perikanan terbanyak (50 kasus). Sedangkan jumlah tindak pidana peri-

(Appendix of Table 4.62).

The Law Number 31 of 2004 about Fishery as a replacement of Law Number 9 of 1985 initially manage the fishery violation, but because of the development needs of the legal and technological that appear new fishery violation, this law are considered incapable of its anticipating. Then, the government issued Law Number 45 of 2009 as a substitute for Law Number 31 of 2004. In the latest law is tucked three articles adapted to law and technologies developments that exist today. Article 71 paragraph (2) about the special court, which means the fisheries court is a special court in the general court. Article 71-A about fisheries court that has authority to examine, hear and decide fishery violation occurring in WPP-RI, both conducted by Indonesian citizens and foreign nationals. If it is not available fisheries court then the District Court concerned within its jurisdiction the authority to examine, hear and decide the case and has already been implemented in the judiciary is the content of Article 71 paragraph (3). Those articles have been already implemented in the judicial practice and expected to give deterrent effect to offenders (Zainuddin, 2013).

The number of fishery violation by province is presented in Appendix of Table 4.63, which in 2015 the number has doubled compared to previous year. Kalimantan Barat was a province with the highest number of fishery violation (50 cases). While the number of fishery violation by type is presented in Appendix of Table 4.64.

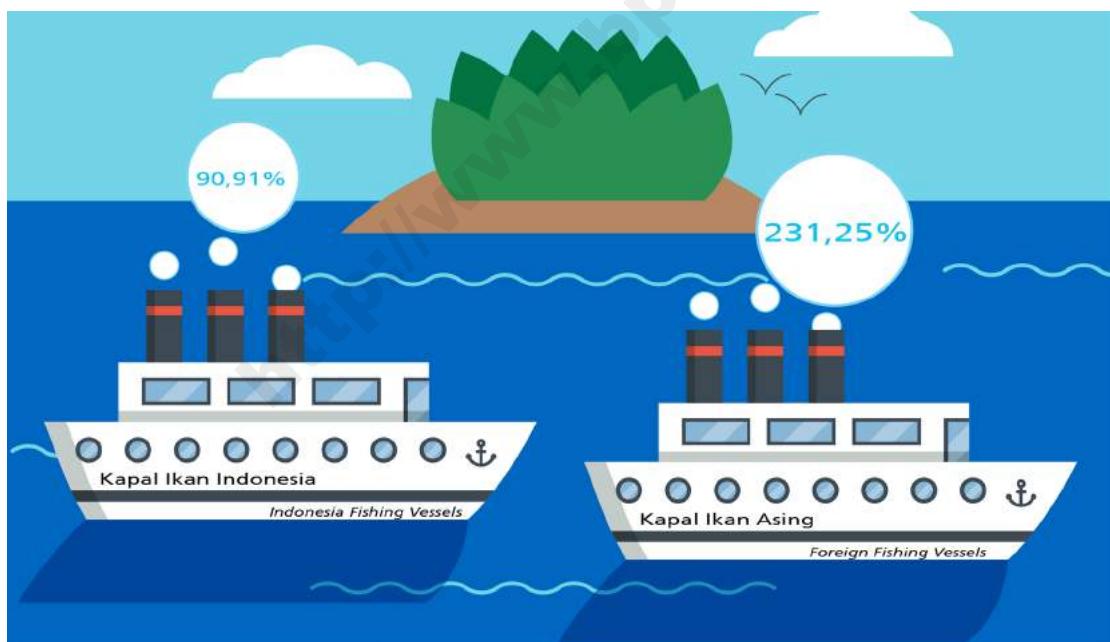
STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

kanan menurut jenisnya tersaji pada lampiran Tabel 4.64.

Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua namun hasil ekspor sumber daya laut hanya nomer dua se-Asia Tenggara. Hal ini diperparah oleh data FAO, di mana Indonesia mengalami kerugian US\$ 50 miliar per tahun akibat ilegal fishing (Merdeka, 2015). Dan hasil operasi kapal pengawas tersaji pada lampiran Tabel 4.65. Pada tahun 2015, hasil operasi kapal pengawas naik 90 persen untuk penangkapan Kapal Ikan Indonesia (KII) dan naik dua kali lipat untuk penangkapan Kapal Ikan Asing (KIA) dibandingkan tahun 2014 (gambar 4.10).

Indonesia is the country with the second longest coastline, but the result of export of marine resources is only number two in Southeast Asia. This is compounded by the FAO, where Indonesia loses US\$ 50 billion per year due to illegal fishing. (Merdeka, 2015). And joint operation of surveillance vessels presented in Appendix of Table 4.65. In 2015, a joint operation of surveillance vessels increased 90 percent to arrest the Indonesia Fishing Vessel (KII) and increased twice to arrest Foreign Fishing Vessel (KIA) compared to 2014 (figure 4.10).

Gambar 4.10. Kenaikan Hasil Operasi Kapal Pengawas, 2015
Figure 4.10. Increasing of Joint Operation of Surveillance Vessels, 2015



Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan / Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

4.12. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sumber daya manusia Indonesia di bidang kelautan dan perikanan akan semakin maju jika pemerintah, dalam hal ini KKP sebagai instansi yang berwenang, serius menggarap sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan. Dibutuhkan tenaga-tenaga profesional, inovatif, berkinerja tinggi, berwawasan lingkungan, berjiwa wira usaha dan bahari, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. KKP hingga saat ini menaungi 13 sekolah perikanan yang terbagi menjadi 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 Akademi Perikanan dan 1 Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Pada lampiran Tabel 4.66 disajikan jumlah lulusan sekolah-sekolah tersebut. Pada kurun waktu 2011 sampai dengan bulan 2015, jumlah lulusannya telah mencapai 7.515 siswa.

Selain menyediakan fasilitas sekolah, pemerintah telah menyebarluaskan petugas penyuluhan perikanan ke seluruh provinsi. Penyuluhan merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. Peranan penyuluhan perikanan adalah memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama perikanan, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama kepada sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Jumlah penyuluhan perikanan selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 berjumlah 13.815 orang (lampiran Tabel 4.67).

Sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang terdapat di daerah pesisir juga perlu mendapat perhatian khusus, agar sumber daya manusianya mengalami peningkatan ilmu dan kualitas hidup untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan. Data

4.12. Education Facilities and Infrastructure

Indonesia's human resources in marine fisheries will be more advanced if the government, in this case the competent authority KKP seriously working on educational facilities of marine fisheries It required professionals, innovative, high-performance, environmentally friendly, spirited entrepreneurship, and marine, as well as the master of science and technology in the field of maritime affairs and fisheries. There is 13 fisheries school under the auspices of KKP. They are divided into 9 Fisheries High School (SUPM), 3 Academy and 1 Institut of Fisheries (STP). The number of graduate schools presented in Appendix of table 4.66. In the period of 2011 up to 2015, the number of graduates has reached 7,515 students.

In addition to providing school facilities, the government also has distributed the fishery information agent to all provinces. Fishery information agent is an important part in supporting the industrialization of marine and fisheries policy. The role of fishery information agent is to facilitate the process of empowerment of the main actors of fisheries, the main perpetrators seeking easy access to resources, technology, and other resources to enable them to develop their business. The number of the fishery information agent during 2011 up to 2015 amounted 13,815 people (Appendix of Table 4.67).

Facilities and infrastructure of basic services of education and health are contained in the coastal areas also need special attention, so that human resources have increased knowledge and advance the quality of life for marine and fisheries sector. Infrastructures data were approximated

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

tersebut didekati dengan data sarana dan prasarana yang ada di desa pesisir dari hasil publikasi Statistik Potensi Desa tahun 2014.

Jumlah desa pesisir yang mempunyai fasilitas pendidikan menurut provinsi dan tingkat pendidikan berdasarkan data Statistik Potensi Desa 2014 dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.68. Terdapat 63,09 persen desa pesisir yang sudah mempunyai TK, jumlah desa pesisir yang mempunyai SD melebihi dari jumlah desa itu sendiri, 51,97 persen desa pesisir yang mempunyai SLTP, 20,64 persen desa pesisir yang mempunyai SMU, dan 9,83 persen desa pesisir yang mempunyai SMK.

4.13. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Desa Pesisir

Indonesia harus memperhatikan masalah sosial ekonomi daerah pesisir karena sangat penting untuk pembangunan sumberdaya laut dan pesisir yang berkelanjutan. Masalah sosial ekonomi tersebut diantaranya ketersediaan pelayanan dari sarana kesehatan, perdagangan dan hotel, lembaga ekonomi seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat untuk pemberdayaan penduduk lokal, dan pengentasan kemiskinan penduduk wilayah pesisir. Serta sarana pendukung kehidupan masyarakat sehari-hari seperti ketersediaan listrik, sumber air minum, bahan bakar memasak, sarana transportasi, dan sarana komunikasi.

Pada lampiran Tabel 4.69 menyajikan banyaknya desa pesisir mempunyai fasilitas kesehatan pada tahun 2014. Terdapat sekitar 19,45 persen desa pesisir yang memiliki polindes, 28,90

by the data of the 2014 Village Potential Statistics.

The numbers of coastal villages have education facilities by province and level of education based on data from the 2014 Village Potential Statistics in Appendix of Table 4.68. Among all coastal villages, 63.09 percent villages already have kindergarten, villages that have elementary school access the number of the village itself, 51.97 percent villages have junior high school, 20.64 percent villages have senior high school, and 9.83 percent villages have vocational high school.

4.13. Socio-Economic Infrastructure in Coastal Village

Indonesia should pay attention to socio-economic problems of coastal areas, as it is very important for the development of marine resources and coastal development. Such as the availability of services from the health, trade, and hotel, financial institutions such as cooperatives, non-government organizations to empower local residents, and poverty reduction for the coastal area population. As well as the availability of supporting life services from electricity, drinking water, cooking fuel, transportation, and communications.

In Appendix of Table 4.69 presented the number of coastal villages that had health facility in 2014. There were about 19.45 percent villages had village maternity post, 28.90 percent villages

persen desa pesisir yang memiliki poskesdes, 35,28 persen desa pesisir yang memiliki puskesmas pembantu dan 96,23 persen desa pesisir yang memiliki posyandu.

Sarana perdagangan dan hotel akan mendorong dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat pesisir. Lampiran Tabel 4.70 menyajikan jumlah desa pesisir yang mempunyai fasilitas ekonomi pada tahun 2014. Terdapat sekitar 5,97 persen desa pesisir yang mempunyai hotel, 8,77 persen desa pesisir yang mempunyai penginapan, dan 9,03 persen desa pesisir yang mempunyai restoran. Tersedianya fasilitas tersebut akan membantu dalam peningkatan wisata bahari.

Koperasi merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendorong usaha perikanan agar mampu meningkatkan pendapatan anggotanya, terutama nelayan. Persentase keberadaan koperasi di desa pesisir berdasarkan jenis koperasi dari yang terbesar berturut-turut; Koperasi Simpan Pinjam 15,44 persen, Koperasi Lainnya 10,52 persen, Koperasi Unit Desa (KUD) 6,88 persen, dan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat 0,88 persen (lampiran Tabel 4.71).

Program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa pesisir terdiri dari pemberian dana modal usaha pertanian, nonpertanian, dan hibah usaha produktif. Selain itu ada program pembangunan/perbaikan transportasi, sarana pendidikan, permukiman dan kesehatan, perekonomian, peningkatan keteknologiannya produksi, pemasaran dan penguatan kelembagaan sosial.

Sejak tahun 2009, seluruh kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) diubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP). PNPM-KP secara umum bertujuan untuk mening-

had village's health post, 35.28 percent villages had the subsidiary public health center, and 96.23 percent villages had integrated health post.

Trade facilities and the hotel will support and increase the economy of coastal communities. Appendix of Table 4.70 presents the number of coastal villages with economic facilities in 2014. There are about 5.97 percent coastal villages that had a hotel, 8.77 percent villages that had an inn, while 9.03 percent villages that have a restaurant. The availability of these facilities will also increase the marine tourism.

Cooperative is an institution established to encourage fishing effort in order to increase the income of its members, especially the fishermen. The coastal village cooperatives percentage based on the type of the largest cooperatives; Saving and Loan Cooperative 15.44 percent, Other Cooperatives 10.52 percent, Village Cooperatives Unit (KUD) 6.88 percent, and the Cooperatives of Small Industry and Citizen Handicraft 0.88 percent (Appendix of table 4.71).

Government programs that are aimed at the community of coastal villages empowerment consist of agricultural capital funds, non-agricultural capital funds, and productive business grants. Moreover, there are development and improvement in several aspects, including transportation, education facility, housing and health, economy, production skill enhancement, marketing, and strengthening social Institutional.

Since 2009, all Economic Empowerment of the Coastal Community (PEMP) activities has been changed into National Program for Community Empowerment Marine Affairs and Fisheries (PNPM-KP). Generally, PNPM-KP aimed

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

katkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kelompok masyarakat miskin bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya PNPM-KP tidak serta merta menghilangkan program yang sudah berjalan. Pendekatan program yang digunakan sepenuhnya *bottom up*, masyarakat sendiri yang merencanakan program, melaksanakan dan melakukan monitoring serta evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

Tahap pemberdayaan yang dikembangkan dalam PNPM-KP adalah tahap inisiasi, tahap penguatan, dan tahap peningkatan kemandirian. Tahap inisiasi yaitu masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat dibina, dilatih berbagai ketrampilan dan diberikan pendampingan. Tahap penguatan yaitu kelompok masyarakat terbina dilatih untuk mampu memanfaatkan skema kredit dan usaha mikro, kecil dan menengah, diberikan pendampingan dan bantuan pemasaran serta peningkatan kualitas produk. Sedangkan tahap peningkatan kemandirian yaitu kelompok masyarakat yang diperkuat ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga mampu mengakses kredit perbankan, difasilitasi dengan pendampingan serta penguatan kemitraan ekonomi dan sosial (KKP, 2010).

Pada lampiran Tabel 4.72 menunjukkan bahwa program PNPM selama tiga tahun terakhir yang kegiatannya berupa pembangunan atau perbaikan infrastruktur transportasi, pendidikan, pemukiman dan kesehatan, serta perekonomian di desa pesisir ada 59,39 persen. Kegiatan PNPM untuk peningkatan kapasitas perekonomian berupa dana bergulir atau simpan pinjam untuk modal usaha pertanian maupun non pertanian serta dana hibah untuk usaha produktif di desa pesisir ada 88,23 persen. Sedangkan kegiatan PNPM berupa peningkatan kapasitas sosial

to improve welfare and employment opportunities of marine and fisheries poor communities. In the implementation, PNPM-KP did not eliminate the programs that are running. The approaching program that used is completely bottom up, the communities planning the program, implementing and monitoring as well as evaluation in accordance with the determined mechanism by themselves.

Developed stage of empowerment in PNPMKP is initiation stage, strengthen stage, and autonomy improvement stage. Initiation stage is the communities through community groups are nurtured, trained with various skills, and given assistance. Strengthen stage is the nurture community groups trained to be ably utilized credit scheme and micro, small and medium enterprises, provided mentoring and marketing assistance and also improvement of product quality. Whereas autonomy improvement stage is the strengthen community groups are enhanced in capacity and ability so they can access bank credits facilitated by the assistance and the social and economic strengthen partnership (KKP, 2010).

The appendix of Table 4.72, showed that PNPM program over the last three years with development or improvement activity of transport, education, housing and health, and economy infrastructure in coastal villages was 59.39 percent. PNPM activities for the enhancement of economy capacity in the form of revolving funds or savings and capital fund for agriculture and non-agriculture as well as grants for productive business grants in coastal villages were 88.23 percent. While PNPM activities enhancement of social community capacity consisting of produc-

kemasyarakatan yang terdiri dari ketrampilan produksi dan pemasaran hasil produksi, serta penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan di desa pesisir ada 10,19 persen.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya laut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Pemerintah mengimpor garam 2,2 juta ton pada tahun 2010, dimana 80 persen garam diimpor dari Australia, 15 persen dari India, 3 persen dari China, dan sisanya dari negara lain (Widiarto, 2012). Selain cuaca, faktor kurang memadainya teknologi, sarana dan prasarana, rendahnya kemampuan dalam pemasaran, serta penguasaan jalur distribusi oleh pedagang membuat rendahnya produktivitas dan kualitas garam rakyat. Rendahnya kualitas garam yang diproduksi menyebabkan harga garam turun. Kondisi ini mempengaruhi kesejahteraan petambak garam (Izzaty dan Pernama, (2011) dalam Rindayani dan Ma'ruf (2013)).

Di tahun 2011, pemerintah melalui KKP melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya petambak garam. Selain itu PUGAR dilaksanakan dalam rangka swasembada garam nasional pada tahun 2014. Menurut KKP, kebutuhan garam untuk konsumsi nasional mencapai 1,5 juta ton per tahun. Program ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan PNPM-KP.

Program PNPM Mandiri KP pada tahun 2011, dilaksanakan melalui dua komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan PUGAR dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan (KKP, 2011).

tion skills and marketing of products, as well as social community institutional in a coastal village was 10.19 percent.

Indonesia as a country rich in marine resources and coastal potential has not been able to fulfill the need of national salt. The government imported 2.2 million tons of salt in 2010. 80 percent of salt is imported from Australia, 15 percent of India, 3 percent of China, and the rest from other countries (Widiarto, 2012). Besides the weather, factor of inadequate technology, facilities, and infrastructure, low ability in marketing, as well as domination of the distribution channel by vendors causing the low of productivity and the quality of salt production. The low quality of salt produced causes the price of salt down. This condition affects the welfare of farmers salt (Izzaty and Pernama, (2011) in Rindayani and Ma'ruf (2013)).

In 2011, the government through the KKP implement the Community Empowerment for Salt Production (PUGAR) in the context of poverty alleviation especially salt farmers. In addition, PUGAR implemented national self-sufficiency of salt in 2014. According to KKP, the needs of the national consumption of salt demand reached 1.5 million tons per year. This program is one of the implementations of PNPM-KP program.

In 2011, PNPM-KP is implemented through two components, there are Rural Fishery Development Program (PUMP) and (PUGAR) in the context of poverty alleviation through capacity-building and increasing communities income and also fisheries and marine entrepreneur growth (KKP, 2011). While in 2012, the implementation

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

Sedangkan pada tahun 2012, program ini pelaksanaanya dilakukan melalui tiga komponen yaitu PUMP Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; PUGAR; dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan upaya kegiatan pemberdayaan, antara lain melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat ke laut dan perikanan pelaksana PNPM-KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok.

Pada lampiran Tabel 4.73 menunjukkan bahwa total produksi garam di Indonesia mencapai sekitar 2,7 juta ton pada tahun 2015. Jawa Timur merupakan provinsi yang mempunyai produksi garam terbesar yaitu sekitar 856 ribu ton yang berasal dari lahan seluas 8.525,88 hektar dan jumlah petani tambak sebanyak 6.900 orang. Produksi garam meningkat 10,62 persen dibandingkan dengan produksi tahun lalu. Peningkatan produksi garam ini merupakan keberhasilan PUGAR yang dicanangkan oleh pemerintah. Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi penghasil garam terbesar di Indonesia, 73,64 persen produksi garam yang dihasilkan berasal dari Pulau Madura.

Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata, tidak terkecuali masyarakat pesisir. Listrik sebagai kebutuhan dasar akan energi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

of this program is implemented through three components, PUMP of Capture Fisheries, Aquaculture, Processing and Marketing of Fishery Products; PUGAR; and Resilient Coastal Village Development (PDPT).

PUMP, PUGAR, and PDPT are effort empowerment activities, through the facilitation of business development aid for fishermen, fish farmers, fish processors/marketers and salt farmers in Marine and Fishery Business Group (KUKP). KUKP is a community institution of marine and fisheries PNPM-KP for the distribution of aid business development for members of the group.

The appendix of Table 4.73 shows that the total salt production in Indonesia reached about 2.7 million tons in 2015. Jawa Timur is a province that has the largest salt production that reached around 856 thousand tons from an area of 8,525.88 hectares and the number of salt farmers reached 6,900 people. Salt production increased by 10.62 percent compared previous year. The increasing of salt production is the success of PUGAR by the government. Jawa Timur as the largest salt-producing province in Indonesia, 73.64 percent of the production of salt produced from Madura Island.

The purpose of national development is to create wealth and prosperity for people. The results of development should be enjoyed by all the people in a fair and equitable, no exception for coastal communities. Electricity as basic needs for energy needed in the daily life. In the appendix of Table 4.74 shows that showed that most

Pada lampiran Tabel 4.74 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang tinggal di desa pesisir sudah menggunakan listrik (93,05 persen), dimana 86,31 persen keluarga yang tinggal di desa pesisir menggunakan listrik PLN, 6,74 persen menggunakan listrik non PLN, dan 6,95 persen sisanya tanpa menggunakan listrik.

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi seluruh makhluk hidup. Air diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan domestik seperti minum, masak, dan mandi. Permasalahan sumber daya air terbagi menjadi dua, yaitu kualitas dan kuantitas. Kuantitas air yang berlimpah tidak menjamin kualitasnya, misalnya masyarakat pesisir. Kuantitas air yang melimpah akan tetapi kualitas untuk digunakan sebagai air minum tidak memenuhi persyaratan baku mutu, kecuali sudah melalui tahapan teknologi tertentu. Hal ini lebih parah jika terjadi bencana banjir rob yang mengakibatkan sumber air minum tercampur dengan air laut. Air yang tercampur dengan air laut akan memiliki tingkat salinitas yang lebih tinggi sehingga tidak layak kualitasnya untuk dikonsumsi. Sumber utama air minum masyarakat pesisir paling banyak berasal dari sumur (36,66 persen), diikuti mata air (21,52 persen). Sedangkan yang paling kecil berasal dari ledeng tanpa meteran (4,00 persen) (Lampiran Tabel 4.75).

Lampiran Tabel 4.75 juga menampilkan jenis bahan bakar memasak yang digunakan oleh masyarakat pesisir. Terdapat 30,12 persen desa pesisir yang masyarakatnya menggunakan LPG dan 14,16 persen desa pesisir yang masyarakatnya menggunakan minyak tanah. Namun masyarakat pesisir cenderung lebih banyak menggunakan kayu bakar untuk memasak (54,92 persen). Ketersediaan kayu bakar yang berasal dari mangrove lebih mudah diperoleh masyarakat

of the families living in the coastal villages using electricity (93.05 percent), where 86.31 percent of families living in coastal villages using the PLN electricity, 6.74 percent non-PLN electricity, and 6.95 percent without electricity.

Water is an absolute necessity for all living beings. The water required for domestic needs such as drinking, cooking, and bathing. The problem of water resources is divided into two, that are quality and quantity. The quantity of water in abundance does not guarantee its quality, for example, coastal communities. The quantity of water is abundant but the quality to be used as a drinking water does not meet the requirements of the quality standards, unless already through the stages of a particular technology. It is even worse if a tidal flood happens, the source of drinking water will be mixed with sea water. This water will have a higher salinity level so the quality of the water is not worth for consumption. The main source of drinking water for coastal communities mostly from wells (36.66 percent), followed by the wellspring (21.52 percent). While the smallest came from piped without installation (4.00 percent) (Appendix of Table 4.75).

Appendix of Table 4.75 also displays the type of cooking fuel used by coastal communities. There is 30.12 percent of coastal villages where their people use LPG and 14.16 percent of coastal villages where their people use kerosene. However, coastal communities tend to use firewood for cooking (54.92 percent). The availability of firewood originating from the mangroves more accessible for coastal communities. Mangrove products are already widely cultivated and

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

pesisir. Produk mangrove yang sudah diusahakan secara meluas dan komersil yang bisa digunakan sebagai bahan bakar memasak misalnya arang yang berasal dari jenis mangrove *Rhizophora mucronata* dan *Rh. Apiculata* serta kayu bakar yang berasal dari jenis mangrove *Ceriops*, *Avicennia*, *Xylocarpus*, *Heritiera*, *Excoecaria*, *Bruguiera* dan *Lumnitzera* (Onrizal, 2008). Namun penggunaannya perlu tetap diawasi jangan sampai merusak ekosistem mangrove.

Wilayah Indonesia yang berbentuk gugusan pulau yang terpisahkan oleh lautan menjadikan transportasi memegang peranan penting dan strategis. Transportasi berperan baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan kewilayahan. Dari segi ekonomi, transportasi berperan dalam memperlancar proses produksi dan distribusi, serta membantu tercapainya pengalokasian sumber ekonomi secara optimal. Transportasi merupakan sektor penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Manfaat transportasi dari segi sosial adalah memberikan kemudahan dalam pelayanan perorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan wisata, dan lain-lain. Manfaat dari segi politik dari transportasi adalah menciptakan persatuan nasional, pemerataan pembangunan, melindungi keamanan negara terhadap serangan dari luar, dan pemindahan penduduk yang lebih efisien misanya jika terjadi bencana. Sedangkan manfaat dari segi kewilayahan adalah memperlancar hubungan antar wilayah dan negara lain. Alat transportasi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu darat, laut, dan udara. Ketiganya berperan penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsinya sebagai alat transportasi.

*commercially that can be used as cooking fuel, for example, charcoal derived from mangrove species *Rhizophora mucronata* and *Rh. Apiculata* and firewood originating from species *Ceriops*, *Avicennia*, *Xylocarpus*, *Heritiera*, *Excoecaria*, *Bruguiera*, and *Lumnitzera* (Onrizal 2008). However, its use needs to remain supervised in order not to destroy mangrove ecosystem.*

The region of Indonesia shaped group of islands separated by oceans makes transport plays an important and strategic role. Transport plays a role both in terms of economic, social, political, and territorial. In terms of economics, transport instrumental in expediting the process of production and distribution, as well as help to achieve the optimal allocation of economic resources. Transportation is supporting the construction sector (the promoting sector) and service providers (the servicing sector) for economic development. Transportation benefit in terms of social services is provided convenience in service of individuals or groups, or the exchange of information delivery, travel, and others. The benefits of the political aspect of transportation are to create national unity, equitable development, protecting the security of the country against attacks from the outside, and a more efficient transfer of population's in case mass disaster happen. While the benefits in terms of territoriality are to facilitate relations between the region and other countries. Means of transportation in Indonesia is divided into three, there are land, sea, and air. All three are an important and complementary role in its function as a means of transportation.

Transportasi dibedakan menjadi dua jenis moda utama yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Penyediaan moda transportasi umum yang memadai, nyaman, aman, murah, tepat waktu, dan terintegrasi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Lampiran Tabel 4.76 menyajikan sarana dan prasarana transpor-tasi antar desa pesisir. Lalu lintas dari dan ke desa paling besar melalui darat 71,21 persen, melalui air 7,69 persen, dan kombinasi keduanya 21,10 persen. Keberadaan angkutan umum dengan trayek tetap sebesar 49,80 persen, tanpa trayek 28,81 persen, dan 21,39 persen desa pesisir tidak terdapat sarana angkutan umum.

Sarana komunikasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Dengan sarana komunikasi yang memadai akan membuka akses pada sumber pemodal-an, pasar, dan program penyuluhan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Tanpa adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kualitas hidup masyarakat tidak akan meningkat. Komunikasi diperlukan sebagai proses dialogis dalam penyampaian ide, informasi, dan inovasi oleh pihak-pihak terkait untuk menunjang terjadinya proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik (Heriyanti, 2014).

Lampiran Tabel 4.77 menyajikan sarana komunikasi di desa pesisir. Jumlah desa pesisir yang mempunyai menara telepon seluler (*Base Transceiver Station/BTS*) sebesar 32,17 persen. BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi dari atau ke telepon, telepon seluler, dan jaringan nirkabel. Untuk layanan pos, didukung oleh adanya kantor pos pembantu (4,73 persen) dan pos keliling (7,03 persen). Sedangkan program atau siaran televisi

Transportation can be divided into two main types of transportation modes, there is public and private transportation. The provision of adequate, comfortable, safe, inexpensive, timely, and integrated public transportation is a problem that must be resolved. Appendix of Table 4.76 presents the facilities and infrastructure of transportation between coastal villages. Traffic facility from one village to another village by road 71.21 percent, by water 7.69 percent, and the combination of both land and sea 21.10 percent. The existence of public transport facilities with permanent route 49.80 percent, without permanent route 28.81 percent, and 21.39 percent of coastal villages have no public transport.

Facilities of communication can improve the quality of life of coastal communities. With adequate means of communication will open up access to the sources of capitalization, market, and extension programs to improve productivity and economic competitiveness. Without a change in attitude, knowledge, and skills, quality of life will not be increased. Communication is needed as a dialogical process in the delivery of ideas, information, and innovation by the parties to support the process of social change towards the better (Heriyanti, 2014).

Appendix of Table 4.77 presents the facilities of communication in the coastal villages. The number of coastal villages that have Base Transceiver Station (BTS) reached 32.17 percent. BTS serves as the sender and receiver (transceiver) communication signals from or to telephones, cellular phones, and wireless networks. For postal services, supported by the post office assistant (4.73 percent) and roving post office (7.03 percent). While the program or television broadcasts

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

yang dapat diterima untuk TVRI dan TVRI swasta sama-sama 97,43 persen.

that can be received for TVRI and TVRI private equally 97.43 percent.

4.14. Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan (NTN)

Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan atau disebut juga Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani subsektor perikanan, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani subsektor perikanan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani subsektor perikanan baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani subsektor perikanan. Dalam hal ini petani subsektor perikanan sebagai produsen dan konsumen. Dalam kapasitas petani subsektor perikanan sebagai produsen dinyatakan sebagai klasifikasi indeks yang diterima nelayan (It) dan kapasitas petani subsektor perikanan sebagai konsumen dinyatakan dalam indeks yang dibayar nelayan (Ib).

It berasal dari indeks yang diterima petani subsektor perikanan sebagai penangkap ikan dan sebagai pembudidaya ikan. Sedangkan Ib dibagi ke dalam dua sektor, yaitu indeks konsumsi rumah tangga yang terdiri dari indeks kelompok makanan, perumahan, pakaian, dan aneka barang dan jasa, serta indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang meliputi indeks kelompok non faktor produksi, faktor produksi, upah, lainnya, dan penambahan barang modal. Metode penghitungan It dan Ib menggunakan formula Laspeyres yang telah dimodifikasi (BPS,

4.14. Fishery Farmer Terms of Trade (NTN)

Fishery Farmer Terms of Trade known as NTN. NTN is a useful indicator to measure the level of fishery farmers welfare because it measures the ability to exchange products (commodities) produced or sold by fishery farmers compared with the products needed by fishery farmers for production process (business) as well as for household consumption. The fishery farmers in the capacity as a producer and consumer. In the capacity of fishery farmers as producer declared a classification index which is received by fishery farmers (It) and the capacity of fishery farmers as consumers expressed in an index that paid by fishery farmers (Ib).

It, comes from the index received by fishery farmers as a catcher of fish and as the fish farmers. While Ib divided consists of two sectors: household consumption index, which consists of the index of food, housing, clothing, and miscellaneous goods and services; and the index of cost of production and capital formation which includes the index of nonfactors of production, factors of production, wages, others, and capital formation. It and Ib were calculated using modified Laspeyres formula method (BPS, 2009).

2009).

NTN adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (*It*) dan dibayar (*Ib*) petani subsektor perikanan. Jika NTN lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani subsektor perikanan periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTN lebih kecil atau dibawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani subsektor perikanan (BPS, 2009). NTN di atas 100 dapat juga diartikan petani sub sektor perikanan mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya atau pendapatan petani subsektor perikanan naik.

Mulai Desember tahun 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTN dari tahun dasar 2007 =100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/ pergeseran pola produksi perikanan dan pola konsumsi rumah tangga perikanan di perdesaan, serta perluasan cakupan subsektor perikanan dan provinsi dalam penghitungan NTN, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.

Dilihat dari nilai indeksnya, rata-rata NTN nasional tahun 2015 adalah sebesar 102,38. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 secara rata-rata nelayan mengalami surplus dari hasil usahanya dibandingkan dengan pengeluarannya. Hal ini sebagai akibat dari kenaikan harga produksi (*It*) lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksinya (*Ib*) terhadap tahun dasar. Rata-rata *It* adalah sebesar 127,17 artinya harga ikan hasil tangkapan nelayan mengalami kenaikan sebesar 27,17 persen dibandingkan dengan harga pada tahun dasar untuk jenis ikan dan kuantitas yang sama. Sedangkan rata-rata *Ib*

*NTN is the ratio between prices received index (*It*) and paid price by fishery farmers (*Ib*). If the NTN greater than 100, it means the purchasing power of fishery farmers in the time period is better than the base year period, otherwise if the NTN smaller or below 100 means there is a declining in the purchasing power of the fishery farmers (BPS, 2009). NTN above 100 can also indicate that fishery farmers have a surplus. Production prices increase faster than consumption prices or fishery farmer's income increase.*

Starting in December 2013, it made changes in the base year calculation of NTN, from the base year 2007 = 100 to the base year 2012 = 100. Changes in the base year are performed to adjust for changes/ shift patterns of fishery production and consumption patterns in rural households fisheries, as well as expand the coverage and provincial fisheries sub-sector in the calculation of NTN, so that the index calculation accuracy can be maintained.

*Judging from the value of the index, the average of national NTN in 2015 reached about 102.38. This means that on average in 2015 the fisherman has a surplus of crops compared with their spending. This is as a result of rising prices of production (*It*) is greater than the increase in prices of consumer goods and the cost of production (*Ib*) to the base year. The average of *It* is about 127.17, it means that the price of fish by fishermen increased by 27.17 percent compared with the price in the base year for the same type of fish and quantity. While the average of *Ib* is about 118.86, it means that the price of goods/*

STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR

adalah sebesar 118,86 berarti bahwa harga barang/jasa yang dibelanjakan nelayan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi mengalami kenaikan 18,86 persen dibandingkan dengan tahun dasar untuk jenis barang/jasa dan kuantitas yang sama.

Setiap provinsi memiliki NTN masing-masing yang dapat dihitung setiap tahun. Di tahun 2015, nilai NTN sebagian besar lebih dari 100 yaitu sekitar 72,73 persen, sisanya nilai NTN kurang dari 100 sebesar 27,27 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian provinsi di Indonesia kemampuan daya beli sub sektor perikanan lebih baik dibandingkan periode tahun dasar 2012. Provinsi yang nilai NTN masih dibawah 100 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Lampiran Tabel 4.78 dan 4.79 menyajikan data indeks harga yang diterima petani subsektor perikanan, indeks harga yang dibayar petani subsektor perikanan dan NTN menurut provinsi tahun 2014-2015.

services were spent by fishermen for household consumption and production increased 18.86 percent compared with the base year for the same types of goods/services and quantity.

Each province has NTN which calculated every year. Each province has NTN each of which can be calculated each year. In 2015, the value of NTN majority of more than 100 which is about 72.73 percent, the remaining value of NTN less than 100 by 27.27 percent. This indicates that most provinces in Indonesia purchasing power of the fisheries sub-sector is better than the period of the base year 2012. Province with NTN value is still below 100, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, and Gorontalo Province.

Appendix of Tables 4.78 and 4.79 present the price index data received by fisheries sub-sector farmers, the index of prices paid by fisheries subsector farmers and the NTN by the province in 2014-2015.

Tabel
Table

7. Perubahan It, Ib, dan NTN Desember 2015 terhadap Desember 2014
Change of It, Ib, and NTN Desember 2015 to Desember 2014

Subsektor/ Subsector	Desember / December						YoY		
	2014			2015					
	It	Ib	NTN	It	Ib	NTN	It	Ib	NTN
Perikanan / <i>Fisheries</i>	118,63	117,66	100,82	124,21	121,46	102,26	4,70	3,23	1,43
Perikanan Tangkap / <i>Capture Fisheries</i>	123,18	119,63	102,97	129,45	122,35	105,80	5,09	2,27	2,75
Perikanan Budidaya / <i>Aquaculture</i>	115,34	116,20	99,25	120,46	120,80	99,72	4,44	3,96	0,47

Sumber / Source : Statistik Nilai Tukar Petani 2015, Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan, BPS / Farmer Terms of Trade Statistics 2015, Subdirectorat of Rural Price Statistics, BPS-Statistics Indonesia

NTN mengalami peningkatan sebesar 1,43 persen sampai dengan Desember 2015. Hal ini menunjukkan kesejahteraan nelayan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Desember 2015, It mengalami kenaikan sebesar 4,70 persen. Nilai ini disumbang sebagian besar dari perikanan tangkap yakni 5,09 persen dibandingkan perikanan budidaya yang hanya menyumbang 4,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga perikanan tangkap lebih dominan dalam penyusunan indeks harga yang diterima oleh nelayan atau dengan kata lain kesejahteraan nelayan penangkapan lebih tinggi dibandingkan dengan petani budidaya ikan.

NTN has increased by 1.43 percent up to December 2015. It shows the welfare of fishermen was higher compared to previous year. Until December 2015, It has increased by 4.70 percent. This value is contributed mostly from capture fisheries around 5.09 percent compared aquaculture fisheries with only 4.44 percent. This indicates that the price of capture fisheries indices more dominant in the preparation of prices received by fish farmers indices or in other words the welfare of capture fisheries fishermen bigger than aquaculture fisheries fishermen.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Adrianto, L., 2015, Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan untuk Perikanan Berkelanjutan di Indonesia, Seri Publikasi PKSPL-IPB No.1/Tahun 2015.
- Antaranews, 2015, Garis Pantai Indonesia Terpanjang Kedua di Dunia, 27 Maret 2015, Jakarta (Online : <http://www.antaranews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia> diakses 11 Oktober 2016).
- Arini, D., 2013, Potensi Terumbu Karang Indonesia : Tantangan dan Upaya Konservasinya, Balai Penelitian Kehutanan Manado, INFO BPK Manado, Volume 3, Nomer 2, hal 147-173.
- APEC, 2013, Penerapan Keamanan Pangan untuk Perikanan Budidaya, Disajikan pada Training Modules on Food Safety Practices for Aquaculture, (Online : fscf-ptin.apec.org/docs/food-safety-practices-for-aquaculture/Aquaculture_1-Introduction_BAHASA.pdf diakses pada 18 Juli 2016).
- Bappenas, 2014, Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Baransano, H.K dan Mangimbulude, J.C., 2011, Ekspoltasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia, Jurnal Biologi Papua Volume 3, Nomor 1, Halaman 39-45.
- Beritasatu, 2016, KKP : Produksi Udang Bakal Naik 32 Persen, (Online : <http://www.beritasatu.com/ekonomi/278856-kkp-produksi-udang-bakal-naik-32.html> diakses 2 November 2016).
- BPS, 2015, Statistik Nilai Tukar Petani 2015, Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan, Jakarta.
- BPS, 2016, Pendapatan Nasional Indonesia 2011-2015, Sub-Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional, Jakarta.
- Burke, L., Selig, E., and Spalding, M., 2002, Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara, kerjasama antara World Resources Institute dengan United Nations Environment Program-World Conservation Monitoring Centre, World Fish Center, dan International Coral Reef Action Network.
- Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP), Kondisi Terumbu Karang di Indonesia, www.coremap.or.id/Kondisi-TK/, 12 Mei 2016.
- Dahuri R, Rais J, Sapta P.G., Sitepu M. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara terpadu (EdisiRevisi). Jakarta: Saptodadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, 2009. Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan. (Online : <https://rokhmindahuri.wordpress.com/tag/kepulauan/>, diakses 21 Oktober 2016).
- ESDM, 2016, Potensi Energi Laut Nasional Telah Diratifikasi, (Online : <http://www.esdm.go.id/berita/323-energi-baru-dan-terbarukan/4755-potensi-energi-laut-nasional-telah-diratifikasi.html> diakses 21 Oktober 2016).
- Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO), 2016, The State of World Fisheries and Aquaculture – Contributing to Food Security and Nutrition For All, Rome, 200 pp.
- Harpiansyah, Pratomo, A., dan Yandri F., 2014, Struktur Komunitas Padang Lamun di Perairan Desa Pengudang Kabupaten Bintang, Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- Herdiawan, D., 2015, Industri Maritim dan Peranannya Terhadap Distribusi Pangan di Wilayah Terpencil dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Pangan Nasional, Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Heriyanti, 2014, Komunikasi Pembangunan Memberikan Peranan Penting Bagi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir : Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, (Online: http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/viewFile/3309/916 diakses 19 Oktober 2016).
- Hutomo, M., 1996. Terumbu Karang dan Pengembangan Wisata Bahari yang Berkelanjutan. Proceesing Seminar Aktivitas Bawah Air 1996, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Jakfar, M., 2015, Tinjauan Ilmiah Konservasi Alam, (Online : <http://bp2sdm.menlhk.go.id/emagazine/index.php/teknis/57-tinjauan-ilmiah-konservasi-alam.html>, diakses 21 Oktober 2016).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, Analisis Data Pokok, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, Statistik Perikanan Budidaya Indonesia menurut Provinsi, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, Pulau-Pulau Kecil Terluar, http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/data_ppkt, 21 September 2016.

REFERENCES

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014, Pusat Data dan Informasi, Jakarta.
- Kementerian Perhubungan, 2016, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia-Kemenhub selesaikan Pembangunan 91 Pelabuhan. (Online : <http://www.dephub.go.id/welcome/readPost/kemenhub-selesaikan-pembangunan-91-pelabuhan> diakses 4 November 2016).
- Kementerian Pertahanan, 2010, Optimalisasi Pengelolaan 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Berbatasan Langsung dengan Negara Tetangga Guna Memperkuat Batas Maritim NKRI, Inspektorat Jenderal, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 3 Agustus 2011, Jakarta.
- Kompas, 2015a, Konservasi Mangrove : Asean Soroti Model Pengelolaan, 13 Februari 2015, Jakarta.
- Kompas. 2015b, Indonesia Susun Standar Pengukuran Karbon, 4 Maret 2015, Halaman 13, Jakarta.
- Kompas, 2015c, Eksplorasi Alam : Izin Tambang Ancam Pulau-Pulau Kecil, 16 Maret 2015, Jakarta.
- Kompas, 2015d, Emisi Karbon Kerusakan Ekosistem Pesisir Sumbang 33 Juta Ton Per Tahun, 20 April 2015, Jakarta.
- Kompas, 2015e, Selamatkan Terumbu Karang, 7 Agustus 2015, Jakarta.
- Kompas. 2015f, Kantong Plastik Segera Dibatasi : Sejumlah Negara Terapkan Plastik Berbayar, 19 November 2015, Jakarta.
- Kompas, 2016, KEHATI Laut Menjadi Kunci Adaptasi, 7 Januari 2016, Hal. 14, Jakarta.
- Media Indonesia, 2015, Terumbu Karang Diperkirakan Punah Pada 2020, 23 April 2015, Jakarta.
- Merdeka, 2015, Menteri Susi Kesal Pencurian Ikan Rugikan Indonesia Rp.600T/Tahun, 30 Maret 2015, Jakarta.
- Mulyadi, E. dan Fitriani, N., 2010, Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata, Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, Volume 2, Nomor 1.
- m.energitoday.com, 2014, BPPT : Aceh Kaya Cadangan Migas. (Online : <http://m.energitoday.com/2014/06/bppt-aceh-kaya-sumber-daya-migas/>, diakses 21 Oktober 2016).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 29 Desember 2005, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2012 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, 15 agustus 2012, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

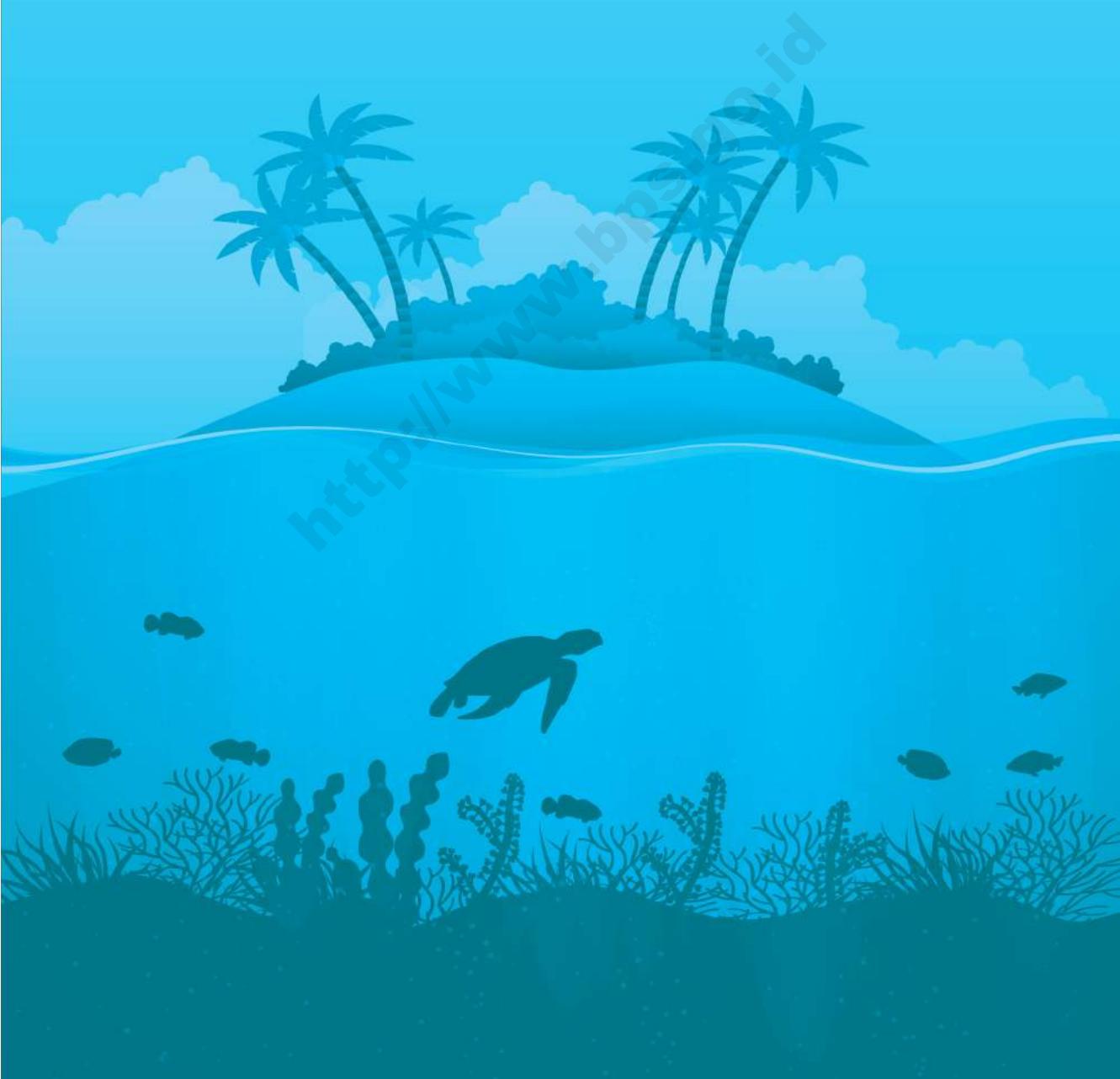
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 29 Juni 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tanggal 18 Juli 2016, Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016, 16 Agustus 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1201, Jakarta.
- Prasetya, A., 2014, Destinasi Indonesia, Panduan Jelajah Indonesia : Exciting Banten No.11 Volume I Tahun 2014.
- presidenri.go.id, 2016, Langka Maju Sektor Perhubungan, (Online : <http://presidenri.go.id/infrastruktur/langkah-maju-sektor-perhubungan.html> diakses 4 November 2016).
- Purnobasuki, H., 2011, Ancaman Terhadap Hutan Mangrove di Indonesia dan Langkah Strategis Pencegahannya, Bulletin PSL Universitas Surabaya, 25(2011) : 3-6.
- Putus Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), 2016, Profil Pelabuhan, (Online :http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan, 13 September 2016).
- Onrizal, M.S., 2008, Peranan Ekosistem Mangrove Dalam Menunjang Kehidupan Masyarakat Pesisir, (Online : <https://onrizal.wordpress.com/2008/10/05/peranan-ekosistem-mangrove-dalam-menunjang-kehidupan-masyarakat-pesisir/>, diakses 18 Oktober 2016).
- Rahmawati, S., Irawan, A., Supriyadi, I.H., dan Azkab, M.H, 2014, Panduan Monitoring Padang Lamun, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bogor.
- Rindayani dan Ma'ruf, F., 2013, Community Empowerment Through The People Salt Enterprises Empowerment Program (PUGAR) On The Department Of Marine And Fisheries At Pamekasan Regency, (Online : <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4547/42/article.pdf> diakses 18 Oktober 2016).
- Saad, S., 2009, Hak Pemeliharaan dan Penangkapan ikan: Eksistensi dan prospek pengaturannya di Indonesia, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 1-2.
- Saraputri, D.A., 2011, Perbandingan Biostimulasi dan Bioaugmentasi dalam Bioremediasi Pantai Tercemar Minyak Bumi, Skripsi, Fakultas Teknik Program Studi Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Satria, A., 2010, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Akses dan Kontrol Terhadap Sumberdaya Alam dalam Menuju Desa 2030, Bogor : Crestpent Press, 2010, hlm. 297.
- Thoha, H., 2007. Kelimpahan Plankton Di Ekosistem Perairan Teluk Gilimanuk, Taman Nasional, Bali Barat. Jurnal Makara-Sains, Vol. 11, No. 1, April 2007: 44-48.

REFERENCES

- Tempo, 2016, Rumput Laut Indonesia Terancam di AS, Ini Efek Dominony, (Online : <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/09/090794599/rumput-laut-indonesia-terancam-di-as-ini-efek-dominonya> diakses 2 November 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 6 ayat 1), 29 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Jakarta.
- Vatria, B., 2010, Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya. Jurnal Belian, Volume 9, Nomer 1 Januari 2010, hal : 47-54.
- Widiarto, S.B., 2012, The implementation efectivity study of Salt Business Empowerment Program in Losarang Village Indramayu City, (Online : <http://repository.ipb.ac.id/> diakses 18 Oktober 2016).
- www.rri.co.id, 2014, Pilih Menteri Kemaritiman, Pakar: Pintar Nomor Dua, yang Utama Jujur dan Punya Kemampuan Memimpin, 23 Oktober 2914, Jakarta (Online : http://www.rri.co.id/post/berita/113545/ekonomi/pilih_menteri_kemaritiman_pakar_pintar_nomor_dua.yang_utama_jujur_dan_punya_kemampuan_memimpin.html diakses 18 Oktober 2016).
- www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2060.html, "Field Listing : Coastline", diakses 10 November 2016.
- web.archive.org/web/20120419075053/http://earthtrends.wri.org/text/coastal-marine/variable-61.html, diakses 10 November 2016.
- Zainuddin, 2013, Proses Peradilan Tindak Perikanan, (Online : <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/proses-peradilan-tindak-pidana-perikanan.html> diakses 19 Oktober 2016).

LAMPIRAN

Appendix



**Tabel
Table** 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Wilayah Administrasi, dan Panjang Garis Pantai menurut Provinsi, 2015
Area, Number of Administration Area, and Length of Coastline by Province, 2015

Provinsi Province	Luas / Area ¹ (km ² / sq.km) ¹	Jumlah Kabupaten/Kota ¹ Number of Regency/City ¹	Jumlah Kecamatan ² Number of Subdistrict ²	Jumlah Desa ² Number of Village ²	Panjang Garis Pantai ³ Length of Coastline ³ (km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	57 956,00	23	289	6 513	2 666,27
Sumatera Utara	72 981,23	33	440	6 112	1 300,00
Sumatera Barat	42 012,89	19	179	1 117	1 973,24
Riau	87 023,66	12	166	1 847	2 190,78
Jambi	50 058,16	11	141	1 562	236,00
Sumatera Selatan	91 592,43	17	232	3 261	570,14
Bengkulu	19 919,33	10	129	1 520	525,00
Lampung	34 623,80	15	227	2 643	1 105,00
Kepulauan Bangka Belitung	16 424,06	7	47	387	2 189,55
Kepulauan Riau	8 201,72	7	67	416	2 368,00 ⁴
DKI Jakarta	664,01	6	44	267	35,00 ⁴
Jawa Barat	35 377,76	27	626	5 962	848,63
Jawa Tengah	32 800,69	35	573	8 559	738,08
DI Yogyakarta	3 133,15	5	78	438	112,80
Jawa Timur	47 799,75	38	664	8 501	1 900,00
Banten	9 662,92	8	155	1 551	500,00
Bali	5 780,06	9	57	716	633,35
Nusa Tenggara Barat	18 572,32	10	116	1 141	2 333,00
Nusa Tenggara Timur	48 718,10	22	307	3 279	2 699,00
Kalimantan Barat	147 307,00	14	174	2 066	1 398,00
Kalimantan Tengah	153 564,50	14	136	1 574	750,60
Kalimantan Selatan	38 744,23	13	152	2 009	1 320,96
Kalimantan Timur	129 066,64	10	103	1 032	1 169,81
Kalimantan Utara	75 467,70	5	50	479	... ⁵
Sulawesi Utara	13 851,64	15	168	1 832	2 395,99
Sulawesi Tengah	61 841,29	13	175	2 018	5 707,27
Sulawesi Selatan	46 717,48	24	306	3 033	1 937,00
Sulawesi Tenggara	38 067,70	17	217	2 300	1 740,00
Gorontalo	11 257,07	6	77	735	655,80
Sulawesi Barat	16 787,18	6	69	648	677,00
Maluku	46 914,03	11	118	1 230	10 630,10
Maluku Utara	31 982,50	10	115	1 196	5 624,66
Papua Barat	99 671,63	13	181	1 614	11 243,59
Papua	319 036,05	29	505	4 480	5 031,12
Indonesia	1 913 578,68	514	7 083	82 038	75 205,24 ⁶

Catatan / Note : ⁴ Data tahun 2014 / Data for 2014

⁵ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

⁶ Penjumlahan data dari tiap provinsi, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah 99 093 km / The summation of data from each province, the data of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is 99 093 km

Sumber / Source : ¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, Kementerian Dalam Negeri
Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 56/2015, June 29, 2015, Ministry of Home Affairs

² Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tanggal 18 Juli 2016 tentang Kode dan Nama
Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Chief Statistician Regulation Number 66/2016, July 18 2016, on Code and Name of Regional Level of Data Collection

³ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2016 / Departement of Marine and Fisheries Provinces, 2016

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.2

Jumlah dan Persentase Desa menurut Provinsi dan Letak Geografis, 2014

Number and Percentage of Village by Province and Geographical Location, 2014

Provinsi Province	Letak Geografis / Geographical Location		Persentase / Percentage	
	Desa Pesisir Coastal Villages	Desa Bukan Pesisir Non Coastal Villages	Desa Pesisir Coastal Villages	Desa Bukan Pesisir Non Coastal Villages
		(1)	(2)	(3)
Aceh	748	5 764	11,49	88,51
Sumatera Utara	459	5 645	7,52	92,48
Sumatera Barat	127	1 018	11,09	88,91
Riau	271	1 564	14,77	85,23
Jambi	30	1 521	1,93	98,07
Sumatera Selatan	29	3 208	0,90	99,10
Bengkulu	186	1 346	12,14	87,86
Lampung	241	2 391	9,16	90,84
Kepulauan Bangka Belitung	166	215	43,57	56,43
Kepulauan Riau	361	54	86,99	13,01
DKI Jakarta	16	251	5,99	94,01
Jawa Barat	227	5 735	3,81	96,19
Jawa Tengah	357	8 221	4,16	95,84
DI Yogyakarta	33	405	7,53	92,47
Jawa Timur	678	7 824	7,97	92,03
Banten	135	1 416	8,70	91,30
Bali	175	541	24,44	75,56
Nusa Tenggara Barat	301	840	26,38	73,62
Nusa Tenggara Timur	1 011	2 259	30,92	69,08
Kalimantan Barat	161	1 948	7,63	92,37
Kalimantan Tengah	44	1 525	2,80	97,20
Kalimantan Selatan	165	1 843	8,22	91,78
Kalimantan Timur	175	851	17,06	82,94
Kalimantan Utara	55	424	11,48	88,52
Sulawesi Utara	778	1 058	42,37	57,63
Sulawesi Tengah	1 021	965	51,41	48,59
Sulawesi Selatan	531	2 499	17,52	82,48
Sulawesi Tenggara	947	1 325	41,68	58,32
Gorontalo	203	533	27,58	72,42
Sulawesi Barat	152	496	23,46	76,54
Maluku	914	174	84,01	15,99
Maluku Utara	941	255	78,68	21,32
Papua Barat	543	1 024	34,65	65,35
Papua	646	4 225	13,26	86,74
Indonesia	12 827	69 363	15,61	84,39

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2011 dan 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2011 and 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.3

Rekapitulasi Data Pulau di Indonesia Sebelum dan Sesudah Diverifikasi menurut Provinsi, 2015
Recapitulation of Islands Data in Indonesia Before and After Verified by Province, 2015

Provinsi Province	Jumlah Pulau Data Kemdagri Sebelum Verifikasi ¹ <i>Number of Islands By Ministry of Home Affairs Before Verified¹</i>	Jumlah Pulau Yang Sudah Diverifikasi Sementara ² <i>Tentative Number of Islands Verified²</i>
(1)	(2)	(3)
Aceh	663	260
Sumatera Utara	419	206
Sumatera Barat	391	186
Riau	139	142
Jambi	19	15
Sumatera Selatan	53	23
Bengkulu	47	10
Lampung	188	132
Kepulauan Bangka Belitung	950	467
Kepulauan Riau	2 408	1 788
DKI Jakarta	218	110
Jawa Barat	131	19
Jawa Tengah	296	33
DI Yogyakarta	23	28
Jawa Timur	287	431
Banten	131	61
Bali	85	27
Nusa Tenggara Barat	864	280
Nusa Tenggara Timur	1 192	432
Kalimantan Barat	339	217
Kalimantan Tengah	32	63
Kalimantan Selatan	320	133
Kalimantan Timur	200	200
Kalimantan Utara	170	178
Sulawesi Utara	668	287
Sulawesi Tengah	750	1 137
Sulawesi Selatan	233	312
Sulawesi Tenggara	651	527
Gorontalo	136	123
Sulawesi Barat	62	41
Maluku	1 422	987
Maluku Utara	1 474	803
Papua Barat	1 945	3 239
Papua	598	552
Indonesia³	17 504	13 449

Catatan / Note : ¹ Kemdagri dan tim dalam "Data Pulau di Wilayah NKRI", tahun 2003

Ministry of Home Affairs and Team in "Data Pulau di Wilayah NKRI", 2003

² Data Berdasarkan hasil Verifikasi "Timnas Pembakuan Nama Rupabumi", tahun 2007 s.d. 2012

Based on the result of verification data by "Timnas Pembakuan Nama Rupabumi", 2007 up to 2012

³ Jumlah Pulau yang telah Didaftarkan ke PBB adalah 13 466 Pulau / Number of Islands that has been registered to UN is 13 466 islands

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.4

Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Provinsi, 2015
Small Outer Islands by Province, 2015

Provinsi Province	Nama Pulau <i>Name of Islands</i>	Nama Kabupaten/Kota <i>Name of Regency/City</i>
(1)	(2)	(3)
Aceh	Rusa	Kabupaten Aceh Besar
	Raya	Kabupaten Aceh Jaya
	Salaut Besar	Kabupaten Simeulue
	Simeulue Cut	Kabupaten Simeulue
	Benggala	Kota Sabang
	Rondo	Kota Sabang
Sumatera Utara	Simuk	Kabupaten Nias
	Wunga	Kabupaten Nias Utara
	Berhala	Kabupaten Serdang Bedagai
Sumatera Barat	Sibarubaru	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Niau/Sinyaunyau	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Riau	Batumandi	Kabupaten Rokan Hilir
Bengkulu	Enggano	Kabupaten Bengkulu Utara
	Mega	Kabupaten Bengkulu Utara
Lampung	Batu Kecil/Bertuah	Kabupaten Tanggamus
Kepulauan Riau	Sentut	Kabupaten Bintan
	Karimun Anak (Karimun Kecil)	Kabupaten Karimun
	Tokonghiu kecil/Iyu Kecil	Kabupaten Karimun
	Damar	Kabupaten Kepulauan Anambas
	Mangkai	Kabupaten Kepulauan Anambas
	Subi Kecil	Kabupaten Natuna
	Tokong Malang Biru	Kabupaten Natuna
	Tokongnanas	Kabupaten Natuna
	Tokongbelayar	Kabupaten Natuna
	Tokongboro	Kabupaten Natuna
	Semiuu	Kabupaten Natuna
	Sebetul	Kabupaten Natuna
	Sekatung	Kabupaten Natuna
	Senua	Kabupaten Natuna
	Kepala	Kabupaten Natuna
	Pelampung	Kota Batam
	Nipa	Kota Batam
	Putri	Kota Batam
	Batu Berantai	Kota Batam
Jawa Barat	Nusamanuk	Kabupaten Tasikmalaya
Jawa Tengah	Nusakambangan	Kabupaten Cilacap
Jawa Timur	Nusa Barong/Barung	Kabupaten Jember
	Ngekel/Sekel	Kabupaten Trenggalek
	Panikan/Panehan	Kabupaten Trenggalek
Banten	Deli	Kabupaten Pandeglang

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.4

Provinsi Province	Nama Pulau <i>Name of Islands</i>	Nama Kabupaten/Kota <i>Name of Regency/City</i>
(1)	(2)	(3)
Nusa Tenggara Barat	Sepatang	Kabupaten Lombok Barat
Nusa Tenggara Timur	Alor	Kabupaten Alor
	Batek	Kabupaten Kupang
	Dana	Kabupaten Rote Ndao
	Dana	Kabupaten Sabu Raijua
	Manggudu	Kabupaten Sumba Timur
Kalimantan Timur	Maratua	Kabupaten Berau
	Sambit	Kabupaten Berau
Kalimantan Utara	Sebatik	Kabupaten Nunukan
	Gosong Makasar	Kabupaten Nunukan
Sulawesi Utara	Bongkil	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
	Kawaluso	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Kawio	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Marore	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Batubawaikang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Kakorotan	Kabupaten Kepulauan Talaud
	Marampit	Kabupaten Kepulauan Talaud
	Miangas	Kabupaten Kepulauan Talaud
	Intata	Kabupaten Kepulauan Talaud
	Mantehage	Kabupaten Minahasa Utara
	Makalehi	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
Sulawesi Tengah	Lingayan/Lingian	Kabupaten Toli Toli
	Dolangan	Kabupaten Toli Toli
	Salando	Kabupaten Toli Toli
Maluku	Panambulai	Kabupaten Kepulauan Aru
	Ararkula	Kabupaten Kepulauan Aru
	Enu	Kabupaten Kepulauan Aru
	Karang	Kabupaten Kepulauan Aru
	Karawiera/Karerei	Kabupaten Kepulauan Aru
	Kultubai Selatan	Kabupaten Kepulauan Aru
	Kultubai Utara	Kabupaten Kepulauan Aru
	Batu Goyang	Kabupaten Kepulauan Aru
	Kisar	Kabupaten Maluku Barat Daya
	Leti	Kabupaten Maluku Barat Daya
	Lirang	Kabupaten Maluku Barat Daya
	Marsela	Kabupaten Maluku Barat Daya
	Meatimiariang	Kabupaten Maluku Barat Daya
	Wetar	Kabupaten Maluku Barat Daya
	Larat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	Selaru	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	Asutubun	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	Batarkusu	Kabupaten Maluku Tenggara Barat

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.4*

Provinsi <i>Province</i>	Nama Pulau <i>Name of Islands</i>	Nama Kabupaten/Kota <i>Name of Regency/City</i>
(1)	(2)	(3)
Maluku Utara	Jiew	Kabupaten Halmahera Tengah
Papua Barat	Moff	Kabupaten Raja Ampat
	Fani	Kabupaten Raja Ampat
	Miossu	Kabupaten Tambrauw
Papua	Laag	Kabupaten Asmat
	Bepondi	Kabupaten Biak Numfor
	Kolepon	Kabupaten Merauke
	Liki	Kabupaten Sarmi
	Bras	Kabupaten Supiori
	Fanildo	Kabupaten Supiori

Sumber/Source : http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/data_ppkt, diakses 21 September 2016
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/data_ppkt, accessed on September 21st, 2016

Tabel
Table

4.5

Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar menurut Status Kependudukan dan Provinsi, 2015
Number of Small Outer Islands by Population Status and Province, 2015

Provinsi Province	Jumlah Pulau <i>Number of Islands</i>	Status Kependudukan <i>Population Status</i>	
		Berpenduduk <i>Populated</i>	Tidak Berpenduduk <i>Un populated</i>
		(3)	(4)
Aceh	6	-	6
Sumatera Utara	3	1	2
Sumatera Barat	2	-	2
Riau	1	-	1
Jambi	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-
Bengkulu	2	1	1
Lampung	1	-	1
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	19	3	16
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	1	-	1
Jawa Tengah	1	1	-
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	3	-	3
Banten	1	-	1
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1	-	1
Nusa Tenggara Timur	5	1	4
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	2	1	1
Kalimantan Utara	2	1	1
Sulawesi Utara	11	8	3
Sulawesi Tengah	3	1	2
Sulawesi Selatan	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	18	9	9
Maluku Utara	1	-	1
Papua Barat	3	-	3
Papua	6	4	2
Indonesia	92	31	61

Sumber / Source : http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/data_ppkt, diakses 21 September 2016
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/data_ppkt, accessed on September 21st, 2016

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.6

Luas dan Kondisi Hutan Mangrove menurut Provinsi, 2015
Area and Condition of Mangrove Forest by Province, 2015

Provinsi Province	Luas Area (Ha)	Kondisi / Condition (%)		
		Baik Good	Sedang Moderate	Rusak Damage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	58 985,57	23,15	56,32	20,53
Sumatera Utara	175 428,04	15,28	51,04	33,68
Sumatera Barat	43 186,71	70,00	-	28,84
Riau	175 607,64	36,01	23,69	16,89
Jambi	12 255,62	85,73	9,68	4,59
Sumatera Selatan	394 163,72	-	-	-
Bengkulu	2 269,45	88,33	5,77	5,90
Lampung	17 110,00	28,75	17,57	53,67
Kepulauan Bangka Belitung	93 330,32	57,00	14,00	13,00
Kepulauan Riau ¹	21 375,00
DKI Jakarta ²	207,29	70,00	30,00	-
Jawa Barat	27 218,36	16,23	32,34	50,54
Jawa Tengah	21 119,01	68,18	9,96	21,86
DI Yogyakarta	40,10	13,89	55,56	30,55
Jawa Timur	84 624,56	43,21	35,77	21,02
Banten	928,90	69,91	7,87	22,22
Bali	2 225,75	78,95	-	9,66
Nusa Tenggara Barat ³	19 149,00	44,24	42,45	9,19
Nusa Tenggara Timur	16 579,85	21,23	45,37	33,33
Kalimantan Barat	149 344,19	70,00	20,00	10,00
Kalimantan Tengah	33 844,08	31,39	39,88	28,73
Kalimantan Selatan	105 038,98	21,86	49,23	26,42
Kalimantan Timur	360 819,26	3,66	3,26	0,16
Kalimantan Utara ⁴
Sulawesi Utara	12 036,29
Sulawesi Tengah	24 733,59	60,49	-	39,51
Sulawesi Selatan	40 226,30	18,60	22,20	59,20
Sulawesi Tenggara	67 111,40
Gorontalo	17 304,84	82,17	-	17,83
Sulawesi Barat	725,42	33,79	40,01	26,20
Maluku	53 301,85	21,06	8,59	14,54
Maluku Utara	35 441,00	38,40	15,98	19,26
Papua Barat	453 395,00	95,80	0,40	3,80
Papua	1 148 948,51
Indonesia	3 668 075,60⁵	25,13	10,00	8,20

Catatan / Note : ¹ Data tahun 2012 / Data for 2012

² Hutan Mangrove yang berada dalam pengelolaan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta
Mangrove forests within the management of the Department of Marine, Agriculture and Food Security DKI Jakarta

³ Data Tahun 2014 / Data for 2014

⁴ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

⁵ Penjumlahan data dari tiap provinsi, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 adalah 3 616 445,19 Ha
Summation of data from each province, the data of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 2015 is 3 616 445.19 Ha

Sumber / Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2016

Department of Marine Affairs and Fisheries Province, 2016

Tabel
Table

4.7

Penanaman/Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa, dan Gambut menurut Provinsi,

2010 - 2014

*Mangrove and Peat Swamp Forest Plantation/Rehabilitation by Province, 2010 - 2014
(Ha)*

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	-	1 520	-	650	-
Sumatera Utara	326	100	909	400	-
Sumatera Barat	-	100	-	300	-
Riau	-	500	554	600	-
Jambi	-	200	-	150	-
Sumatera Selatan	-	-	-	400	-
Bengkulu	-	170	-	100	-
Lampung	-	250	-	400	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	90	5	193	-
Kepulauan Riau	-	255	360	480	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	330	637	240	-
Jawa Tengah	-	290	1 323	600	-
DI Yogyakarta	172	381	-	100	-
Jawa Timur	70	280	760	280	-
Banten	-	-	-	-	-
Bali	-	150	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	150	140	140	-
Nusa Tenggara Timur	-	400	-	150	-
Kalimantan Barat	-	200	-	1 000	-
Kalimantan Tengah	-	500	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	200	134	300	-
Kalimantan Timur	-	600	1 420	800	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	150	-	4 000	-
Sulawesi Tengah	-	600	-	200	-
Sulawesi Selatan	-	325	520	500	-
Sulawesi Tenggara	-	300	200	460	-
Gorontalo	-	790	135	400	-
Sulawesi Barat	-	330	120	150	-
Maluku	-	200	42	100	-
Maluku Utara	-	270	112	140	-
Papua Barat	-	500	938	1 000	-
Papua	-	300	562	1 000	-
Indonesia	568	10 431	8 871	11 403	-

Sumber / Source : Statistik Kehutanan Indonesia 2014, Kementerian Kehutanan
Forestry Statistics of Indonesia 2014, Ministry of Forestry

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.8

Jumlah Lokasi dan Persentase Kondisi Terumbu Karang menurut Wilayah, 2011-2015
Number of Coral Reef Location and Percentage of Condition by Area, 2011-2015

Wilayah Area	Jumlah Lokasi/Kondisi <i>Number of Location/Condition</i>	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia Bagian Barat <i>West Indonesian</i>	Jumlah Lokasi / Number of locations Percentase kondisi / Percentage of condition Sangat Baik / Very Good Baik / Good Cukup / Moderate Kurang / Damaged	479 5,64 28,81 34,03 31,52	504 5,36 29,56 34,33 30,75	509 5,50 30,06 33,99 30,45	536 5,22 29,29 35,26 30,22	... 4,94 28,92 36,68 29,45
Indonesia Bagian Tengah <i>Center Indonesian</i>	Jumlah Lokasi / Number of locations Percentase kondisi / Percentage of condition Sangat Baik / Very Good Baik / Good Cukup / Moderate Kurang / Damaged	292 5,82 30,14 44,18 20,55	308 5,52 29,55 44,81 20,78	316 5,70 30,38 44,30 19,62	327 5,81 29,66 43,73 20,80	... 5,48 29,39 44,38 20,75
Indonesia Bagian Timur <i>East Indonesian</i>	Jumlah Lokasi / Number of locations Percentase kondisi / Percentage of condition Sangat Baik / Very Good Baik / Good Cukup / Moderate Kurang / Damaged	305 5,25 20,98 34,43 39,34	321 4,98 21,18 34,58 39,25	321 4,98 21,18 34,58 39,25	321 4,98 21,18 34,58 39,25	... 4,64 21,45 33,62 40,29
Indonesia	Jumlah Lokasi / Number of locations Percentase kondisi / Percentage of condition Sangat Baik / Very Good Baik / Good Cukup / Moderate Kurang / Damaged	1 076 5,58 26,95 36,90 30,76	1 133 5,30 27,18 37,25 30,45	1 146 5,41 27,66 37,00 29,93	1 184 5,32 27,20 37,42 30,07	1 259 5,00 27,01 37,97 30,02

Catatan / Note : Sangat Baik / Very Good : 75-100 % tutupan karang hidup / the living surface of coral reef
 Baik / Good : 50-74 % tutupan karang hidup / the living surface of coral reef
 Cukup / Moderate : 25-49 % tutupan karang hidup / the living surface of coral reef
 Kurang / Damaged : 0-24 % tutupan karang hidup / the living surface of coral reef

Sumber / Source : www.coremap.or.id, didownload 12 Mei 2016
www.coremap.or.id, downloaded on May 12, 2016

Tabel
Table

4.9

Luas dan Kondisi Terumbu Karang menurut Provinsi, 2015
Area and Condition of Coral Reef by Province, 2015

Provinsi Province	Luas Area (Ha)	Kondisi / Condition (%)		
		Baik Good	Sedang Moderate	Rusak Damage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	14 689,70	41,64	10,63	47,73
Sumatera Utara	111 899,80	26,28	24,00	49,71
Sumatera Barat	36 693,27	25,00	0,00	74,98
Riau	1,20	41,67	12,50	45,83
Jambi	0,00
Sumatera Selatan	13,00	23,08	23,08	53,84
Bengkulu	6 138,52	66,19	17,88	15,93
Lampung	2 189,50	8,13	20,67	71,20
Kepulauan Bangka Belitung	81 551,14	23,00	34,00	41,00
Kepulauan Riau ¹	278 815,41
DKI Jakarta	5 000,00	50,00	0,00	50,00
Jawa Barat	7 533,70	29,52	27,70	42,78
Jawa Tengah	761,56	8,25	0,00	91,75
DI Yogyakarta	5 100,00	10,00	20,00	70,00
Jawa Timur	649 973,36	30,00	30,00	40,00
Banten	2 034,00	29,22	9,11	61,67
Bali ¹	8 836,71
Nusa Tenggara Barat	19 399,00	23,52	30,45	46,03
Nusa Tenggara Timur	142 479,63	40,00	25,00	35,00
Kalimantan Barat	72 559,82	75,00	20,00	5,00
Kalimantan Tengah	35 586,00	75,60	0,20	24,20
Kalimantan Selatan	13 179,18	87,63	10,17	2,20
Kalimantan Timur ¹	84 518,57
Kalimantan Utara ¹	90,67
Sulawesi Utara	28 938,80
Sulawesi Tengah	87 018,69	28,61	1,40	69,98
Sulawesi Selatan	116 437,80	21,90	19,90	58,20
Sulawesi Tenggara	32 625,30	28,00	0,00	72,00
Gorontalo	30 243,75	63,93	0,00	36,07
Sulawesi Barat	7 783,72	31,03	33,19	35,78
Maluku	58 917,18	25,27	2,02	22,05
Maluku Utara	111 724,05	38,81	26,56	34,64
Papua Barat	139 096,00	32,60	42,60	24,80
Papua	232 892,20	48,90	19,65	31,44
Indonesia	2 340 202,66 ²	30,84	20,35	33,93

Catatan / Note : ¹ Sumber dari Kelautan dan Perikanan dalam angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Source from Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

² Penjumlahan data dari tiap provinsi, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 adalah 2 517 857,90 Ha
Summation of data from each province, the data of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 2015 is 2 517 857.90 Ha

Sumber / Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2016

Department of Marine Affairs and Fisheries Province, 2016

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.10

Luas dan Kondisi Padang Lamun menurut Provinsi, 2015
Area and Condition of Seagrass by Province, 2015

Provinsi Province	Luas Area (Ha)	Kondisi / Condition (%)		
		Baik Good	Sedang Moderate	Rusak Damage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	223,03	0,00	97,76	2,24
Sumatera Utara	172,20	18,87	53,98	27,15
Sumatera Barat	598,85	100,00	0,00	0,00
Riau
Jambi	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-
Bengkulu	252,83	37,07	49,27	13,67
Lampung	710,00	64,79	22,59	12,62
Kepulauan Bangka Belitung	13 055,24	60,00	30,00	10,00
Kepulauan Riau ¹	11 489,60
DKI Jakarta
Jawa Barat	802,00	54,69	21,45	23,87
Jawa Tengah	120,18	94,00	0,00	6,00
DI Yogyakarta ²
Jawa Timur ¹	3 405,72	74,08	15,06	10,86
Banten	1 039,50	81,40	8,87	9,73
Bali	1 316,00	79,91	0,00	20,09
Nusa Tenggara Barat ²	32 224,00	99,18	0,82	0,00
Nusa Tenggara Timur	15 933,34	0,00	0,00	37,01
Kalimantan Barat	29 345,50	70,00	20,00	10,00
Kalimantan Tengah	210,00	23,81	42,86	33,33
Kalimantan Selatan	204,22
Kalimantan Timur	782,78	13,58	25,01	23,01
Kalimantan Utara ³
Sulawesi Utara	7 691,40
Sulawesi Tengah	34 821,26	51,17	35,18	13,65
Sulawesi Selatan	6 264,70	55,10	8,90	36,00
Sulawesi Tenggara	10 615,14
Gorontalo ²	1 195,00	100,00	0,00	0,00
Sulawesi Barat	3 242,39	29,37	23,50	47,13
Maluku	9 698,25	34,70	23,51	9,86
Maluku Utara	6 609,00	50,96	21,58	0,98
Papua Barat	281 589,00
Papua	1 309,80	87,93	12,07	0,00
Indonesia	474 920,93 ⁴	20,62	6,14	4,43

Catatan / Note : ¹ Data tahun 2012 / Data for 2012

² Data tahun 2014 / Data for 2014

³ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

⁴ Penjumlahan data dari tiap provinsi / The Summation of data from each province

Sumber / Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2016

Departmen of Marine Affairs and Fisheries Province, 2016

**Tabel
Table 4.11 Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi, Pemanfaat Laut, dan Keberadaan Mangrove, 2014
Number of Coastal Villages by Province, Utilization of the sea, and the Existence of
Mangrove, 2014**

Provinsi Province	Perikanan Tangkap Capture Fisheries	Perikanan Budidaya Aquaculture Fisheries	Tambak Garam Salt Pond	Wisata Bahari Marine Tourism	Transportasi Umum Public Transportation	Mangrove Mangrove
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	647	117	35	38	61	230
Sumatera Utara	401	74	4	31	96	162
Sumatera Barat	119	22	0	23	41	72
Riau	260	26	1	6	144	235
Jambi	28	3	1	0	18	22
Sumatera Selatan	22	14	0	0	22	23
Bengkulu	146	5	0	5	3	37
Lampung	199	57	2	31	38	79
Kepulauan Bangka Belitung	163	37	0	14	28	145
Kepulauan Riau	344	215	0	39	210	302
DKI Jakarta	13	12	0	7	11	9
Jawa Barat	205	92	38	59	15	113
Jawa Tengah	301	187	60	53	22	195
DI Yogyakarta	29	4		6	1	2
Jawa Timur	614	270	108	51	106	310
Banten	118	43	1	38	17	42
Bali	153	36	16	45	20	25
Nusa Tenggara Barat	274	135	41	35	58	130
Nusa Tenggara Timur	899	253	105	47	237	420
Kalimantan Barat	157	29	1	8	51	128
Kalimantan Tengah	44	12	0	2	18	41
Kalimantan Selatan	161	55	0	17	94	120
Kalimantan Timur	162	101	0	31	58	142
Kalimantan Utara	50	32	0	2	32	43
Sulawesi Utara	734	111	9	65	207	422
Sulawesi Tengah	977	335	6	60	218	596
Sulawesi Selatan	508	353	26	51	149	292
Sulawesi Tenggara	904	442	1	54	323	554
Gorontalo	192	63	2	13	25	116
Sulawesi Barat	149	48	1	15	20	87
Maluku	868	248	8	40	459	393
Maluku Utara	866	75	3	25	531	470
Papua Barat	516	66	5	39	165	323
Papua	615	90	8	12	206	281
Indonesia	11 838	3 662	482	962	3 704	6 561

Sumber / Source : Diholah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.12

Exploitasi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Indonesia, 2011-2014
(Ton)

Ikan ¹ Fish ¹	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	260 618	263 032	251 343	273 133
DEMERSAL	686 206	720 876	772 855	798 863
Kurau / Four Finger Threadfin	8 991	5 296	5 586	5 604
Manyung / Giant Catfish	90 980	92 409	107 053	102 111
Layur / Hairtails	57 228	64 274	68 784	57 372
Kurisi / Treadtins Breams	53 779	63 885	63 225	70 659
Kuniran / Sulphur Goalfish	35 157	36 442	42 817	40 319
Swanggi / Big Eyes	38 536	38 228	41 775	48 951
Beloso / Greater Lizardfish	21 663	20 441	20 867	22 283
Golok-golok / Wolf Herrings	14 272	14 377	13 838	13 835
Gulamah / Croackers/Drums	78 171	77 709	82 416	77 928
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	118 608	119 088	123 416	130 301
Kerapu / Groupers	74 059	92 183	99 904	110 418
Kuwe / Jack Trevalies	84 575	88 495	93 706	109 441
Ikan Lidah / Flat Fishes	10 187	8 049	9 468	9 641
PELAGIS KECIL	763 831	796 247	779 124	800 799
Banyar / Indian Mackarel	19 688	44 240	109 974	84 321
Kembung / Short-bodied Mackerels	291 863	266 358	239 216	269 411
Ikan Terbang / Flying Fishes	13 997	12 332	15 973	16 896
Ikan Layang / Scads	405 808	427 510	368 221	376 276
Lemuru / Bali Sardinella	32 475	45 807	45 740	53 895
TUNA BESAR	406 390	462 695	513 341	537 102
Cakalang / Skipjack Tuna	372 211	429 024	481 014	496 682
Albakora / Albacore	11 483	11 028	6 095	8 750
Setuhuk / Marlin	8 572	6 930	8 748	9 979
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	5 572	5 981	7 918	9 774
Lemadang / Common Dolphin Fish	8 552	9 732	9 566	11 917
CUMI-CUMI	141 723	140 924	140 499	150 623

Catatan / Note : ¹ Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No. KEP.45/MEN/2011

¹ The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.13

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Indonesia, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Indonesia, 2011-2014
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ¹ Fish ¹	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	7 308 098	7 331 475	7 485 073	8 618 648
DEMERSAL	9 742 805	11 177 435	13 583 067	15 754 399
Kurau / Four Finger Threadfin	99 499	122 870	228 057	179 690
Manyung / Giant Catfish	1 128 580	1 254 347	1 711 167	1 625 817
Layur / Hairtails	489 210	624 005	745 039	726 327
Kurisi / Treadtins Breams	527 084	816 656	876 976	1 053 136
Kuniran / Sulphur Goalfish	315 339	324 456	351 067	307 836
Swanggi / Big Eyes	303 436	292 280	339 761	409 897
Beloso / Greater Lizardfish	193 692	130 058	159 441	166 970
Golok-golok / Wolf Herrings	182 909	265 230	308 170	225 953
Gulamah / Croakers/Drums	660 813	696 067	860 193	837 769
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	2 598 842	2 603 673	2 928 183	3 482 261
Kerapu / Groupers	1 946 139	2 628 559	3 268 355	4 292 266
Kuwe / Jack Trevalies	1 188 679	1 337 693	1 655 957	2 270 719
Ikan Lidah / Flat Fishes	108 583	81 541	150 701	175 758
PELAGIS KECIL	6 841 253	7 577 455	9 169 056	9 632 494
Banyar / Indian Mackarel	256 356	524 004	1 224 540	921 460
Kembung / Short-bodied Mackerels	3 474 860	3 489 049	4 032 603	4 406 902
Ikan Terbang / Flying Fishes	87 917	68 543	135 603	138 439
Ikan Layang / Scads	2 838 727	3 295 476	3 500 272	3 772 626
Lemuru / Bali Sardinella	183 393	200 383	276 038	393 067
TUNA BESAR	4 135 173	5 221 805	6 478 627	7 873 706
Cakalang / Skipjack Tuna	3 696 560	4 733 166	5 930 656	7 012 704
Albakora / Albacore	168 062	182 561	151 737	276 379
Setuhuk / Marlin	133 325	125 271	180 923	231 237
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	56 326	77 546	95 357	181 323
Lemadang / Common Dolphin Fish	80 900	103 261	119 954	172 063
CUMI-CUMI	2 358 197	2 214 797	2 866 575	3 124 025

Catatan / Note : ¹ Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No. KEP.45/MEN/2011

¹ The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.14a

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Western Sumatra¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	49 481	47 803	24 994	37 170
DEMERSAL	58 143	84 794	77 366	75 943
Kurau / Four Finger Threadfin	650	769	839	557
Manyung / Giant Catfish	3 369	10 659	11 327	7 082
Layur / Hairtails	5 214	9 674	9 698	8 072
Kurisi / Treadtins Breams	3 188	7 341	4 479	6 201
Kuniran / Sulphur Goalfish	65	162	307	434
Swanggi / Big Eyes	4 432	5 272	5 440	5 682
Beloso / Greater Lizardfish	5 161	5 501	5 445	5 421
Golok-golok / Wolf Herrings	1 077	1 110	1 127	1 525
Gulamah / Croackers/Drums	3 112	3 385	3 740	3 014
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	7 911	10 288	8 872	8 206
Kerapu / Groupers	8 667	11 965	9 947	10 015
Kuwe / Jack Trevalies	14 459	18 289	14 300	18 217
Ikan Lidah / Flat Fishes	1 915	1 489	1 845	1 517
PELAGIS KECIL	47 626	46 732	48 287	45 647
Banyar / Indian Mackarel	2 471	2 357	...	1 831
Kembung / Short-bodied Mackerels	26 251	28 086	36 156	30 711
Ikan Terbang / Flying Fishes	621	645	...	813
Ikan Layang / Scads	17 206	14 534	12 131	12 292
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	27 821	29 216	35 138	34 371
Cakalang / Skipjack Tuna	21 293	25 139	31 536	28 549
Albakora / Albacore	1 007	136	-	...
Setuhuk / Marlin	2 784	1 898	1 900	2 855
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	1 013	1 485	1 057	2 213
Lemadang / Common Dolphin Fish	1 724	558	645	754
CUMI-CUMI	3 843	3 843	3 043	3 792

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Barat Sumatera terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Western Sumatera consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.14b

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Eastern Sumatera¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	46 498	39 300	47 054	50 847
DEMERSAL	99 963	97 158	104 183	114 302
Kurau / Four Finger Threadfin	6 482	2 153	2 362	2 355
Manyung / Giant Catfish	22 806	22 117	19 514	25 703
Layur / Hairtails	2 833	3 229	3 535	3 296
Kurisi / Treadtins Breams	15 356	15 354	13 395	14 071
Kuniran / Sulphur Goalfish	6 517	6 149	9 193	9 385
Swanggi / Big Eyes	1 686	2 154	1 582	1 905
Beloso / Greater Lizardfish	1 101	739	660	787
Golok-golok / Wolf Herrings	7 044	6 238	5 536	5 349
Gulamah / Croackers/Drums	8 816	6 613	6 575	6 905
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	12 877	12 250	13 846	14 287
Kerapu / Groupers	8 344	11 283	12 707	13 978
Kuwe / Jack Trevalies	12 913	14 749	14 909	15 645
Ikan Lidah / Flat Fishes	232	368	369	636
PELAGIS KECIL	43 353	43 223	35 085	33 683
Banyar / Indian Mackarel	2 078	2 307	...	1 284
Kembung / Short-bodied Mackerels	32 121	29 243	31 025	26 701
Ikan Terbang / Flying Fishes	-	-	...	-
Ikan Layang / Scads	2 110	5 435	4 060	5 698
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	1 366	314	179	188
Cakalang / Skipjack Tuna	639	-	-	12
Albakora / Albacore	-	-	-	...
Setuhuk / Marlin	557	5	5	6
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	126	280	128	169
Lemadang / Common Dolphin Fish	44	29	46	1
CUMI-CUMI	21 097	12 295	13 783	11 230

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Timur Sumatera terdiri dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Eastern Sumatera consist of Province of Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.14c

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa ¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Northern Java ¹, 2011-2014
 (Ton)

Ikan ² <i>Fish</i> ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	21 903	21 722	21 250	19 450
DEMERSAL	128 642	126 846	141 678	140 739
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	317	546	613	711
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	22 496	17 601	27 110	16 282
Layur / <i>Hairtails</i>	11 409	8 980	11 357	9 484
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	4 139	7 316	7 568	9 589
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	26 594	27 338	29 125	26 738
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	22 780	22 114	23 706	28 393
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	5 410	5 462	5 085	6 188
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	846	1 140	790	646
Gulamah / <i>Croakers/Drums</i>	12 926	12 793	12 513	11 058
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	12 239	12 479	11 558	16 396
Kerapu / <i>Groupers</i>	5 622	7 677	7 304	7 232
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	4 247	4 270	4 726	7 894
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	463	270	223	128
PELAGIS KECIL	145 030	185 244	137 216	140 425
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	1 648	441	...	1 508
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	40 166	37 362	33 807	48 882
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	175	752	...	25
Ikan Layang / <i>Scads</i>	99 437	124 080	90 952	84 443
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	2 758	21 469	12 457	5 567
TUNA BESAR	41 659	41 830	44 918	50 300
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	34 307	35 531	37 872	45 961
Albakora / <i>Albacore</i>	3 529	2 488	2 814	...
Setuhuk / <i>Marlin</i>	1 775	1 082	1 881	1 218
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	355	517	500	505
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	1 693	2 212	1 851	2 616
CUMI-CUMI	51 517	73 752	53 255	68 274

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Jawa terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Northern Java consist of Province of Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.14d

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Southern Java¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	5 692	6 593	5 841	2 264
DEMERSAL	15 198	23 117	24 075	22 989
Kurau / Four Finger Threadfin	-	-	2	28
Manyung / Giant Catfish	1 418	2 273	2 512	1 539
Layur / Hairtails	6 373	11 752	10 841	9 468
Kurisi / Treadtins Breams	1 587	1 739	1 575	1 506
Kuniran / Sulphur Goalfish	192	534	1 589	1 199
Swanggi / Big Eyes	21	29	50	76
Beloso / Greater Lizardfish	31	182	65	330
Golok-golok / Wolf Herrings	19	65	12	355
Gulamah / Croackers/Drums	2 426	2 330	3 141	1 915
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	1 077	1 311	1 018	1 582
Kerapu / Groupers	494	1 304	1 228	2 670
Kuwe / Jack Trevalies	1 295	1 276	1 488	1 912
Ikan Lidah / Flat Fishes	284	387	554	409
PELAGIS KECIL	57 550	52 509	47 081	44 353
Banyar / Indian Mackarel	31	570	...	740
Kembung / Short-bodied Mackerels	3 565	4 883	5 506	4 035
Ikan Terbang / Flying Fishes	8	99	...	692
Ikan Layang / Scads	29 777	34 433	26 012	18 681
Lemuru / Bali Sardinella	24 150	12 459	15 563	20 205
TUNA BESAR	16 271	14 881	10 567	11 936
Cakalang / Skipjack Tuna	12 212	12 274	7 539	8 900
Albakora / Albacore	2 973	679	1 054	...
Setuhuk / Marlin	372	593	879	1 290
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	342	606	458	535
Lemadang / Common Dolphin Fish	372	729	637	1 211
CUMI-CUMI	1 537	3 355	3 835	4 118

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Jawa terdiri dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta

Jawa Timur

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Southern Java consist of Province of Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.14e

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara ¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara ¹, 2011-2014
 (Ton)

Ikan ² <i>Fish</i> ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	2 016	2 056	2 718	6 004
DEMERSAL	31 269	24 620	26 904	28 817
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	64	-	-	447
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	689	184	876	868
Layur / <i>Hairtails</i>	3 626	2 075	1 941	1 977
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	4 144	2 885	3 014	3 293
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	344	580	559	548
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	350	178	265	263
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	595	549	202	220
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	268	132	378	395
Gulamah / <i>Croackers/Drums</i>	391	262	818	1 128
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	6 862	6 059	4 981	5 383
Kerapu / <i>Groupers</i>	10 244	8 798	9 759	10 460
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	3 960	3 048	4 099	3 823
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	-	2	12	12
PELAGIS KECIL	42 503	44 328	47 054	73 993
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	372	339	...	757
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	11 882	11 947	5 889	19 036
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	2 842	2 440	...	3 617
Ikan Layang / <i>Scads</i>	21 572	17 591	23 582	22 460
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	5 567	11 879	17 583	28 123
TUNA BESAR	31 885	34 345	37 043	44 944
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	23 882	22 087	27 997	36 873
Albakora / <i>Albacore</i>	3 935	7 725	2 227	...
Setuhuk / <i>Marlin</i>	1 233	1 800	2 028	2 268
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	1 569	624	1 969	2 167
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	1 266	2 109	2 822	3 636
CUMI-CUMI	20 458	3 772	6 253	7 864

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Bali & Nusa Tenggara terdiri dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Bali & Nusa Tenggara consist of Province of Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table 4.14f Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Malacca Strait¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	36 733	34 831	37 472	42 956
DEMERSAL	53 000	53 605	66 708	70 768
Kurau / Four Finger Threadfin	430	523	539	586
Manyung / Giant Catfish	7 886	8 496	8 855	9 239
Layur / Hairtails	3 194	3 064	3 709	4 331
Kurisi / Treadtins Breams	3 810	4 726	7 577	7 016
Kuniran / Sulphur Goalfish	450	450	415	119
Swanggi / Big Eyes	4 583	4 446	5 875	5 515
Beloso / Greater Lizardfish	756	874	808	758
Golok-golok / Wolf Herrings	2 076	2 720	2 924	1 999
Gulamah / Croakers/Drums	12 406	11 136	12 616	14 305
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	3 915	3 647	4 579	5 108
Kerapu / Groupers	5 295	6 029	7 755	9 169
Kuwe / Jack Trevalies	3 793	5 483	6 149	6 665
Ikan Lidah / Flat Fishes	6 482	4 731	4 907	5 958
PELAGIS KECIL	62 341	67 217	61 461	58 520
Banyar / Indian Mackarel	1 189	1 010	...	793
Kembung / Short-bodied Mackerels	46 894	50 100	47 558	45 016
Ikan Terbang / Flying Fishes	452	237	...	-
Ikan Layang / Scads	11 730	13 150	13 903	12 711
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	3 743	3 074	4 692	3 565
Cakalang / Skipjack Tuna	3 347	2 644	4 334	3 201
Albakora / Albacore	-	-	-	...
Setuhuk / Marlin	258	99	71	68
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	81	139	83	122
Lemadang / Common Dolphin Fish	57	192	204	174
CUMI-CUMI	12 021	13 427	20 898	22 498

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selat Malaka terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Malacca Strait consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Riau*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.14g

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Southern/Western Kalimantan¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² <i>Fish²</i>	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	38 087	50 373	53 216	56 425
DEMERSAL	32 701	43 022	54 863	55 437
Kurau / Four Finger Threadfin	280	433	541	178
Manyung / Giant Catfish	11 136	10 211	16 697	20 346
Layur / Hairtails	1 394	1 987	2 277	2 306
Kurisi / Treadtins Breams	1 522	3 599	4 327	4 057
Kuniran / Sulphur Goalfish	-	69	151	168
Swanggi / Big Eyes	455	644	753	550
Beloso / Greater Lizardfish	172	114	31	1
Golok-golok / Wolf Herrings	811	567	686	634
Gulamah / Croackers/Drums	6 344	8 225	10 406	10 459
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	6 635	5 952	7 518	8 821
Kerapu / Groupers	2 619	4 393	4 978	3 522
Kuwe / Jack Trevalies	1 846	6 458	5 571	4 223
Ikan Lidah / Flat Fishes	298	370	927	172
PELAGIS KECIL	14 852	13 981	25 817	33 436
Banyar / Indian Mackarel	83	-	2 373	2 938
Kembung / Short-bodied Mackerels	9 911	9 157	9 384	11 985
Ikan Terbang / Flying Fishes	-	-	-	-
Ikan Layang / Scads	4 341	4 824	14 060	18 513
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	538	1 133	1 741	581
Cakalang / Skipjack Tuna	-	85	-	-
Albakora / Albacore	-	-	-	...
Setuhuk / Marlin	25	170	373	-
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	513	570	1 368	580
Lemadang / Common Dolphin Fish	-	308	-	1
CUMI-CUMI	8 417	9 865	11 960	7 901

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan/Barat Kalimantan terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Southern/Western Kalimantan consist of Province of Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.14h

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Eastern Kalimantan¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	32 710	32 855	33 181	31 310
DEMERSAL	18 026	21 153	18 304	16 883
Kurau / Four Finger Threadfin	50	42	62	55
Manyung / Giant Catfish	1 514	2 533	1 518	1 575
Layur / Hairtails	137	222	221	230
Kurisi / Treadtins Breams	1 846	2 475	2 165	1 479
Kuniran / Sulphur Goalfish	92	92	92	93
Swanggi / Big Eyes	276	271	273	204
Beloso / Greater Lizardfish	32	34	51	42
Golok-golok / Wolf Herrings	291	307	289	296
Gulamah / Croakers/Drums	2 055	2 399	2 456	2 369
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	4 352	4 723	4 485	4 459
Kerapu / Groupers	5 801	6 173	4 360	3 659
Kuwe / Jack Trevalies	1 791	2 112	2 256	2 347
Ikan Lidah / Flat Fishes	80	77	76	75
PELAGIS KECIL	20 293	24 207	22 799	21 000
Banyar / Indian Mackarel	302	293	...	268
Kembung / Short-bodied Mackerels	9 331	11 132	12 115	11 411
Ikan Terbang / Flying Fishes	-	-	...	-
Ikan Layang / Scads	10 369	12 475	10 684	9 321
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	1 572	1 980	2 373	2 863
Cakalang / Skipjack Tuna	1 364	1 791	2 182	2 676
Albakora / Albacore	-	-	-	...
Setuhuk / Marlin	163	153	154	151
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	16	18	21	20
Lemadang / Common Dolphin Fish	29	18	16	16
CUMI-CUMI	3 901	4 864	6 187	5 157

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Timur Kalimantan terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Eastern Kalimantan consist of Province of Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.14i

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Northern Sulawesi¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² <i>Fish²</i>	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	884	1 231	441	435
DEMERSAL	17 750	18 261	30 034	47 198
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	129	97	8	-
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	143	37	6	-
Layur / <i>Hairtails</i>	94	287	707	464
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	1 116	811	668	1 317
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	13	475	308	776
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	190	183	177	1 526
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	517	-	11	3
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	137	137	90	72
Gulamah / <i>Croackers/Drums</i>	116	72	27	48
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	3 549	4 090	6 191	9 379
Kerapu / <i>Groupers</i>	5 423	8 239	13 482	18 153
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	6 460	3 970	8 356	15 460
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	-	-	3	-
PELAGIS KECIL	101 929	114 437	72 516	92 780
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	634	22 792	...	24 631
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	21 055	1 728	902	3 558
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	1 557	1 358	...	1 008
Ikan Layang / <i>Scads</i>	78 546	88 422	71 477	63 583
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	-	-	137	-
TUNA BESAR	96 648	151 171	204 621	186 487
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	94 786	148 222	201 366	182 318
Albakora / <i>Albacore</i>	-	-	-	...
Setuhuk / <i>Marlin</i>	330	510	552	1 158
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	783	1 096	1 712	2 264
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	749	1 343	991	747
CUMI-CUMI	4 887	3 245	3 281	3 222

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Northern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.14j

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Southern Sulawesi¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	4 055	3 663	3 988	5 110
DEMERSAL	52 363	50 101	50 320	49 621
Kurau / Four Finger Threadfin	241	418	249	251
Manyung / Giant Catfish	2 598	1 987	2 314	1 232
Layur / Hairtails	1 335	1 786	1 298	1 719
Kurisi / Treadtins Breams	5 873	6 816	5 740	6 633
Kuniran / Sulphur Goalfish	512	473	348	676
Swanggi / Big Eyes	928	422	296	254
Beloso / Greater Lizardfish	600	106	65	221
Golok-golok / Wolf Herrings	276	307	22	29
Gulamah / Croakers/Drums	784	1 126	1 943	1 800
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	12 955	11 995	12 503	11 428
Kerapu / Groupers	15 669	15 365	14 446	15 628
Kuwe / Jack Trevalies	10 868	9 607	11 096	9 750
Ikan Lidah / Flat Fishes	-	-	-	-
PELAGIS KECIL	96 693	74 820	63 410	97 422
Banyar / Indian Mackarel	10 782	14 120	...	15 983
Kembung / Short-bodied Mackerels	30 116	20 940	20 901	25 416
Ikan Terbang / Flying Fishes	2 635	1 662	...	1 843
Ikan Layang / Scads	52 884	37 791	42 509	54 180
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	51 464	53 962	50 173	61 236
Cakalang / Skipjack Tuna	48 450	51 469	47 652	58 520
Albakora / Albacore	-	-	-	...
Setuhuk / Marlin	257	269	297	316
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	444	318	269	503
Lemadang / Common Dolphin Fish	2 313	1 906	1 955	1 897
CUMI-CUMI	6 444	5 605	4 302	6 182

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Southern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.14k

Eksplorasi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua ¹, 2011-2014
Exploitation of Fish Resources in Maluku and Papua ¹, 2011-2014
(Ton)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	22 559	22 605	21 188	21 162
DEMERSAL	164 879	164 389	179 215	176 166
Kurau / Four Finger Threadfin	348	315	371	436
Manyung / Giant Catfish	16 925	16 311	16 324	18 245
Layur / Hairtails	21 619	21 218	23 200	16 025
Kurisi / Treadtins Breams	11 198	10 823	12 717	15 497
Kuniran / Sulphur Goalfish	378	120	730	183
Swanggi / Big Eyes	2 835	2 515	3 358	4 583
Beloso / Greater Lizardfish	7 288	6 880	8 444	8 312
Golok-golok / Wolf Herrings	1 721	1 845	1 984	2 535
Gulamah / Croackers/Drums	28 795	29 368	28 181	24 927
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	46 236	46 294	47 865	45 252
Kerapu / Groupers	10 682	10 957	15 285	15 932
Kuwe / Jack Trevalies	18 142	19 233	20 756	23 505
Ikan Lidah / Flat Fishes	433	355	552	734
PELAGIS KECIL	145 933	143 550	94 824	159 540
Banyar / Indian Mackarel	98	11	...	33 588
Kembung / Short-bodied Mackerels	60 571	61 780	35 973	42 660
Ikan Terbang / Flying Fishes	5 707	5 139	...	8 898
Ikan Layang / Scads	77 836	74 775	58 851	74 394
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	133 384	130 789	121 896	131 881
Cakalang / Skipjack Tuna	131 931	129 782	120 536	129 672
Albakora / Albacore	-	-	-	...
Setuhuk / Marlin	818	351	608	649
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	330	328	353	696
Lemadang / Common Dolphin Fish	305	328	399	864
CUMI-CUMI	7 601	7 762	13 702	10 385

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Maluku dan Papua terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Maluku and Papua consist of Province of Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.15a

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Barat Sumatera¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Western Sumatra¹, 2011-2014
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	1 078 813	1 155 121	866 799	1 281 642
DEMERSAL	1 166 632	1 460 303	1 507 551	1 546 766
Kurau / Four Finger Threadfin	7 147	8 920	10 540	7 760
Manyung / Giant Catfish	57 389	152 342	157 265	115 291
Layur / Hairtails	52 584	112 419	123 048	134 938
Kurisi / Treadtins Breams	44 299	115 473	67 818	...
Kuniran / Sulphur Goalfish	766	1 839	2 989	3 248
Swanggi / Big Eyes	52 794	44 431	60 567	51 372
Beloso / Greater Lizardfish	99 649	35 264	57 129	47 132
Golok-golok / Wolf Herrings	20 231	10 742	16 504	17 463
Gulamah / Croakers/Drums	65 592	35 520	51 401	41 492
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	216 605	241 008	310 377	299 131
Kerapu / Groupers	304 036	356 192	329 937	363 219
Kuwe / Jack Trevalies	245 295	342 964	319 976	446 635
Ikan Lidah / Flat Fishes	20 476	13 931	22 337	19 085
PELAGIS KECIL	685 987	739 833	912 748	866 476
Banyar / Indian Mackarel	41 717	23 198	...	15 757
Kembung / Short-bodied Mackerels	424 490	499 755	723 097	636 799
Ikan Terbang / Flying Fishes	13 675	7 364	...	15 079
Ikan Layang / Scads	185 872	198 774	189 651	195 968
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	2 873
TUNA BESAR	465 132	529 037	643 034	670 540
Cakalang / Skipjack Tuna	361 133	449 942	571 639	534 165
Albakora / Albacore	15 392	3 021	-	-
Setuhuk / Marlin	46 277	37 469	40 196	79 826
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	15 386	28 650	19 169	56 549
Lemadang / Common Dolphin Fish	26 944	9 955	12 031	...
CUMI-CUMI	62 923	79 874	82 870	104 708

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Barat Sumatera terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Western Sumatra consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat Bengkulu, Lampung

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.15b

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Sumatera ¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Eastern Sumatra ¹, 2011-2014
 (Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² <i>Fish</i> ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	1 085 015	1 156 187	866 799	1 497 815
DEMERSAL	1 423 375	1 959 934	2 794 052	2 503 075
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	61 350	74 416	169 780	129 020
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	231 053	287 631	319 768	424 107
Layur / <i>Hairtails</i>	22 520	31 142	33 047	30 420
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	172 366	297 897	284 798	...
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	60 334	60 647	95 543	83 725
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	17 836	23 213	18 476	19 723
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	3 630	4 412	3 908	4 748
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	100 305	118 243	118 412	116 806
Gulamah / <i>Croakers/Drums</i>	67 033	69 429	66 315	73 025
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	235 151	266 347	388 643	486 014
Kerapu / <i>Groupers</i>	320 779	576 613	931 072	729 305
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	229 839	266 151	364 291	403 316
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	1 483	2 036	1 878	2 866
PELAGIS KECIL	540 038	599 740	503 218	554 410
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	36 883	50 287	...	26 818
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	371 674	379 496	455 136	446 548
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	-	-	...	-
Ikan Layang / <i>Scads</i>	31 176	51 714	48 082	77 113
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	-	-	-	3 931
TUNA BESAR	16 295	3 901	3 039	3 506
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	8 207	-	-	121
Albakora / <i>Albacore</i>	-	-	-	-
Setuhuk / <i>Marlin</i>	5 361	80	122	155
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	2 078	3 447	2 154	3 230
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	649	374	763	...
CUMI-CUMI	379 505	262 468	82 870	243 620

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Timur Sumatera terdiri dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Eastern Sumatra consist of Province of Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.15c

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Jawa ¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Northern Java ¹, 2011-2014
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	824 739	708 495	645 283	611 865
DEMERSAL	1 447 746	1 525 557	1 678 608	1 556 409
Kurau / Four Finger Threadfin	3 042	5 795	7 333	6 220
Manyung / Giant Catfish	236 363	222 218	423 584	185 327
Layur / Hairtails	83 344	83 683	116 479	89 473
Kurisi / Treadtins Breams	41 342	54 800	57 754	...
Kuniran / Sulphur Goalfish	241 061	241 425	206 831	179 375
Swanggi / Big Eyes	146 227	125 798	132 068	191 864
Beloso / Greater Lizardfish	31 019	28 579	28 922	32 321
Golok-golok / Wolf Herrings	4 909	4 064	4 289	4 783
Gulamah / Croakers/Drums	80 591	92 372	104 706	99 678
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	391 403	414 292	320 206	546 892
Kerapu / Groupers	123 389	180 594	187 888	100 819
Kuwe / Jack Trevalies	65 875	73 933	88 547	118 658
Ikan Lidah / Flat Fishes	4 089	2 068	1 412	999
PELAGIS KECIL	1 094 124	1 358 903	1 258 829	1 295 814
Banyar / Indian Mackarel	17 999	5 792	...	23 451
Kembung / Short-bodied Mackerels	371 706	385 419	395 531	553 999
Ikan Terbang / Flying Fishes	1 603	3 762	...	121
Ikan Layang / Scads	683 650	871 876	788 150	669 119
Lemuru / Bali Sardinella	14 258	87 990	-	49 124
TUNA BESAR	482 247	624 002	805 466	981 125
Cakalang / Skipjack Tuna	371 279	512 885	-	807 487
Albakora / Albacore	57 630	46 777	-	112 309
Setuhuk / Marlin	35 250	25 030	46 135	43 991
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	4 818	8 207	9 434	17 338
Lemadang / Common Dolphin Fish	13 270	31 103	32 422	...
CUMI-CUMI	640 335	916 042	865 913	1 081 478

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Jawa terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Northern Java consist of Province of Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.15d

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Jawa ¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Southern Java ¹, 2011-2014
 (Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² <i>Fish</i> ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	88 130	177 976	323 869	117 119
DEMERSAL	167 998	268 500	342 742	413 305
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	-	4	25	498
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	13 754	16 164	22 855	15 511
Layur / <i>Hairtails</i>	60 853	118 671	167 646	180 653
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	16 460	19 805	24 564	...
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	1 236	3 550	20 654	8 245
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	199	432	861	957
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	246	979	251	1 651
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	124	441	171	7 923
Gulamah / <i>Croakers/Drums</i>	13 803	14 311	18 404	15 158
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	24 779	35 426	24 651	34 205
Kerapu / <i>Groupers</i>	13 106	39 272	36 925	110 476
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	21 819	17 752	25 737	34 624
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	1 743	2 134	3 279	3 404
PELAGIS KECIL	339 686	281 226	393 018	458 488
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	229	4 200	...	13 929
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	40 600	59 809	80 515	65 920
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	88	704	...	4 443
Ikan Layang / <i>Scads</i>	153 178	178 307	222 627	217 633
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	145 467	37 765	89 875	156 563
TUNA BESAR	204 211	208 726	178 933	271 114
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	149 560	161 847	110 254	140 633
Albakora / <i>Albacore</i>	40 373	17 596	23 240	81 123
Setuhuk / <i>Marlin</i>	6 552	13 440	25 022	34 621
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	4 133	8 277	11 340	14 737
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	3 593	7 566	9 078	...
CUMI-CUMI	28 364	69 601	101 826	81 541

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Jawa terdiri dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Southern Java consist of Province of Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel 4.15e Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Bali dan Nusa Tenggara ¹, 2011-2014
 Table 4.15e Production Value of Fish Resources in Bali and Nusa Tenggara ¹, 2011-2014
 (Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	88 002	85 324	323 869	330 820
DEMERSAL	445 171	395 440	498 960	503 148
Kurau / Four Finger Threadfin	190	2	-	3 356
Manyung / Giant Catfish	4 907	1 836	10 838	15 216
Layur / Hairtails	24 922	20 509	21 546	25 663
Kurisi / Treadtins Breams	44 939	39 441	47 028	...
Kuniran / Sulphur Goalfish	3 179	4 814	6 626	6 873
Swanggi / Big Eyes	1 696	1 520	3 293	4 762
Beloso / Greater Lizardfish	3 551	2 706	1 217	1 347
Golok-golok / Wolf Herrings	1 360	1 011	2 976	3 443
Gulamah / Croakers/Drums	3 580	3 017	11 156	12 992
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	118 605	104 404	97 290	110 422
Kerapu / Groupers	202 642	178 579	240 791	254 863
Kuwe / Jack Trevalies	36 960	38 596	56 200	63 784
Ikan Lidah / Flat Fishes	-	16	68	427
PELAGIS KECIL	337 898	403 648	421 843	771 262
Banyar / Indian Mackarel	3 262	3 300	...	14 450
Kembung / Short-bodied Mackerels	119 048	136 726	77 775	285 745
Ikan Terbang / Flying Fishes	21 233	18 670	...	37 735
Ikan Layang / Scads	169 328	169 313	235 488	253 192
Lemuru / Bali Sardinella	23 668	74 628	108 581	180 140
TUNA BESAR	439 363	529 308	587 056	806 863
Cakalang / Skipjack Tuna	337 416	350 534	436 076	641 816
Albakora / Albacore	54 096	115 167	57 902	82 947
Setuhuk / Marlin	21 726	31 926	35 700	43 681
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	13 900	6 550	22 021	38 419
Lemadang / Common Dolphin Fish	12 225	25 131	35 357	...
CUMI-CUMI	440 408	81 079	148 444	212 800

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Bali & Nusa Tenggara terdiri dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Bali & Nusa Tenggara consist of Province of Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.15f

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selat Malaka ¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Malacca Strait ¹, 2011-2014
 (Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² <i>Fish</i> ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	1 108 706	991 908	323 869	1 412 064
DEMERSAL	869 772	839 497	1 318 097	1 308 253
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	12 878	11 627	-	14 946
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	162 965	145 221	196 536	192 545
Layur / <i>Hairtails</i>	31 887	44 411	45 505	54 082
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	45 766	54 310	132 090	...
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	2 548	1 884	4 715	1 427
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	54 212	70 235	89 381	88 837
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	3 266	2 449	8 197	5 568
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	37 148	109 116	142 559	34 212
Gulamah / <i>Croakers/Drums</i>	93 239	71 779	131 879	150 237
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	106 016	105 406	157 646	159 100
Kerapu / <i>Groupers</i>	207 458	189 950	297 729	340 730
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	72 857	86 942	111 860	126 126
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	76 682	55 283	108 338	140 443
PELAGIS KECIL	923 963	1 043 182	1 208 273	1 158 878
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	25 621	16 738	...	16 024
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	711 194	761 186	960 764	919 388
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	3 834	297	...	-
Ikan Layang / <i>Scads</i>	146 167	155 845	247 510	223 466
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	-	-	-	-
TUNA BESAR	64 201	79 121	94 076	77 481
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	57 726	70 093	86 059	73 834
Albakora / <i>Albacore</i>	-	-	-	-
Setuhuk / <i>Marlin</i>	3 943	1 776	1 348	1 321
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	1 434	2 740	1 643	2 326
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	1 098	4 512	5 026	...
CUMI-CUMI	251 440	246 349	552 133	605 472

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selat Malaka terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Malacca Strait consist of Province of Aceh, Sumatera Utara, Riau*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.15g

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan/Barat Kalimantan¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Southern/Western Kalimantan¹, 2011-2014
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	769 501	906 367	1 145 249	1 124 803
DEMERSAL	577 306	655 414	1 048 590	1 066 896
Kurau / Four Finger Threadfin	7 388	12 491	-	7 242
Manyung / Giant Catfish	179 193	149 835	326 036	395 196
Layur / Hairtails	9 401	10 711	24 747	26 060
Kurisi / Treadtins Breams	10 059	57 083	79 956	...
Kuniran / Sulphur Goalfish	-	461	1 617	2 374
Swanggi / Big Eyes	5 813	8 258	9 385	3 555
Beloso / Greater Lizardfish	1 074	846	191	20
Golok-golok / Wolf Herrings	2 211	4 262	7 546	8 188
Gulamah / Croakers/Drums	63 695	98 171	156 082	143 819
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	240 387	118 579	208 038	279 465
Kerapu / Groupers	40 113	98 658	125 188	97 139
Kuwe / Jack Trevalies	18 508	96 353	109 804	102 365
Ikan Lidah / Flat Fishes	1 674	3 968	9 702	1 473
PELAGIS KECIL	99 548	139 216	248 738	509 987
Banyar / Indian Mackarel	1 247	-	...	54 292
Kembung / Short-bodied Mackerels	83 139	116 350	163 891	260 403
Ikan Terbang / Flying Fishes	-	-	...	-
Ikan Layang / Scads	12 951	18 604	84 847	195 292
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	2 197	11 278	19 278	10 955
Cakalang / Skipjack Tuna	-	776	-	-
Albakora / Albacore	-	-	-	-
Setuhuk / Marlin	325	3 140	10 565	-
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	1 872	5 208	8 713	10 955
Lemadang / Common Dolphin Fish	-	2 154	-	...
CUMI-CUMI	196 844	186 910	311 270	251 132

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan/Barat Kalimantan terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Southern/Western Kalimantan consist of Province of Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.15h

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Timur Kalimantan¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Eastern Kalimantan¹, 2011-2014
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² <i>Fish²</i>	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	958 111	895 390	945 605	885 426
DEMERSAL	505 427	975 777	481 004	459 144
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	1 683	1 345	-	2 379
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	11 643	34 883	13 401	14 147
Layur / <i>Hairtails</i>	1 683	5 990	3 397	3 482
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	11 162	16 340	15 368	...
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	460	544	546	481
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	1 079	1 070	1 260	1 038
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	181	201	279	232
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	2 340	1 965	1 340	1 474
Gulamah / <i>Croackers/Drums</i>	15 273	18 347	20 383	20 232
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	112 515	123 955	125 739	135 635
Kerapu / <i>Groupers</i>	310 280	315 857	243 579	215 140
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	39 208	457 001	55 408	64 664
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	258	244	242	240
PELAGIS KECIL	298 764	352 135	374 320	373 488
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	2 206	2 283	...	2 164
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	189 842	209 441	235 418	223 830
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	-	-	...	-
Ikan Layang / <i>Scads</i>	104 376	138 446	138 902	147 494
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	-	-	-	-
TUNA BESAR	34 591	56 496	65 305	76 631
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	33 134	55 027	64 067	75 419
Albakora / <i>Albacore</i>	-	-	-	-
Setuhuk / <i>Marlin</i>	1 151	1 148	1 157	1 130
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	62	72	82	82
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	245	249	-	...
CUMI-CUMI	86 465	100 869	311 270	113 758

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Timur Kalimantan terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Eastern Kalimantan consist of Province of Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.15i

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Utara Sulawesi¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Northern Sulawesi¹, 2011-2014
 (Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	37 478	260 172	8 578	17 734
DEMERSAL	279 908	311 378	594 632	1 742 122
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	508	972	82	-
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	447	136	51	1
Layur / <i>Hairtails</i>	993	1 708	8 462	6 601
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	9 521	6 779	6 724	...
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	149	5 136	4 161	13 095
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	1 827	1 345	2 489	15 720
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	319	-	64	21
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	520	610	891	831
Gulamah / <i>Croakers/Drums</i>	1 688	690	89	477
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	46 834	92 227	113 757	246 947
Kerapu / <i>Groupers</i>	131 914	151 838	333 256	1 158 833
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	85 708	50 547	124 607	299 596
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	-	-	8	-
PELAGIS KECIL	642 637	983 936	675 335	860 391
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	3 171	252 298	...	232 246
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	163 745	11 782	9 071	35 192
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	8 018	5 504	...	5 903
Ikan Layang / <i>Scads</i>	467 183	713 742	663 830	587 050
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	-	-	2 434	-
TUNA BESAR	758 755	17 673	2 184 662	2 247 879
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	747 766	1 347	2 155 612	2 216 230
Albakora / <i>Albacore</i>	-	-	-	-
Setuhuk / <i>Marlin</i>	1 508	3 138	9 067	10 459
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	5 610	6 741	13 193	21 190
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	3 871	6 447	6 790	...
CUMI-CUMI	54 671	46 259	64 078	56 453

Catatan / Note :¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Utara Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Northern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.15j

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Selatan Sulawesi¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Southern Sulawesi¹, 2011-2014
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² <i>Fish²</i>	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	176 014	132 139	182 134	230 775
DEMERSAL	824 032	942 394	939 056	1 119 067
Kurau / <i>Four Finger Threadfin</i>	3 552	5 562	2 174	2 505
Manyung / <i>Giant Catfish</i>	20 455	21 430	26 854	14 797
Layur / <i>Hairtails</i>	9 633	9 694	12 128	18 908
Kurisi / <i>Treadtins Breams</i>	54 220	72 860	69 025	...
Kuniran / <i>Sulphur Goalfish</i>	3 715	3 637	3 740	7 368
Swanggi / <i>Big Eyes</i>	9 491	3 397	3 598	3 489
Beloso / <i>Greater Lizardfish</i>	2 797	759	454	1 663
Golok-golok / <i>Wolf Herrings</i>	2 574	2 172	250	340
Gulamah / <i>Croakers/Drums</i>	8 360	13 189	23 766	22 479
Ikan Kakap Merah / <i>Red Snappers</i>	255 401	262 012	265 946	297 027
Kerapu / <i>Groupers</i>	238 342	417 487	357 900	528 330
Kuwe / <i>Jack Trevalies</i>	218 066	132 368	173 220	222 161
Ikan Lidah / <i>Flat Fishes</i>	-	-	-	-
PELAGIS KECIL	904 628	757 600	825 662	1 417 720
Banyar / <i>Indian Mackarel</i>	123 725	165 862	...	287 888
Kembung / <i>Short-bodied Mackerels</i>	290 643	203 449	296 095	376 918
Ikan Terbang / <i>Flying Fishes</i>	19 831	16 405	...	24 972
Ikan Layang / <i>Scads</i>	467 854	359 712	529 567	727 942
Lemuru / <i>Bali Sardinella</i>	-	-	-	-
TUNA BESAR	659 874	534 696	680 616	946 123
Cakalang / <i>Skipjack Tuna</i>	523 765	511 270	655 587	933 281
Albakora / <i>Albacore</i>	10 975	-	-	-
Setuhuk / <i>Marlin</i>	103 367	4 148	4 021	4 924
Ikan Layaran / <i>Indo Pacific Sailfish</i>	3 694	4 468	4 092	7 918
Lemadang / <i>Common Dolphin Fish</i>	18 073	14 810	16 918	...
CUMI-CUMI	95 970	103 236	83 490	141 310

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Selatan Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara

¹ *Regional Fisheries Management (WPP) in Southern Sulawesi consist of Province of Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara*

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² *The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011*

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.15k

Nilai Produksi Sumber Daya Ikan di Maluku dan Papua¹, 2011-2014
Production Value of Fish Resources in Maluku and Papua¹, 2011-2014
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Ikan ² Fish ²	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UDANG	1 093 588	1 096 249	1 108 893	1 108 585
DEMERSAL	1 915 647	2 019 309	2 195 749	2 378 852
Kurau / Four Finger Threadfin	1 761	1 735	4 797	5 765
Manyung / Giant Catfish	210 412	222 650	213 979	253 679
Layur / Hairtails	191 388	185 067	189 034	156 047
Kurisi / Treadtins Breams	76 949	81 869	91 853	...
Kuniran / Sulphur Goalfish	1 892	520	3 645	1 624
Swanggi / Big Eyes	12 262	12 583	18 383	28 580
Beloso / Greater Lizardfish	47 960	53 861	58 825	72 267
Golok-golok / Wolf Herrings	11 187	12 605	13 231	30 490
Gulamah / Croakers/Drums	247 960	279 242	275 711	258 182
Ikan Kakap Merah / Red Snappers	851 145	870 016	915 891	887 421
Kerapu / Groupers	117 197	123 519	184 089	289 188
Kuwe / Jack Trevalies	154 543	186 387	226 307	388 789
Ikan Lidah / Flat Fishes	2 178	1 860	3 437	6 820
PELAGIS KECIL	1 156 887	1 193 569	986 930	1 365 145
Banyar / Indian Mackarel	295	47	...	234 441
Kembung / Short-bodied Mackerels	708 779	725 637	635 311	602 160
Ikan Terbang / Flying Fishes	19 634	16 137	...	50 187
Ikan Layang / Scads	416 992	439 143	351 619	478 357
Lemuru / Bali Sardinella	-	-	-	-
TUNA BESAR	1 117 786	1 282 067	1 216 973	1 609 310
Cakalang / Skipjack Tuna	1 106 575	1 273 935	1 204 482	1 589 719
Albakora / Albacore	-	-	-	-
Setuhuk / Marlin	6 942	3 986	7 591	11 012
Ikan Layaran / Indo Pacific Sailfish	3 338	3 186	3 516	8 579
Lemadang / Common Dolphin Fish	933	960	1 384	...
CUMI-CUMI	121 271	122 109	213 133	231 752

Catatan / Note : ¹ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Maluku dan Papua terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua,

Papua Barat

¹ Regional Fisheries Management (WPP) in Maluku and Papua consist of Province of Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

² Penentuan Jenis Ikan yang disajikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.45/MEN/2011

² The Determination of Fish Type served based on Ministry of Marine Affairs and Fisheries RI No. KEP.45/MEN/2011

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.16

Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2014
Production of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and Province, 2014
 (Ton)

Provinsi Province	Udang Donggol <i>Endeavour prawn/ shrimp, Bluetail endeavour prawn/ shrimp, Red greasiback</i>	Udang putih/ Jerbung <i>Banana prawn/ white shrimp / Indian banana</i>	Udang Krosok <i>Tiger cat/ Rainbow shrimp</i>	Udang Ratu/Raja <i>King prawn/ Blue legged</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	442	1 533	600	230
Sumatera Utara	4 005	11 046	291	1 726
Sumatera Barat	9 932	8 787	172	5
Riau	409	12 503	159	-
Jambi	2 612	5 499	787	-
Sumatera Selatan	1 126	1 769	-	-
Bengkulu	395	656	4 955	21
Lampung	636	1 324	3 084	38
Kepulauan Bangka Belitung	1 052	1 755	837	2
Kepulauan Riau	868	1 698	105	-
DKI Jakarta	-	756	4	-
Jawa Barat	790	790	429	-
Jawa Tengah	552	610	1 487	28
DI Yogyakarta	-	10	-	-
Jawa Timur	-	3 645	-	-
Banten	2	655	1	-
Bali	-	31	-	-
Nusa Tenggara Barat	58	4 182	133	25
Nusa Tenggara Timur	-	39	15	4
Kalimantan Barat	1 856	2 386	2 182	70
Kalimantan Tengah	3 900	2 968	1 529	-
Kalimantan Selatan	3 226	17 147	3 462	231
Kalimantan Timur	5 205	4 180	234	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	4	99	-	-
Sulawesi Selatan	411	660	24	5
Sulawesi Tenggara	75	439	-	-
Gorontalo	-	12	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Maluku	403	1 710	164	32
Maluku Utara	-	78	-	-
Papua Barat	1 727	1 909	-	160
Papua	483	730	644	-
Indonesia	40 169	89 606	21 298	2 577

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.16*

Provinsi <i>Province</i>	Udang Windu <i>Jumbo/Giant/Blue/ Brown tiger prawn</i>	Udang Barong/Udang Karang <i>Spiny lobsters</i>	Udang Lainnya <i>Other shrimps</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	932	262	1 512
Sumatera Utara	4 313	191	7 907
Sumatera Barat	733	936	2 085
Riau	8 741	-	3 216
Jambi	-	-	7 112
Sumatera Selatan	156	1 768	1 735
Bengkulu	40	400	276
Lampung	-	870	971
Kepulauan Bangka Belitung	250	123	2 048
Kepulauan Riau	-	-	3 337
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	33	129	5 629
Jawa Tengah	28	50	1 566
DI Yogyakarta	-	7	-
Jawa Timur	1 343	126	2 242
Banten	-	-	802
Bali	10	163	38
Nusa Tenggara Barat	228	52	980
Nusa Tenggara Timur	11	25	10
Kalimantan Barat	829	160	4 342
Kalimantan Tengah	2 180	-	6 579
Kalimantan Selatan	5 703	1 257	6 521
Kalimantan Timur	2 402	193	8 993
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	46	31	-
Sulawesi Tengah	112	39	92
Sulawesi Selatan	129	437	1 433
Sulawesi Tenggara	481	174	834
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	6	2
Maluku	2 293	794	426
Maluku Utara	18	5	-
Papua Barat	2 640	1 414	3 746
Papua	1 133	474	179
Indonesia	34 784	10 086	74 613

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

**Tabel
Table** 4.17 **Nilai Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Jenis Udang dan Provinsi,
2014
Production Value of Marine Shrimp Capture Fisheries by Type of Shrimp and Province,
2014**
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Provinsi Province	Udang Donggol <i>Endeavour prawn/ shrimp, Bluetail endeavour prawn/ shrimp, Red greasiback</i>	Udang putih/ Jerbung <i>Banana prawn/ white shrimp / Indian banana</i>	Udang Krosok <i>Tiger cat/ Rainbow shrimp</i>	Udang Ratu/Raja <i>King prawn/ Blue legged</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	14 702	46 186	13 848	11 508
Sumatera Utara	166 024	427 094	13 130	108 151
Sumatera Barat	253 290	265 192	6 878	436
Riau	17 656	380 593	4 942	-
Jambi	81 738	212 568	27 538	-
Sumatera Selatan	27 543	102 353	-	-
Bengkulu	9 875	32 711	112 907	3 651
Lampung	12 275	15 561	59 455	920
Kepulauan Bangka Belitung	50 592	59 913	12 929	147
Kepulauan Riau	27 490	54 611	1 466	-
DKI Jakarta	-	30 158	148	-
Jawa Barat	23 681	42 644	8 582	-
Jawa Tengah	20 684	43 908	28 026	296
DI Yogyakarta	-	754	-	-
Jawa Timur	-	125 493	10	-
Banten	46	32 850	73	-
Bali	-	1 562	-	-
Nusa Tenggara Barat	2 549	208 207	15 904	1 143
Nusa Tenggara Timur	-	533	176	197
Kalimantan Barat	52 804	58 139	21 849	666
Kalimantan Tengah	76 020	116 826	7 943	-
Kalimantan Selatan	53 904	329 043	46 650	6 777
Kalimantan Timur	134 144	183 274	6 465	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	120	3 841	-	-
Sulawesi Selatan	8 884	18 607	24	750
Sulawesi Tenggara	1 496	12 180	-	-
Gorontalo	-	247	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Maluku	34 219	44 051	5 736	2 329
Maluku Utara	-	827	-	-
Papua Barat	94 060	104 789	-	9 395
Papua	17 841	33 922	27 869	-
Indonesia	1 181 637	2 988 637	422 548	146 366

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.17*

Provinsi <i>Province</i>	Udang Windu <i>Jumbo/Giant/Blue/ Brown tiger prawn</i>	Udang Barong/Udang Karang <i>Spiny lobsters</i>	Udang Lainnya <i>Other shrimps</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	49 257	18 746	31 266
Sumatera Utara	226 575	7 654	174 083
Sumatera Barat	45 268	58 949	56 721
Riau	194 459	-	70 158
Jambi	-	-	104 600
Sumatera Selatan	7 354	61 730	50 216
Bengkulu	4 719	113 488	6 053
Lampung	-	21 681	12 856
Kepulauan Bangka Belitung	17 467	12 280	65 982
Kepulauan Riau	-	-	144 082
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	1 779	23 390	132 049
Jawa Tengah	4 209	9 840	9 897
DI Yogyakarta	-	2 114	-
Jawa Timur	87 968	30 237	49 040
Banten	-	-	21 109
Bali	606	43 463	2 025
Nusa Tenggara Barat	26 291	5 834	21 406
Nusa Tenggara Timur	202	477	242
Kalimantan Barat	37 202	10 149	60 732
Kalimantan Tengah	59 927	-	93 054
Kalimantan Selatan	278 712	31 429	66 707
Kalimantan Timur	177 712	29 275	70 826
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	1 254	817	-
Sulawesi Tengah	6 941	1 764	2 751
Sulawesi Selatan	5 530	96 148	34 090
Sulawesi Tenggara	19 383	4 590	28 727
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	315	52
Maluku	158 706	46 124	27 060
Maluku Utara	179	90	-
Papua Barat	154 530	82 915	191 101
Papua	48 832	16 624	7 387
Indonesia	1 615 062	730 123	1 534 274

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.18

Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Daerah Perairan dan Jenis Udang,
2012-2014
*Production of Marine Shrimp Capture Fisheries by Territorial Waters and Type of
Shrimp, 2012-2014*

(Ton)

Provinsi Province	Udang Dogol			Udang putih/Jerbung		
	<i>Endeavour prawn/shrimp, Bluetail endeavour prawn/shrimp, Red greasiback</i>			<i>Banana prawn/White shrimp/Indian banana</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	21 351	12 083	12 835	16 091	2 718	10 716
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	4 470	4 851	6 239	12 020	16 481	16 131
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	262	1 107	101	957	1 091	398
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	1 217	1 995	1 243	9 109	6 654	6 068
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	48	47	58	615	894	4 252
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	3 945	5 535	2 403	15 398	17 044	19 723
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	5 279	7 991	8 265	17 881	18 322	17 360
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	5 644	6 106	5 922	10 161	10 054	9 321
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	563	495	486	857	902	1 099
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	3	17	4	94	87	111
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	2 445	2 811	2 613	4 222	4 000	4 427
Indonesia	45 277	40 038	40 169	87 405	79 247	89 606

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.18

Provinsi Province	Udang Krosok <i>Tiger cat/Rainbow shrimp</i>			Udang Ratu/Raja <i>King prawn/Blue legged</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	1 410	3 319	5 444	929	1 998	842
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	5 700	4 498	4 813	532	16	40
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	1 043	840	265	-	3	28
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	2 558	1 491	1 656	-	-	-
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	34	66	148	88	67	29
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	692	740	733	1 202	1 305	1 140
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	4 534	6 228	6 474	62	62	301
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	1 143	990	933	219	272	-
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	54	181	24	55	-	5
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	437	8	-	-	-	-
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	87	4 130	808	171	203	192
Indonesia	17 692	22 491	21 298	3 258	3 296	2 577

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.18*

Provinsi Province	Udang Windu <i>Jumbo/ Giant/ Blue/ Brown tiger prawn</i>			Udang Barong/Udamg Karang <i>Spiny lobsters</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	2 209	1 307	1 806	1 577	2 206	1 621
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	1 204	857	5 319	2 512	2 738	2 761
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	39	38	23	496	322	232
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	1 667	1 344	1 381	395	75	80
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	152	285	249	232	276	240
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	3 979	7 955	8 040	562	168	168
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	5 230	5 716	5 871	1 687	1 246	1 417
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	5 872	6 158	5 243	2 740	6 954	193
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	434	337	610	358	564	617
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	43	44	158	483	172	70
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	7 130	6 722	6 084	2 507	1 761	2 687
Indonesia	26 417	30 763	34 784	10 541	16 482	10 086

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.18

Provinsi Province	Udang Lainnya <i>Other shrimps</i>			Jumlah <i>Total</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(25)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	4 236	2 363	3 906	86 930	24 994	37 170
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	12 862	17 613	15 544	114 583	47 054	50 847
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	3 796	2 440	1 217	55 966	5 841	2 264
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	6 776	9 691	9 022	51 273	21 250	19 450
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	887	1 083	1 028	40 856	2 718	6 004
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	9 053	7 725	10 749	57 715	37 472	42 956
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	15 700	13 651	16 737	113 771	53 216	56 425
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	7 076	2 647	9 698	86 438	33 181	31 310
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	1 342	1 509	2 269	13 462	3 988	5 110
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	171	113	92	2 228	441	435
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	6 043	1 561	4 351	62 855	33 888	21 162
Indonesia	67 942	60 396	74 613	686 077	264 043	273 133

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012 - 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistic of Indonesia 2012-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.19

Nilai Produksi Perikanan Tangkap Udang di Laut menurut Daerah Perairan dan Jenis
Udang, 2012-2014
*Production Value of Marine Shrimp Capture Fisheries by Territorial Waters and Type of
Shrimp, 2012-2014*
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Provinsi Province	Udang Dogol			Udang putih/Jerbung		
	<i>Endeavour prawn/shrimp, Bluetail endeavour prawn/shrimp, Red greasiback</i>			<i>Banana prawn/White shrimp/Indian banana</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	405 444	382 522	363 920	358 109	94 072	346 708
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	121 343	141 357	198 904	476 285	742 206	567 590
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	10 790	56 297	8 324	43 004	153 936	34 475
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	40 823	62 414	36 087	344 695	294 287	241 332
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	1 859	1 908	2 549	10 794	33 341	210 302
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	80 539	83 511	98 361	460 233	608 712	682 485
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	114 225	203 888	168 398	350 277	423 110	401 196
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	134 983	152 554	148 475	299 160	299 604	286 086
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	8 597	9 679	10 380	17 345	20 592	30 786
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	153	1 010	120	2 876	2 575	4 088
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	136 719	158 050	146 120	168 328	181 234	183 588
Indonesia	1 058 519	1 253 191	1 181 637	2 531 106	2 854 670	2 988 637

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.19

Provinsi Province	Udang Krosok <i>Tiger cat/Rainbow shrimp</i>			Udang Ratu/Raja <i>King prawn/Blue legged</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	39 733	33 661	128 424	46 664	94 296	61 394
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	168 883	95 141	101 388	13 199	404	1 067
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	18 699	18 950	6 762	-	73	296
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	31 927	22 090	30 077	-	-	-
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	1 935	1 933	16 080	3 515	2 708	1 341
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	18 829	24 552	23 281	52 897	71 780	62 352
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	53 566	29 454	62 468	591	486	7 443
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	12 378	21 995	20 440	3 420	4 313	-
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	3 632	11 996	24	3 542	-	750
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	6 596	166	-	-	-	-
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	3 462	216 120	33 606	12 559	12 010	11 723
Indonesia	359 641	486 058	422 548	136 388	186 069	146 366

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.19*

Provinsi Province	Udang Windu <i>Jumbo/ Giant/ Blue/ Brown tiger prawn</i>			Udang Barong/Udamg Karang <i>Spiny lobsters</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	99 646	51 652	89 832	126 019	152 080	192 105
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	43 474	37 388	142 728	85 668	90 148	95 691
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	2 684	8 706	3 020	79 488	59 968	47 872
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	129 462	97 013	90 936	40 225	16 875	17 708
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	9 019	30 841	27 099	32 394	42 081	49 774
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	152 946	469 707	312 539	34 977	6 731	6 731
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	187 135	233 257	233 800	28 481	39 704	41 579
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	338 974	358 150	319 752	34 088	46 522	29 275
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	15 390	14 723	24 914	55 759	96 201	101 052
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	1 699	2 185	8 195	11 635	4 405	2 581
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	314 076	355 220	362 247	216 549	116 047	145 753
Indonesia	1 294 506	1 658 841	1 615 062	745 282	670 762	730 123

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.19

Provinsi Province	Udang Lainnya <i>Other shrimps</i>			Jumlah <i>Total</i>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(25)
Barat Sumatera <i>Western Sumatera</i>	79 505	58 515	99 258	1 155 120	866 799	1 281 642
Timur Sumatera <i>Eastern Sumatera</i>	247 336	449 397	390 446	1 156 188	1 556 040	1 497 814
Selatan Jawa <i>Southern Java</i>	23 311	25 939	16 371	177 976	323 869	117 119
Utara Jawa <i>Northern Java</i>	121 362	215 017	195 724	708 494	707 697	611 865
Bali-Nusa Tenggara <i>Bali-Nusa Tenggara</i>	25 807	29 770	23 674	85 323	143 581	330 820
Selat Malaka <i>Malacca Strait</i>	191 488	227 673	226 314	991 909	1 492 667	1 412 064
Selatan/Barat Kalimantan <i>Southern/Western Kalimantan</i>	172 391	205 350	209 919	906 666	1 145 249	1 124 803
Timur Kalimantan <i>East Kalimantan</i>	72 388	62 466	81 400	895 391	945 605	885 426
Selatan Sulawesi <i>Southern Sulawesi</i>	27 874	28 944	62 869	132 139	182 134	230 775
Utara Sulawesi <i>Northern Sulawesi</i>	3 059	2 198	2 751	26 018	12 538	17 734
Maluku-Papua <i>Maluku-Papua</i>	244 556	70 213	225 548	1 096 249	1 108 893	1 108 585
Indonesia	1 209 078	1 375 482	1 534 274	7 151 475	8 485 073	8 618 648

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012 - 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistic of Indonesia 2012-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.20

Luas Usaha dan Produksi Budidaya Tambak dan Laut menurut Provinsi, 2014
*Area and Production of Brackishwater Pond and Marine Culture by Province,
2014*

Provinsi Province	Budidaya Tambak <i>Brackishwater Pond Culture</i>		Budidaya Laut <i>Marine Culture</i>	
	Luas Lahan Area	Produksi Production	Luas Lahan Area	Produksi Production
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
Aceh	3,27	37 721,00	50 541,00	109,00
Sumatera Utara	18,29	29 345,00	4 499,00	4 350,00
Sumatera Barat	3,50	297,00	13,00	243,00
Riau	10,35	311,00	498,00	401,00
Jambi	-	786,00	324,00	-
Sumatera Selatan	-	53 082,00	30 667,00	-
Bengkulu	5,08	4 767,00	339,00	24,00
Lampung	783,45	71 064,00	37 985,00	6 775,00
Kepulauan Bangka Belitung	52,89	828,00	147,00	1 088,00
Kepulauan Riau	3 831,70	35,00	76,00	15 358,00
DKI Jakarta	21,04	756,00	364,00	4 066,00
Jawa Barat	29,57	310 481,00	64 265,00	1 015,00
Jawa Tengah	55,45	212 693,00	45 025,00	42 413,00
DI Yogyakarta	-	2 495,00	4 915,00	-
Jawa Timur	129 518,11	191 610,00	51 195,00	601 413,00
Banten	860,60	60 070,00	10 358,00	25 671,00
Bali	457,60	3 554,00	209,00	84 931,00
Nusa Tenggara Barat	16 903,52	111 554,00	7 495,00	749 659,00
Nusa Tenggara Timur	10 776,015	1 902,00	1 149,00	1 966 261,00
Kalimantan Barat	1,17	46 730,00	19 147,00	1 631,00
Kalimantan Tengah	15,00	10 745,00	5 977,00	339,00
Kalimantan Selatan	224,19	27 177,00	17 032,00	2 706,00
Kalimantan Timur	8 285,11	52 572,00	153 833,00	321 128,00
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	1 588,00	668,00	299,00	301 876,00
Sulawesi Tengah	24 574,31	73 733,00	8 586,00	1 137 589,00
Sulawesi Selatan	44 821,80	1 001 214,00	109 832,00	2 087 873,00
Sulawesi Tenggara	26 927,61	75 954,00	19 783,00	956 495,00
Gorontalo	435,00	11 344,00	7 645,00	24 991,00
Sulawesi Barat	1 910,00	25 133,00	13 739,00	39 323,00
Maluku	7 382,50	5 415,00	226,00	496 004,00
Maluku Utara	1 194,42	156,00	64,00	103 213,00
Papua Barat	767,08	2 988,00	95,00	57 760,00
Papua	20,02	1 209,00	761,00	51,00
Indonesia	281 474,65	2 428 389,00	667 083,00	9 034 756,00

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.21

Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2010-2014
Production of Brackishwater Pond Culture by Province, 2010-2014
(Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	31 041	23 405	27 994	32 940	37 721
Sumatera Utara	32 785	32 830	33 841	35 506	29 345
Sumatera Barat	12	12	26	179	297
Riau	2 371	2 120	662	329	311
Jambi	2 097	1 852	732	538	786
Sumatera Selatan	65 133	70 370	47 278	52 201	53 082
Bengkulu	897	1 125	750	1 838	4 767
Lampung	53 248	54 666	50 315	82 822	71 064
Kepulauan Bangka Belitung	503	535	961	761	828
Kepulauan Riau	14	13	19	91	35
DKI Jakarta	1 030	1 800	827	1 211	756
Jawa Barat	170 684	179 980	199 923	338 439	310 481
Jawa Tengah	83 878	115 786	110 526	188 407	212 693
DI Yogyakarta	268	499	602	817	2 495
Jawa Timur	158 927	177 682	170 434	177 077	191 610
Banten	56 309	59 345	51 535	58 511	60 070
Bali	2 649	2 232	1 899	3 005	3 554
Nusa Tenggara Barat	40 544	67 999	78 418	97 839	111 554
Nusa Tenggara Timur	1 027	1 195	1 497	1 586	1 902
Kalimantan Barat	12 889	10 089	19 805	47 723	46 730
Kalimantan Tengah	4 031	5 224	6 394	9 244	10 745
Kalimantan Selatan	15 378	20 101	23 392	23 826	27 177
Kalimantan Timur	53 517	51 164	60 557	54 208	52 572
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	606	428	261	3 451	668
Sulawesi Tengah	23 214	42 057	30 627	83 215	73 733
Sulawesi Selatan	534 456	600 241	744 385	918 645	1001 214
Sulawesi Tenggara	46 962	54 921	66 183	86 506	75 954
Gorontalo	4 081	3 212	3 716	10 879	11 344
Sulawesi Barat	16 018	17 928	19 375	19 627	25 133
Maluku	527	1 741	1 205	4 264	5 415
Maluku Utara	127	85	296	253	156
Papua Barat	189	1 164	1 212	110	2 988
Papua	628	950	1 154	1 624	1 209
Indonesia	1 416 040	1 602 748	1 756 801	2 337 672	2 428 389

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.22

Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2010-2014
Production of Marine Culture by Province, 2010-2014
 (Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	42	164	43	84	109
Sumatera Utara	1 888	3 566	3 086	4 348	4 350
Sumatera Barat	13	79	833	335	243
Riau	11	3	2	5	401
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	392	-	-	-	-
Bengkulu	-	248	421	23	24
Lampung	9 448	10 696	10 142	7 142	6 775
Kepulauan Bangka Belitung	746	4 585	5 164	779	1 088
Kepulauan Riau	16 477	4 682	14 057	15 927	15 358
DKI Jakarta	35 281	26 726	3 071	2 517	4 066
Jawa Barat	14 707	7 934	3 726	1 528	1 015
Jawa Tengah	4 809	5 737	6 604	14 211	42 413
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	389 430	412 798	561 887	580 683	601 413
Banten	15 024	16 708	17 219	21 930	25 671
Bali	99 883	106 667	144 610	146 192	84 931
Nusa Tenggara Barat	163 287	278 107	451 482	599 742	749 659
Nusa Tenggara Timur	347 828	377 203	398 739	1 846 350	1 966 261
Kalimantan Barat	197	20	147	177	1 631
Kalimantan Tengah	300	149	230	88	339
Kalimantan Selatan	1 502	2 303	2 726	2 426	2 706
Kalimantan Timur	55 995	83 216	195 530	249 746	321 128
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	48 546	103 544	159 642	181 052	301 876
Sulawesi Tengah	716 496	734 635	891 428	1 234 021	1 137 589
Sulawesi Selatan	815 777	1 024 310	1 480 791	1 661 417	2 087 873
Sulawesi Tenggara	353 431	588 745	640 334	918 245	956 495
Gorontalo	64 077	89 190	95 482	10 407	24 991
Sulawesi Barat	13 211	21 553	27 343	33 127	39 323
Maluku	275 193	610 712	476 175	586 106	496 004
Maluku Utara	49 878	65 093	121 135	98 312	103 213
Papua Barat	20 613	26 280	57 555	75 565	57 760
Papua	224	176	131	146	51
Indonesia	3 514 706	4 605 829	5 769 735	8 292 631	9 034 756

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

**Tabel
Table 4.23 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tambak menurut Provinsi, 2010-2014
*Production Value of Brackishwater Pond Culture by Province, 2010-2014***
(Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	711 169	617 884	699 511	966 190	1 153 216
Sumatera Utara	2 567 285	1 349 505	1 169 546	893 630	1 859 430
Sumatera Barat	380 135	335	450	7 894	9 116
Riau	135 185	92 468	15 936	10 698	7 915
Jambi	25 962	21 489	9 180	16 014	13 150
Sumatera Selatan	3 055 287	3 520 248	1 974 814	1 949 928	2 422 411
Bengkulu	15 482	20 775	22 182	52 950	506 804
Lampung	1 634 599	2 024 383	1 887 658	5 073 781	4 148 664
Kepulauan Bangka Belitung	18 156	21 489	34 647	36 062	2 025
Kepulauan Riau	267	398	741	3 846	47 722
DKI Jakarta	20 035	33 637	15 776	21 218	23 281
Jawa Barat	2 951 663	3 906 440	4 823 961	5 134 891	8 232 921
Jawa Tengah	970 243	1 151 343	1 552 973	4 283 683	2 779 838
DI Yogyakarta	11 912	21 365	23 956	34 652	103 831
Jawa Timur	2 200 308	4 188 446	4 307 943	4 322 955	5 049 778
Banten	239 350	321 568	402 261	420 915	420 766
Bali	97 398	96 417	79 894	130 564	215 008
Nusa Tenggara Barat	1 618 845	1 711 492	1 977 378	4 055 146	6 090 213
Nusa Tenggara Timur	28 324	29 941	26 313	53 756	67 717
Kalimantan Barat	709 548	375 893	786 851	2 435 677	2 918 314
Kalimantan Tengah	53 492	66 738	136 614	99 887	124 494
Kalimantan Selatan	302 834	509 864	723 475	659 309	818 440
Kalimantan Timur	2 598 790	1 686 755	1 752 407	2 271 582	2 226 101
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	27 762	11 299	6 875	123 120	23 410
Sulawesi Tengah	396 870	848 074	362 240	1 350 879	444 259
Sulawesi Selatan	2 861 408	2 999 917	3 711 875	5 134 563	5 448 291
Sulawesi Tenggara	878 019	895 665	1 744 612	2 105 362	2 103 317
Gorontalo	23 317	130 032	43 563	134 755	248 532
Sulawesi Barat	271 671	352 696	368 824	404 905	642 791
Maluku	15 401	79 984	60 604	223 270	265 628
Maluku Utara	3 577	3 710	5 103	15 182	6 178
Papua Barat	5 634	5 767	29 955	4 170	91 040
Papua	21 826	12 658	17 832	53 946	40 531
Indonesia	24 851 754	27 108 256	28 775 952	42 485 378	48 555 131

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.24

Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut menurut Provinsi, 2010-2014
Production Value of Marine Culture by Province, 2010-2014
 (Juta Rupiah / Million Rupiahs)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	30 605	9 946	2 201	4 555	9 416
Sumatera Utara	1 416 766	268 249	160 663	129 282	234 188
Sumatera Barat	1 447	23 819	9 538	31 170	19 686
Riau	369	97	88	174	5 249
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	19 575	-	-	-	-
Bengkulu	-	372	2 022	1 650	4 248
Lampung	8 972	336 861	775 758	194 483	120 060
Kepulauan Bangka Belitung	9 171	11 919	29 610	14 695	17 108
Kepulauan Riau	539 352	180 444	305 628	481 576	539 631
DKI Jakarta	105 761	84 562	39 835	35 575	71 726
Jawa Barat	5 448	43 122	11 860	3 801	1 930
Jawa Tengah	7 971	15 059	14 993	30 597	50 997
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	940 914	432 477	1 143 145	1 008 276	960 885
Banten	75 590	54 404	31 654	38 472	45 629
Bali	146 777	383 800	389 816	206 578	173 333
Nusa Tenggara Barat	540 227	493 312	1 171 728	1 282 558	1 632 734
Nusa Tenggara Timur	2 080	1 320 537	997 133	5 679 085	7 005 154
Kalimantan Barat	7 553	589	2 055	2 645	159 864
Kalimantan Tengah	2 100	149	1 613	88	339
Kalimantan Selatan	2 808	15 924	20 706	4 554	5 771
Kalimantan Timur	66 060	790 541	597 834	454 044	665 144
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	888 146	137 547	263 193	1 132 085	707 268
Sulawesi Tengah	2 072 445	1 627 457	1 341 773	2 603 953	1 812 817
Sulawesi Selatan	1 713 810	1 537 153	2 222 247	4 156 199	3 091 252
Sulawesi Tenggara	943 182	1 815 997	1 047 827	1 197 250	1 614 403
Gorontalo	215 671	180 261	145 313	211 696	17 428
Sulawesi Barat	93 602	55 127	83 710	65 697	80 612
Maluku	788 186	1 589 815	1 145 179	2 940 723	5 038 295
Maluku Utara	297 640	123 638	249 227	490 884	1 119 793
Papua Barat	66 539	141 649	202 646	829 480	255 062
Papua	5 764	3 300	7 572	2 748	1 788
Indonesia	11 014 531	11 678 132	12 416 567	23 234 573	25 461 810

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.25

Produksi Budidaya Udang menurut Jenis Udang dan Provinsi, 2014
Production of Shrimp Culture by Type of Shrimp and Province, 2014
(Ton)

Provinsi Province	Udang Windu <i>Black Tiger Shrimp</i>	Udang Putih <i>White Shrimp</i>	Udang Vaname <i>Vaname Shrimp</i>	Udang Lainnya <i>Others Shrimp</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	8 048	155	1 391	-
Sumatera Utara	8 326	-	16 161	-
Sumatera Barat	2	-	2	-
Riau	8	-	49	-
Jambi	35	3	-	-
Sumatera Selatan	5 010	40	40 928	19
Bengkulu	781	6	3 302	-
Lampung	1 103	76	62 872	66
Kepulauan Bangka Belitung	1	-	747	-
Kepulauan Riau	-	-	2	-
DKI Jakarta	129	-	-	-
Jawa Barat	42 168	4 293	60 120	-
Jawa Tengah	5 083	2 016	30 610	1 805
DI Yogyakarta	-	-	2 446	-
Jawa Timur	7 196	2 103	40 899	3 035
Banten	382	658	1 606	-
Bali	-	-	3 423	-
Nusa Tenggara Barat	972	-	78 967	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	7	-
Kalimantan Barat	4 654	257	32 073	-
Kalimantan Tengah	46	-	-	65
Kalimantan Selatan	5 881	10	-	680
Kalimantan Timur	8 774	4 936	-	5 161
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	65	-	84	2
Sulawesi Tengah	3 985	169	500	-
Sulawesi Selatan	16 036	786	15 247	198
Sulawesi Tenggara	7 961	-	27 230	-
Gorontalo	24	-	2 209	-
Sulawesi Barat	2 549	115	3 025	-
Maluku	-	-	4 915	-
Maluku Utara	-	-	90	-
Papua Barat	9	11	-	-
Papua	5	-	-	-
Indonesia	129 233	15 634	428 905	11 031

Catatan / Note :¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.26

Nilai Produksi Budidaya Udang menurut Provinsi dan Jenis Udang, 2014
Production Value of Shrimp Culture by Province and Type of Shrimp, 2014
 (Juta rupiah / Million rupiah)

Provinsi Province	Udang Windu <i>Black Tiger Shrimp</i>	Udang Putih <i>White Shrimp</i>	Udang Vaname <i>Vanname Shrimp</i>	Udang Lainnya <i>Others Shrimp</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	541 964	7 125	82 946	-
Sumatera Utara	762 700	-	837 571	-
Sumatera Barat	111	-	211	-
Riau	664	-	2 625	-
Jambi	514	56	-	-
Sumatera Selatan	288 341	1 782	2 046 420	851
Bengkulu	58 832	345	433 663	-
Lampung	106 451	5 642	3 920 802	1 506
Kepulauan Bangka Belitung	60	-	44 881	-
Kepulauan Riau	-	-	144	-
DKI Jakarta	9 259	-	-	-
Jawa Barat	2 218 299	110 234	3 432 091	-
Jawa Tengah	221 495	44 993	1 101 892	41 614
DI Yogyakarta	-	-	103 338	-
Jawa Timur	505 435	82 474	2 330 801	88 837
Banten	20 494	28 461	78 317	-
Bali	-	-	213 190	-
Nusa Tenggara Barat	88 345	-	5 728 868	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	527	-
Kalimantan Barat	279 239	6 418	2 405 475	-
Kalimantan Tengah	2 411	-	-	1 105
Kalimantan Selatan	408 072	178	-	6 117
Kalimantan Timur	1 216 798	227 575	-	189 138
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	5 688	-	5 967	93
Sulawesi Tengah	219 181	5 070	30 025	-
Sulawesi Selatan	1 363 060	27 510	914 820	3 968
Sulawesi Tenggara	398 027	-	1 089 208	-
Gorontalo	1 414	-	110 447	-
Sulawesi Barat	192 582	3 439	167 112	-
Maluku	-	-	245 748	-
Maluku Utara	12	-	4 510	-
Papua Barat	765	440	-	-
Papua	439	-	-	-
Indonesia	8 910 651	551 740	25 331 596	333 228

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.27

Produksi Budidaya Udang Windu menurut Provinsi, 2010-2014
Production of Black Tiger Shrimp Culture by Province, 2010-2014
(Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5 331	5 040	5 667	5 621	8 048
Sumatera Utara	8 007	7 165	7 580	9 627	8 326
Sumatera Barat	1	1	4	2	2
Riau	500	531	68	27	8
Jambi	8	3	1	-	35
Sumatera Selatan	32 879	27 603	11 730	5 641	5 010
Bengkulu	56	127	152	278	781
Lampung	6 810	3 182	2 317	2 791	1 103
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	142	129	58	201	129
Jawa Barat	19 371	25 935	25 944	27 860	42 168
Jawa Tengah	3 028	2 373	2 711	33 580	5 083
DI Yogyakarta	3	-	-	-	-
Jawa Timur	7 313	7 711	9 377	6 578	7 196
Banten	198	255	294	404	382
Bali	11	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	676	551	2 739	4 299	972
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	855	1 230	1 674	1 865	4 654
Kalimantan Tengah	407	140	86	52	46
Kalimantan Selatan	4 757	4 586	5 015	4 758	5 881
Kalimantan Timur	10 411	9 531	10 446	10 758	8 774
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	216	87	45	390	65
Sulawesi Tengah	4 416	6 352	3 201	22 403	3 985
Sulawesi Selatan	12 832	12 838	14 786	15 319	16 036
Sulawesi Tenggara	5 028	7 489	10 014	13 275	7 961
Gorontalo	259	189	282	143	24
Sulawesi Barat	1 543	1 661	1 360	1 898	2 549
Maluku	449	1 400	736	526	-
Maluku Utara	1	27	7	1	-
Papua Barat	12	11	9	4	9
Papua	1	10	10	17	5
Indonesia	125 521	126 157	116 313	168 318	129 233

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.28

Produksi Budidaya Udang Putih menurut Provinsi, 2010-2014
Production of White Tiger Shrimp Culture by Province, 2010-2014
(Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	231	-	82	114	155
Sumatera Utara	2 814	-	1	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-
Riau	-	-	120	-	-
Jambi	1	2	-	-	3
Sumatera Selatan	-	-	-	1	40
Bengkulu	56	-	-	3	6
Lampung	-	60	161	-	76
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	1	-	-
DKI Jakarta	3	-	-	-	-
Jawa Barat	3 775	-	4 999	5 257	4 293
Jawa Tengah	1 011	778	924	1 091	2 016
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	1 956	3 517	-	2 099	2 103
Banten	366	593	444	487	658
Bali	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	71	155	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	107	93	165	2 369	257
Kalimantan Tengah	49	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	1	10
Kalimantan Timur	5 429	5 125	5 312	5 576	4 936
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	57	169
Sulawesi Selatan	524	402	453	506	786
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	14	24	460	99	115
Maluku	3	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-
Papua Barat	13	8	5	5	11
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	16 423	10 757	13 128	17 665	15 634

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.29

Produksi Budidaya Udang Vaname menurut Provinsi, 2010-2014
Production of Vaname Shrimp Culture by Province , 2010-2014
(Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	-	-	-	1 244	1 391
Sumatera Utara	18 116	19 438	19 414	19 791	16 161
Sumatera Barat	-	-	1	3	2
Riau	428	466	33	32	49
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	30 955	41 309	32 490	40 016	40 928
Bengkulu	80	118	370	945	3 302
Lampung	37 357	44 161	40 489	72 051	62 872
Kepulauan Bangka Belitung	387	469	879	710	747
Kepulauan Riau	1	4	33	32	2
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	25 353	30 600	29 900	61 633	60 120
Jawa Tengah	1 858	1 962	3 421	13 872	30 610
DI Yogyakarta	258	495	597	812	2 446
Jawa Timur	34 593	35 058	45 383	33 060	40 899
Banten	106	170	294	1 407	1 606
Bali	2 530	2 075	1 585	2 932	3 423
Nusa Tenggara Barat	32 627	43 077	38 525	56 960	78 967
Nusa Tenggara Timur	3	4	5	13	7
Kalimantan Barat	9 018	5 272	6 670	39 092	32 073
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	47	108	34	272	84
Sulawesi Tengah	1 305	4 110	761	91	500
Sulawesi Selatan	3 360	4 316	4 393	8 542	15 247
Sulawesi Tenggara	8 085	13 056	12 734	18 369	27 230
Gorontalo	1	5	39	996	2 209
Sulawesi Barat	63	126	623	1 138	3 025
Maluku	-	-	-	2 065	4 915
Maluku Utara	46	20	17	111	90
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	206 471	246 420	238 663	376 189	428 905

Catatan / Note :¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.30

Produksi Budidaya Rumput Laut menurut Provinsi, 2010-2014
Production of Seaweed Culture by Province, 2010-2014
(Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	-	-	-	20	-
Sumatera Utara	60	13	69	-	-
Sumatera Barat	1	-	-	1	-
Riau	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	248	421	18	10
Lampung	2 382	2 369	4 819	4 701	4 647
Kepulauan Bangka Belitung	661	4 550	4 481	96	525
Kepulauan Riau	11 775	1 658	11 116	11 700	11 252
DKI Jakarta	280	23	5	160	37
Jawa Barat	838	205	788	49	79
Jawa Tengah	4 460	5 042	6 252	13 954	41 518
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	385 103	409 536	560 488	580 032	593 702
Banten	11 909	13 337	13 670	17 657	20 226
Bali	99 481	106 398	144 168	145 597	84 336
Nusa Tenggara Barat	162 411	277 700	451 031	599 100	749 141
Nusa Tenggara Timur	347 726	377 200	398 736	1 846 224	1 966 255
Kalimantan Barat	101	15	131	157	302
Kalimantan Tengah	300	149	230	88	339
Kalimantan Selatan	1 395	2 280	2 702	2 404	2 676
Kalimantan Timur	39 400	83 093	195 314	249 412	320 911
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	43 656	98 838	159 099	176 421	299 677
Sulawesi Tengah	716 195	734 381	891 381	1 233 058	1 137 030
Sulawesi Selatan	815 759	1 024 302	1 480 712	1 661 335	2 087 841
Sulawesi Tenggara	348 981	586 965	639 192	917 363	956 017
Gorontalo	64 035	89 149	95 422	103 924	24 935
Sulawesi Barat	13 164	21 547	27 335	33 115	39 323
Maluku	260 155	610 365	474 167	583 351	494 743
Maluku Utara	48 915	64 595	120 430	97 502	102 586
Papua Barat	20 202	25 354	56 439	58 058	33 340
Papua	93	101	89	59	16
Indonesia	3 399 438	4 539 413	5 738 687	8 335 663	8 971 464

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesian Aquaculture Statistics 2010-2014, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.31

Percentase Kontribusi Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi, 2011 - 2015
Percentage of Fishery Contribution to Gross Regional Domestic Product at Current Market Price by Province, 2011 - 2015

Provinsi Province	2011	2012	2013	2014 ^{x)}	2015 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,55	4,53	4,51	4,51	4,83
Sumatera Utara	2,21	2,23	2,26	2,30	2,37
Sumatera Barat	3,27	3,23	3,28	3,48	3,56
Riau	2,11	2,15	2,32	2,52	2,96
Jambi	1,97	1,95	1,88	2,08	2,28
Sumatera Selatan	2,99	3,11	3,15	3,37	3,38
Bengkulu	7,82	7,74	7,50	7,15	6,96
Lampung	6,49	6,28	6,25	6,46	5,94
Kepulauan Bangka Belitung	5,98	6,28	6,46	6,50	6,64
Kepulauan Riau	2,41	2,33	2,33	2,32	2,36
DKI Jakarta	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Jawa Barat	0,84	0,86	0,88	0,92	0,95
Jawa Tengah	1,01	1,02	1,05	1,04	1,04
DI Yogyakarta	0,37	0,39	0,41	0,44	0,44
Jawa Timur	2,01	2,20	2,32	2,43	2,48
Banten	0,51	0,52	0,52	0,54	0,53
Bali	4,60	4,41	4,25	4,27	4,26
Nusa Tenggara Barat	4,07	4,18	4,04	4,20	3,80
Nusa Tenggara Timur	4,59	4,51	4,48	4,70	4,73
Kalimantan Barat	1,75	1,69	1,63	1,63	1,62
Kalimantan Tengah	2,48	2,62	2,59	2,46	2,59
Kalimantan Selatan	3,24	3,24	3,29	3,35	3,69
Kalimantan Timur	1,34	1,42	1,18	1,30	1,52
Kalimantan Utara	-	-	5,68	6,21	6,57
Sulawesi Utara	7,18	7,55	7,75	8,21	7,77
Sulawesi Tengah	6,22	6,21	6,20	6,29	6,02
Sulawesi Selatan	6,26	5,44	6,92	7,62	8,00
Sulawesi Tenggara	10,54	10,15	10,60	10,97	10,25
Gorontalo	8,15	8,06	7,94	8,36	8,68
Sulawesi Barat	10,63	10,33	10,65	10,69	10,79
Maluku	13,28	13,38	13,57	13,72	13,24
Maluku Utara	8,13	8,02	7,90	7,72	7,42
Papua Barat	4,88	4,98	5,01	5,36	5,48
Papua	4,72	5,16	5,01	5,27	5,69
Indonesia	2,33	2,33	2,16	2,21	2,27

Catatan / Note : ^{x)} Angka sementara / Preliminary figures^{xx)} Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber / Source : Hasil Perhitungan dari Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha,

2011-2015, Badan Pusat Statistik

2011-2015 Calculation from Gross Regional Domestic Product by Province in Indonesia by Industrial Origin, BPS - Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.32

Volume Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014
Volume of Export on Fishery Products by Province, 2010-2014
 (Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	227	153	105	97	73
Sumatera Utara	68 385	70 676	77 975	74 783	81 545
Sumatera Barat	140	398	125	63	189
Riau	8 711	9 136	5 001	3 692	3 860
Jambi	195	-	-	-	-
Sumatera Selatan	2 185	1 412	1 311	1 566	1 216
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	26 513	32 665	28 228	26 909	28 064
Kepulauan Bangka Belitung	4 618	4 523	4 626	5 368	4 155
Kepulauan Riau	28 565	26 503	26 515	28 179	33 861
DKI Jakarta	210 165	263 455	274 762	283 555	271 363
Jawa Barat	68	66	82	55	37
Jawa Tengah	21 025	30 693	36 222	31 447	31 688
DI Yogyakarta	1	2	10	120	803
Jawa Timur	343 039	341 775	352 839	348 634	376 903
Banten	-	-	-	97	62
Bali	16 576	14 154	15 747	19 660	16 121
Nusa Tenggara Barat	10	29	15	15	10
Nusa Tenggara Timur	244	287	533	785	593
Kalimantan Barat	1 036	1 583	1 433	1 251	985
Kalimantan Tengah	33	0.1	-	2	2
Kalimantan Selatan	322	261	420	357	536
Kalimantan Timur	11 864	16 419	12 718	14 965	15 170
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	18 820	32 247	32 585	28 101	29 583
Sulawesi Tengah	511	496	23	23	12
Sulawesi Selatan	67 677	90 051	91 125	103 759	139 702
Sulawesi Tenggara	139	102	1 509	2 887	1 362
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	135 222	145 930	187 143	203 976	162 285
Maluku Utara	94	34	4	-	-
Papua Barat	42 541	36 987	42 844	38 418	34 556
Papua	94 649	39 306	35 216	39 415	51 511
Indonesia	1 103 576	1 159 349	1 229 116	1 258 180	1 274 982

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.33

Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014
Value of Export on Fishery Products by Province, 2010-2014
(000 US \$)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	217	168	116	224	593
Sumatera Utara	228 186	265 105	281 918	307 356	355 735
Sumatera Barat	395	1 320	535	211	184
Riau	4 261	3 275	3 790	6 063	7 444
Jambi	511	-	-	-	-
Sumatera Selatan	16 903	10 385	10 264	15 683	11 971
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	210 598	306 149	250 745	298 845	352 016
Kepulauan Bangka Belitung	8 697	9 040	8 524	12 062	7 109
Kepulauan Riau	29 313	28 496	27 105	33 861	22 469
DKI Jakarta	642 843	849 048	1 035 652	1 147 789	1 197 781
Jawa Barat	270	308	420	503	840
Jawa Tengah	95 806	123 652	132 584	117 610	161 303
DI Yogyakarta	7	27	38	318	1 521
Jawa Timur	1 090 980	1 307 351	1 364 269	1 474 754	1 719 600
Banten	-	-	-	1 343	697
Bali	107 419	94 255	101 030	104 729	94 940
Nusa Tenggara Barat	265	307	223	248	435
Nusa Tenggara Timur	82	68	1 199	1 491	479
Kalimantan Barat	4 762	9 562	9 522	7 088	6 753
Kalimantan Tengah	333	5 545	4	6	15
Kalimantan Selatan	1 193	918	2 591	2 102	3 540
Kalimantan Timur	61 040	49 838	79 785	103 784	122 617
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	53 515	113 471	163 333	140 275	129 050
Sulawesi Tengah	3 799	4 382	45	4	23
Sulawesi Selatan	152 850	187 626	204 382	210 581	276 935
Sulawesi Tenggara	700	518 340	3 983	7 260	3 843
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	73 001	89 177	105 701	124 756	90 296
Maluku Utara	310	270	41	-	-
Papua Barat	40 192	46 592	49 655	40 915	39 959
Papua	35 381	19 775	16 201	21 953	33 763
Indonesia	2 863 831	3 521 091	3 853 655	4 181 858	4 641 913

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2011-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2011-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.34

Percentase Nilai Ekspor Hasil Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor menurut Provinsi,
2013-2014
*Percentage of Export Value on Fishery Products to Total of Export Value by Province,
2013-2014*

Provinsi Province	Nilai Ekspor Hasil Pertanian <i>Export Value of Fishery Product</i> (000 US \$)		Total Nilai Ekspor <i>Total of Export Value</i> (000 US \$)		Percentase <i>Percentage</i> (%)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	224	593	962 970	505 292	0,02	0,12
Sumatera Utara	307 356	355 735	9 598 008	9 361 110	3,20	3,80
Sumatera Barat	211	184	2 209 012	2 105 614	0,01	0,01
Riau	6 063	7 444	17 557 157	17 248 437	0,03	0,04
Jambi	-	-	1 437 144	1 267 280	-	-
Sumatera Selatan	15 683	11 971	3 915 682	3 084 045	0,40	0,39
Bengkulu	-	-	154 109	95 898	-	-
Lampung	298 845	352 016	3 892 284	3 856 748	7,68	9,13
Kepulauan Bangka Belitung	12 062	7 109	2 191 053	2 082 209	0,55	0,34
Kepulauan Riau	33 861	22 469	16 769 052	16 112 777	0,20	0,14
DKI Jakarta	1 147 789	1 197 781	47 397 619	48 079 487	2,42	2,49
Jawa Barat	503	840	685 159	1 277 467	0,07	0,07
Jawa Tengah	117 610	161 303	5 326 581	5 633 676	2,21	2,86
DI Yogyakarta	318	1 521	16 166	16 885	1,97	9,01
Jawa Timur	1 474 754	1 719 600	15 562 857	18 724 463	9,48	9,18
Banten	1 343	697	1 442 558	1 489 017	0,09	0,05
Bali	104 729	94 940	327 947	298 346	31,93	31,82
Nusa Tenggara Barat	248	435	400 150	307 504	0,06	0,14
Nusa Tenggara Timur	1 491	479	21 242	21 037	7,02	2,28
Kalimantan Barat	7 088	6 753	1 356 682	661 402	0,52	1,02
Kalimantan Tengah	6	15	767 475	496 390	0,00	0,00
Kalimantan Selatan	2 102	3 540	8 847 214	8 028 992	0,02	0,04
Kalimantan Timur	103 784	122 617	31 003 651	26 119 630	0,33	0,47
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	140 275	129 050	739 195	1 003 821	18,98	12,86
Sulawesi Tengah	4	23	293 649	179 279	0,00	0,01
Sulawesi Selatan	210 581	276 935	1 575 766	1 747 916	13,36	15,84
Sulawesi Tenggara	7 260	3 843	975 891	326 380	0,74	1,18
Gorontalo	-	-	5 243	15 051	-	-
Sulawesi Barat	-	-		152 008	-	-
Maluku	124 756	90 296	210 174	173 071	59,36	52,17
Maluku Utara	-	-	730 632	29 803	-	-
Papua Barat	40 915	39 959	3 451 434	3 949 279	1,19	1,01
Papua	21 953	33 763	2 728 043	1 529 674	0,80	2,21
Indonesia	4 181 858	4 641 913	182 551 799	175 979 987	2,29	2,64

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2014-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2014-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.35

Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2010-2014
Export Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2010-2014

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Volume (Ton)	1 103 576	1 159 349	1 229 114	1 258 179	1 274 982
Udang / Shrimp	145 092	158 062	162 068	162 410	196 623
Tuna, Cakalang, Tongkol / <i>Tuna, Skipjack, Little Tuna</i>	122 450	141 774	201 159	209 072	206 553
Mutiara / Pearl	9	24	336	315	475
Rumput Laut / Seaweed	123 075	159 075	174 011	183 075	208 197
Kepiting / Crab	21 537	23 089	28 212	34 173	28 091
Ikan Lainnya / Other Fish	622 932	621 632	538 723	519 293	500 384
Lainnya / Others	68 481	55 693	124 605	149 841	134 660
Volume (Ton)	2 863 831	3 521 091	3 853 658	4 181 857	4 641 913
Udang / Shrimp	1 056 399	1 309 674	1 304 149	1 684 086	2 140 862
Tuna, Cakalang, Tongkol / <i>Tuna, Skipjack, Little Tuna</i>	383 230	498 591	749 992	764 791	692 281
Mutiara / Pearl	31 429	31 792	31 186	27 766	31 188
Rumput Laut / Seaweed	135 939	157 587	177 923	209 975	279 916
Kepiting / Crab	208 424	262 321	329 724	359 304	414 372
Ikan Lainnya / Other Fish	898 039	1 100 576	965 062	1 056 117	771 147
Lainnya / Others	150 371	160 550	295 622	79 817	312 146

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.36

Volume Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014
Volume of Import on Fishery Products by Province, 2010-2014
 (Ton)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	-	-	-	-	3
Sumatera Utara	46 913	40 637	38 027	46 186	31 317
Sumatera Barat	-	2	-	-	-
Riau	1 290	55	26	4	0.1
Jambi	4 427	374	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	16	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	12 142	17 239	13 696	14 586	14 288
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	5 637	3 501	2 968	3 479	4 353
DKI Jakarta	200 511	188 585	141 904	143 297	142 844
Jawa Barat	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	6 307	6 727	8 250	10 898	6 920
DI Yogyakarta	-	0,001	-	-	-
Jawa Timur	85 612	172 329	130 954	131 952	106 266
Banten	-	11	-	-	-
Bali	2 148	114	17	24	49
Nusa Tenggara Barat	-	0.2	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	3 576	2 175	1 489	2 780	1 007
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	1	3	4	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	129	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	92	122	9	194	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	500	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	369 284	431 871	337 359	353 404	307 047

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

**Tabel
Table 4.37 Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Provinsi, 2010-2014**
Value of Import on Fishery Products by Province, 2010-2014
(000 US \$)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1	-	-	-	1
Sumatera Utara	48 316	42 688	44 682	52 553	35 371
Sumatera Barat	-	1 489	-	-	-
Riau	681	34	483	63	4
Jambi	2 618	262	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	88	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	14 756	21 383	16 176	17 180	15 967
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	6 890	4 630	5 464	6 060	7 772
DKI Jakarta	198 810	201 623	151 065	172 853	183 924
Jawa Barat	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	7 466	9 416	11 119	11 471	7 091
DI Yogyakarta	-	0,04	-	-	-
Jawa Timur	103 953	203 551	181 596	193 106	165 023
Banten	-	27	-	-	-
Bali	2 774	652	499	496	847
Nusa Tenggara Barat	-	6	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	4 264	1 639	1 083	2 240	961
Kalimantan Tengah	-	0,014	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	674	11	21	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	462	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	143	268	96	1 003	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	683	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	8	-	-	-
Indonesia	391 817	488 351	412 362	457 247	416 961

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.38 Persentase Nilai Impor Hasil Perikanan Terhadap Total Nilai Impor menurut Provinsi, 2013-2014
Percentage of Import Value on Fishery Products to Total of Import Value by Province, 2013-2014

Provinsi Province	Nilai Impor Hasil Pertanian <i>Import Value of Fishery Product</i>		Total Nilai Impor <i>Total of Import Value</i>		Percentase <i>Percentage</i>	
	(000 US \$)		(000 US \$)		2013	2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	-	1	40 515	116 818	-	0,001
Sumatera Utara	52 553	35 371	5 046 452	3 992 118	1,04	0,89
Sumatera Barat	-	-	1 034 606	632 798	-	-
Riau	63	4	1 716 763	1 341 046	0,00	0,00
Jambi	-	-	196 851	109 026	-	-
Sumatera Selatan	-	-	750 206	1 466 217	-	-
Bengkulu	-	-	12 632	6 948	-	-
Lampung	17 180	15 967	3 440 457	2 383 698	0,50	0,67
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	58 959	49 891	-	-
Kepulauan Riau	6 060	7 772	10 877 427	8 462 343	0,06	0,09
DKI Jakarta	172 853	183 924	84 604 814	71 132 703	0,20	0,26
Jawa Barat	-	-	1 842 777	1 843 537	-	-
Jawa Tengah	11 471	7 091	15 801 097	10 738 859	0,07	0,07
DI Yogyakarta	-	-	1 406	2 204	-	-
Jawa Timur	193 106	165 023	25 210 957	19 283 722	0,77	0,86
Banten	-	-	12 174 900	9 852 071	-	-
Bali	496	847	376 946	131 935	0,13	0,64
Nusa Tenggara Barat	-	-	118 936	166 975	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	31 919	7 873	-	-
Kalimantan Barat	2 240	961	500 018	628 237	0,45	0,15
Kalimantan Tengah	-	-	106 692	70 733	-	-
Kalimantan Selatan	-	...	2 495 287	1 388 572	-	...
Kalimantan Timur	21	...	8 471 495	5 541 392	0,00	...
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	-	...	122 063	72 103	-	...
Sulawesi Tengah	-	...	226 690	707 844	-	...
Sulawesi Selatan	1 003	...	835 554	943 674	0,12	...
Sulawesi Tenggara	-	...	578 660	412 821	-	...
Gorontalo	-	...	52 271	102 644	-	...
Sulawesi Barat	-	...	5 516	2 548	-	...
Maluku	-	...	391 603	259 372	-	...
Maluku Utara	-	...	12 325	61 706	-	...
Papua Barat	-	...	27 550	35 654	-	...
Papua	-	...	1 014 472	746 724	-	...
Indonesia	457 247	416 961	178 178 817	142 694 804	0,26	0,29

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.39

Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan menurut Komoditas Utama, 2010-2014
Import Volume and Value of Fish Product By Major Commodities, 2010-2014

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Volume (Ton)	369 282	431 871	337 360	353 404	307 243
Udang / Shrimp	33 134	63 465	64 394	56 046	40 038
Tuna, Cakalang, Tongkol / <i>Tuna, Skipjack, Little Tuna</i>	173 546	213 566	139 540	139 535	121 200
Mutiara / Pearl	162 602	154 840	133 426	157 823	146 006
Volume (Ton)	391 815	488 351	412 362	457 247	418 438
Udang / Shrimp	36 307	44 385	49 129	69 221	47 983
Tuna, Cakalang, Tongkol / <i>Tuna, Skipjack, Little Tuna</i>	149 632	178 792	127 379	145 749	131 891
Mutiara / Pearl	205 876	265 175	235 854	242 276	238 563

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.40

Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014-2016
Average Daily per Capita Consumption of Calorie from Fish by Province and Type of Region, 2014-2016
 (kkal / kcal)

Provinsi Province	Perkotaan / Urban			Pedesaan / Rural			Perkotaan + Perdesaan Urban + Rural		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
Aceh	74,36	72,38	76,47	75,18	74,15	75,06	74,94	73,65	75,47
Sumatera Utara	67,87	58,60	58,61	73,20	61,89	61,00	70,57	60,26	59,80
Sumatera Barat	45,26	44,92	45,19	48,72	46,71	47,87	47,37	46,00	46,77
Riau	62,45	54,46	53,58	64,12	55,00	52,12	63,47	54,79	52,69
Jambi	56,94	46,43	49,66	51,41	41,49	43,27	53,09	42,99	45,24
Sumatera Selatan	51,67	48,32	47,30	51,69	47,38	45,08	51,68	47,72	45,88
Bengkulu	52,87	53,98	50,05	47,19	40,95	42,24	48,96	45,00	44,72
Lampung	35,50	37,97	37,46	36,86	37,25	35,66	36,51	37,44	36,15
Kepulauan Bangka Belitung	74,24	75,44	69,32	86,32	71,71	68,72	80,37	73,55	69,02
Kepulauan Riau	70,32	68,77	69,76	128,00	96,46	89,12	79,67	73,31	72,77
DKI Jakarta	40,10	35,20	36,36	-	-	-	40,10	35,20	36,36
Jawa Barat	29,83	32,07	35,55	32,85	32,59	35,64	30,85	32,24	35,58
Jawa Tengah	24,22	25,57	23,77	25,27	23,12	23,54	24,79	24,24	23,65
DI Yogyakarta	21,82	19,37	20,88	12,85	18,10	22,87	18,80	18,95	21,52
Jawa Timur	36,18	34,57	34,42	40,38	35,44	34,25	38,37	35,02	34,33
Banten	40,93	43,36	43,02	45,63	41,87	45,42	42,42	42,89	43,76
Bali	32,34	33,77	32,92	43,33	41,30	36,93	36,64	36,67	34,41
Nusa Tenggara Barat	38,42	39,99	41,57	45,38	39,72	47,34	42,46	39,84	44,84
Nusa Tenggara Timur	54,47	50,72	49,58	32,64	25,53	28,74	36,91	30,59	33,00
Kalimantan Barat	59,12	54,53	56,15	58,58	52,36	50,81	58,74	53,03	52,48
Kalimantan Tengah	68,48	57,71	62,57	74,49	57,13	59,32	72,47	57,33	60,46
Kalimantan Selatan	57,48	55,10	53,26	79,40	73,91	66,07	70,15	65,94	60,52
Kalimantan Timur	69,12	57,99	58,48	71,68	62,46	55,36	70,09	59,65	57,37
Kalimantan Utara	-	70,78	76,37	-	67,55	70,26	-	69,36	73,74
Sulawesi Utara	79,72	79,00	79,51	76,17	88,22	77,40	77,77	84,02	78,38
Sulawesi Tengah	75,35	68,52	72,35	68,75	70,75	68,52	70,36	70,20	69,50
Sulawesi Selatan	80,03	78,22	79,03	78,67	66,68	66,95	79,17	70,99	71,60
Sulawesi Tenggara	103,63	100,14	98,11	89,28	80,47	82,67	93,31	86,14	87,27
Gorontalo	88,59	102,28	86,23	76,00	77,25	70,66	80,32	85,93	76,26
Sulawesi Barat	92,61	89,52	97,25	88,72	72,60	77,22	89,61	76,00	81,32
Maluku	83,86	88,13	84,58	87,29	78,08	82,96	85,96	81,99	83,60
Maluku Utara	95,53	100,44	79,77	101,95	87,94	90,69	100,20	91,34	87,74
Papua Barat	92,32	79,88	80,60	70,24	68,00	64,97	76,82	72,49	70,98
Papua	65,05	65,37	63,88	49,47	35,88	30,39	53,48	43,69	39,19
Indonesia	42,00	41,06	41,77	48,16	44,00	44,06	45,30	42,52	42,88

Sumber / Source : Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2014-2016 (Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2014-2016),

Badan Pusat Statistik

Consumption of Calorie and Protein of Indonesia and Province 2014-2016 (Based on Susenas March 2014-2016),

BPS-Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.41

Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari dari Ikan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014-2016
Average Daily per Capita Consumption of Protein from Fish by Province and Type of Region, 2014-2016

(kkal / kcal)

Provinsi Province	Perkotaan / Urban			Pedesaan / Rural			Perkotaan + Perdesaan Urban + Rural		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	12,63	12,25	12,97	12,65	12,33	12,49	12,65	12,31	12,63
Sumatera Utara	12,01	10,37	10,31	12,55	10,77	10,56	12,28	10,57	10,44
Sumatera Barat	7,67	7,49	7,48	8,39	7,73	7,95	8,11	7,63	7,75
Riau	10,47	8,81	8,77	10,79	8,99	8,55	10,66	8,92	8,64
Jambi	9,33	7,72	8,05	8,46	6,63	6,85	8,73	6,96	7,22
Sumatera Selatan	8,55	8,01	7,87	8,19	7,54	7,09	8,32	7,71	7,37
Bengkulu	8,67	8,94	8,09	7,64	6,43	6,65	7,96	7,21	7,11
Lampung	6,11	6,49	6,31	5,90	6,12	5,83	5,95	6,21	5,96
Kepulauan Bangka Belitung	12,21	13,23	11,93	13,95	12,47	11,88	13,10	12,84	11,90
Kepulauan Riau	11,85	11,55	11,69	19,77	16,01	14,95	13,13	12,28	12,19
DKI Jakarta	7,20	6,00	6,17	-	-	-	7,20	6,00	6,17
Jawa Barat	5,22	5,43	5,94	5,53	5,52	5,98	5,32	5,46	5,96
Jawa Tengah	3,67	4,31	3,99	3,92	3,90	3,95	3,81	4,09	3,97
DI Yogyakarta	3,24	3,18	3,41	2,01	2,95	3,73	2,83	3,11	3,52
Jawa Timur	6,01	5,88	5,83	6,42	5,95	5,72	6,23	5,92	5,77
Banten	7,24	7,35	7,23	7,39	7,05	7,67	7,29	7,25	7,36
Bali	5,60	5,71	5,57	7,39	7,01	6,28	6,30	6,21	5,83
Nusa Tenggara Barat	6,56	6,67	6,93	7,64	6,63	7,96	7,19	6,65	7,52
Nusa Tenggara Timur	9,40	8,79	8,80	5,31	4,36	4,96	6,11	5,25	5,74
Kalimantan Barat	10,26	9,49	9,56	9,51	8,54	8,31	9,74	8,83	8,70
Kalimantan Tengah	11,24	9,22	10,02	11,38	8,90	9,07	11,33	9,01	9,40
Kalimantan Selatan	9,69	9,36	8,81	12,80	12,07	10,77	11,49	10,92	9,92
Kalimantan Timur	11,48	9,82	9,81	11,62	10,28	9,07	11,54	9,99	9,55
Kalimantan Utara	-	12,20	12,91	-	11,37	11,69	-	11,83	12,38
Sulawesi Utara	12,80	13,24	13,17	12,33	14,28	12,64	12,54	13,80	12,88
Sulawesi Tengah	12,31	11,52	12,10	11,20	11,72	11,36	11,47	11,67	11,55
Sulawesi Selatan	13,02	12,83	13,02	12,72	10,97	10,99	12,83	11,66	11,77
Sulawesi Tenggara	17,36	17,23	16,53	14,61	13,55	13,90	15,39	14,61	14,69
Gorontalo	14,08	16,85	14,36	12,41	12,43	11,55	12,99	13,97	12,56
Sulawesi Barat	14,84	15,04	15,99	13,74	11,84	12,50	13,99	12,48	13,22
Maluku	13,40	14,90	14,53	13,89	13,20	14,30	13,70	13,86	14,39
Maluku Utara	15,86	16,77	13,34	16,35	14,47	15,33	16,22	15,29	14,79
Papua Barat	15,51	13,43	13,61	11,73	11,48	11,15	12,85	12,21	12,10
Papua	10,95	11,27	10,98	7,65	5,90	5,14	8,50	7,32	6,67
Indonesia	7,11	6,95	7,03	7,91	7,32	7,32	7,51	7,14	7,17

Sumber / Source : Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2014-2016 (Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2014-2016),

Badan Pusat Statistik

Consumption of Calorie and Protein of Indonesia and Province 2014-2016 (Based on Susenas March 2014-2016),

BPS-Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.42

Jumlah Pelabuhan menurut Jenis Pelabuhan Perikanan dan Provinsi, 2016
Number of Port by Type of Fishing Port and Province, 2016

Provinsi Province	Pelabuhan Perikanan Samudera <i>Fishery Ocean Port</i>	Pelabuhan Perikanan Nusantara <i>Fishery Archipelago Port</i>	Pelabuhan Perikanan Pantai <i>Fishery Coastal Port</i>	Pangkalan Pendaratan Ikan <i>Fishery Landing Quay</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	1	0	168
Sumatera Utara	1	1	1	24
Sumatera Barat	1	0	1	15
Riau	0	0	0	10
Jambi	0	0	0	3
Sumatera Selatan	0	0	0	2
Bengkulu	0	0	0	21
Lampung	0	0	4	17
Kepulauan Bangka Belitung	0	2	0	9
Kepulauan Riau	0	0	1	5
DKI Jakarta	1	0	0	5
Jawa Barat	0	2	6	51
Jawa Tengah	1	1	9	65
DI Yogyakarta	0	0	1	16
Jawa Timur	0	2	8	75
Banten	0	1	1	31
Bali	0	1	0	7
Nusa Tenggara Barat	0	0	1	10
Nusa Tenggara Timur	0	0	1	10
Kalimantan Barat	0	1	2	53
Kalimantan Tengah	0	0	0	8
Kalimantan Selatan	0	0	1	3
Kalimantan Timur	0	0	0	9
Kalimantan Utara	0	0	1	1
Sulawesi Utara	1	0	2	11
Sulawesi Tengah	0	0	0	18
Sulawesi Selatan	0	0	0	18
Sulawesi Tenggara	1	0	0	10
Gorontalo	0	1	0	16
Sulawesi Barat	0	0	0	2
Maluku	0	2	0	7
Maluku Utara	0	1	2	8
Papua Barat	0	0	1	7
Papua	0	0	0	2
Indonesia	7	16	43	717

Sumber / Source : http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan (diakses tanggal 13 September 2016)
http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan (accessed on September 13rd, 2016)

**Tabel
Table** 4.43 **Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut menurut Provinsi dan Jenis
Kapal yang Digunakan, 2013 - 2014**
Number of Marine Fishing Boats by Province and Type of Fishing Boat, 2013 - 2014

Provinsi Province	Tanpa Motor Non Powered Boat		Motor Tempel Outboard Motor		Kapal Motor Motorboat	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	8 087	2 610	5 285	4 981	9 086	8 680
Sumatera Utara	12 337	3 840	7 561	4 886	20 072	18 776
Sumatera Barat	8 480	3 831	6 583	6 686	1 987	1 668
Riau	5 986	5 237	482	606	6 301	6 127
Jambi	3 288	20	2 227	57	3 482	2 603
Sumatera Selatan	3 086	1 915	1 171	1 171	4 275	4 272
Bengkulu	3 327	583	2 130	2 053	647	861
Lampung	4 973	1 045	3 964	3 892	3 179	2 766
Kepulauan Bangka Belitung	5 598	1 421	3 858	3 809	11 518	9 543
Kepulauan Riau	13 049	8 878	3 743	3 011	17 362	18 128
DKI Jakarta	-	-	-	-	5 677	3 290
Jawa Barat	10 838	294	10 748	10 512	7 518	4 868
Jawa Tengah	17 291	308	17 246	19 396	3 916	2 703
DI Yogyakarta	471	-	471	934	50	43
Jawa Timur	27 850	3 667	23 570	22 243	27 349	27 507
Banten	2 522	307	2 230	1 476	4 272	4 127
Bali	14 949	1 525	12 721	12 587	666	338
Nusa Tenggara Barat	17 547	4 217	13 101	13 177	5 426	5 245
Nusa Tenggara Timur	16 483	11 971	4 562	5 034	5 320	5 764
Kalimantan Barat	8 490	3 385	3 690	3 095	6 103	6 018
Kalimantan Tengah	2 516	701	1 760	2 431	2 572	2 974
Kalimantan Selatan	626	512	114	114	8 564	8 236
Kalimantan Timur	9 258	2 284	6 950	6 360	19 438	19 012
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	17 378	6 459	9 505	6 438	16 518	5 561
Sulawesi Tengah	46 158	18 244	23 629	21 696	6 327	4 307
Sulawesi Selatan	9 413	4 663	6 418	19 357	3 834	12 223
Sulawesi Tenggara	21 509	7 436	14 731	14 277	2 987	4 006
Gorontalo	8 619	1 429	7 070	6 282	282	229
Sulawesi Barat	24 389	1 548	19 420	6 192	13 379	3 571
Maluku	48 576	32 896	9 973	10 299	4 967	4 912
Maluku Utara	1 600	613	891	983	1 515	1 196
Papua Barat	9 594	5 307	4 187	4 387	844	835
Papua	28 847	11 893	7 634	7 027	1 140	1 135
Indonesia	413 135	149 039	237 625	225 449	226 573	201 524

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2014-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2014-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.44

Jumlah Alat Penangkap Ikan Laut menurut Jenis Alat Penangkap, 2010 - 2014
Number of Marine Fishing Gear by Type of Fishing Gear, 2010 - 2014
(buah / units)

Jenis Alat Tangkap Type of Fishing Gear	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pukat tarik / Trawl					
Pukat tarik udang ganda / <i>Double rigs shrimp trawl</i>	2 543	2 165	1 911	1 164	569
Pukat tarik udang tunggal <i>/ Stern shrimp trawl</i>	3 530	7 627	5 197	4 387	1 395
Pukat tarik berbingkai / <i>Beam trawl</i>	156	-	393	3 109	100
Pukat tarik ikan / <i>Fish net</i>	7 369	8 659	9 582	10 884	7 069
Pukat kantong / Seine net					
Payang (termasuk Lampara) / <i>Pelagic danish seine</i>	27 002	31 348	33 493	31 190	82 502
Dogol (termasuk Lampara dasar-Jaring arad, Cantrang) / <i>Demersal danish seine</i>	19 726	23 683	28 442	26 413	25 012
Pukat Pantai / <i>Beach seine</i>	19 556	18 449	17 631	23 030	19 577
Pukat cincin / Purse seine	17 572	32 040	27 706	22 310	23 225
Jaring insang / Gill net					
Jaring insang hanyut / <i>Drift gill nets</i>	99 983	106 334	115 520	131 135	116 522
Jaring insang lingkar / <i>Encircling gill net</i>	18 353	21 683	21 757	20 255	23 703
Jaring insang tetap / <i>Set gill net</i>	97 495	90 516	106 591	111 361	107 490
Jaring klitik / <i>Jarring klitik</i>	60 914	62 127	61 938	69 155	66 785
Jaring angkat / Lift net					
Bagan perahu/Rakit / <i>Boat/Raft lift net</i>	13 120	14 768	14 195	13 669	11 370
Bagan tancap / <i>Stationary lift net</i>	14 008	17 550	15 743	15 475	15 847
Serok dan songko / <i>Scoop net</i>	11 884	11 422	10 827	10 127	9 860
Anco / <i>Shore lift net</i>	2 417	1 907	2 047	3 148	1 974
Jaring angkat lainnya / <i>Other lift nets</i>	7 245	5 545	4 654	2 573	5 116

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.44

Jenis Alat Tangkap Type of Fishing Gear	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pancing / Hook and lines					
Rawai tuna / Tuna long line	8 558	10 125	12 714	11 235 ^r	8 403
Rawai hanyut lainnya selain rawai tuna / Other drift long line	12 306	13 350	16 600	20 354 ^r	17 705
Rawai dasar / Set long line	35 319	34 421	46 952	45 643	43 450
Huhate / Skipjack pole and line	7 379	8 167	7 338	4 263	3 932
Pancing tonda / Troll line	64 554	82 754	86 523	88 328 ^r	78 925
Pancing ulur / Hand lines (including Vertical long line)	93 268	126 513	129 888	161 164	170 561
Pancing cumi / Squid jigger	22 192	20 709	19 563	15 811	17 960
Pancing lainnya / Other lines	118 405	102 713	94 773	110 059	82 989
Perangkap / Trap					
Sero (termasuk Kelong) / Guiding barrier	9 335	9 137	9 404	10 375	9 910
Jermal / Stow net	7 300	5 121	4 137	2 864	4 576
Bubu / Pots	80 488	80 199	85 790	127 174	123 910
Alat pengumpul dan penangkap / Collectors and gears					
Alat pengumpul rumput laut / Seaweed collectors	1 791	2 304	5 006	3 952	2 092
Alat penangkap kerang / Shell fish gears	12 298	13 638	15 717	17 759 ^r	15 761
Alat penangkap teripang (Ladung) / Sea cucumber gears	1 770	3 719	5 269	8 226	3 067
Alat penangkap kepiting / Crab gears	16 979	12 616	23 835	24 398	- 1
Lainnya / Others					
Muroami / Muroami	1 021	1 496	886	924	878
Jala tebar / Cast net	6 826	4 981	10 409	19 563	15 453
Garpu dan tombak, dan lain-lain / Harpoon, etc	41 537	26 497	31 853	30 504 ^r	22 107
Jumlah / Total	947 220	1 001 667	1 060 449	1 175 314	1 174 274

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki/ Figure revised¹ Pada tahun 2014 tidak ada klasifikasi untuk alat tangkap ini / In 2014 There No Classification on This Fishing GearsSumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia 2011-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.45

Jumlah Nelayan di Laut menurut Provinsi dan Kategori Nelayan, 2014
Number of Marine Fishers by Province and Category of Fishers, 2014
 (Orang / Person)

Provinsi Province	Nelayan Penuh Full Time	Nelayan Sambilan Utama Part Time (Major)	Nelayan Sambilan Tambahan Part Time (Minor)	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43 638	17 896	9 237	70 771
Sumatera Utara	94 893	26 861	2 244	123 998
Sumatera Barat	30 324	8 590	2 511	41 425
Riau	22 752	5 317	2 465	30 534
Jambi	4 184	3 076	1 181	8 441
Sumatera Selatan	15 621	12 516	5 240	33 377
Bengkulu	19 038	1 448	438	20 924
Lampung	13 651	10 259	4 652	28 562
Kepulauan Bangka Belitung	26 688	6 369	1 151	34 208
Kepulauan Riau	92 551	14 590	6 763	113 904
DKI Jakarta	25 487	1 011	898	27 396
Jawa Barat	74 364	17 516	12 208	104 088
Jawa Tengah	32 975	47 972	18 343	99 290
DI Yogyakarta	1 129	1 442	164	2 735
Jawa Timur	179 421	36 346	12 121	227 888
Banten	30 374	8 855	573	39 802
Bali	14 401	10 866	4 301	29 568
Nusa Tenggara Barat	43 794	12 997	7 840	64 631
Nusa Tenggara Timur	22 194	15 951	14 065	52 210
Kalimantan Barat	25 519	26 100	10 239	61 858
Kalimantan Tengah	16 200	10 888	4 623	31 711
Kalimantan Selatan	21 549	23 766	9 516	54 831
Kalimantan Timur	34 414	7 277	3 842	45 533
Kalimantan Utara				
Sulawesi Utara	53 284	42 080	33 300	128 664
Sulawesi Tengah	35 203	39 346	20 421	94 970
Sulawesi Selatan	89 013	18 328	6 664	114 005
Sulawesi Tenggara	54 406	38 511	14 215	107 132
Gorontalo	10 028	4 419	4 566	19 013
Sulawesi Barat	19 406	33 369	4 758	57 533
Maluku	115 282	28 723	64 443	208 448
Maluku Utara	7 583	3 451	7 744	18 778
Papua Barat	14 437	20 352	8 242	43 031
Papua	39 298	22 519	9 119	70 936
Indonesia	1 323 101	579 007	308 087	2 210 195

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.46

Jumlah Nelayan di Laut menurut Propinsi, 2010 - 2014
Number of Marine Fishermen by Province, 2010 - 2014
(Orang / Person)

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	71 000	71 805	64 968	70 771	70 771
Sumatera Utara	166 476	162 581	183 751	129 160	123 998
Sumatera Barat	31 236	32 132	38 387	40 378	41 425
Riau	42 253	42 666	48 111	42 800	30 534
Jambi	13 429	14 896	15 506	49 191	8 441
Sumatera Selatan	34 277	33 696	33 363	33 818	33 377
Bengkulu	15 863	16 507	19 266	20 475	20 924
Lampung	36 596	36 465	36 370	36 405	28 562
Kepulauan Bangka Belitung	71 850	78 602	81 205	39 399	34 208
Kepulauan Riau	98 521	99 942	113 297	112 554	113 904
DKI Jakarta	40 479	68 360	61 813	28 268	27 396
Jawa Barat	81 266	95 970	98 110	101 042	104 088
Jawa Tengah	103 839	103 441	100 030	102 963	99 290
DI Yogyakarta	2 317	2 419	3 338	2 871	2 735
Jawa Timur	250 881	291 543	226 303	210 649	227 888
Banten	31 644	32 432	27 649	26 765	39 802
Bali	55 242	53 053	54 237	50 888	29 568
Nusa Tenggara Barat	68 046	65 754	71 250	40 115	64 631
Nusa Tenggara Timur	67 259	46 178	44 260	47 927	52 210
Kalimantan Barat	55 170	61 613	57 721	56 998	61 858
Kalimantan Tengah	29 153	27 717	27 161	21 125	31 711
Kalimantan Selatan	52 378	51 420	52 192	53 195	54 831
Kalimantan Timur	122 308	137 206	137 041	42 491	45 533
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	80 096	62 608	65 861	115 730	128 664
Sulawesi Tengah	80 054	104 307	125 202	149 217	94 970
Sulawesi Selatan	137 695	137 044	108 988	122 177	114 005
Sulawesi Tenggara	77 232	76 045	79 421	77 044	107 132
Gorontalo	23 705	24 022	18 981	44 734	57 533
Sulawesi Barat	38 201	36 736	50 402	19 013	19 013
Maluku	78 111	98 956	124 894	119 645	208 448
Maluku Utara	11 719	15 301	16 607	17 235	18 778
Papua Barat	38 160	30 339	30 865	39 954	43 031
Papua	55 986	53 457	61 838	99 972	70 936
Indonesia	2 162 442	2 265 213	2 278 388	2 164 969	2 210 195

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2011-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2011-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.47

Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut menurut Provinsi, 2010 - 2014
Number of Marine Capture Household/Fishing Company by Province, 2010 - 2014

Provinsi Province	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16 407	17 151	17 149	17 667	17 758
Sumatera Utara	31 872	33 331	39 069	43 081	43 085
Sumatera Barat	9 276	9 574	9 962	11 141	12 185
Riau	13 946	13 933	14 809	14 901	14 764
Jambi	2 417	2 629	2 721	1 925	2 680
Sumatera Selatan	7 205	7 073	7 342	7 355	7 358
Bengkulu	7 757	8 185	8 182	8 278	7 487
Lampung	8 773	7 673	7 455	7 606	7 757
Kepulauan Bangka Belitung	16 933	17 526	17 468	17 786	17 304
Kepulauan Riau	25 859	25 667	28 398	30 230	30 017
DKI Jakarta	4 178	3 322	2 442	3 238	3 290
Jawa Barat	19 950	19 610	20 104	20 754	18 231
Jawa Tengah	21 761	21 971	19 972	19 919	22 545
DI Yogyakarta	1 021	1 128	1 529	1 615	1 754
Jawa Timur	57 018	59 654	67 536	62 485	59 513
Banten	6 425	5 851	6 100	6 034	6 058
Bali	16 771	15 954	15 058	15 429	15 654
Nusa Tenggara Barat	21 165	20 559	20 526	24 624	24 791
Nusa Tenggara Timur	23 813	15 441	17 049	25 011	27 135
Kalimantan Barat	9 861	12 017	11 325	13 535	13 890
Kalimantan Tengah	6 841	6 407	6 155	5 330	6 439
Kalimantan Selatan	9 294	9 260	9 167	9 164	9 166
Kalimantan Timur	24 490	27 704	26 840	27 806	28 176
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	19 250	18 824	16 026	39 270	19 500
Sulawesi Tengah	33 343	40 922	52 372	57 511	50 855
Sulawesi Selatan	32 276	32 717	33 859	35 711	36 642
Sulawesi Tenggara	26 056	26 054	26 799	26 016	27 119
Gorontalo	12 702	7 779	7 790	7 922	7 985
Sulawesi Barat	7 596	14 178	12 657	11 803	12 088
Maluku	37 041	44 543	54 139	49 842	51 947
Maluku Utara	3 070	2 905	2 891	2 992	3 077
Papua Barat	14 686	13 451	13 549	13 649	13 646
Papua	28 603	32 208	30 976	31 992	23 209
Indonesia	577 656	595 201	627 416	671 622	643 105

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2011-2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2011-2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.48

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut dan Tambak serta Pembudidaya Ikan menurut Provinsi, 2014

Number of Marine and Brackishwater Pond Culture Households and Fish Farmer by Province, 2014

Provinsi Province	Laut / Marine		Tambak / Brackishwater Pond	
	Rumah Tangga <i>Household</i>	Pembudidaya <i>Fish Farmer</i>	Rumah Tangga <i>Household</i>	Pembudidaya <i>Fish Farmer</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	352	1 056	25 141	75 423
Sumatera Utara	1 268	3 804	2 218	6 654
Sumatera Barat	136	251	204	240
Riau	158	590	243	729
Jambi	-	-	507	1 521
Sumatera Selatan	-	-	11 786	35 358
Bengkulu	91	454	180	224
Lampung	1 012	1 012	18 193	360
Kepulauan Bangka Belitung	168	199	50	18 193
Kepulauan Riau	8 802	26 406	161	805
DKI Jakarta	1 667	5 001	167	501
Jawa Barat	177	261	26 190	52 964
Jawa Tengah	506	1 518	27 583	82 749
DI Yogyakarta	-	-	560	1 680
Jawa Timur	8 935	85 066	23 622	42 529
Banten	1 437	3 463	2 381	4 762
Bali	2 761	2 803	137	464
Nusa Tenggara Barat	9 752	29 256	5 262	15 786
Nusa Tenggara Timur	30 592	78 154	2 192	6 271
Kalimantan Barat	380	1 140	3 275	9 825
Kalimantan Tengah	10	30	1 325	3 975
Kalimantan Selatan	243	669	3 304	6 608
Kalimantan Timur	3 329	5 459	18 376	21 770
Kalimantan Utara	-	-	-	-
Sulawesi Utara	3 782	11 346	216	1 728
Sulawesi Tengah	15 143	45 429	3 950	11 850
Sulawesi Selatan	41 015	123 045	49 652	148 956
Sulawesi Tenggara	29 874	89 622	12 865	38 595
Gorontalo	1 341	3 711	1 378	2 756
Sulawesi Barat	2 381	7 143	5 998	17 994
Maluku	11 998	35 994	178	534
Maluku Utara	3 099	8 639	175	175
Papua Barat	901	2 703	85	255
Papua	869	5 239	179	960
Indonesia	182 179	579 463	247 733	613 194

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

**Tabel
Table** 4.49 Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Laut menurut Provinsi dan Jenis Perahu yang Digunakan, 2014
Number of Marine Households/Fishing Company by Province and Type of Fishing Boat, 2014

Provinsi Province	Tanpa Perahu <i>Without Boat</i>	Perahu Tanpa Motor <i>With Non Powered Boat</i>	Dengan Motor Tempel <i>With Outboard Motor</i>	Dengan Kapal Motor <i>With Motorboat</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1 487	2 610	4 981	8 680
Sumatera Utara	15 583	3 840	4 886	18 776
Sumatera Barat	-	3 831	6 686	1 668
Riau	2 794	5 237	606	6 127
Jambi	-	20	57	2 603
Sumatera Selatan	-	1 915	1 171	4 272
Bengkulu	3 990	583	2 053	861
Lampung	54	1 045	3 892	2 766
Kepulauan Bangka Belitung	2 531	1 421	3 809	9 543
Kepulauan Riau	-	8 878	3 011	18 128
DKI Jakarta	-	-	-	3 290
Jawa Barat	2 557	294	10 512	4 868
Jawa Tengah	138	308	19 396	2 703
DI Yogyakarta	777	-	934	43
Jawa Timur	6 096	3 667	22 243	27 507
Banten	148	307	1 476	4 127
Bali	1 204	1 525	12 587	338
Nusa Tenggara Barat	2 152	4 217	13 177	5 245
Nusa Tenggara Timur	4 366	11 971	5 034	5 764
Kalimantan Barat	1 392	3 385	3 095	6 018
Kalimantan Tengah	333	701	2 431	2 974
Kalimantan Selatan	304	512	114	8 236
Kalimantan Timur	520	2 284	6 360	19 012
Kalimantan Utara	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1 042	6 459	6 438	5 561
Sulawesi Tengah	6 608	18 244	21 696	4 307
Sulawesi Selatan	399	4 663	19 357	12 223
Sulawesi Tenggara	1 400	7 436	14 277	4 006
Gorontalo	45	1 429	6 282	229
Sulawesi Barat	777	1 548	6 192	3 571
Maluku	3 840	32 896	10 299	4 912
Maluku Utara	285	613	983	1 196
Papua Barat	3 117	5 307	4 387	835
Papua	3 154	11 893	7 027	1 135
Indonesia	67 093	149 039	225 449	201 524

Sumber / Source : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capture Fisheries Statistics of Indonesia by Province 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.50

Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014

Number of Coastal Villages by Province and Main Income Source of Major Population, 2014

Provinsi Province	Tanaman Pangan <i>Food Crops-</i>	Perkebunan <i>Plantation</i>	Peternakan <i>Livestock</i>	Perikanan Tangkap <i>Capture Fisheries</i>	Perikanan Budidaya <i>Aquaculture Fisheries</i>	Kehutanan <i>Forestry</i>	Jasa Pertanian <i>Agriculture Services</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	405	49	3	192	31	0	5
Sumatera Utara	101	213	1	117	1	0	2
Sumatera Barat	55	27	1	19	0	0	0
Riau	20	197		31	0	1	0
Jambi	2	25	0	3	0	0	0
Sumatera Selatan	6	7	0	11	5	0	0
Bengkulu	45	95	3	18	1	0	1
Lampung	102	91		18	13	0	0
Kepulauan Bangka Belitung	6	69	0	36	0	0	0
Kepulauan Riau	15	65	1	199	3	1	0
DKI Jakarta		0	0	6	0	0	0
Jawa Barat	168	2	0	30	12	0	0
Jawa Tengah	196	2	0	66	30	0	0
DI Yogyakarta	33	0	0	0	0	0	0
Jawa Timur	428	24	1	119	11	4	1
Banten	71	4		18	6	0	1
Bali	80	23	9	6	2	0	0
Nusa Tenggara Barat	227	21	2	33	2	0	0
Nusa Tenggara Timur	727	124	7	66	26	2	1
Kalimantan Barat	89	38		24	1	0	0
Kalimantan Tengah	17	1	0	23	1	0	0
Kalimantan Selatan	52	26	3	60	3	1	0
Kalimantan Timur	58	30		43	4	0	0
Kalimantan Utara	15	15		9	3	0	0
Sulawesi Utara	151	459	2	111	5	0	0
Sulawesi Tengah	285	505	1	106	46	2	0
Sulawesi Selatan	243	44	4	110	59	0	0
Sulawesi Tenggara	241	319	2	216	67	5	0
Gorontalo	124	20	0	52	2	0	0
Sulawesi Barat	34	75	2	29	1	0	0
Maluku	342	369	8	92	43	5	1
Maluku Utara	61	775	5	45	2	0	0
Papua Barat	187	113	1	181		28	0
Papua	291	58	3	244	1	1	1
Indonesia	4 877	3 885	59	2 333	381	50	13

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.50*

Provinsi Province	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	Perdagangan Besar/Ecer dan Rumah Makan <i>Trades/ Retail and Restaurants</i>	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi <i>Transportation, Warehousing, and Communication</i>	Jasa Services	Lainnya <i>Others</i>
	(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	1	2	17	0	33	10
Sumatera Utara	1	1	12	0	7	3
Sumatera Barat	0	2	10	0	12	1
Riau	0	1	5	1	10	5
Jambi	0	0	0	0	0	0
Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
Bengkulu	0	2	8	0	9	4
Lampung	0	6	3	2	5	1
Kepulauan Bangka Belitung	41	0	6	0	5	3
Kepulauan Riau	8	24	18	1	21	5
DKI Jakarta	0	4	6	0	0	0
Jawa Barat	0	1	1	0	10	3
Jawa Tengah	9	40	4	1	7	2
DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
Jawa Timur	4	28	33	2	23	0
Banten	4	21	7	0	2	1
Bali	0	3	16	0	33	3
Nusa Tenggara Barat	1	0	11	0	3	1
Nusa Tenggara Timur	0	4	21	0	32	1
Kalimantan Barat	2	1	2	0	3	1
Kalimantan Tengah	0	0	1	0	1	0
Kalimantan Selatan	5	2	3	0	10	0
Kalimantan Timur	8	6	7	0	10	9
Kalimantan Utara	4	3	3	0	3	0
Sulawesi Utara	2	5	18	0	19	6
Sulawesi Tengah	8	4	24	0	28	12
Sulawesi Selatan		7	27	3	29	5
Sulawesi Tenggara	6	4	39	1	38	9
Gorontalo	1	0	0	0	4	0
Sulawesi Barat	0	0	5	0	6	0
Maluku	4	2	16	1	26	5
Maluku Utara	4	1	15	3	26	4
Papua Barat	1	2	12	1	16	1
Papua	0	2	15	1	24	5
Indonesia	114	178	365	17	455	100

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.51 Pulau Kecil yang Berpotensi Mengandung Mineral di beberapa Provinsi dan Jenis Potensi, 2015
Potency of Mineral on Several Small Islands in several Provinces and Potential Type, 2015

Provinsi Province	Nama Pulau Name of Islands	Luas Pulau Area of Islands (Ha)	Potensi Mineral Potency of Mineral
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	Pulau Breueh	5 802,34	Besi Tembaga Molibdenum Emas
	Pulau Weh	12,18	Trass Kaolin
	Pulo Aceh	24,08	pasir besi andesit batu gamping marmer granit
	Pulau Simeulue	199,50	lempung batu gamping lignit
Riau	Pulau Tebing Tinggi	138 000,00	Gambut
	Pulau Padang	111 900,00	Gambut
	Pulau Merbau	23 100,00	Gambut
	Pulau Rangsang	90 620,00	Gambut
	Pulau Rupat	150 000,00	Pasir laut Lempung Kerikil Pasir kuarsa
Bengkulu	Pulau Bengkalis	90 630,00	Gambut
	Sinaboi	1 000,00	Pasir laut
	Pulau Mendol	32 500,00	Timah, Pasir laut
	Pulau Enggano	40 200,00	Batu Gamping Batu Apung Batu Lempung
Jawa Tengah	Pulau Tikus	2,00	Batu Gamping
	Pulau Nusakambangan	11 510,00	Batu Gamping
	Pulau Karimunjawa	1 000,00	Pasir Pantai Basalt Tanah Liat Oker (Limonit) Granit Batu Gamping
	Pulau Menjangan	13,00	Pasir Kuarsa
	Pulau Kamojan	45,00	Tanah Liat Oker (Limonit)
	Pulau Seruni	20,00	Batu Gamping
	Pulau Genting	20,00	Pasir Pantai Basalt Granit Batu Gamping

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 4.51

Provinsi <i>Province</i>	Nama Pulau <i>Name of Islands</i>	Luas Pulau <i>Area of Islands</i> (Ha)	Potensi Mineral <i>Potency of Mineral</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Tengah	Pulau Cendikian	45,00	Pasir Pantai Batu Gamping
	Pulau Menjangan	40,00	Pasir Pantai Batu Gamping
	Pulau Menjangan Kecil	30,00	Pasir Pantai Batu Gamping
	Pulau Sintok	30,00	Pasir Pantai Batu Gamping
	Pulau Bengkoang	20,00	Pasir Pantai
	Pulau Tengah	10,00	Pasir Pantai Batu Gamping
	Pulau Parang	50,00	Pasir Pantai Basalt
	Pulau Kumbang	12,00	Batu Gamping
	Pulau Nyamuk	20,00	Pasir Pantai Batu Gamping
	Pulau Cemara Besar	10,00	Pasir Pantai Batu Gamping
	Pulau Gundul	6,00	Basalt
	Pulau Alang-Alang	na	Batu Gamping
Jawa Timur	Pulau Mrican	na	Oker (Limonit)
	Bawean	19 630,00	Batu gamping Oniks
Nusa Tenggara Timur	Pulau Lomblen	126 639,00	Emas Timbal Besi Tembaga Barit
	Pulau Alor	211 970,00	Tembaga Timbal Andesit Batu Hias Batu Gamping Diorit Gipsum Kaolin Lempung Pasir Kuarsa Sirtu
	Pulau Pantar	72 800,00	Emas Andesit Gipsum
	Pulau Papagaran	173 300,00	Emas

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.51

Provinsi Province	Nama Pulau <i>Name of Islands</i>	Luas Pulau <i>Area of Islands</i> (Ha)	Potensi Mineral <i>Potency of Mineral</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Nusa Tenggara Timur	Pulau Papagaran Besar	181 700,00	Emas
	Pulau Sebayu Besar	na	Emas
	Pulau Rusa	na	Emas
	Pulau Lambaleda	na	Mangan Batu Gamping
	Pulau Pungu Kecil	na	Toseki
	Pulau Pura	na	Andesit
	Pulau Maya	1,10	Batuan Granit Bauksit (hipotenik)
	Pulau Karimata	156,25	Batuan Granit Bauksit (hipotenik)
Kalimantan Barat	P. Sebuku	21 428,30	Batubara
	P. Suwangi	669,60	Besi Laterit
Kalimantan Selatan	Nunukan	23 354,00	Batu bara
	Sebatik	23 442,00	batuan karbonat tersier batuan sedimen tersier Batu bara tertiary/prae-tertiary volcanic rocks
	Mandul	36 834,00	batuan karbonat tersier Batu bara
Kalimantan Utara	Tarakan	25 095,00	Batu bara batuan sedimen kuarter tersier
	Bunyu	11 141,00	Batu bara batuan sedimen kuarter tersier
	Karakelang (Talaud)	9 763,50	Nikel Mangan Chrom
	Salibabu (Talaud)	777,20	Pasir besi titan
Sulawesi Utara	Kabaruan (Talaud)	1 156,10	Nikel Chrom
	Lipang (Sangihe)	9,00	Tin
	Kawaluso (Sangihe)		Tin
	Beng (Sangihe)		Baryt
	Beeng Darat (Sangihe)		Emas
	Beeng Laut (Sangihe)		Emas
	Bangka (Minut)	4 800,00	Bijih besi
	Batanglampe (Kab. Sinjai)	100,00	Logam Dasar
	Burunglohe (Kab. Sinjai)	93,00	Batubara

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 4.51

Provinsi <i>Province</i>	Nama Pulau <i>Name of Islands</i>	Luas Pulau <i>Area of Islands</i> (Ha)	Potensi Mineral <i>Potency of Mineral</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Selatan	Jampea Kab. Kep. Selayar)	15 880,00	Pasir besi Granit Trakit Logam Dasar
	Pasi (Kab.Kep. Selayar)	2 285,00	Batugamping
	Pasitanete (Kab.Kep.Selayar)	274,00	Batugamping
	Tangnga (Kab. Kep. Selayar)	42,00	Granit
	Bembe (Kab. Kep. Selayar)	170,00	Granit
	Tanamalaila (Kab. Kep. Selayar)	885,00	Granit
	Liukang Loe (Bulukumba)	430,00	Batugamping
Gorontalo	P. Dudepo	1 184,00	Emas Perak
Maluku	Pulau Haruku (Desa Haruku, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah)	18 879,00	Mineral logam (Galena)
	Pulau Sermata (Desa Mahaleta dan Desa Lelang, Kec. Mdona Hyera, Kab. Maluku Barat Daya)	16 313,00	Pasir besi
	Pulau Ambon (Desa Morela, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah)	77 568,00	Logam
	Sayafi	1 987,90	Nikel
Maluku Utara	Manuran (Wageo Utara)	1 173,00	Nikel
	Gag (Raja Ampat)	13 136,00	Nikel

Sumber / Source : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, 2016

Tabel
Table

4.52

Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut menurut Provinsi, 2014
Number and Area of Marine Conservation by Province, 2014

Provinsi Province	Taman Nasional Laut Marine National Park		Taman Wisata Alam Laut Marine Ecotourism Park		Taman Wisata Perairan Marine Nature Recreation Park	
	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	-	-	2	231 400	-	-
Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	1	39 900
Riau	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-	-
Lampung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	1	1 262 686
DKI Jakarta	1	107 489	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	1	110 117	-	-	-	-
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
Banten	-	-	1	720	-	-
Bali	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	2	8 600	1	2 954
Nusa Tenggara Timur	-	-	3	119 350	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	1	280	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	89 065	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	1	362 605	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	1	530 765	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	1	1 390 000	2	117 800	1	50 000
Gorontalo	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	3	13 098	1	2 500
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Papua	1	1 453 500	-	-	1	183 000
Indonesia	7	4 043 541	14	491 248	6	1 541 040

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.52

Provinsi Province	Suaka Margasatwa Laut <i>Marine Sanctuary</i>		Cagar Alam Laut <i>Marine Natural Preservation</i>		Kawasan Konservasi Laut <i>District Marine Conservation Area</i>	
	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	-	-	-	-	4	53 583
Sumatera Utara	-	-	-	-	5	167 714
Sumatera Barat	-	-	-	-	9	198 961
Riau	-	-	-	-	1	40 742
Jambi	-	-	-	-	2	30
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	3	87 476
Lampung	-	-	1	11 200	2	91 081
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	5	799 893
Kepulauan Riau	-	-	-	-	6	1 077 463
DKI Jakarta	1	90	-	-	-	-
Jawa Barat	1	90	2	1 620	3	32 315
Jawa Tengah	-	-	-	-	5	57 722
DI Yogyakarta	-	-	-	-	2	3 570
Jawa Timur	-	-	-	-	4	121 606
Banten	-	-	-	-	1	7 391
Bali	-	-	-	-	3	37 631
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	7	103 644
Nusa Tenggara Timur	-	-	1	2 000	4	817 882
Kalimantan Barat	-	-	1	77 000	1	15 300
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1	171 679
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	2	34 959
Kalimantan Timur	1	220	-	-	2	290 387
Kalimantan Utara	-	-	-	-	2	274
Sulawesi Utara	-	-	-	-	4	67 864
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	6	177 828
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	4	181 545
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	9	535 813
Gorontalo	-	-	-	-	2	2 460
Sulawesi Barat	-	-	-	-	2	82 880
Maluku	-	-	-	-	1	150 000
Maluku Utara	-	-	-	-	5	9 718
Papua Barat	-	-	1	62 660	4	1 821 509
Papua	2	5 278	-	-	1	24 910
Indonesia	5	5 678	6	154 480	112	7 265 831

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.52

Provinsi Province	Suaka Perikanan <i>Fishery Sanctuary</i>		Suaka Alam Perairan <i>Marine Nature Preserves</i>		Taman Nasional Perairan <i>Marine National Park</i>	
	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)	Jumlah Number	Luas / Area (Ha)
	(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Aceh	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
Riau	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-	-
Lampung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	1	12	-	-	-	-
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	2	370	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	-	-
Bali	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1	71	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	1	3 355 353
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	1	114 000	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	2	331 630	-	-
Papua	-	-	-	-	-	-
Indonesia	4	453	3	445 630	1	3 355 353

Sumber / Source : Analisis Data Pokok 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Basic Data Analysis 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.53

Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Laut di Beberapa Provinsi, 2009 - 2014
Number of Visitors to Marine Ecotourism Parks in Several Provinces, 2009-2014
 (Orang / Person)

Provinsi Province	Taman Wisata Laut <i>Marine Ecotourism Park</i>	Indonesia / Indonesian				
		2009	2010	2012	2013	2014
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	Kepulauan Banyak	31	3	1	2	2
	Pulau Weh	14	2	4	3	-
Sumatera Barat	Kep. Pieh	-	-	-	-	-
Banten	P. Sangiang	-	-	460	814	52 464
Nusa Tenggara Barat	Pulau Moyo	225	1	-	1 524	78
	Gili Meno, GA, GT	-	-	-	-	-
	P. Satonda	-	-	312	894	739
	Gili Matra	1	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	Teluk Kupang	5	-	-	-	-
	Teluk Maumere	2	-	48	-	-
	Tujuh Belas Pulau Riung	126	801	2 113	5 991	-
Kalimantan Timur	Pulau Sangalaki	-	1 172	76	79	1 719
Sulawesi Selatan	Kep. Kapoposang	36	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	Teluk Lasolo	27	7 509	919	-	-
	Mangolo	210	-	-	-	-
	Pulau Padamarang	15	159	70	-	-
Maluku	Pulau Kassa	-	-	-	5	-
	Pulau Pombo	97	-	-	-	-
	Taman Laut Banda	-	-	-	-	-
	P. Marsegu	23	-	-	-	-
Papua	Kepulauan Padaido	5	-	-	-	-
	Teluk Youtefa	4	-	-	-	-
	Nabiri	-	-	-	-	-
INDONESIA		821	9 647	4 003	9 312	55 002

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.53

Provinsi Province	Taman Wisata Laut <i>Marine Ecotourism Park</i>	Asing / Foreigner				
		2009	2010	2012	2013	2014
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	Kepulauan Banyak	15	7	5	-	-
	Pulau Weh	-	12	-	-	-
Sumatera Barat	Kep. Pieh	-	-	-	-	-
Banten	P.Sangiang	-	-	14	7	283
Nusa Tenggara Barat	Pulau Moyo	-	488	1 410	-	898
	Gili Meno, GA, GT	-	-	-	-	-
	P. Satonda	-	-	493	-	802
	Gili Matra	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	Teluk Kupang	-	-	-	-	-
	Teluk Maumere	19	7	64	266	-
	Tujuh Belas Pulau Riung	583	323	798	3 359	-
Kalimantan Timur	Pulau Sangalaki	-	290	10	-	-
Sulawesi Selatan	Kep. Kapoposang	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	Teluk Lasolo	-	-	-	-	-
	Mangolo	-	-	-	-	-
	Pulau Padamarang	-	-	-	-	-
Maluku	Pulau Kassa	-	-	-	-	-
	Pulau Pombo	-	-	-	-	-
	Taman Laut Banda	-	-	-	-	-
	P. Marsegu	-	-	-	-	-
Papua	Kepulauan Padaido	-	-	-	-	-
	Teluk Youtefa	-	-	-	-	-
	Nabiri	-	-	-	-	-
INDONESIA		617	1 127	2 794	3 632	1 983

Catatan / Note : Data Tahun 2011 tidak tersedia / The 2011 data is not available

Sumber / Source : Statistik Kehutanan Indonesia 2010-2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Forestry Statistics of Indonesia 2010-2015, Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.54

Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Terjadinya Pencemaran, 2014
Number of Coastal Villages by Province and Pollution Incident, 2014

Provinsi Province	Jenis Pencemaran Types of Pollutants						Sumber Pencemaran Source of Pollutants		
	Rumah Tangga / Household			Pabrik / Factory					
	Air Water	Tanah Soil	Udara Air	Air Water	Tanah Soil	Udara Air	Air Water	Tanah Soil	Udara Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	42	9	105	11	4	4	10	0	16
Sumatera Utara	29	2	102	10	1	2	16	0	12
Sumatera Barat	12	1	48	5	0	0	4	0	4
Riau	26	2	218	2	1	2	10	0	3
Jambi	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sumatera Selatan	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Bengkulu	21	1	10	5	0	0	13	0	5
Lampung	27	2	18	8	1	0	9	0	7
Kepulauan Bangka Belitung	73	32	16	0	1	1	4	0	9
Kepulauan Riau	25	4	47	7	0	0	9	2	4
DKI Jakarta	6	1	3	2	1	1	4	0	1
Jawa Barat	41	2	33	8	0	1	28	1	15
Jawa Tengah	71	16	68	12	1	12	49	9	31
DI Yogyakarta	2	0	32	0	0	0	1	0	0
Jawa Timur	58	8	96	11	2	7	40	4	49
Banten	31	9	36	14	3	0	13	5	26
Bali	16	1	7	8	1	2	3	0	1
Nusa Tenggara Barat	26	12	24	9	4	1	8	5	10
Nusa Tenggara Timur	32	4	37	10	0	1	2	0	3
Kalimantan Barat	21	1	33	4	0	4	2	0	4
Kalimantan Tengah	7	1	1	2	1	0	1	0	0
Kalimantan Selatan	25	6	19	1	0	3	10	1	5
Kalimantan Timur	44	9	42	15	2	0	9	2	14
Kalimantan Utara	4	0	3	1	0	0	1	0	0
Sulawesi Utara	43	4	28	22	2	2	4	0	8
Sulawesi Tengah	70	9	30	19	1	2	8	0	8
Sulawesi Selatan	36	7	44	12	3	5	13	1	18
Sulawesi Tenggara	28	9	39	9	1	0	2	0	1
Gorontalo	18	15	9	5	7	1	0	0	2
Sulawesi Barat	8	3	15	1	0	5	2	0	0
Maluku	42	6	19	24	3	3	7	3	0
Maluku Utara	37	15	50	16	7	2	1	3	1
Papua Barat	20	2	13	9	0	1	3	2	3
Papua	36	11	11	28	9	2	2	0	1
Indonesia	979	204	1 257	290	56	64	288	38	261

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.54

Provinsi Province	Sumber Pencemaran <i>Source of Pollutants</i>			Pengaduan Warga Ke Aparat Desa/ Kelurahan <i>Resident Complaint to Officials/ Office Village</i>		
	Lainnya / Others					
	Air Water	Tanah Soil	Udara Air	Air Water	Tanah Soil	Udara Air
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	21	5	85	31	6	35
Sumatera Utara	3	1	88	13	0	19
Sumatera Barat	3	1	44	5	1	8
Riau	14	1	213	11	1	79
Jambi	0	0	1	0	0	1
Sumatera Selatan	2	0	0	1	0	0
Bengkulu	3	1	5	8	1	5
Lampung	10	1	11	8	1	4
Kepulauan Bangka Belitung	69	31	6	31	6	11
Kepulauan Riau	9	2	43	14	2	14
DKI Jakarta	0	0	1	2	0	2
Jawa Barat	5	1	17	27	2	16
Jawa Tengah	10	6	25	36	10	35
DI Yogyakarta	1	0	32	0	0	0
Jawa Timur	7	2	40	36	7	46
Banten	4	1	10	17	6	26
Bali	5	0	4	4	0	4
Nusa Tenggara Barat	9	3	13	14	4	17
Nusa Tenggara Timur	20	4	33	27	2	32
Kalimantan Barat	15	1	25	15	1	19
Kalimantan Tengah	4	0	1	5	1	0
Kalimantan Selatan	14	5	11	16	2	12
Kalimantan Timur	20	5	28	24	8	26
Kalimantan Utara	2	0	3	3	0	2
Sulawesi Utara	17	2	18	27	3	17
Sulawesi Tengah	43	8	20	53	9	17
Sulawesi Selatan	11	3	21	17	4	21
Sulawesi Tenggara	17	8	38	17	7	28
Gorontalo	13	8	6	10	1	4
Sulawesi Barat	5	3	10	4	0	7
Maluku	11	0	16	17	2	11
Maluku Utara	20	5	47	31	9	20
Papua Barat	8	0	9	12	0	6
Papua	6	2	8	16	3	6
Indonesia	401	110	932	552	99	550

Sumber / Source: Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.55

Kejadian Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia, 1997 - 2016
Occurrence of Oil Spill in Indonesian Waters, 1997 - 2016

Tahun Year	Lokasi Location	Kejadian Occurrence
1997	Banten	TKG Regent III, tenggelam, minyak MFO
1997	Kepulauan Riau	Orapin Global dan Evoikos tabrakan
1997	Kepulauan Riau	Pipa transfer minyak CALTEX, bocor, minyak mentah
1997	Selat Makasar	Mission Viking tenggelam, minyak
1997	Selat Makasar	Platform E-20 UNOCAL tenggelam
1997	Selat Madura	SETDCO tenggelam
1998	Tanjung Priok	Kapal Permina suplai No. 27 kandas
1998	Amamapare, Papua	MV Lonian Express, tabrakan, minyak mentah
1999	Batam	Mighty Serent II, tenggelam, minyak sisa
1999	Tanjung Priok	Pertamina Supply OS.27, tumpah, minyak sisa
1999	Sungai Siak Riau	MT Stephanie XVII, tabrakan, premium
1999	Cilacap	MT. King Fisher robek (640 ribu liter tumpah)
2000	Cilacap	KM. HHC tenggelam (9.000 ton asphal)
2000	Batam	MT. Natuna Sea kandas (4.000 ton minyak)
2001	Tejal, Cirebon	Steadfast tenggelam (1.200 ton limbah minyak)
2002	Bengkalis Riau	TKG Bumindo, kandas, MFO
2004	Wiriagar	TK-OSC 10, tenggelam, minyak mentah
2004	Wilayah TSS	MV. Kamimases Hyundai, tongkang cargo, tabrakan, minyak
2004	Santuriang	Tanker MT. Pan Sejati, tenggelam, minyak
2004	Teluk Tomini	Tanker MT. Istana VII, tenggelam, minyak
2004	Balikpapan	Tanker MT. Panos 6, bocor, minyak
2004	Teluk Tomini	Tanker MT. North Star, tenggelam, minyak
2004	Tanjung Balai Karimun	Tanker MT. Vista Mariner, kandas minyak
2004	Pekanbaru	Tanker MT. Maulana, terbakar, minyak
2004	Cilacap	Tanker MT. Lucky Lady, bocor, minyak
2004	Batu Ampar Batam	KM. Swadaya Lestari, minyak kotor
2004	Ambon	Tanker MT. PJST 03/YB 9043, terbakar, solar
2005	Teluk Ambon	Meledaknya kapal ikan MV Fu Yuan Fu F66
2008	Semarang	MT Kharisma Selatan terbalik 500 kilo liter MFO
2009	Laut Timur, NTT	Meledaknya ladang minyak Montara (kilang PTTEP Australia) 400 barel per hari
2009	Gresik	PT. Aremada Hess Indonesia Pangkah, Minyak Hidro Karbon Cair
2010	Tanjung Perak	MV Traveller Biglift bocor 200 ton
2010	Cilacap	Kebocoran pengisian minyak MFO ke kapal tangker MT Asia 17
2011	Blora	Pencurian pipa sepangkang 4 meter yang merupakan trunklin 4 inch antara Nglobo dan Cepu
2011	Dumai	Tumpahnya puluhan ton CPO dari tangki timbun
2012	Cilacap	Tumpahan minyak di sekitar dermaga Sleko, hingga radius 200 m
2014	Perairan Dumai, Riau	Tumpahan minyak di pelabuhan minyak KCPI Dumai dari Kapal Medelyn West
2015	Tuban	Kebocoran pipa minyak lepas pantai PT. PetroChina
2015	Nusakambangan, Cilacap	Kebocoran pipa minyak bawah laut PT. Pertamina Refinery Unit IV Cilacap
2015	Teluk Penyu, Cilacap	Tumpahan minyak dari Kapal MT Martha Petrol yang tersangkut karang
2016	Dumai	Tumpahan tangki timbun minyak sawit mentah (CPO) PT. Nagamas Palmoil Lestari di kawasan Pelindo Dumai, Riau
2016	Malang	Tumpah minyak mentah di Perairan Malang Selatan

Sumber / Source : Data dihimpun dari berbagai sumber / Data compiled from various sources

Tabel
Table

4.56

Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi, Tempat Buang Sampah oleh Sebagian Besar Keluarga, dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), 2014

Number of Coastal Villages by Province, Type of Garbage Dump Area, and Temporary Shelters Trash, 2014

Provinsi Province	Tempat Sampah Kemudian Diangkut <i>Trash then Transported</i>	Dalam Lubang atau Dibakar <i>In Hole or Burned</i>	Sungai/ Saluran Irigasi/ Danau/ Laut <i>River/ Irrigation Canals/ Lake/Sea</i>	Drainase (Got/ Selokan) <i>Drainage</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tempat Penampungan Sampah <i>Temporary Shelters Trash</i>
			(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	75	574	61	15	23	77
Sumatera Utara	27	201	107	12	112	27
Sumatera Barat	26	78	19	0	4	26
Riau	18	218	32	1	2	19
Jambi	5	6	15	0	4	6
Sumatera Selatan	0	9	20	0	0	0
Bengkulu	38	127	4	0	17	17
Lampung	23	159	44	4	11	25
Kepulauan Bangka Belitung	48	94	6	0	18	39
Kepulauan Riau	112	156	93	0	0	114
DKI Jakarta	15	1	0	0	0	14
Jawa Barat	25	156	33	4	9	38
Jawa Tengah	70	258	21	0	8	80
DI Yogyakarta	0	33	0	0	0	3
Jawa Timur	103	471	55	3	46	107
Banten	14	54	27	1	39	15
Bali	78	45	3	0	49	78
Nusa Tenggara Barat	38	123	76	8	56	35
Nusa Tenggara Timur	62	704	25	7	213	59
Kalimantan Barat	12	126	15	0	8	33
Kalimantan Tengah	3	15	24	0	2	6
Kalimantan Selatan	20	86	43	0	16	24
Kalimantan Timur	49	87	39	0	0	49
Kalimantan Utara	20	25	10	0	0	21
Sulawesi Utara	90	537	89	13	49	93
Sulawesi Tengah	72	647	226	14	62	99
Sulawesi Selatan	84	307	97	3	40	67
Sulawesi Tenggara	116	482	174	13	162	100
Gorontalo	7	156	26	3	11	15
Sulawesi Barat	17	68	48	0	19	17
Maluku	50	226	510	6	122	60
Maluku Utara	78	245	468	14	136	55
Papua Barat	25	278	170	4	66	30
Papua	34	391	187	9	25	30
Indonesia	1 454	7 143	2 767	134	1 329	1 418

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

**Tabel 4.57 Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi, Tempat Buang Air Besar, dan Tempat/ Saluran Pembuangan Limbah Cair/ Air Kotor Sebagian Besar Keluarga, 2014
Number of Coastal Villages by Province, Type of Toilet Facility, and Type of Drain/Area Liquid Waste Disposal by Most of Families, 2014**

Provinsi Province	Tempat Buang Air Besar Type of Toilet Facility					Tempat/ Saluran Pembuangan Limbah Cair/Air Kotor Type of Drain/Area Liquid Waste Disposal				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	496	10	59	183	67	317	38	324	2	
Sumatera Utara	224	17	37	181	43	68	113	204	31	
Sumatera Barat	90	3	2	32	13	38	14	62	0	
Riau	257	1	0	13	33	77	30	131	0	
Jambi	27	1	0	2	0	0	20	5	5	
Sumatera Selatan	27	0	2	0	1	0	23	5	0	
Bengkulu	165	1	3	17	12	23	3	148	0	
Lampung	155	3	1	82	14	86	40	99	2	
Kepulauan Bangka Belitung	148	1	4	13	11	32	1	118	4	
Kepulauan Riau	336	7	7	11	51	63	153	94	0	
DKI Jakarta	16	0	0	0	4	10	2	0	0	
Jawa Barat	174	20	11	22	29	115	32	46	5	
Jawa Tengah	316	8	4	29	35	151	46	115	10	
DI Yogyakarta	33	0	0	0	11	0	0	22	0	
Jawa Timur	466	69	14	129	102	168	56	352	0	
Banten	86	6	5	38	13	54	23	43	2	
Bali	163	1		11	42	85	1	42	5	
Nusa Tenggara Barat	160	15	9	117	41	99	28	125	8	
Nusa Tenggara Timur	822	23	13	153	35	39	2	880	55	
Kalimantan Barat	142	5	5	9	23	30	19	84	5	
Kalimantan Tengah	21	8	2	13	1	2	11	30	0	
Kalimantan Selatan	124	9	2	30	5	10	36	114	0	
Kalimantan Timur	148	4	3	20	9	57	37	70	2	
Kalimantan Utara	51	0	0	4	0	22	9	24	0	
Sulawesi Utara	587	39	69	83	64	294	29	386	5	
Sulawesi Tengah	678	19	56	268	98	236	128	555	4	
Sulawesi Selatan	366	13	13	139	40	181	53	257	0	
Sulawesi Tenggara	643	43	32	229	74	133	96	634	10	
Gorontalo	51	15	44	93	11	32	11	149	0	
Sulawesi Barat	91	4	2	55	8	42	9	93	0	
Maluku	419	19	147	329	20	116	96	674	8	
Maluku Utara	403	28	189	321	18	149	91	678	5	
Papua Barat	228	100	156	59	25	74	77	362	5	
Papua	423	124	39	60	24	65	132	415	10	
Indonesia	8 536	616	930	2 745	977	2 868	1 459	7 340	183	

- Catatan / Note : A. Jamban Sendiri / Private Toilet
B. Jamban Bersama/ Shared Toilet
C. Jamban Umum/ Public Toilet
D. Bukan Jamban/ No Toilet Facility
E. Lubang Resapan / Infiltration Hole
F. Drainase (got/ selokan) / Drainage (Drains/ Gullies)
G. Sungai/ Saluran Irrigasi/ Danau/ Laut / River/Irrigation Canals/ Lake/Sea
H. Dalam Lubang/ Tanah Terbuka / In Hole/ Open Area
I. Lainnya / Others

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.58

Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Perubahan Penggunaan (Konversi) Lahan
 Selama Setahun Terakhir, 2014
Number of Coastal Villages by Province and Land Conversion during Last Year, 2014

Provinsi Province	Lahan Pertanian Sawah <i>Wetland Area</i>		Lahan Pertanian Non Sawah <i>Agricultural Dryland</i>		Lahan Non Pertanian <i>Non Agricultural Land</i>	
	Lahan Pertanian Non Sawah <i>Agricultural Dryland</i>	Lahan Non Pertanian Non <i>Agricultural Land</i>	Lahan Pertanian Sawah <i>Wetland Area</i>	Lahan Non Pertanian Non <i>Agricultural Land</i>	Lahan Pertanian Sawah <i>Wetland Area</i>	Lahan Non Pertanian Non <i>Agricultural Land</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	37	32	33	36	26	14
Sumatera Utara	41	16	14	21	11	17
Sumatera Barat	31	28	14	25	4	12
Riau	19	11	15	39	19	23
Jambi	2	3	2	13		3
Sumatera Selatan	3		2		1	1
Bengkulu	20	5		8		7
Lampung	10	12	5	9	6	3
Kepulauan Bangka Belitung	5	1	7	51	3	49
Kepulauan Riau	4	3		56		30
DKI Jakarta						
Jawa Barat	32	38	23	49	6	9
Jawa Tengah	37	57	8	58	2	2
DI Yogyakarta	5	3	1	8		
Jawa Timur	25	63	11	134	1	2
Banten	21	41	8	48	4	8
Bali	8	45	2	62		
Nusa Tenggara Barat	23	75	66	73	13	13
Nusa Tenggara Timur	11	5	41	45	18	26
Kalimantan Barat	16	28	26	40	13	21
Kalimantan Tengah	3	3	3	6	4	5
Kalimantan Selatan	9	3	5	24	2	13
Kalimantan Timur	18	12	11	41	10	33
Kalimantan Utara	5	3	1	7	2	2
Sulawesi Utara	7	9	10	32	4	15
Sulawesi Tengah	26	21	52	111	19	50
Sulawesi Selatan	24	64	46	46	7	15
Sulawesi Tenggara	11	7	9	72	4	21
Gorontalo	2	2		15		
Sulawesi Barat	6	8	9	26	1	7
Maluku	29	12	8	124	6	84
Maluku Utara	20	14	15	104	10	76
Papua Barat	1	2		36		41
Papua	4		7	47	1	59
Indonesia	515	626	454	1 466	197	661

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.59

Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Kejadian/ Bencana Alam yang terjadi selama 3 Tahun Terakhir, 2014
Number of Coastal Village by Province and Type of Natural Disaster throughout The Past 3 Years, 2014

Provinsi Province	Jenis Bencana Alam / Types of Natural Disasters				
	Tanah Longsor <i>Land Slide</i>	Banjir <i>Flood</i>	Banjir Bandang <i>Flash Flood</i>	Gempa Bumi <i>Earthquake</i>	Tsunami <i>Tsunami</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18	190	10	135	0
Sumatera Utara	20	61	5	37	2
Sumatera Barat	14	46	14	10	0
Riau	2	61	1	0	0
Jambi	2	1	0	0	0
Sumatera Selatan	0	1	0	0	0
Bengkulu	8	23	2	12	0
Lampung	16	52	10	0	0
Kepulauan Bangka Belitung	3	29	4	0	0
Kepulauan Riau	10	30	0	0	0
DKI Jakarta	0	8	0	0	0
Jawa Barat	16	83	20	20	1
Jawa Tengah	14	100	12	10	0
DI Yogyakarta	1	9	0	0	0
Jawa Timur	40	81	7	39	0
Banten	6	63	5	10	0
Bali	11	27	3	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	101	21	25	0
Nusa Tenggara Timur	71	197	15	68	0
Kalimantan Barat	0	36	0	0	0
Kalimantan Tengah	0	9	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	21	2	0	0
Kalimantan Timur	8	34	1	0	0
Kalimantan Utara	11	9	6	8	0
Sulawesi Utara	118	149	33	38	0
Sulawesi Tengah	84	331	20	76	0
Sulawesi Selatan	18	165	17	8	0
Sulawesi Tenggara	34	162	6	71	0
Gorontalo	20	80	22	33	0
Sulawesi Barat	12	30	6	4	0
Maluku	100	170	27	42	1
Maluku Utara	44	216	27	87	0
Papua Barat	16	33	10	45	1
Papua	10	43	1	12	1
Indonesia	737	2 651	307	790	6

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.59*

Provinsi Province	Jenis Bencana Alam / Types of Natural Disasters				
	Gelombang Pasang Laut <i>Sea Tidal Wave</i>	Angin Puyuh/ Puting Beliung/ Topan <i>Waterspout</i>	Gunung Meletus <i>Volcanic Eruption</i>	Kebakaran Hutan <i>Forest Fire</i>	Kekeringan (Lahan) <i>Drought (Land)</i>
	(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	71	25	0	8	90
Sumatera Utara	35	26	1	4	20
Sumatera Barat	27	22	0	1	14
Riau	20	6	0	88	76
Jambi	0	3	0	0	0
Sumatera Selatan	1	1	0	0	1
Bengkulu	12	5	0	1	12
Lampung	13	11	0	0	12
Kepulauan Bangka Belitung	4	27	0	6	2
Kepulauan Riau	29	50	0	32	20
DKI Jakarta	7	3	0	0	0
Jawa Barat	35	34	0	2	28
Jawa Tengah	48	24	0	0	16
DI Yogyakarta	8	6	0	0	2
Jawa Timur	56	83	0	2	11
Banten	14	14	0	0	21
Bali	24	30	0	6	0
Nusa Tenggara Barat	39	56	0	0	34
Nusa Tenggara Timur	131	237	16	42	193
Kalimantan Barat	16	5	0	36	47
Kalimantan Tengah	11	7	0	0	2
Kalimantan Selatan	45	16	0	0	2
Kalimantan Timur	9	9	0	4	9
Kalimantan Utara	3	3	0	3	1
Sulawesi Utara	124	69	5	6	27
Sulawesi Tengah	111	52	0	9	38
Sulawesi Selatan	95	194	0	1	22
Sulawesi Tenggara	37	95	0	2	16
Gorontalo	28	26	0	0	19
Sulawesi Barat	36	52	0	1	8
Maluku	140	109	0	34	30
Maluku Utara	183	94	32	9	38
Papua Barat	30	17	0	0	0
Papua	42	11	0	0	1
Indonesia	1 484	1 422	54	297	812

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel 4.60 Kualitas Air Laut di Sekitar Pantai di Indonesia, 2015
 Table 4.60 Quality of Sea Water Around Port in Indonesia, 2015

Nama Kota/Pelabuhan City/Port	Keterangan Note	Parameter				
		pH	Suhu <i>Temperature</i> (°C)	Salinitas (0/00)	TSS (mg/l)	COD (mg/l)
			(4)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pidie Jaya, Aceh	Min / Min	8,46	25,9	8,30	51,00	-
	Maks / Max	8,79	26,5	20,50	62,00	-
Teluk Bayur	Min / Min	7,40	27,9	18,39	3,00	9,80
Sumatera Barat	Maks / Max	7,50	28,1	26,33	6,00	21,97
Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan	Min / Min	6,60	20,19	8,31
	Maks / Max	7,65			45,53	8 195,00
Pelabuhan Sri Bintan Pura Kepulauan Riau		7,84	26,5	19,00	7,00	-
Panjang, Bandar Lampung, Lampung	Min / Min	7,25	...	32,80	2,00	...
	Maks / Max	8,00		33,05	4,00	
Glagah, Yogyakarta	Min / Min	7,71	23,1	44,00	23,20	0,00
	Maks / Max	7,77	27,1	44,00	23,40	0,00
Banyuwangi Ketapang, Jawa Timur	Min / Min	7,91	25,5	2,42	7,20	...
	Maks / Max	8,18	27,7	34,60	14,80	
Selat Sunda, Kota Cilegon Banten	Min / Min	7,80	30,0	38,00	0,00	0,00
	Maks / Max	8,40	34,0	40,00	12,00	0,00
Padangbai, Bali		8,62	30,7	33,60	3,00	8,00
Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat	Min / Min	7,10	22,7	3,10	0,60	...
	Maks / Max	8,00	28,0	33,60	117,15	
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Min / Min	6,00	11,21
	Maks / Max				21,00	24,55
Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan	Min / Min	8,00	27,2	...	12,00	-
	Maks / Max	8,13	29,2		18,00	-
Gorontalo	Min / Min	8,30	25,0	32,00
	Maks / Max	8,50		39,00		
Teluk Ambon, Maluku	Min / Min	7,48	26,6	12,90	3,80	...
	Maks / Max	8,17	29,4	38,40	25,30	
Kaimana, Papua Barat	Min / Min	6,00	27,0	26,00
	Maks / Max	9,87	30,4	33,00		
Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat	Min / Min	7,83	29,0	30,00	29,00	...
	Maks / Max	7,96	31,0	34,00	31,00	
Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat	Min / Min	15,00	30,6	15,00
	Maks / Max	29,00	31,6	29,00		

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.60

Nama Kota/Pelabuhan City/Port	Keterangan Note	Parameter			
		BOD5 (mg/l)	DO (mg/l)	Nitrat (mg/l)	Fosfat (mg/l)
		(1)	(2)	(8)	(9)
Pidie Jaya, Aceh	Min / Min Maks / Max	-	-
Teluk Bayur	Min / Min	0,50	0,21
Sumatera Barat	Maks / Max			2,60	< 0,013
Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan	Min / Min Maks / Max	0,10 0,19	...
Pelabuhan Sri Bintan Pura		-	-
Kepulauan Riau					
Panjang, Bandar Lampung, Lampung	Min / Min Maks / Max	< 2 14,96	8,12 8,38	1,00 2,10	...
Glagah, Yogyakarta	Min / Min Maks / Max	0,00 0,00	0,00 0,03
Banyuwangi Ketapang, Jawa Timur	Min / Min Maks / Max	-	-	-	-
Selat Sunda, Kota Cilegon Banten	Min / Min Maks / Max	0,00 0,00	0,00 0,00
Padangbai, Bali		18,92	...	< 0,05	-
Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat	Min / Min Maks / Max	0,07 0,72	0,00 0,17
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Min / Min Maks / Max	4,50 19,82	...	<0,001	0,003 0,25
Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan	Min / Min Maks / Max	23,38 25,90	6,46 6,76	...	-
Gorontalo	Min / Min Maks / Max
Teluk Ambon, Maluku	Min / Min Maks / Max	< 0,008 1,75	...
Kaimana, Papua Barat	Min / Min Maks / Max	...	5,11 6,25
Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat	Min / Min Maks / Max	...	6,50 7,22
Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat	Min / Min Maks / Max	...	5,63 10,00

Sumber / Source : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Regional Environment Impact Control Agency

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.61

Jumlah dan Nama Speedboat Pengawas menurut Provinsi, 2015

Number and Name of Surveillance Speedboat by Province, 2015

Provinsi Province	Jumlah Total	Nama Kapal Name of Vessel
(1)	(2)	(3)
Aceh	3	Napoleon 08, Napoleon 32, Napoleon 40
Sumatera Utara	7	Dolphin 02 (tidak bisa dioperasikan), Dolphin 05, Dolphin 14, Napoleon 20, Napoleon 22, Napoleon 28, Napoleon 34
Sumatera Barat	1	Marlin 18
Riau	-	
Jambi	2	Dolphin 23, Napoleon 21
Sumatera Selatan	-	
Bengkulu	1	Dolphin 01
Lampung	2	Napoleon 14, Napoleon 29
Kepulauan Bangka Belitung	2	Dolphin 08, Napoleon 50
Kepulauan Riau	9	Dolphin 09 (tidak bisa dioperasikan), Dolphin 10 (tidak bisa dioperasikan), Dolphin 15, Dolphin 18, Dolphin 24, Napoleon 15, Napoleon 16, Napoleon 27, Napoleon 48
DKI Jakarta	3	Marlin 09, Dolphin 04, Napoleon 06
Jawa Barat	1	Dolphin 22
Jawa Tengah	4	Marlin 03, Dolphine 29, Napoleon 35, Napoleon 36
DI Yogyakarta	1	Napoleon 12
Jawa Timur	2	Dolphin 21, Dolphine 28
Banten	-	
Bali	5	Marlin 01, Marlin 02 (tidak bisa dioperasikan), Napoleon 07 (tidak bisa dioperasikan), Napoleon 19, Napoleon 38
Nusa Tenggara Barat	4	Marlin 06, Marlin 08, Napoleon 23, Napoleon 37
Nusa Tenggara Timur	2	Napoleon 05, Napoleon 24
Kalimantan Barat	5	Marlin 17, Marlin 20 (tidak bisa dioperasikan), Marlin 25 (tidak bisa dioperasikan), Napoleon 03, Napoleon 49
Kalimantan Selatan	2	Marlin 05 (tidak bisa dioperasikan), Marlin 07
Kalimantan Timur	2	Marlin 21, Dolphin 17
Kalimantan Tengah	-	
Kalimantan Utara	1	Napoleon 47
Sulawesi Utara	4	Dolphin 03, Albacore 01, Napoleon 17, Napoleon 46
Sulawesi Tengah	3	Marlin 22, Napoleon 09, Napoleon 39
Sulawesi Selatan	4	Marlin 10, Marlin 16 (tidak bisa dioperasikan), Napoleon 11 (tidak bisa dioperasikan), Napoleon 30
Sulawesi Tenggara	3	Marlin 04, Dolphin 19, Lumba-lumba
Gorontalo	3	Dolphin 26, Tenggiri, Napoleon 31
Sulawesi Barat	1	Napoleon 04
Maluku	7	Dolphin 06 (tidak bisa dioperasikan), Dolphin 12 (tidak bisa dioperasikan), Dolphin 27 (tidak bisa dioperasikan), Albacore 02, Napoleon 26, Napoleon 44, Napoleon 45
Maluku Utara	3	Marlin 19, Dolphin 11, Napoleon 10
Papua Barat	7	Marlin 11, Marlin 12, Marlin 13, Dolphin 25 (tidak bisa dioperasikan), Napoleon 13, Napoleon 18, Napoleon 41
Papua	15	Marlin 14 (tidak bisa dioperasikan), Marlin 15, Marlin 23, Marlin 24, Dolphin 07, Dolphin 13 (tidak bisa dioperasikan), Dolphin 16, Dolphin 20, Napoleon 01, Napoleon 02, Napoleon 25, Napoleon 33, Napoleon 42, Napoleon 43, Napoleon 51

INDONESIA

109

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.62

Jumlah Awak Kapal Pengawas, 2011 - 2015
Number of Surveillance Vessel's Crews, 2011 - 2015
(Orang / People)

Nama Kapal <i>Name of Vessel</i>	2011	2012	2013	2014	2015 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KP. Barracuda 001	9	10	9	7	7
KP. Barracuda 002	9	8	8	7	7
KP. Hiu 001	13	13	12	10	13
KP. Hiu 002	12	12	11	10	14
KP. Hiu 003	13	13	12	9	12
KP. Hiu 004	13	12	12	11	13
KP. Hiu 005	13	11	11	9	12
KP. Hiu 006	13	13	12	9	12
KP. Hiu 007	13	13	12	9	12
KP. Hiu 008	12	12	11	9	12
KP. Hiu 009	12	13	12	9	11
KP. Hiu 010	13	13	13	10	13
KP. Hiu 011	-	-	-	10	13
KP. Hiu Macan 001	19	19	20	15	20
KP. Hiu Macan 002	18	18	15	12	18
KP. Hiu Macan 003	17	17	16	12	18
KP. Hiu Macan 004	18	18	16	13	18
KP. Hiu Macan 005	20	20	19	15	20
KP. Hiu Macan 006	19	18	17	14	19
KP. Todak 001	9	9	8	6	6
KP. Todak 002	9	9	8	7	7
KP. Takalamungan	11	11	11	8	8
KP. Padaido	10	10	10	8	8
KP. Hiu Macan Tutul 001	20	18	17	15	19
KP. Hiu Macan Tutul 002	-	-	16	15	21
KP. Akar Bahar 001	7	7	8	5	5
KP. Paus 001	12	12	12	14	16
JUMLAH / TOTAL	334	329	328	278	354

Catatan / Note : ¹ Data sampai dengan Desember 2015 / Data is up to December 2015Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.63

Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Provinsi, 2011 - 2015
Number of Fisheries Violation by Province, 2011 - 2015
(Kasus / Cases)

Provinsi Province	2011	2012	2013 ^r	2014 ^r	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	-	-	-	-	3
Sumatera Utara	10	11	13	3	8
Sumatera Barat	-	-	-	2	-
Riau	9	9	-	-	17
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	1
Lampung	-	-	1	2	6
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	23	34	27	11	11
DKI Jakarta	3	2	1	5	12
Jawa Barat	3	-	-	2	-
Jawa Tengah	2	2	2	-	1
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	3	2
Banten	-	-	-	-	1
Bali	-	-	-	1	2
Nusa Tenggara Barat	-	-	2	2	3
Nusa Tenggara Timur	-	-	1	-	-
Kalimantan Barat	16	25	4	7	50
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	1	6
Kalimantan Timur	-	6	-	-	1
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	13	20	23	4	36
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	3
Sulawesi Selatan	-	1	2	-	2
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	1	5	2	9	4
Maluku Utara	7	8	3	1	4
Papua Barat	13	2	-	5	6
Papua	-	-	-	-	5
Indonesia	100	125	81	58	184

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel 4.64 Jumlah Tindak Pidana Perikanan menurut Jenis Tindak Pidana, 2011 - 2015
Table 4.64 Number of Fisheries Violation by Type of Violation, 2011 - 2015
(Kasus / Cases)

Provinsi Province	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanpa Ijin / Without permission	17	15	18	10	60
Tanpa ijin dan alat tangkap terlarang / Without permission and Prohibited fishing gear	39	55	30	9	32
Dokumen tidak lengkap / Incomplete documents	13	2	-	4	31
Alat Tangkap Terlarang / Prohibited fishing gear	-	15	-	6	22
Fishing ground	5	32	5	4	1
Alat Tangkap tidak sesuai ijin (SIP) / Fishing gear that not allowable	2	-	-	-	4
Dokumen tidak lengkap dan Fishing Ground / Incomplete documents and Fishing Ground	5	-	-	-	-
Tidak ada transmitter / No transmitter	-	-	-	-	-
Fishing ground dan alat tangkap terlarang / Fishing ground and Prohibited fishing gear	2	-	-	-	-
Pengangkutan ikan / transhipment	-	-	-	-	-
Menampung ikan tidak sesuai SIKPI / accommodate the fish does not fit SIKPI	1	-	-	-	-
Tanpa keterangan jenis tindak pidana perikanan / Without information types fisheries violation	2	-	-	-	-
Pencurian terumbu karang / coral reefs theft	-	-	-	-	-
Menggunakan Bahan Kimia/biologis/peledak / Using Chemical/biological/explosive	-	-	2	-	-
Dokumen tidak lengkap dan Tidak ada transmpter / Incomplete documents and No transmitter	-	-	-	-	-
Bahan Peledak/bom / explosive	-	-	-	4	-
Tanpa izin dan dokumen palsu / Without permition and False documents	1	-	-	-	-
Tidak memiliki SLO / No SLO	1	-	-	-	21
Penangkapan ikan secara group tidak dalam satu kesatuan armada / Fishing group is not in a whole fleet	-	-	-	8	4
Bongkar Muat tidak sesuai SIP / Loading that not allowable	1	-	-	-	-
ABK/Nakhoda Asing Tidak Sesuai SIP (Surat Izin Penangkapan Ikan) / Crew/ foreign skipper not appropriate according to the with fishing license	1	2	-	-	-
Pengangkatan BMKT tanpa izin / Assignment BMKT without permission	0	0	-	3	-
Illegal Transhipmen ke Negara lain / Illegal Transhipment to other countries	0	0	-	1	1

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.64

Provinsi Province	2011	-	2012	-	2013	-	2014	-	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
Melakukan Perdagangan Ikan/Ekspor Ikan dilindungi atau ukuran ikan yang dilarang UU / <i>Fish trade activities/ Fish export protected or fish size prohibited by laws</i>	0	0	-	7	7				
Penangkapan ikan di daerah Grey Area/alat tangkap terlarang/dikembalikan ke negara asal terkait MoU / <i>Fishing in grey area/ prohibited fishing gear/ returned to native country related agreements</i>	-	4	2	0	1				
JUMLAH / TOTAL	90		125		57		56		184

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.65

Hasil Operasi Kapal Pengawas, 2011 - 2015
Joint Operation of Surveillance Vessels, 2011 - 2015
(buah / units)

Nama Kapal <i>Name of Vessel</i>	2011		2012		2013		2014		2015 ¹	
	KII (2)	KIA (3)	KII (4)	KIA (5)	KII (6)	KIA (7)	KII (8)	KIA (9)	KII (10)	KIA (11)
KP. Hiu Macan 001	-	24	-	32	-	10	-	7	-	24
KP. Hiu Macan 002	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1
KP. Hiu Macan 003	-	-	1	1	-	5	8	-	6	-
KP. Hiu Macan 004	9	5	-	2	1	-	1	-	3	-
KP. Hiu Macan 005	-	4	2	1	-	3	-	-	-	10
KP. Hiu Macan 006	2	1	-	3	1	2	2	-	6	-
KP. Hiu 001	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-
KP. Hiu 002	-	-	16	4	4	-	-	-	2	-
KP. Hiu 003	-	7	-	4	-	6	-	-	3	-
KP. Hiu 004	-	11	7	6	2	1	-	1	2	-
KP. Hiu 005	-	-	1	6	5	-	1	-	-	-
KP. Hiu 006	-	-	2	1	-	2	-	-	2	-
KP. Hiu 007	1	7	-	1	-	2	-	-	-	-
KP. Hiu 008	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1
KP. Hiu 009	-	3	1	5	-	5	1	1	-	1
KP. Hiu 010	-	10	4	3	4	1	2	-	-	2
KP. Hiu 011	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
KP. Barracuda 001	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
KP. Barracuda 002	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
KP. Todak 001	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
KP. Todak 002	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-
KP. Takalamongan	6	-	4	-	-	-	3	-	5	-
KP. Padaido	-	1	-	-	3	-	-	-	1	1
KP. Hiu Macan Tutul 001	4	-	-	-	-	-	3	-	4	4
KP. Hiu Macan Tutul 002	-	-	-	-	1	-	-	6	1	9
KP. Akar Bahar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH / TOTAL	30	76	42	70	24	44	22	16	42	53

Catatan / Note : ¹ Data sampai dengan Desember 2015 / Data is up to December 2015KII : Kapal Ikan Indonesia / *Indonesia Fishing Vessels*KIA : Kapal Ikan Asing / *Foreign Fishing Vessels*Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.66

Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
menurut Provinsi dan Nama Sekolah, 2011 - 2015
*Number of Fishery School Alumni in Ministry of Marine Affairs and Fisheries by
Province and Name of School, 2011 - 2015*

Provinsi Province	Nama Sekolah Name of School	Tahun Lulus / Graduation Year				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Tinggi Perikanan (STP)		331	342	334	320	386
DKI Jakarta	Sekolah Tinggi Perikanan	331	342	334	320	386
Politeknik Kelautan Perikanan		264	246	232	310	341
Jawa Timur	Politeknik KP Sidoarjo	97	80	97	121	137
Sulawesi Utara	Politeknik KP Bitung	90	88	64	103	117
Papua Barat	Politeknik KP Sorong	77	78	71	86	87
Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM)		713	790	829	1 035	1 042
Aceh	SUPM Lodong	66	86	96	124	102
Sumatera Barat	SUPM Pariaman	81	76	97	127	104
Lampung	SUPM Kota Agung	72	73	79	123	121
Jawa Tengah	SUPM Tegal	129	130	144	175	147
Nusa Tenggara Timur	SUPM Tegal di Kupang	44	41	36	32	57
Kalimantan Barat	SUPM Pontianak	79	97	82	117	138
Sulawesi Selatan	SUPM Bone	82	99	108	132	143
Maluku	SUPM Waehleru	74	92	87	115	117
Papua Barat	SUPM Sorong	86	96	100	90	113
INDONESIA		1 308	1 378	1 395	1 665	1 769

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Tabel
Table

4.67

Jumlah Penyuluhan Perikanan menurut Provinsi, 2011 - 2015
Number of Fishery Information Agent by Province, 2011 - 2015
 (Orang / Person)

Provinsi Province	2011	2012	2013	2014 ^r	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	189	315	431	431	451
Sumatera Utara	166	245	427	478	489
Sumatera Barat	163	242	331	558	512
Riau	111	198	268	223	328
Jambi	108	186	553	390	489
Sumatera Selatan	250	286	273	602	624
Bengkulu	115	243	152	302	296
Lampung	147	145	229	364	368
Kepulauan Bangka Belitung	75	62	403	121	170
Kepulauan Riau	61	74	387	213	294
DKI Jakarta	50	91	113	200	171
Jawa Barat	466	748	725	801	975
Jawa Tengah	544	901	918	1056	1091
DI Yogyakarta	97	155	347	343	321
Jawa Timur	484	720	747	952	1000
Banten	121	166	181	205	211
Bali	198	186	383	367	356
Nusa Tenggara Barat	198	311	418	424	426
Nusa Tenggara Timur	146	235	403	488	501
Kalimantan Barat	159	214	355	380	402
Kalimantan Tengah	158	162	180	241	262
Kalimantan Selatan	217	336	400	496	503
Kalimantan Timur	144	165	194	150	165
Kalimantan Utara	-	-	-	83	83
Sulawesi Utara	190	258	291	274	312
Sulawesi Tengah	126	217	323	206	224
Sulawesi Selatan	360	522	723	723	744
Sulawesi Tenggara	196	284	427	456	491
Gorontalo	86	140	275	259	269
Sulawesi Barat	91	106	140	165	179
Maluku	148	203	254	279	398
Maluku Utara	96	182	181	294	289
Papua Barat	68	138	167	154	153
Papua	119	162	214	232	268
Indonesia	5 847	8 598	11 813	12 009	13 815

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figuresSumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

**Tabel
Table** 4.68 Jumlah Desa Pesisir yang mempunyai Fasilitas Pendidikan menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014
Number of Coastal Villages Having Education Facility by Province and Type of Education Level, 2014

Provinsi <i>Province</i>	TK/RA/BA <i>Kindergarten</i>		SD/MI <i>Primary School(s)</i>		SMP/MTs <i>Junior High School(s)</i>	
	Negeri <i>Goverment</i>	Swasta <i>Private</i>	Negeri <i>Goverment</i>	Swasta <i>Private</i>	Negeri <i>Goverment</i>	Swasta <i>Private</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	89	276	480	44	143	33
Sumatera Utara	24	145	354	73	105	75
Sumatera Barat	13	103	122	33	62	25
Riau	16	185	258	73	117	105
Jambi	4	13	29	13	12	7
Sumatera Selatan	1	6	26	8	11	5
Bengkulu	16	92	128	20	49	15
Lampung	10	115	203	75	56	59
Kepulauan Bangka Belitung	50	69	162	18	74	16
Kepulauan Riau	54	154	334	51	163	58
DKI Jakarta	0	16	15	10	14	8
Jawa Barat	15	183	227	110	96	96
Jawa Tengah	6	335	339	150	75	120
DI Yogyakarta	2	33	33	14	14	12
Jawa Timur	14	647	644	442	159	362
Banten	0	105	134	60	52	76
Bali	16	161	172	36	71	38
Nusa Tenggara Barat	43	223	297	132	178	129
Nusa Tenggara Timur	97	461	729	507	357	144
Kalimantan Barat	27	65	159	55	95	51
Kalimantan Tengah	2	38	44	12	27	10
Kalimantan Selatan	12	138	150	25	60	24
Kalimantan Timur	24	145	171	40	88	50
Kalimantan Utara	7	35	50	18	26	12
Sulawesi Utara	91	470	467	289	204	86
Sulawesi Tengah	74	679	950	150	354	159
Sulawesi Selatan	74	407	501	122	234	125
Sulawesi Tenggara	59	594	767	65	336	77
Gorontalo	50	102	175	20	83	16
Sulawesi Barat	26	126	147	41	71	54
Maluku	126	304	592	433	359	167
Maluku Utara	113	260	769	191	287	161
Papua Barat	35	113	268	160	87	31
Papua	30	75	233	244	107	34
Indonesia	1 220	6 873	10 129	3 734	4 226	2 440

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.68

Provinsi Province	SMU/MA		SMK		Akademi/Perguruan Tinggi Academy/ College(s)	
	Senior High School(s)		Vocational High School(s)		Negeri Goverment	Swasta Private
	Negeri Goverment	Swasta Private	Negeri Goverment	Swasta Private	Negeri Goverment	Swasta Private
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	73	27	29	2	6	6
Sumatera Utara	24	36	29	20	0	8
Sumatera Barat	31	16	11	10	3	11
Riau	45	49	14	7	2	8
Jambi	3	3	3	1	0	0
Sumatera Selatan	2	3	0	0	0	0
Bengkulu	18	13	14	4	4	3
Lampung	18	28	7	15	0	3
Kepulauan Bangka Belitung	19	10	11	4	1	3
Kepulauan Riau	64	34	18	19	11	16
DKI Jakarta	6	7	4	6	1	6
Jawa Barat	24	31	17	35	1	8
Jawa Tengah	16	53	8	34	2	5
DI Yogyakarta	1	1	5	5	0	0
Jawa Timur	42	208	29	76	4	39
Banten	19	36	7	16	2	6
Bali	29	32	14	19	8	9
Nusa Tenggara Barat	41	69	37	24	1	13
Nusa Tenggara Timur	92	68	58	37	2	21
Kalimantan Barat	27	23	15	7	1	3
Kalimantan Tengah	4	4	5	2	0	1
Kalimantan Selatan	18	11	6	5	0	3
Kalimantan Timur	30	26	13	23	2	11
Kalimantan Utara	5	6	4	5	2	1
Sulawesi Utara	42	48	35	18	4	13
Sulawesi Tengah	97	90	56	33	6	11
Sulawesi Selatan	71	78	43	21	4	27
Sulawesi Tenggara	104	62	41	23	5	19
Gorontalo	16	10	11	3	0	1
Sulawesi Barat	26	26	22	12	2	12
Maluku	150	80	63	18	18	20
Maluku Utara	111	84	48	34	6	10
Papua Barat	36	16	12	5	7	11
Papua	34	22	24	5	4	11
Indonesia	1 338	1 310	713	548	109	319

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.68*

Provinsi Province	Sekolah Luar Biasa (SLB) <i>Special School(s)</i>		Pondok Pesantren	Madrasah Diniyah	Seminari/ Sejenisnya <i>Seminary (ies)</i>
	Negeri <i>Goverment</i>	Swasta <i>Private</i>			
	(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	3	3	151	200	9
Sumatera Utara	0	0	8	79	1
Sumatera Barat	4	5	9	23	0
Riau	3	1	22	194	0
Jambi	0	0	4	9	1
Sumatera Selatan	0	0	1	0	0
Bengkulu	1	2	8	34	4
Lampung	0	0	34	12	0
Kepulauan Bangka Belitung	4	0	9	88	1
Kepulauan Riau	3	4	26	86	4
DKI Jakarta	0	0	3	16	0
Jawa Barat	1	1	101	185	1
Jawa Tengah	0	3	123	235	5
DI Yogyakarta	0	1	6	2	0
Jawa Timur	12	13	325	481	1
Banten	1	3	89	118	1
Bali	3	1	15	11	3
Nusa Tenggara Barat	2	5	75	34	1
Nusa Tenggara Timur	9	1	5	13	5
Kalimantan Barat	1	0	29	23	0
Kalimantan Tengah	1	0	7	14	0
Kalimantan Selatan	2	0	20	39	1
Kalimantan Timur	5	2	23	20	1
Kalimantan Utara	1	0	8	1	0
Sulawesi Utara	2	2	5	15	2
Sulawesi Tengah	6	3	45	169	5
Sulawesi Selatan	8	6	46	49	6
Sulawesi Tenggara	4	6	20	49	2
Gorontalo	3	0	4	17	0
Sulawesi Barat	5	3	11	19	0
Maluku	6	6	19	54	9
Maluku Utara	4	2	12	15	1
Papua Barat	1	0	5	7	2
Papua	4	1	10	2	1
Indonesia	99	74	1 278	2 313	67

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.69

Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis
Sarana Kesehatan, 2014*Number of Coastal Villages Having Health Facility by Province and Type of Health Facility,
2014*

Provinsi Province	Rumah Sakit Hospital(s)	Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital(s)	Rumah Sakit dengan Rawat Inap <i>Public Health Center(s) with Inpatient</i>	Rumah Sakit Tanpa Rawat Inap <i>Public Health Center(s) without Inpatient</i>	Puskesmas Pembantu Subsidiary of Health Center(s)	Poliklinik/ Balai Pengobatan <i>Polyclinic(s)/ Medical Center(s)</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10	10	26	35	221	26
Sumatera Utara	12	13	23	29	134	54
Sumatera Barat	5	8	16	16	64	8
Riau	5	5	16	16	118	8
Jambi			4	3	20	1
Sumatera Selatan			1	1	7	1
Bengkulu	4	2	9	15	53	5
Lampung		9	14	13	71	29
Kepulauan Bangka Belitung	8	26	12	16	75	15
Kepulauan Riau	17	11	26	40	199	44
DKI Jakarta	6	6	7	10		10
Jawa Barat	3	6	17	29	86	34
Jawa Tengah	9	10	15	21	85	45
DI Yogyakarta		3	1	4	26	8
Jawa Timur	15	13	78	33	212	58
Banten		4	8	11	26	34
Bali	9	11	14	28	107	22
Nusa Tenggara Barat	4		40	6	170	12
Nusa Tenggara Timur	14	9	103	53	357	30
Kalimantan Barat	1		14	25	78	1
Kalimantan Tengah	1	2	3	5	37	
Kalimantan Selatan	2	9	3	23	39	11
Kalimantan Timur	12	1	24	22	123	27
Kalimantan Utara	2		8	6	24	4
Sulawesi Utara	9	2	52	45	224	8
Sulawesi Tengah	11	6	60	45	344	19
Sulawesi Selatan	12	8	70	29	283	25
Sulawesi Tenggara	9	3	55	84	217	12
Gorontalo	3		6	19	52	3
Sulawesi Barat	5	1	20	12	51	6
Maluku	24	6	65	105	377	28
Maluku Utara	11	1	35	75	222	7
Papua Barat	9	2	42	39	207	19
Papua	10	1	36	48	216	19
Indonesia	242	188	923	961	4 525	633

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.69*

Provinsi <i>Province</i>	Praktek Dokter <i>Physician</i> (s)	Tempat Praktek Bidan <i>Mildwife</i> (s)	Poskesdes <i>Village</i> <i>Health</i> <i>Post(s)</i>	Polindes <i>Village</i> <i>Maternity</i> <i>Post(s)</i>	Posyandu <i>Integrated</i> <i>Health</i> <i>Post(s)</i>	Apotek <i>Pharmacy</i> (ies)	Toko Khusus Obat/Jamu <i>Traditional</i> <i>Drugstore</i> (s)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	51	123	188	128	728	35	38
Sumatera Utara	38	152	108	60	394	30	37
Sumatera Barat	38	75	65	31	127	22	35
Riau	34	77	94	60	270	22	30
Jambi	3	15	8	9	30	-	4
Sumatera Selatan	1	17	20	7	28	-	2
Bengkulu	30	74	24	18	184	14	11
Lampung	34	167	102	6	238	15	21
Kepulauan Bangka Belitung	38	68	114	40	166	21	25
Kepulauan Riau	81	99	95	158	359	55	60
DKI Jakarta	11	10	2		16	8	11
Jawa Barat	56	210	92	47	227	34	51
Jawa Tengah	96	294	210	44	356	64	54
DI Yogyakarta	12	20	14	4	33	3	2
Jawa Timur	180	595	413	451	675	93	220
Banten	40	104	36	15	135	21	20
Bali	105	152	129	7	175	45	33
Nusa Tenggara Barat	53	87	130	90	299	28	18
Nusa Tenggara Timur	67	43	166	300	1000	47	12
Kalimantan Barat	27	63	101	68	159	9	20
Kalimantan Tengah	5	20	15	9	43	4	4
Kalimantan Selatan	16	41	53	48	162	9	10
Kalimantan Timur	44	61	18	39	172	37	40
Kalimantan Utara	16	18	12	3	54	13	15
Sulawesi Utara	83	63	166	48	770	38	21
Sulawesi Tengah	74	246	455	173	1001	69	63
Sulawesi Selatan	85	104	224	38	529	61	49
Sulawesi Tenggara	57	57	184	150	922	48	45
Gorontalo	9	7	67	38	203	6	5
Sulawesi Barat	25	36	82	16	152	14	16
Maluku	51	43	204	44	808	42	31
Maluku Utara	42	61	86	231	921	43	10
Papua Barat	18	9	15	77	468	27	17
Papua	23	12	15	38	539	24	5
Indonesia	1 543	3 223	3 707	2 495	12 343	1 001	1 035

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.70

Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Perdagangan dan Hotel menurut Provinsi, 2014
Number of Coastal Villages Having Trade Facility and Hotel by Province, 2014

Provinsi Province	Mini Market <i>Mini Market(s)</i>	Restoran/ Rumah Makan <i>Restaurant(s)/ Food Stall(s)</i>	Kedai Makanan Minuman <i>Food & Beverage Store(s)</i>	Warung/ Toko/Warung Kelontongan <i>Grocery Store(s)</i>	Hotel <i>Hotel(s)</i>	Penginapan <i>Inn(s)/ Motel(s)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	38	20	542	644	18	34
Sumatera Utara	19	28	213	334	18	28
Sumatera Barat	34	44	108	122	14	26
Riau	23	20	151	254	9	28
Jambi	0	0	19	30	0	0
Sumatera Selatan	1	2	20	29	0	0
Bengkulu	20	42	118	184	15	16
Lampung	40	49	153	239	16	21
Kepulauan Bangka Belitung	20	39	150	161	19	16
Kepulauan Riau	84	88	254	348	38	52
DKI Jakarta	10	8	16	16	9	9
Jawa Barat	80	49	204	222	23	34
Jawa Tengah	78	65	335	350	37	16
DI Yogyakarta	7	5	31	33	3	8
Jawa Timur	167	87	627	660	42	40
Banten	46	34	108	129	29	35
Bali	99	87	173	172	79	108
Nusa Tenggara Barat	28	46	186	285	37	32
Nusa Tenggara Timur	36	34	162	794	49	49
Kalimantan Barat	27	21	116	160	8	15
Kalimantan Tengah	1	0	26	40	2	4
Kalimantan Selatan	3	13	121	164	10	11
Kalimantan Timur	40	25	140	166	28	42
Kalimantan Utara	18	8	42	54	11	12
Sulawesi Utara	53	56	411	724	40	56
Sulawesi Tengah	40	70	573	937	34	112
Sulawesi Selatan	80	41	321	515	28	53
Sulawesi Tenggara	35	35	278	909	47	60
Gorontalo	4	20	159	189	3	9
Sulawesi Barat	8	22	108	139	12	21
Maluku	35	34	151	736	25	71
Maluku Utara	42	36	149	849	15	58
Papua Barat	24	9	68	430	24	31
Papua	27	21	75	427	24	18
Indonesia	1 267	1 158	6 308	11 445	766	1 125

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.71 Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Koperasi menurut Provinsi, 2014
Number of Coastal Villages Having Cooperative Facility by Province, 2014

Provinsi Province	Koperasi Unit Desa <i>Village Cooperative Unit(s)</i>	Koperasi Industri	Koperasi Simpan Pinjam <i>Saving and Loan Cooperative(s)</i>	Koperasi Lainnya <i>Others Cooperative(s)</i>			
		Kecil dan Kerajinan Rakyat <i>Small Industry and Citizen Handicraft Cooperative(s)</i>					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
Aceh	31	4	61	35			
Sumatera Utara	22	2	47	22			
Sumatera Barat	19	3	49	30			
Riau	37	4	40	44			
Jambi	2	0	3	0			
Sumatera Selatan	7	0	3	0			
Bengkulu	7	2	38	29			
Lampung	13	2	19	21			
Kepulauan Bangka Belitung	23	3	32	44			
Kepulauan Riau	47	6	73	64			
DKI Jakarta	1	0	12	11			
Jawa Barat	45	6	54	37			
Jawa Tengah	36	6	92	71			
DI Yogyakarta	5	0	15	8			
Jawa Timur	57	16	234	347			
Banten	8	2	23	15			
Bali	34	1	131	47			
Nusa Tenggara Barat	25	3	70	39			
Nusa Tenggara Timur	27	5	238	48			
Kalimantan Barat	24	3	16	27			
Kalimantan Tengah	8	1	3	0			
Kalimantan Selatan	17	0	12	21			
Kalimantan Timur	36	8	48	35			
Kalimantan Utara	10	1	15	11			
Sulawesi Utara	21	1	98	28			
Sulawesi Tengah	39	5	114	59			
Sulawesi Selatan	68	4	74	84			
Sulawesi Tenggara	49	3	96	63			
Gorontalo	3	0	37	13			
Sulawesi Barat	12	1	28	8			
Maluku	75	10	89	33			
Maluku Utara	39	5	74	32			
Papua Barat	20	1	27	14			
Papua	15	5	16	10			
Indonesia	882	113	1 981	1 350			

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.72

Jumlah Desa Pesisir yang menerima Dana Modal Usaha untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Selama 3 tahun terakhir menurut Provinsi dan Sumber Dana, 2014
Number of Coastal Villages that Receive Capital Fund through the Community Empowerment Program during 3 years by Province and Type of Funding Sources, 2014

Provinsi Province	Jenis Program Pemberdayaan Masyarakat / Community Empowerment Program					
	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur (sarana/prasarana) Lingkungan ¹ <i>Development/ Improvement of Environment Infrastructures and Facilities</i>			Peningkatan Kapasitas Perekonomian ² <i>Enhancement of Economy Capacity</i>		
	PNPM <i>PNPM</i>	Non-PNPM <i>Non-PNPM</i>	PNPM dan Non-PNPM <i>PNPM and Non-PNPM</i>	PNPM <i>PNPM</i>	Non-PNPM <i>Non-PNPM</i>	PNPM dan Non-PNPM <i>PNPM and Non-PNPM</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	453	185	200	516	441	260
Sumatera Utara	132	48	19	303	261	82
Sumatera Barat	88	61	22	101	121	79
Riau	84	224	36	143	284	171
Jambi	17	20	7	13	30	15
Sumatera Selatan	15	5	3	17	24	12
Bengkulu	109	42	19	173	113	36
Lampung	117	44	10	226	175	74
Kepulauan Bangka Belitung	66	109	21	151	195	99
Kepulauan Riau	267	213	40	229	421	194
DKI Jakarta	18	6		22	22	5
Jawa Barat	192	121	25	199	258	184
Jawa Tengah	296	231	71	250	412	295
DI Yogyakarta	16	43	16	33	27	46
Jawa Timur	411	367	130	581	560	495
Banten	123	61	20	133	145	96
Bali	112	130	38	162	218	91
Nusa Tenggara Barat	215	120	54	447	196	120
Nusa Tenggara Timur	714	572	244	1 059	868	499
Kalimantan Barat	137	34	12	119	191	96
Kalimantan Tengah	21	21	6	36	51	21
Kalimantan Selatan	116	62	16	64	225	124
Kalimantan Timur	119	66	30	90	216	126
Kalimantan Utara	37	24	3	37	53	40
Sulawesi Utara	619	107	26	782	500	213
Sulawesi Tengah	834	260	50	806	995	268
Sulawesi Selatan	432	240	80	413	480	255
Sulawesi Tenggara	788	248	65	918	500	290
Gorontalo	171	72	4	169	192	79
Sulawesi Barat	108	29	4	168	110	55
Maluku	305	107	12	1 020	483	194
Maluku Utara	267	60	16	614	416	181
Papua Barat	74	38	7	633	242	180
Papua	145	63	27	690	187	329
Indonesia	7 618	4 033	1 333	11 317	9 612	5 304

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.72*

Provinsi Province	Jenis Program Pemberdayaan Masyarakat / <i>Community Empowerment Program</i>			
	Peningkatan Kapasitas Sosial Kemasyarakatan (SDM) ³ <i>Enhancement of Social Community Capacity</i>			
	PNPM <i>PNPM</i>	Non-PNPM <i>Non-PNPM</i>	PNPM dan Non-PNPM <i>PNPM dan Non-PNPM</i>	
(1)	(8)	(9)	(10)	
Aceh	65	50	13	
Sumatera Utara	4	24	3	
Sumatera Barat	18	49	8	
Riau	10	36	3	
Jambi		1	1	
Sumatera Selatan	1			
Bengkulu	11	20	4	
Lampung	17	27	6	
Kepulauan Bangka Belitung	13	68	15	
Kepulauan Riau	37	92	26	
DKI Jakarta	3	4		
Jawa Barat	35	73	9	
Jawa Tengah	122	149	41	
DI Yogyakarta	7	36	10	
Jawa Timur	95	213	40	
Banten	11	40	15	
Bali	46	71	12	
Nusa Tenggara Barat	64	88	29	
Nusa Tenggara Timur	195	210	58	
Kalimantan Barat	13	36	4	
Kalimantan Tengah	6	18		
Kalimantan Selatan	12	26	5	
Kalimantan Timur	20	90	22	
Kalimantan Utara	10	11	8	
Sulawesi Utara	67	71	18	
Sulawesi Tengah	83	232	11	
Sulawesi Selatan	58	140	34	
Sulawesi Tenggara	91	115	16	
Gorontalo	18	36	2	
Sulawesi Barat	15	19	4	
Maluku	38	69	5	
Maluku Utara	42	57	12	
Papua Barat	25	24	11	
Papua	55	64	40	
Indonesia	1 307	2 259	485	

Catatan / Note : ¹ Terdiri dari Transportasi (jalan, jembatan, dll), Pendidikan (gedung sekolah, sarana pendukung pendidikan), Pemukiman dan kesehatan (sanitasi, air bersih, penerangan, posyandu), dan Perekonomian (irigasi, pasar, TPI/PPI, sarana perdagangan, sarana pendukung perekonomian lainnya) / *Consists of Transportation (roads, bridges, etc.), education (school buildings, education support), Settlement and health (sanitation, clean water, lighting, Integrated Health Post), and Economy (irrigation, markets, fish auction, trade facilities, other economy support facilities)*

² Terdiri dari Dana bergulir/ simpan pinjam untuk modal usaha pertanian dan non pertanian, serta dana hibah untuk usaha produktif (budidaya dan non budidaya) / *Consists of revolving fund/ savings and capital fund for agricultural and non agricultural, as well as Productive Business grants (farming and non farming)*

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.73

Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Jumlah Petambak Garam menurut Provinsi, 2011-2015
Land Area, Production Number, and Labors Number of Salt by Province, 2011-2015

Provinsi Province	Luas Lahan <i>Land Area</i> (Ha)				
	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-	67,50	203,01	139,64	123,45
Sumatera Utara	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-
Riau	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	-	-	-	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3 499,81	5 570,66	7 135,96	6 744,36	6 733,00
Jawa Tengah	6 138,36	6 481,68	7 075,63	6 585,37	6 608,78
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	10 313,28	10 354,60	10 522,71	9 756,96	8 525,88
Banten	-	-	-	-	-
Bali	114,06	157,96	160,42	184,33	43,87
Nusa Tenggara Barat	2 247,33	2 186,55	2 280,87	2 562,04	2 335,71
Nusa Tenggara Timur	212,97	336,09	286,52	323,70	333,60
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	7,00	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	18,73	18,00	18,00	18,00	-
Sulawesi Selatan	1 513,40	1 802,40	1 647,03	1 583,19	974,64
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Gorontalo	75,00	-	-	-	87,20
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	24 139,94	26 975,44	29 330,15	27 897,59	25 766,13

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 4.73

Provinsi <i>Province</i>	Jumlah Produksi <i>Production Number</i> (Ton)				
	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	-	3 621,29	6 014,41	8 093,90	9 135,84
Sumatera Utara	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-
Riau	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	-	-	-	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	228 716,60	535 249,29	221 430,12	629 403,18	760 897,25
Jawa Tengah	449 835,50	645 728,28	278 131,88	633 860,13	850 556,80
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	716 097,93	939 814,94	490 923,56	921 159,42	856 764,96
Banten	-	-	-	-	-
Bali	3 339,32	6 775,40	4 308,32	7 674,11	10 547,62
Nusa Tenggara Barat	135 789,49	230 095,96	118 462,44	198 210,17	175 196,87
Nusa Tenggara Timur	5 962,38	11 857,85	3 726,39	7 205,71	7 883,52
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	11,20	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	1 338,20	1 350,00	1 251,30	1 123,58	-
Sulawesi Selatan	80 820,29	99 223,09	39 359,13	96 160,99	97 117,26
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Gorontalo	1 875,00	-	-	-	709,83
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	1 623 785,91	2 473 716,10	1 163 607,55	2 502 891,19	2 768 809,95

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.73

Provinsi Province	Petambak Labors (Orang / Person)				
	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	-	241	715	885	1 080
Sumatera Utara	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-
Riau	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	-	-	-	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1 348	6 658	6 531	7 042	1 840
Jawa Tengah	3 539	9 178	3 515	1 629	2 280
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	4 544	8 886	10 075	3 688	6 900
Banten	-	-	-	-	-
Bali	352	483	588	395	570
Nusa Tenggara Barat	734	2 312	2 364	2 471	5 040
Nusa Tenggara Timur	1 495	1 394	1 110	1 065	1 280
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	60	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	160	161	160	160	-
Sulawesi Selatan	1 342	1 355	3 665	2 771	1 990
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Gorontalo	65	-	-	-	70
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	13 639	30 668	28 723	20 106	21 050

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marine and Fisheries in Figures 2015, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.74

Jumlah Keluarga pada Desa Pesisir menurut Provinsi dan Pengguna Listrik, 2014
Number of Families on Coastal Villages by Province and Power Electricity Users, 2014

Provinsi Province	PLN PLN	Non-PLN Non-PLN	Tanpa Listrik Without Electricity	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	193 840	831	7 376	202 047
Sumatera Utara	187 182	7 950	24 184	219 316
Sumatera Barat	138 778	7 811	18 195	164 784
Riau	105 762	36 785	28 747	171 294
Jambi	10 609	5 024	2 365	17 998
Sumatera Selatan	6 544	12 482	5 155	24 181
Bengkulu	62 008	2 202	2 177	66 387
Lampung	119 692	22 598	20 747	163 037
Kepulauan Bangka Belitung	156 521	9 491	3 902	169 914
Kepulauan Riau	334 159	46 138	8 000	388 297
DKI Jakarta	167 155	189	0,00	167 344
Jawa Barat	428 080	2 573	13 489	444 142
Jawa Tengah	514 194	3 027	1 184	518 405
DI Yogyakarta	49 983	42	89	50 114
Jawa Timur	1 009 746	47 662	18 238	1 075 646
Banten	212 458	1 429	3 539	217 426
Bali	364 632	146	1 411	366 189
Nusa Tenggara Barat	314 002	7 520	20 594	342 116
Nusa Tenggara Timur	260 946	31 217	104 570	396 733
Kalimantan Barat	158 519	6 676	7 689	172 884
Kalimantan Tengah	14 549	3 372	3 237	21 158
Kalimantan Selatan	69 930	13 009	3 420	86 359
Kalimantan Timur	219 618	32 901	6 786	259 305
Kalimantan Utara	74 431	6 062	1 574	82 067
Sulawesi Utara	213 786	9 493	9 151	232 430
Sulawesi Tengah	285 452	42 572	48 839	376 863
Sulawesi Selatan	350 901	33 077	16 629	400 607
Sulawesi Tenggara	211 657	28 894	38 021	278 572
Gorontalo	52 851	3 670	9 102	65 623
Sulawesi Barat	92 402	11 175	8 685	112 262
Maluku	254 786	27 028	57 081	338 895
Maluku Utara	143 689	36 653	41 593	221 935
Papua Barat	79 256	21 296	8 441	108 993
Papua	113 788	23 753	16 855	154 396
Indonesia	6 971 906	544 748	561 065	8 077 719

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel 4.75 Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi, Sumber Air Minum, dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak Sebagian Besar Keluarga, 2014
Table 4.75 Number of Coastal Villages by Province, Main Source of Drinking Water, and Type of Cooking Fuel Most of Families, 2014

Provinsi Province	Sumber Air Minum Utama Main Source of Drinking Water			
	Air kemasan <i>Bottled Water</i>	Ledeng dengan meteran (PAM/ PDAM) <i>Piped with Installation/ Piped Into Dwelling (Water Company (PAM)/Regional Water Company (PDAM))</i>	Ledeng Tanpa Meteran <i>Piped without Installation</i>	Sumur Bor/ Pompa <i>Tube Well/ Borehole</i>
		(1)	(2)	(3)
Aceh	220	72	26	33
Sumatera Utara	42	29	8	43
Sumatera Barat	21	14	1	8
Riau	19	1	1	3
Jambi	0	0	0	0
Sumatera Selatan	1	0	0	0
Bengkulu	19	18	2	4
Lampung	23	13	3	5
Kepulauan Bangka Belitung	41	2	2	17
Kepulauan Riau	44	21	11	14
DKI Jakarta	6	8	2	0
Jawa Barat	50	32	8	63
Jawa Tengah	31	70	29	101
DI Yogyakarta	0	3	0	2
Jawa Timur	77	112	11	114
Banten	44	15	8	13
Bali	22	77	0	13
Nusa Tenggara Barat	20	40	19	66
Nusa Tenggara Timur	4	94	27	30
Kalimantan Barat	1	3	2	2
Kalimantan Tengah	2	2	1	7
Kalimantan Selatan	13	11	15	21
Kalimantan Timur	37	39	1	18
Kalimantan Utara	11	10	0	3
Sulawesi Utara	75	83	60	37
Sulawesi Tengah	39	133	79	105
Sulawesi Selatan	80	90	11	121
Sulawesi Tenggara	65	121	31	52
Gorontalo	40	37	4	2
Sulawesi Barat	8	15	1	25
Maluku	6	42	46	25
Maluku Utara	16	83	34	24
Papua Barat	16	11	18	9
Papua	13	29	52	14
Indonesia	1 106	1 330	513	994

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.75*

Provinsi Province	Sumber Air Minum Utama <i>Main Source of Drinking Water</i>				
	Sumur Wells	Mata Air Wellspring	Sungai/ Danau/ Kolam River/ Lake/ Pool	Air Hujan Rain water	Lainnya Others
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	345	25	10	15	2
Sumatera Utara	217	91	8	21	0
Sumatera Barat	49	25	4	4	1
Riau	23	1	0	219	4
Jambi	0	0	0	30	0
Sumatera Selatan	1	0	1	26	0
Bengkulu	137	4	2	0	0
Lampung	153	41	2	1	0
Kepulauan Bangka Belitung	98	4	0	0	2
Kepulauan Riau	158	109	0	3	1
DKI Jakarta	0	0	0	0	0
Jawa Barat	58	9	1	2	4
Jawa Tengah	99	20	0	6	1
DI Yogyakarta	12	3	0	13	0
Jawa Timur	286	77	0	1	0
Banten	43	11	1	0	0
Bali	17	24	3	19	0
Nusa Tenggara Barat	114	36	6	0	0
Nusa Tenggara Timur	346	418	30	60	2
Kalimantan Barat	22	14	2	115	0
Kalimantan Tengah	8	0	7	17	0
Kalimantan Selatan	80	9	12	4	0
Kalimantan Timur	32	11	9	19	9
Kalimantan Utara	4	0	1	26	0
Sulawesi Utara	199	268	13	41	2
Sulawesi Tengah	258	327	55	24	1
Sulawesi Selatan	177	31	1	18	2
Sulawesi Tenggara	273	322	32	47	4
Gorontalo	79	38	3	0	0
Sulawesi Barat	69	22	10	2	0
Maluku	433	320	9	33	0
Maluku Utara	517	192	46	29	0
Papua Barat	178	138	76	96	1
Papua	218	171	30	111	8
Indonesia	4 703	2 761	374	1 002	44

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.75

Provinsi Province	Jenis Bahan Bakar Memasak <i>Type of Cooking Fuel</i>				
	Gas Kota City Gas	LPG LPG/Gas	Minyak Tanah Kerosene	Kayu Bakar Firewood	Lainnya Others
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	0	465	34	249	0
Sumatera Utara	0	131	31	297	0
Sumatera Barat	0	12	56	59	0
Riau	0	184	2	70	15
Jambi	0	22	0	0	8
Sumatera Selatan	0	25	0	4	0
Bengkulu	0	150	1	35	0
Lampung	0	93	0	148	0
Kepulauan Bangka Belitung	0	89	69	8	0
Kepulauan Riau	0	102	223	36	0
DKI Jakarta	0	16	0	0	0
Jawa Barat	2	189	0	36	0
Jawa Tengah	0	325	1	31	0
DI Yogyakarta	0	11	0	22	0
Jawa Timur	0	449	0	229	0
Banten	0	97	0	38	0
Bali	0	134	0	41	0
Nusa Tenggara Barat	0	72	104	125	0
Nusa Tenggara Timur	0		92	919	0
Kalimantan Barat	0	134		26	1
Kalimantan Tengah	0	5	21	18	0
Kalimantan Selatan	0	5	96	64	0
Kalimantan Timur	1	152	8	14	0
Kalimantan Utara	1	22	22	10	0
Sulawesi Utara	0	159	151	465	3
Sulawesi Tengah	0	10	240	717	54
Sulawesi Selatan	0	458	5	68	0
Sulawesi Tenggara	0	107	222	607	11
Gorontalo	0	130	5	68	0
Sulawesi Barat	0	116	0	32	4
Maluku	0	0	139	775	0
Maluku Utara	2	0	136	803	0
Papua Barat	0	0	70	473	0
Papua	0	0	88	558	0
Indonesia	6	3 864	1 816	7 045	96

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik

Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

**Tabel
Table** 4.76 Jumlah Desa Pesisir menurut Provinsi dan Sarana dan Prasarana Transportasi antar Desa,
2014
*Number of Coastal Villages by Province and Transportation Facilities between Village,
2014*

Provinsi Province	Lalu Lintas Dari Dan Ke Desa <i>Traffic Facility From One Village To Another</i>				Keberadaan Angkutan Umum <i>Public Transportation Facilities</i>		
			Darat dan Air <i>Land and Sea</i>	Dengan Trayek Tetap <i>With Permanent</i>	Ada / Yes		Tidak Ada No
	Darat <i>Land</i>	Air <i>Sea</i>			Dengan Trayek Tetap <i>With Permanent</i>	Tanpa Trayek Tetap <i>Without Permanent</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	696	5	47	261	259	228	
Sumatera Utara	333	9	117	129	118	212	
Sumatera Barat	90	6	31	59	43	25	
Riau	154	11	106	81	54	136	
Jambi	10	3	17	14	1	15	
Sumatera Selatan		10	19	12	16	1	
Bengkulu	184		2	107	54	25	
Lampung	207	3	31	93	82	66	
Kepulauan Bangka Belitung	147	3	16	107	22	37	
Kepulauan Riau	134	74	153	167	114	80	
DKI Jakarta	10	4	2	16	0	0	
Jawa Barat	219	0	8	139	50	38	
Jawa Tengah	348	2	7	233	28	96	
DI Yogyakarta	33	0	0	17	6	10	
Jawa Timur	624	1	53	356	186	136	
Banten	131	0	4	95	7	33	
Bali	175	0	0	122	31	22	
Nusa Tenggara Barat	271	2	28	168	99	34	
Nusa Tenggara Timur	902	24	85	570	342	99	
Kalimantan Barat	109	8	44	97	35	29	
Kalimantan Tengah	7	10	27	5	21	18	
Kalimantan Selatan	90	6	69	75	30	60	
Kalimantan Timur	104	10	61	67	37	71	
Kalimantan Utara	37	2	16	18	31	6	
Sulawesi Utara	650	26	102	488	234	56	
Sulawesi Tengah	786	50	185	678	243	100	
Sulawesi Selatan	412	47	72	329	141	61	
Sulawesi Tenggara	695	34	218	508	341	98	
Gorontalo	190	1	12	117	76	10	
Sulawesi Barat	146	3	3	94	43	15	
Maluku	348	139	427	318	366	230	
Maluku Utara	371	152	418	413	368	160	
Papua Barat	198	205	140	198	90	255	
Papua	323	137	186	237	127	282	
Indonesia	9 134	987	2 706	6 388	3 695	2 744	

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

Tabel
Table

4.77

Jumlah Desa Pesisir yang Mempunyai Sarana Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Sarana Komunikasi, 2014

Number of Coastal Villages Having Communication Facilities by Province and Type of Communication Facility, 2014

Provinsi Province	Keluarga yang Berlangganan Telepon Kabel <i>Families who Subscription telephone cables</i>	Telepon Umum yang masih aktif/berfungsi <i>Public telephones are still active/function</i>			Menara Telepon Seluler Base <i>Transceiver Station (BTS)</i>	Wartel/ Wartelpos/ Warparpostel Telecommunication Cafe/Post-telecommunication Cafe/Tourism-post-telecommunication
		Koin <i>Coin</i>	Kartu <i>Card</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	29	3	14	194		1
Sumatera Utara	38	-	6	124		10
Sumatera Barat	57	-	-	78		5
Riau	18	1	-	136		-
Jambi	-	-	1	10		-
Sumatera Selatan	-	-	-	6		-
Bengkulu	34	1	8	52		-
Lampung	29	-	-	81		2
Kepulauan Bangka Belitung	23	-	5	127		5
Kepulauan Riau	65	-	1	193		13
DKI Jakarta	10	4	-	16		2
Jawa Barat	66	2	2	152		11
Jawa Tengah	139	1	-	169		19
DI Yogyakarta	4	-	-	24		1
Jawa Timur	282	7	-	355		23
Banten	39	1	3	111		13
Bali	105	-	-	132		13
Nusa Tenggara Barat	42	-	1	166		3
Nusa Tenggara Timur	67	5	12	214		12
Kalimantan Barat	35	1	2	92		3
Kalimantan Tengah	4	-	2	11		
Kalimantan Selatan	15	-	-	78		2
Kalimantan Timur	50	-	1	98		10
Kalimantan Utara	15	-	-	32		4
Sulawesi Utara	62	1	20	169		7
Sulawesi Tengah	76	-	-	275		5
Sulawesi Selatan	104	2	1	234		16
Sulawesi Tenggara	40	-	2	177		3
Gorontalo	6	-	-	70		1
Sulawesi Barat	18	-	-	73		1
Maluku	57	-	15	202		13
Maluku Utara	42	1	2	163		41
Papua Barat	11	-	1	58		3
Papua	26	2	15	54		9
Indonesia	1 608	32	114	4 126		251

LAMPIRAN

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.77

Provinsi Province	Warung Internet <i>Internet Cafe</i>	Kantor Pos/ Pos Pembantu/ Rumah Pos <i>Post Office/ Post Office Assistant</i>	Pos / Post	
			Pos Keliling <i>Roving Post</i>	Jasa Ekspedisi Swasta <i>Private expedition Service</i>
			(9)	(10)
(1)	(7)	(8)		
Aceh	56	24	38	18
Sumatera Utara	74	23	23	23
Sumatera Barat	62	22	18	13
Riau	32	10	8	9
Jambi	2	-	1	-
Sumatera Selatan	1	-	1	-
Bengkulu	35	12	21	14
Lampung	30	11	26	15
Kepulauan Bangka Belitung	30	10	37	18
Kepulauan Riau	79	47	16	34
DKI Jakarta	11	11	2	10
Jawa Barat	94	16	41	13
Jawa Tengah	122	22	61	28
DI Yogyakarta	10	1	5	1
Jawa Timur	272	70	96	37
Banten	62	11	32	8
Bali	79	27	18	23
Nusa Tenggara Barat	51	22	35	18
Nusa Tenggara Timur	77	27	34	28
Kalimantan Barat	33	14	17	16
Kalimantan Tengah	2	2	2	2
Kalimantan Selatan	18	9	12	6
Kalimantan Timur	58	24	24	26
Kalimantan Utara	20	4	10	11
Sulawesi Utara	63	24	86	15
Sulawesi Tengah	88	32	49	31
Sulawesi Selatan	118	16	41	28
Sulawesi Tenggara	59	23	45	35
Gorontalo	14	2	15	3
Sulawesi Barat	25	8	6	8
Maluku	64	33	18	19
Maluku Utara	53	20	21	15
Papua Barat	16	9	9	18
Papua	27	21	34	14
Indonesia	1 837	607	902	557

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.77

Provinsi Province	Program/Siaran televisi dapat diterima Television broadcast/program can be received			
	TVRI TVRI	TVRI daerah TVRI Region	TVRI swasta TVRI Private	TV Luar Negeri TVRI Foreign
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	744	638	742	718
Sumatera Utara	455	442	452	428
Sumatera Barat	126	84	125	118
Riau	267	152	264	234
Jambi	30	24	30	28
Sumatera Selatan	28	27	29	18
Bengkulu	186	129	183	182
Lampung	241	219	241	241
Kepulauan Bangka Belitung	166	137	166	165
Kepulauan Riau	358	317	357	354
DKI Jakarta	16	13	16	12
Jawa Barat	225	206	226	185
Jawa Tengah	357	345	357	325
DI Yogyakarta	32	33	33	26
Jawa Timur	677	648	677	599
Banten	135	126	132	109
Bali	170	167	170	163
Nusa Tenggara Barat	298	186	297	281
Nusa Tenggara Timur	979	628	976	958
Kalimantan Barat	158	153	159	145
Kalimantan Tengah	44	39	44	40
Kalimantan Selatan	165	155	165	162
Kalimantan Timur	172	133	172	166
Kalimantan Utara	51	50	52	55
Sulawesi Utara	768	361	763	701
Sulawesi Tengah	1 009	531	998	956
Sulawesi Selatan	510	303	517	450
Sulawesi Tenggara	917	394	935	899
Gorontalo	203	91	201	183
Sulawesi Barat	151	45	150	146
Maluku	836	487	867	753
Maluku Utara	924	106	894	845
Papua Barat	482	462	489	416
Papua	617	614	618	599
Indonesia	12 497	8 445	12 497	11 660

Sumber / Source : Diolah dari Hasil PODES 2014, Badan Pusat Statistik
Based on 2014 Village Potential Statistics of Indonesia, BPS- Statistics Indonesia

LAMPIRAN

**Tabel
Table** 4.78 Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan (Ib), dan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTN) Menurut Provinsi, 2014
Price Received by Fish Farmers Indices (It), Price Paid by Fish Farmers Indices (Ib), and Farmers' Terms of Trade of Fishery Sub Sector (NTN) by Province, 2014
(2012=100)

Provinsi Province	Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan <i>Prices Received by Fish Farmers Indices</i>		
	It	Penangkapan <i>Capture</i>	Budidaya <i>Aquaculture</i>
		(3)	(4)
(1)	(2)		
Aceh	110,25	111,25	109,26
Sumatera Utara	109,52	112,63	106,39
Sumatera Barat	114,07	113,03	114,32
Riau	117,48	118,90	115,34
Jambi	113,88	116,07	111,56
Sumatera Selatan	112,14	108,57	115,67
Bengkulu	113,32	111,52	113,99
Lampung	111,85	116,66	110,22
Kepulauan Bangka Belitung	114,64	115,85	106,61
Kepulauan Riau	116,59	115,54	121,33
DKI Jakarta	111,19	118,66	103,67
Jawa Barat	113,06	118,35	112,63
Jawa Tengah	112,83	119,70	111,30
DI Yogyakarta	113,91	119,43	113,61
Jawa Timur	122,18	120,90	123,02
Banten	115,48	125,64	107,57
Bali	118,58	129,61	104,51
Nusa Tenggara Barat	105,81	111,39	102,49
Nusa Tenggara Timur	112,13	114,75	112,77
Kalimantan Barat	110,98	113,82	106,75
Kalimantan Tengah	116,53	121,04	107,93
Kalimantan Selatan	120,66	122,34	116,18
Kalimantan Timur	114,25	123,39	103,98
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	118,32	122,58	110,63
Sulawesi Tengah	112,31	112,94	110,63
Sulawesi Selatan	118,03	117,87	118,14
Sulawesi Tenggara	119,23	120,58	115,99
Gorontalo	113,65	117,46	102,73
Sulawesi Barat	106,96	106,35	108,01
Maluku	120,43	119,41	125,50
Maluku Utara	109,87	108,85	120,55
Papua Barat	116,02	117,47	104,83
Papua	109,95	112,23	103,61
Indonesia	114,63	116,90	112,98

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.78

Provinsi Province	Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan <i>Prices Paid by Fish Farmers Indices</i>			
	lb	Indeks Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Index</i>	Indeks Biaya Produksi & Penambahan Barang <i>Cost of Production & Capital Formation Index</i>	NTN
		(1)	(11)	(12)
Aceh	109,53	111,14	106,50	100,66
Sumatera Utara	112,02	113,54	110,34	97,77
Sumatera Barat	109,15	113,83	102,56	104,50
Riau	111,76	112,33	110,55	105,12
Jambi	112,44	113,96	109,71	101,28
Sumatera Selatan	110,71	112,34	107,64	101,29
Bengkulu	111,23	114,11	104,29	101,87
Lampung	109,93	112,14	106,91	101,75
Kepulauan Bangka Belitung	112,26	112,12	112,42	102,12
Kepulauan Riau	108,39	109,40	106,84	107,57
DKI Jakarta	110,68	112,24	108,42	100,47
Jawa Barat	111,94	114,69	106,16	101,00
Jawa Tengah	111,74	114,61	107,92	100,98
DI Yogyakarta	109,97	114,79	104,36	103,59
Jawa Timur	114,82	117,51	110,56	106,41
Banten	110,83	112,12	108,80	104,20
Bali	112,54	115,51	107,18	106,18
Nusa Tenggara Barat	109,28	111,62	106,43	98,70
Nusa Tenggara Timur	111,11	111,56	110,16	102,77
Kalimantan Barat	112,13	113,90	109,83	98,98
Kalimantan Tengah	111,99	114,70	107,91	104,06
Kalimantan Selatan	110,79	113,69	105,62	108,90
Kalimantan Timur	112,62	114,22	109,68	101,45
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	112,09	114,68	106,46	105,56
Sulawesi Tengah	110,95	113,83	106,17	101,23
Sulawesi Selatan	110,89	113,31	106,79	106,43
Sulawesi Tenggara	112,61	113,63	110,33	105,89
Gorontalo	113,53	116,55	107,70	100,11
Sulawesi Barat	110,33	111,31	108,25	96,95
Maluku	112,73	114,09	110,26	106,83
Maluku Utara	109,53	111,18	106,88	100,30
Papua Barat	112,16	114,91	106,91	103,44
Papua	109,51	111,80	104,98	100,40
Indonesia	111,59	113,95	107,65	102,72

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Diolah dari hasil Survei Harga Perdesaan, Badan Pusat Statistik

Based on Rural Price Survey, BPS - Statistics Indonesia

LAMPIRAN

Tabel
Table

4.79

Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan (Ib), dan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTN) Menurut Provinsi, 2015
Price Received by Fish Farmers Indices (It), Price Paid by Fish Farmers Indices (Ib), and Farmers' Terms of Trade of Fishery Sub Sector (NTN) by Province, 2015
(2012=100)

Provinsi Province	Indeks Harga yang Diterima Petani Ikan <i>Prices Received by Fish Farmers Indices</i>		
	It	Penangkapan <i>Capture</i>	Budidaya <i>Aquaculture</i>
		(3)	(4)
(1)	(2)		
Aceh	113,86	118,19	109,61
Sumatera Utara	115,05	119,91	110,16
Sumatera Barat	122,18	119,85	122,74
Riau	125,87	129,64	120,18
Jambi	119,23	125,02	113,07
Sumatera Selatan	116,08	114,31	117,83
Bengkulu	116,62	118,75	115,82
Lampung	116,36	126,10	113,05
Kepulauan Bangka Belitung	120,79	122,37	110,29
Kepulauan Riau	124,83	124,65	125,65
DKI Jakarta	116,71	125,95	107,39
Jawa Barat	117,77	130,77	116,71
Jawa Tengah	120,16	128,90	118,21
DI Yogyakarta	121,02	127,28	120,67
Jawa Timur	130,47	131,77	129,63
Banten	123,20	136,98	112,47
Bali	124,49	136,29	107,00
Nusa Tenggara Barat	117,07	125,74	103,83
Nusa Tenggara Timur	122,89	125,01	117,58
Kalimantan Barat	119,75	122,52	115,62
Kalimantan Tengah	125,56	131,05	115,10
Kalimantan Selatan	129,67	133,48	119,59
Kalimantan Timur	118,81	130,49	105,67
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	127,41	134,86	113,95
Sulawesi Tengah	123,58	128,81	109,58
Sulawesi Selatan	124,71	128,33	122,01
Sulawesi Tenggara	126,46	130,30	117,20
Gorontalo	120,40	124,58	108,43
Sulawesi Barat	117,30	119,56	113,36
Maluku	126,93	127,11	126,04
Maluku Utara	118,42	117,64	126,61
Papua Barat	125,30	127,36	109,47
Papua	122,43	128,66	105,14
Indonesia	121,69	127,17	117,75

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.79

Provinsi Province	Indeks Harga yang Dibayar Petani Ikan <i>Prices Paid by Fish Farmers Indices</i>			NTN
	lb	Indeks Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Index</i>	Indeks Biaya Produksi & Penambahan Barang <i>Modal Cost of Production & Capital Formation Index</i>	
		(1)	(11)	(12)
Aceh	116,59	118,11	113,59	97,66
Sumatera Utara	118,23	120,81	115,43	97,31
Sumatera Barat	114,34	119,87	106,51	106,85
Riau	118,71	118,33	119,44	106,03
Jambi	118,76	120,13	116,16	100,39
Sumatera Selatan	117,75	120,30	113,00	98,58
Bengkulu	117,64	120,76	109,87	99,14
Lampung	117,31	121,16	112,05	99,19
Kepulauan Bangka Belitung	120,18	119,40	121,34	100,51
Kepulauan Riau	116,25	118,43	112,94	107,38
DKI Jakarta	118,88	120,77	116,18	98,17
Jawa Barat	119,15	123,59	109,79	98,84
Jawa Tengah	118,61	123,11	112,61	101,30
DI Yogyakarta	114,82	121,95	106,53	105,40
Jawa Timur	123,52	126,82	117,60	105,63
Banten	116,94	119,05	113,61	105,36
Bali	119,02	123,47	110,88	104,60
Nusa Tenggara Barat	115,52	118,60	111,86	101,34
Nusa Tenggara Timur	118,16	117,56	119,44	104,00
Kalimantan Barat	119,72	121,64	117,29	100,02
Kalimantan Tengah	120,91	122,53	118,43	103,85
Kalimantan Selatan	117,56	121,09	111,27	110,30
Kalimantan Timur	120,77	122,14	118,48	98,38
Kalimantan Utara ¹
Sulawesi Utara	120,57	124,10	112,94	105,67
Sulawesi Tengah	117,83	121,37	111,89	104,88
Sulawesi Selatan	119,64	124,05	112,14	104,24
Sulawesi Tenggara	121,61	122,44	119,50	103,99
Gorontalo	120,84	124,58	113,61	99,64
Sulawesi Barat	116,74	117,92	114,16	100,47
Maluku	119,53	122,23	114,65	106,19
Maluku Utara	115,80	117,92	112,35	102,26
Papua Barat	118,86	122,92	111,09	105,42
Papua	116,36	120,37	108,48	105,21
Indonesia	118,86	122,20	113,21	102,38

Catatan / Note : ¹ Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Data were included in Kalimantan Timur Province

Sumber / Source : Diolah dari hasil Survei Harga Perdesaan, Badan Pusat Statistik

Based on Rural Price Survey, BPS - Statistics Indonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

ISSN 2086-2806



BADAN PUSAT STATISTIK

BPS-Statistics Indonesia

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

